TEORI
KEBIJAKAN
EKONOMI
Sajian
Dr Jan Hoesada, KSAP
www.naturexposed.com

DAFTAR ISI & DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI & DAFTAR LAMPIRAN ii

BAB 1 KEBIJAKAN NEGARA 1

1.1 Membangun Daya-Saing Bangsa 2
1.2 Kebijakan Pemerintah 4
1.3 Strategi Peningkatan Efisiensi Negara 12
1.4 Strategi Pindah Kelas 13
1.5 Merumuskan Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi 15
1.6 Pemerintah Menetapkan Kebijakan Industrialisasi atau Mikroekonomi 16
1.7 Optimalisasi Kualitas Koordinasi 16
1.8. Penerapan Managerial Economics 17

BAB 2 KEBIJAKAN EKONOMI 18

2.1.Kebijakan Ekonomi Pembangunan 19
2.2.Kebijakan Ekonomi Politik 22
2.3.Kebijakan Ekonomi Kewirausahaan 25
2.4. Hampiran Reformasi (*Reformation Approach*) 31
2.5.Teori Bantuan Antar Negara 32
2.6.Strategi Reformasi Nirgagal 33
2.7.Sejarah Reformasi Ekonomi Kewirausahaan Eropa 33
2.8. Kebijakan Ekonomi Kewirausahaan NKRI 34
2.9. Kebijakan Ekonomi-Lingkungan 36
2.10.Kebijakan Ekonomi SDM 41
2.11..Kebijakan Ekonomi Kelautan 43
2.12. Kebijakan Ekonomi Kehutanan 54
2.13.Kebijakan Ekonomi Agraria 60
2.14. Kebijakan Ekonomi Pertanian 62
2.15. Kebijakan Ekonomi Luar Biasa 65

BAB 3. KEBIJAKAN FISKAL 77-78

3.1. Pendahuluan 78
3.2. Ragam Kebijakan Fiskal 78
3.3. Kebijakan Fiskal dalam APBN 78
3.4.Kebijakan Makro Fiskal 79
3.5. Kebijakan Fiskal Peduli Moneter 80
3.6. Teori APBN Perubahan 80
3.7. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam APBN 81

3.8.Contoh Penerapan Kebijakan Fiskal 81
3.9 Kebijakan FiskaL Diluar APBN/D 83
3.10. Sejarah APBN NKRI 84
3.11.Teori Kebijakan Fiskal 93

BAB 4 KEBIJAKAN MONETER 123

4.1.Sistem Keuangan Negara 124
4.2. Hubungan Sistem Keuangan dan Sistem Moneter 133
4.3. Hubungan Kebiijakan Keuangan dan Kebijakan Moneter 133
4.4..Sistem Moneter 133
4.5. Kebijakan Moneter 135
4.6. Hulu Kebijakan Moneter Sebuah Negara 138
4.7. Hubungan Otoritas Fiskal dan Otoritas Moneter 139
4.8 . Teori Kebijakan Moneter 140
4.9.Teori Transmisi / Operasionalisasi Kebijakan Moneter 145
4.10.Teori Instrumen Kebijakan Moneter 146
4.11. Teori Kebijakan Moneter Tak-Lazim / Inkonvensional 150
4.12.Teori Penargetan 152
4.13.Teori Kebijakan Pemoneteran *(monetization*) 153
4.14.Teori Bantalan Likuiditas (*liquidity buffer*) 153
4.15. Kumpulan Kebijakan Moneter Inkonvensional Bank Sentral 154
4.16.Peranan Bank Sentral 156
4.17.Kebijakan Luar biasa BI 158
4.18. Teori Bauran Kebijakan Fiskal & Moneter 159
4.19. Teori Hubungan Antar Kebijakan 164
4.2.Teori Inflasi 167

BAB 5 KEBIJAKAN MAKRO PRUDENSIAL 174

5.1. Teori Ekonomi sebagai Hulu Teori Makro-Prudensial 175
5.2. Model Makro Ekonomi 175
5.3. Makna Kebijakan Makroprudensial 176
5.4. Kebijakan Trilema 177
5.5. Kerangka Kebijakan Makro Prudensial 177
5.6.Tujuan Kebijakan Makro-Prudensial 178
5.7.Instrumen Makro-Prudensial 178
5.8. Perkembangan Kebijakan Makro Prudensial Dunia 179
5.9.Kebijakan Makro-Prudensial Indonesia 182
5.10.Aturan Emas Kebijakan Makro-Prudensial 182
5.11.Teori Perbedaan 183

5.12.Teori Hubungan Antar Kebijakan 184

BAB 6 KEBIJAKAN EKONOMI MIKRO DAN MESO, SERTA KEBIJAKAN MIKRO PRUDENSIAL 188

6.1.Ekonomi Mikro 189
6.2.Teori Kebijakan Ekonomi-Mikro 193
6.3.Teori Kebijakan Ekonomi-Mikro Kala Krisis 195
6.4 Ekonomi Meso 196
6.5.Kebijakan Mikroprudensial 203

LAMPIRAN 210

LAMPIRAN 1 211
LAMPIRAN 2 221
LAMPIRAN 3 225
LAMPIRAN 4 228
LAMPIRAN 5 231

BAB 1
KEBIJAKAN
NEGARA

BAB 1 KEBIJAKAN NEGARA

1.1. Membangun Daya-Saing Bangsa.

Kebijakan adalah sebuah sistem pemandu para pengambil keputusan pada sebuah entitas keluarga, entitas dan/atau negara untuk mencapai hasil optimal , seringkali berbentuk hukum positif/peraturan , larangan/kewajiban/pilihan/anjuran, prosedur/tatacara/protokol wajib, pemberitahuan imbalan/sanksi.

Sarana kebijakan pemerintah adalah pajak, belanja pemerintah , regulasi dan pengendalian (*control*). Kebijakan pajak bertujuan untuk pendapatan APBN, belanja APBN, resdistribusi pendapatan masyarakat, pembentukan/pengendalian sektor privat dan publik antara lain untuk mendorong/menghalangi konsumsi/produksi tertentu. Belanja APBN kepada sektor privat untuk mendorong kegiatan ekonomi, belanja kesejahteraan masyarakat antara lain belanja pembangunan prasarana, belanja pajak, subsidi, tunjangan pengangguran, BPJS dan lain-lain bertujuan peningkatan kesejahteraan umum , menyebabkan negara disebut sebagai negara-kesejahteraan (*welfare state*). Sebagai regulator, pemerintah membentuk pertumbuhan/pemerataan kegiatan perekonomian, kehidupan sosial dan lingkungan hidup bertujuan optimalisasi kehidupan bangsa.

Bentuk kebijakan misalnya adalah berbagai rumpun kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan lingkungan hidup cq iklim dan kebijakan sosial , kebijakan internasional, nasional dan regional.

Terdapat berbagai bentuk sistem pemerintahan , antara lain sistem demokrasi (berdasar suara rakyat langsung atau melalui perwakilan) yang di anut negara berbentuk republik dan sistem otokrasi yang dianut negara berbentuk kerajaan/monarki (misalnya kesultanan, kekaisaran, kerajaan, sebagian besar telah menjadi *monarki konstitusional* berbasis pemilu untuk memilih kepala negara /PM, dimana raja sekadar sebagai simbol), kekuasaan partai/militer atau seorang diktator.

Kebijakan distributif adalah pengumpulan dana dari sebagian besar masyarakat untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat, kebijakan peregulasian terfokus biaya/beban/kerugian sebuah kelompok masyarakat demi kemaslahatan/kebaikan sebagian besar masyarakat, sedang kebijakan redistributif adalah kebijakan berbagi penghasilan & kekayaan sekelompok tertentu kepada sekelompok yang lain.

Setiap calon PM atau presiden negara bersistem demokrasi harus tahu mengapa suatu bangsa tertentu sampai hari ini tak dapat keluar dari lumpur kemiskinan. Globalisasi menimbulkan persaingan antar negara di bidang pasar-ekspor, menarik modal asing masuk, pendidikan, produktivitas dan pertahanan. Pasar makin terintegrasi, persaingan global menyebabkan pemerintah nan-baik (bersih korupsi dan profesional) berbasis

manajemen-risiko makin dibutuhkan bangsa untuk mencipta lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan kemakmuran , melalui plihan strategi nasional paling-tepat, pilihan struktur ekonomi idaman, pilihan pengembangan sumber-daya bangsa, kebijakan alokasi sumber-daya bangsa nan efisien umumnya, khususnya dalam merumuskan/melaksanakan kebijakan fiskal & moneter , kebijakan ekonomi-mikro dan kelembagaan , perlindungan keamanan, hak-milik dan kesempatan bekerja. Penjagaan aspek ekonomi tertentu.

Tugas pemerintah menjaga agar tak terjadi (1) defisit fiskal (apalagi berkesinambungan dan/atau besar) adalah segalanya, (2) stagnasi pertumbuhan ekonomi, (3) stagnasi pertumbuhan tabungan dan pertumbuhan investasi dalam peribahasa"konsumsi untuk kebutuhan sekarang, tabungan untuk kebutuhan masadepan", (4) bank sentral kehilangan indipendensi dan kemampuan-profesional mencipta pertumbuhan noniflasioner. Secara empiris kebijakan ekonomi-mikro berhampiran liberalisasi nan-berhati-hati dan rasional (antara lain dengan menghapus hambatan perdagangan LN dan investasi asing, nilai tukar tersesuai kondisi pasar, privatisasi nan-tepat) berdampak baik, digambarkan oleh Richard H.K.Vietor dalam buku berjudul *How Country Compete: Strategy, Strutcure, and Government in the Global Economy.*

Menjaga demokrasi dalam keaneka-ragaman budaya dan memilih pemimpin bangsa nan-jujur & kompeten melalui sistem demokrasi adalah dua syarat utama untuk sukses berbangsa-bernegara. Buku Acemoglu dan Robinson yang berjudul *"Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty."*, berargumen antara lain bahwa iklim tropis nan panas menyebabkan orang malas bekerja dan kurang rasa ingin tahu (Montesque), penyakit tropis menurunkan produkvitas (Jared Diamond) , atribut budaya menurunkan produktivitas (Max Weber) , bangsa tersebut menjadi berciri institusi politik (pemimpin non-demokratis) dan ekonomi yang ekstraktif (perekonomian untuk kepentingan pribadi pemimpin) , berlatar belakang moral masyarakat dan dayapikir masyarakat nan-sederhana menyebabkan ketidak mampuan masyarakat memilih pemimpin berkualitas yang mampu mengeluarkan bangsa dari lumpur kemiskinan. Buku tersebut memuat bantahan terhadap teori di atas, antara lain mengapa Singapura pada iklim tropis lebih makmur dari berbagai negara sub-tropis , mengapa sistem monarki Malaysia lebih memakmurkan rakyat dibanding sistem demokrasi NKRI.

Masalah kabinet amat beragam, jumlah kementerian maksimum sebanyak 34 departemen. Terdapat berbagai jenis masalah nasional saling berkaitan. Presiden dapat menggabungkan beberapa kementerian menjadi sebuah kementerian baru atau sebaliknya mengembangkan sebuah kementerian menjadi beberapa kementerian, melengkapi kementerian dengan mengisi jabatan wakil-menteri dan membentuk berbagai badan hukum,komite dan komisi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian kelompok I adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,Kementerian Pertahanan .

Kementerian kelompok II adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, yaitu Kementerian Agama ,Kementerian Agraria & Tata Ruang,Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,Kementerian Energi & SD Mineral,Kementerian Hukum dan HAM,Kementerian Kelautan & Perikanan,Kementerian Kesehatan,Kementerian Ketenagakerjaan,Kementerian Keuangan,Kementerian Komunikasi & Informatika, KLH & Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat,Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi,Kementerian Perdagangan,Kementerian Perhubungan,Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian,Kementerian Sosial. Sebagian besar kementerian tersebut dapat diubah oleh Kabinet, khusus kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan apabila diubah dan/atau dibubarkan harus mendapat persetujuan DPR.

Kementerian kelompok III adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah terdiri atas Kementerian Sekretariat Negara, ,Kementerian Koperasi & UKM,Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi ,Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,Kementerian BUMN,Kementerian Pemuda dan Olah Raga,Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,Kementerian Investasi.

Untuk memenuhi syarat jumlah maksimum 34 kementerian, maka terjadi penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kementerian koordinator adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya, mencakupi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamananan,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ,Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan,Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi.

1.2. Kebijakan Pemerintah.

1.2.1.Kinerja Tahun 2021.

NKRI pada akhir tahun 2021 mencatat berbagai kinerja pemerintahan berupa 208 juta jiwa tervaksinasi , indeks keyakinan konsumen mencapai 118,5 atau diatas 100, ekspor kuartal III 2021 naik hampir 30 %, cadangan devisa USD 140 M , akumulasi surplus neraca perdagangan USD 34,32 M, pemulihan berangsur sepanjang satu tahun terakhir menunjukkan kesehatan ekonomi-fundamental, kembalinya indeks harga saham menjadi adalah gejala amat positif, apalagi karena sebagian besar nasabah adalah sektor retail atau individual. Pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional telah mendorong masuknya investasi lebih dari 5.000 triliun rupiah. Kawasan Ekonomi Khusus terutama di sektor

yang pertumbuhannya tinggi selama pandemi, seperti *Nongsa Digital Park*, termasuk juga di sektor *renewable energy*, seperti *solar farm*, juga banyak diminati oleh investor. Forum G20 diharapkan akan efektif memacu tenaga kerja hingga konsumsi, Kepresiden NKRI pada G20 tahun 2021/2022 diharapkan memberi dampak domestik nan-positif.World Bank menilai bahwa Indonesia memiliki Kebijakan Fiskal yang prudent & Kebijakan Moneter yang tepat, termasuk reformasi struktural yang dilakukan secara masif sehingga mampu menarik investor.

1.2.2. RPJM dan Renstra.

Artikel DJKN,2020, berjudul Korelasi RPJMN Dengan Renstra menjelaskan antara lain sebagai berikut. Tahun 2020 merupakan awal perencanaan jangka menengah 2020-2024 yang mencakupi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) , Rencana Strategis (Renstra) pada Kementerian/ Lembaga (K/L) atau unit dibawahnya, sesuai Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 terfokus pada 5 aspek, yaitu Pembangunan SDM, infrastruktur,penyederhanaan regulasi, penyederhaan birokrasi dan transformasi ekonomi dengan implemmentasi pada 7 agenda pembangunan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing , revolusi mental dan pembangunan kebudayaan , pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar , pelestarian lingkungan hidup, pembangunan ketahanan terhadap bencana, dan pembangunan adaptif terhadap perubahan iklim , pembangunan/pemeliharaan stabilitas polhukhankam dan transformasi layanan publik . Pada RPJMN periode 2015-2019 pembangunan difokuskan pada 3 hal yaitu insfrastruktur, SDM, dan deregulasi ekonomi, kemudian pada RPJMN periode 2020-2024 disempurnakan dengan menambahkan dua lagi fokus pembangunan yaitu penyederhanaan regulasi dan penyederhaan birokrasi.

Strategi Penyederhanaan regulasi dilakukan melalui omnibus *law*, yaitu penggabungan beberapa peraturan yang terkait dalam satu peraturan dengan tujuan untuk mengurangi tumpang tindih dan menghasilkan regulasi yang berorentasi tujuan dengan mengutamakan kualitas. Penyederhaan birokrasi dilakukan melalui penyederhaan prosedur, penyelenggaraan *e-government*, serta reformasi birokrasi pelayanan publik untuk mendukung iklim investasi, dengan memangkas prosedur birokrasi nan panjang, serta penyederhanakan eselonisasi.

1.2.3. Sejarah Kebijakan Pemerintah.

Nunuk Nurlita, dalam artikel berjudul Kebijakan-Kebijakan Pemerintah mengungkapkan antara lain upaya awal Orde Baru adalah penghapusan berbagai hukum positif terkait unsur komunisme dan kebijakan menekan inflasi warisan Orde Lama.
Kebijakan periode Pelita I antara lain tentang tataniaga ekspor-impor, devaluasi mata uang rupiah, kebijakan sektor pertanian, kebijakan industri mendukung sektor pertanian.

Kebijakan Pelita II(1 April 1974 – 31 Maret 1979) melanjutkan fokus pada sektor pertanian, industrialisasi bahan-mentah seperti karet, kayu , timah menjadi bahan-baku, kebijakan pembangunan sarana & prasarana terutama jalan/jembatan, mendorong konsumsi produk lokal, memperluas lapangan kerja, kebijakan fiskal menghapus pajak ekspor, mendorong PMA/PMDN, meningkatkan PDB melalui peningkatan daya saing produk bertujuan ekspor,
Kebijakan pelita III(1 April 1979 – 31 Maret 1984) berbasis trilogi-pembangunan (pertumbuhan PDB, 8 jalur pemerataan pembangunan, stabilitas nasional) , mendorong semua bidang perekonomian, perdagangan, perindustrian terfokus pertanian cq swasembada.
Kebijakan pelita IV masih terfokus pada sektor pertanian, industri pengolahan hasil-pertanian dan industri sarana-pertanian, Indonesia mendapat penghargaan pada tahun 1985 dari organisasi FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia). sector swasta disorong untuk berperan dalam bidang ekspor dan penanaman modal. Terdapat Paket Devaluasi 1986, terdapat kebijakan bagaimana cara melakukan pinjaman ke LN yang berlatar-belakang jatuhnya harga minyak dunia, terdapat kebijakanderegulasi bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dengan cara penurunan bea masuk impor bahan baku industri, berbagai kebijakan proteksi produksi agar lebih efisien, kebijakan untuk mendorong penanaman modal, meningkatkan efisiensi,inovasi dan produktivitas sektor riil menengah ke atasm untuk meningkatkan ekspor non migas , ditambah penyempurnaan/penyederhanaan ketentuan ekspor, penyempurnaan klasifikasi barang, pembebasan dan keringanan bea masuk, restrukturisasi bidang ekonomi untuk memperlancar perizinan bersifat deregulasi, ditambah deregulasi/mendebirokratisasi bidang perdagangan & hubungan laut, kebijakan pengembang pasar modal dan asuransi.

1.2.4.Prolegnas.

Pembangunan hukum positif NKRI dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang , sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Prolegnas wajib disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas era Soekarno berciri penghapusan berbagai UU warisan penjajah , pada era Orde Baru berciri pembaharuan UU versi Orde Lama , pada Era Reformasi mulai berciri khas NKRI cq kebutuhan bangsa. Daftar Rencana Pembuatan UU versi Prolegnas adalah muara Dasar Negara, Falsafah Negara, berbagai panduan PBB tentang HAM , transparansi , pertanggungjawaban dan lain-lain, sistem perekonomian terpilih NKRI dan sistem APBN, kemauan politis tingkat campurtangan pemerintah kedalam hukum pasar bebas agar berfungsi optimal , sebagian besar mengatur perilaku pemerintahan, masyarakat dan kekuatan-asing. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada periode 2004 sampai sekarang, yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004). Keberadaan Prolegnas dilanjutkan, bahkan diperkuat dalam pengaturan UU 12/2011 sebagai pengganti dari UU 10/2004. Sejarah mencatat bahwa target raihan pembentukan UU baru atau amandemen UU hampir selalu tak dapat dicapai DPR sebagai mesin pembuat UU , karena (1) kewajiban pembentukan dasar-pengetahuan fraksi/komisi pembahas melalui persyaratan-akademis (misalnya sarjana ilmu ekonomi) , kewajiban

riset-empiris terhadap berbagai-negara-rujukan, tingkat kesulitan nan-besar untuk membuat naskah akademis-memadai sebagai pembentukan RUU , (2) tak ada kriteria kualitas dan ciri/karakteristik kualitas minimum sebuah RUU, (3) jadwal selesai boleh dilanggar , (4) benturan kepentingan para pemangku-kepentingan berpuncak pada sidang-sidang DPR, (5) berbagai agenda tersembunyi berbagai kekuatan poltik , (6) proses sinkronisasi/harmonisasi RUU dengan UU yang sedang berlaku efektif , agar tidak tumpang tindih/bertentangan/ saling-melemahkan bahkan batal demi hukum .

Prolegnas ideal mencakupi pula program pengguguran berbagai UU , PP dan Kepmen yang tak lagi relevan-zaman , sesuai kaidah"Mengatur semua, semua jadi tidak beres". Anggi Tondi Martaon ,2021, dalam artikel berjudul *DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022* menjelaskan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 berjumlah 40 rancangan undang-undang (RUU) , antara lain adalah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Energi Baru dan Terbarukan, Bahan Kimia, Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pelindungan Data Pribadi, Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Wabah Penyakit Menular, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Desain Industri , Daerah Kepulauan.

1.2.5.Kebijakan Optimalisasi Teknologi.

Enam kebijakan optimalisasi teknologi untuk pembangunan NKRI mencakupi memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan. Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lain, mendorong pengembangan fintech untuk mendukung pertumbuhan ekonomi , mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau startup, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup.

1.2.6.Kebijakan Perubahan Iklim.

Melalui situs Merdeka, kolom Ekonomi, Anisyah Al Faqir, 2021, menyajikan artikel berjudul Empat Kebijakan Pemerintah untuk Perubahan Iklim, menyitir pernyataan Menteri Keuangan via ©Humas Kemenkeu tentang *Climate Change Fiscal Framework* (CCFF), *carbon pricing*, *Energy Transition Mechanism* (ETM), dan *pooling fund* bencana sebagai berikut.

- CCFF merupakan kerangka untuk memformulasikan kebijakan fiskal dan strategi memobilisasi dana di luar APBN melalui kegiatan identifikasi dan analisis *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia untuk mengurangi CO2 berdasar sumbernya yang bermuara pada pembiayaan via APBN dan swasta berbasis *climate fiscal strategy*. Pemerintah memperkenalkan kebijakan *carbon pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berbasis akuntabilitas-pelaku cq *polluters-pay-principle.*

- Carbon pricing terdiri atas instrumen perdagangan dan non perdagangan. Instrumen perdagangan meliputi Perdagangan Izin Emisi (Emission Trading System atau ETS) dan Offset Emisi (Crediting Mechanism), instrumen non-perdagangan meliputi pajak atau pungutan atas karbon (carbon tax) dan Result Based Payment (RBP).Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, muncul pajak karbon, sebagai pelengkap carbon price , sarana carbon trading dan mekanisme offsetting.
- Terkait Energy Transition Mechanism (ETM), ETM akan mengubah penggunaan batu bara menuju energi baru dan terbarukan (EBT), menghadapi kenaikan konsumsi energi-listrik bagi mobil listrik dan bahan-bakar-memasak.berbeasis listrik , APBN belanja modal bertugas mengubah SDA seperti angin, sinar matahari dan aliran-air menjadi listrik.
- Kebijakan *pooling fund* bencana untuk menghadapi tingginya risiko bencana di Indonesia, termasuk perubahan iklim, sebagai sebuah sistem/ mekanisme pengumpulan dana dengan menghitung risiko bencana pada suatu daerah.

1.2.7.Kebijakan Perdagangan Bebas.

Eri Sutrisno ,2021, pada portal Informasi Indonesia , mengunggah artikel berjudul Lagi, Pemerintah Terbitkan Lima Kebijakan Perdagangan Bebas, dalam upaya peningkatan kinerja ekspor Indonesia berskema FTA. Pemerintah Indonesia kembali mengesahkan lima kebijakan terkait kegiatan importasi *free trade area* (FTA) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) FTA, menyusul pemecahan pertama dari PMK 229/PMK.04/2017, yaitu ASEAN-Australia-New Zealand FTA yang ditetapkan dalam PMK 168/PMK.04/2020, ASEAN-Korea FTA yang ditetapkan dalam PMK 169/PMK.04/2020, ASEAN- India-FTA yang ditetapkan dalam PMK 170/PMK.04/2020, dan ASEAN-China FTA yang ditetapkan dalam PMK 171/PMK.04/2020. Lima PMK FTA tersebut, yaitu Indonesia-Pakistan PTA yang ditetapkan dalam PMK 70/PMK.04/2021, ASEAN-Jepang CEP yang ditetapkan dalam PMK 71/PMK.04/2021, MoU Indonesia-Palestine tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina yang ditetapkan dalam PMK 72/PMK.04/2021, Indonesia-Jepang EPA yang ditetapkan dalam PMK 73/PMK.04/2021, dan Indonesia-Chile CEPA yang ditetapkan dalam PMK 80/PMK.04/2021. Lima PMK tersebut diterbitkan sebagai landasan hukum dan pedoman terkait tata laksana pemberian tarif preferensi atas lima skema FTA, yang sebelumnya diatur dalam satu PMK, yaitu PMK 229/PMK.04/2017. Kelima PMK itu merupakan pemecahan kedua dari PMK 229/PMK.04/2017 dengan memberikan pengaturan tambahan, antara lain, terkait pemberlakuan FTA di kawasan ekonomi khusus (KEK). Dengan ditetapkannya lima PMK tersebut, PMK 229/PMK.04/2017 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1.2.8.Kebijakan Sumber Daya Negara

Kebijakan penciptaan, pengembangan dan penggunaan sumberdaya meliputi :

a.Kebijakan SDA
b.Kebijakan SDM
c.Kebijakan teknologi.

d.Kebijakan sumber permodalan.
e.Kebijakan efisiensi SDA,SDM,teknologi, modal.

Penjelasan sbb :

1.2.8.1. Kebijakan SDA.

Berbagai negara membuat kebijakan SDA lestari , anti deforestrasi, anti erosi, kebijakan mencegah penggunaan pupuk atau antihama berlebihan , kebijakan pemulihan pertambangan , pantai dan terumbu karang, kebijakan anti/pengendalian polusi. Sebagai contoh, sejarah sempat mencatat, penggunaan hasil tambang batubara di RRC dengan APBN anti polusi tak memadai, berisiko membahayakan kesehatan penduduk. US mempunyai SDA minyak bumi, menyebabkan penggunaan BBM secara nasional berlebihan karena kebijakan subsidi harga BBM bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi , menyebabkan cadangan minyak menurun drastis, menyebabkan impor BBM, menyebabkan kenaikan harga BBM , menyebabkan emisi karbon AS tertinggi di dunia , polusi udara mengganggu kesehatan publik. Strategi monarki-absolut Saudi Arabia antara lain APBN Belanja Kekuasaan berbentuk subsidi/membeli oposisi, membeli sarana pertahanan. Sebagai negara minyak, walau income percapita USD 18.000 pertumbuhan GDP lemah. Afrika Selatan tercatat sejarah sempat mengalami penurunan PDB dari tahun ketahun karena tak mampu memberi nilai tambah ekpspor bahan-baku dari SDA berlimpah.Negara Inggris tak punya SDA, mengabaikan industri batubara, mobil dan industri berat, bergantung pada intellectual resources & industri keuangan. Singapore membangun hub perdagangan dunia, *petrochemical industry*, *biotechnology* , dan *brainpower.*

1.2.8.2. Kebijakan SDM .

Kebijakan SDM bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan/kemakmuran bangsa. Negara Jepang berfokus pada kualitas dan nilai tambah SLTA menyebabkan SDM produktif cq pekerja memberi nilai-tambah pada PDB, sementara negara negara Perancis, AS, UK menggunakan hampiran strategi pendidikan tinggi, agar iptek dan industri berteknologi canggih berkembang lebih pesat dari bangsa lain, dengan cetak biru pembangunan industrialisasi modern bernilai tambah dan menyebabkan pertumbuhan PDB terbesar di antara bangsa-bangsa dunia, negara Jerman dan Jepang mengembangkan sekolah teknik dan sistem magang , menghasilkan *high quality enginnering* dan pertumbuhan daya saing bangsa secara lebih merata. India adalah sebuah sistem ekonomi berbasis pendidikan & SDM, dengan produksi 5 juta Sarjana Muda & Sarjana pertahun. Pada berbagai negara , terjadi pengembangan SDM berbasis EDP untuk menyambut era digital. Sebagai contoh, strategi SDM negara Tiongkok bersifat menyeluruh melalui strategi pengumpulan/pembinaan bibit unggul berbasis intelegensi tertentu , bakat-alam dan peminatan dalam berbagai rumpun, misalnya bidang obat-obatan, kedokteran, virus, intelegensi artifisial (AI), bidang ilmu pengairan, agraria, agrikultur , sumber daya/tenaga , robotisasi , ilmu ekonomi, hubungan internasional dan atlet. Kebijakan SDM terkait pada pemanfaatan budaya-bangsa yang berguna untuk akselerasi pembangunan & kemakmuran.

1.2.8.3. Strategi Pendidikan Informal

Strategi Pendidikan Informal antara lain mengundang PMA berteknologi. Sebagai contoh, negara Tiongkok mengundang dan memanjakan FDI sebagai sarana transfer teknologi, pengetahuan, perubahan kemampuan manajerial bagi para pekerja asli.

1.2.8.4. Strategi SD Teknologi.

Global Innovation Index (GII) edisi 2020 kembali menetapkan Swiss sebagai negara paling inovatif di dunia diikuti oleh Swedia, Amerika Serikat (AS), Belanda, dan Inggris (UK). Daftar 20 negara paling inovatif berdasarkan GII 2020 adalah Swiss, Swedia, AS , Inggris , Belanda, Denmark ,Finlandia,Singapura,Jerman,Korea Selatan,Hongkong , Prancis,Israel , Tiongkok, Irlandia, Jepang, Kanada, Luxemburg,Austria dan Norwegia.
10 negara Asia paling inovatif berdasarkan GII 2020 adalah Singapura , Korea Selatan , Hong Kong,Tiongkok, Jepang, Australia , New Zealand ,Malaysia, Vietnam dan Thailand. Terdapat 80 indikator penentuan peringkat teknologi versi GII , antara lain mencakupi (1) Parameter tradisional seperti investasi untuk penelitian dan pengembangan serta pendaftaran paten dan merek dagang secara internasional, (2) Indikator lebih baru termasuk pembuatan aplikasi telepon seluler dan ekspor teknologi tinggi. Geografi inovasi terus bergeser, GII 2020 menunjukkan bahwaselama bertahun-tahun, India, Cina, Filipina, dan Vietnam adalah perekonomian berkemajuan paling signifikan dalam peringkat inovasi versi GII .

Strategi pengembangan sumberdaya teknologi mencakupi strategi pengembangan sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi, strategi pengembangan R&D bangsa berbasis laboratorium korporasi. Sebagai contoh, Perancis dan AS mengembangkan strategi perlindungan hak paten untuk menyuburkan invensi/inovasi, Jepang menyuburkan budaya belanja teknologi, paten dll untuk di komersialisasi oleh korporasi modern, strategi *innovative immitation* berbasis R&D Jepang , sehingga berhasil menjadi salah-satu *innovation leader* di muka bumi. Adalah Kabinet Jokowi tampak berupaya keras memikat PMA berbasis teknologi cq inovasi.

1.2.8.5.Strategi Permodalan

Strategi Permodalan mencakupi lima strategi, yaitu strategi tabungan domestik, strategi ekuitas domestik, strategi FDI sebagai sumber ketiga modal bangsa, strategi utang LN .

1.2.8.5.1.Strategi Tabungan.

Dewasa ini (2022) strategi tabungan terhalang kondisi bunga deposito lebih rendah dari tingkat Inflasi NKRI. Strategi tabungan domestik mencakupi pembangunan budaya menabung cq pembuatan kebijakan pemerintah untuk mendorong masyarakat menabung (pajak atas deposito, amnesti/pemutihan tabungan LN ke DN, laba/deviden diinvestasikan kembali bebas pajak, dll), tarif pajak penghasilan lebih tinggi atas penghasilan/gaji yang 100 % dikonsumsi , kebijakan “paksaan menabung” , dan berbagai kebijakan industri perbankan untuk memikat tabungan masyarakat. Pemerintah

membangkitkan kesadaran masyarakat dan melakukan pembangunan budaya rumah tangga untuk menabung sebagian penghasilan untuk hari tua & pendidikan anak, mencipta berbagai *high saving country* seperti Jepang, Singapura, China yang mencapai 30-40% GDP berbentuk deposito pada bank domestik, dan kebijakan kepemilikan rumah bagi pengantin baru dengan kebijakan down payment realestate nan kecil terjangkau, bunga utang real-estat rendah, dan kebijakan harga realestate terjangkau. Bila pasar ekuitas melemah, dibentuklah kebijakan menghalangi PMA masuk , agar bangsa mengandalkan tabungan masyarakat untuk industrialisasi/investasi produktif melalui kredit bank.

1.2.8.5.2.Strategi Ekuitas Domestik.

Strategi Ekuitas Domestik dilakukan melalui pengembangan perbankan investasi (investment banking) dan pasar-modal , terdapat kebijakan nasional untuk mengalirkan modal ke industri terpilih sebagai tulang pungung bangsa, kepada entitas yang layak mendapat aliran dana itu.

1.2.8.5.3.Strategi Memikat PMA .

Sampai 1980-an, sebagian besar FDI datang ke negara maju. Setelah 1980, FDI mengalir dari negara maju ke negara berkembang. Sejarah mencatat bahwa Kanada tahun1970 an membuat kebijakan untuk memikat pemodal AS), Singapura (1960-1990 mendorong industri *assembly plant & petrochemical* mengandalkan FDI, RRC menggunakan dua strategi yaitu tabungan/kredit bank domestik dan FDI. FDI dibutuhkan NKRI adalah jenis-usaha berteknologi-tinggi dan bersedia alih-teknologi, FDI bertujuan ekspor dan penghasil devisa , FDI padat karya, FDI pengguna SD domestik (bahan baku utama dan SDM), FDI pendukung/penguat tulang-punggung perekonomian bangsa, FDI skala-investasi-raksasa, FDI penunjang Ekonomi Kelautan dan FDI ramah-lingkungan.

1.2.8.5.4.Strategi Pinjaman LN.

Pinjaman LN tak boleh untuk belanja rutin APBN. Bagi negara berkembang, taraf hidup belum tinggi, modal langka, negara/bangsa perlu hutang LN untuk meningkatkan produktivitas bangsa , berbentuk pinjaman investasi. Pada negara berkembang, taraf hidup rendah, modal langka, APBN defisit, perlu hutang LN untuk pembiayaan APBN. Berbagai negara berkembang terpaksa membuat kebijakan ketergantungan pada IMF , pada umumnya IMF memberi pinjaman bersyarat reformasi & liberalisasi ekonomi . Pada sebagian negara, terjadi kebijakan membangun otonomi kepemerintahan & melepas diri dari ketergantungan pada IMF, yaitu kebijakan tidak berhutang dan/atau mengembalikan hutang IMF secepatnya. Kaidah emas utang (pembiayaan) dalam APBN, bahwa utang negara tak boleh digunakan untuk belanja rutin. Terdapat berbagai negara tak ingin pinjam ke LN antara lain India berbasis Swadeshi yang bermakna otonomi dari kekuatan dunia, Polandia dengan kebijakan komunisme tertentu. Sejarah mencatat, bahwa India mengalami guncangan minyak pada tahun 1970 , terpaksa pinjam untuk menutup defisit APBN. Polandia mengalami defisit

perdagangan dengan USSR , terpaksa pinjam LN. Terjadi tren dunia untuk mengurangi pinjaman LN untuk pembiayaan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembiayaan domestik & PMA naik-daun dan lebih digemari sebagai sarana pertumbuhan ekonomi bangsa. Sejarah mencatat NKRI melunasi utang kepada IMF sekaligus.

1.3. Strategi Peningkatan Efisiensi Negara

Setiap presiden dan kabinetnya berfokus pada akumulasi modal , teknologi dan akumulasi SDM berkualitas dilakukan secara berkesinambungan. Pemasukan modal besar semasa, tanpa basis teknologi & SDM memadai untuk menerima modal asing itu, menyebabkan pertumbuhan ekonomi semasa (tidak *sustainable*).Modal & SD lain harus digunakan secara optimal ,untuk peningkatan produktivitas bangsa dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Rerata pendidikan dan jenis pendidikan adalah penting, akumulasi pengetahuan dan teknologi meningkatkan efektivitas & efisisiensi pembangunan ekonomi. Pemerintah mendorong invensi & inovasi, melakukan pilihan teknologi tepat budaya & tepat guna sebagai tulang-punggung bangsa , pemerintah berfokus pada teknologi pengurangan biaya. PMA ter-efisien diundang masuk sebagai contoh industrialisasi, sebagai sekolah praktik nyata, PMA percontohan diundang masuk sengaja dengan berbagai pemikat/kemudahan , berperan sebagai pesaing industri domestik untuk meningkatkan efisiensi, sedemikian rupa, agar perusahaan domestik makin efisien , dapat bersaing dgn PMA , mampu melakukan ekspor , menyebabkan penghasilan & cadangan devisa meningkat. Pelestarian SDA adalah syarat utama pembangunan-ekonomi, efisiensi penggunaan SDA adalah dasar pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth*). Sebagai misal, bila cadangan minyak bumi akan habis dalam kurun satu atau dua dasawarsa, bangsa harus mereformasi pendapatan APBN dari migas ke nonmigas , konsumsi nasional akan migas secara bertahap dikurangi dengan hampiran elektrisasi/elektronikasi segala sarana kehidupan, antara lain mobil dan sarana-memasak. Persaingan domestik nan-sehat didorong untuk meningkatkan efektivitas & efisiensi penggunaan SD nasional. Kebijakan standardisasi meningkatkan komplementabilitas antar industri , efisiensi dan efektivitas industri / bangsa. Kebijakan BUMN dan/atau privatitasi terarah pada optimalisasi efisiensi bangsa dan APBN. Kebijakan insentif pajak untuk reinvestasi deviden untuk mendorong investasi berbasis tabungan. Strategi pemikat PMA mencakupi strategi pembangunan zona-zona ekonomi , fasilitas perpajakan, pasar domestik nan-sehat, SDM terlatih dan berdaya-saing, bukan sekadar lebih murah dari negara lain, dan kebijakan untuk mengundang secara-aktif agar PMA masuk.RRC membangun 4 economic zone pada tahun 2005 menerima USD 500 Miliar PMA, membangun *economic & technological development zone* , sebagai zona techno-incubator . mendorong industri berbasis teknologi & menyuburkan modal-ventura (*venture capital*). Pemerintah mendesain berbagai kebijakan peningkatan efisiensi alokasi SD. Bila alokasi dilakukan pemerintah, maka alokasi tidak pro-pasar,tidak tepat atau boros, lambat, konservatif dan korup. Pemerintah AS & UK percaya bahwa alokasi SD harus dilakukan pemerintah karena lebih konservatif dan untu kepentingan bangsa. Jepang berupaya agar investasi dilakukan swasta, terkendali oleh beberapa (sesedikit mungkin) kementerian dengan staf terpilih , cerdas, jujur dan berpandangan visioner, menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 9% sepanjang satu dekade atau lebih. Italia

membangun pusat industri kerajinan dan PMA diundang sebagai guru & pesaing pendorong efisiensi domestik. Pemerintah South Africa mengundang BMW sebagai PMA.

1.4.Strategi Pindah Kelas

1.4.1. Identifikasi Jenis Perangkap

Pimpinan bangsa nan-ideal memimpin bangsanya agar berjuang untuk pindah kelas. Berbagai negara berupaya naik jenjang dari peringkat negara berpenghasilan menengah ke negara berpenghasilan tinggi dan tergolong negara maju-paripurna.

- Penyebab stagnasi naik-jenjang *(stagnation trap)* adalah kondisi/masalah pasok TK berlebihan , kenaikan upah/gaji dan biaya TK, migrasi penduduk berbakat dan produktif, perubahan demografis, stagnasi pertumbuhan rumpun suku produktif & kreatif, laba entitas komersial menurun. Kegagalan investasi modal-manusia yang tertandai oleh rerata umur menua sebelum kaya , generasi konsumtif bukan generasi produktif, pengaruh negatif teknologi dalam kehidupan cq budaya kerja. Sektor privat nir-inovasi , budaya meniru saja. Pemerintah tidak mendukung/mengembangkan masyarakat/perekonomian kreatif, tak ada strategi bangsa untuk mengembangkan modal sosial di bidang / sektor iptek. Bangsa menghadapi masalah stabilitas ekonomi-makro, inflasi tak terkendali, penggembungan kredit tidak sehat untuk maksud spekulasi.
- Perangkap kemajuan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari status negara miskin menyebabkan bangsa berada dalam zona nyaman sebagai *upper-middle income country* , bangsa tak mampu pindah status dari proses bernilai-tambah rendah menjadi proses bernilai-tambah tinggi , misalnya kegagalan modernisasi sektor riil dan jasa, bangsa masih mengandalkan posisi upah-murah dan meniru teknologi asing , bangsa gagal beralih dari pemujaan modal dan proses nilai-tambah menjadi pemujaan/peningkatan daya-saing antar-bangsa, terjadi tanda tanda penurunan tingkat pertumbuhan PDB dan pertumbuhan penghasilan-perkapita yang diterima saja sebagai suratan takdir, tanpa reaksi atau upaya mengembalikan/memperbaiki tingkat pertumbuhan.
- Terjadi berbagai relokasi usaha atau pabrik ke LN, terjadi arus modal domestik ke LN, karena berbagai kebijakan dan kondisi lingkungan tidak-kondusif.
- Sumber BKF Departemen Keuangan bahwa perangkap juga dapat berbentuk ketidak mampuan pemerintahan , infrastruktur perekonomian sebagai syarat negara maju perekonomian tidak dibentuk oleh kebijakan pembangunan dan APBN, pemerintah gagal membentuk budaya kreatif , mandiri dan berani mengambil risiko , bangsa gagal membangun sisi-pasok perekonomian melalui pembangunan industri yang mencipta pasar dan kesempatan-kerja TK produktif, pemerintah gagal menarik PMA, birokrasi dan korupsi menyebabkan rente-ekonomi , pemerintah gagal meningkatkan kualitas, kecepatan dan kemudahan prosedur pendirian usaha dan kegiatan usaha, gagal mencipta keamanan publik dan keamanan usaha.
- Kabinet cq Bapenas kurang kompeten, Propenas tak mampu mengartikulasi ambisi-pindah-kelas dengan menetapkan target pemenuhan syarat sebagai negara maju , agenda

transisi pindah kelas ke negara-maju-perekonomian dan restrukturisasi APBN menuju sasaran tersebut.

- Sistem politik tidak sehat, terdapat ketidak seimbangan kekuasaan pihak-pihak berpentingan, terdapat warna/dominasi politik kelompok keras, haus harta , irasional dan tak-peduli nasib bangsa.
- Kabinet tak membuat kebijakan transisi pindah-kelas. , redefinsi target pasar dan redefinsi daya-saing bangsa , pembentukan jaringan ekonomi negara maju , perang terhadap kroupsi, pembentukan skala keekonomian kegiatan agrikultur menjadi corprate-farming dan industrialisasi sektor agri dan sektor riil berbasis agrikultur,berbentuk diversifikasi pasar target, diversifikasi produk utama bangsa, kebijakan destruktif-nankreatif dan realokasi sumber-daya bangsa.

1.4.2.Strategi Naik Jenjang

Terdapat berbagai prasyarat dan strategi untuk naik jenjang, sebagai berikut:

1.4.2.1. Pendefinisian Tiap jenjang.

Negara memahami definisi Negara Maju Perekonomian, definisi Negara Berpenghasilan Menengah-Keatas dan Negara Terbelakang Perkonomian , negara kaya dan negara miskin, negara mantap perekonomian dan negara ringkih perekonomian..

1.4.2.2. Persyaratan Tiap Jenjang.

Identifikasi persyaratan / kriteria berbagai definisi tersebut di atas

- Peyakinan bahwa segala syarat jenjang sekarang, telah terpenuhi secara meuaskan, agar jangan sampai merosot jenjang.
- Identifikasi segala pra-syarat dan syarat duduk pada jenjang berikutnya.

1.4.2.3. Rencana Kerja Memenuhi Persyaratan Jenjang Idaman.

Rencana kerja untuk memenuhi syarat pindah kelas, pada Propenas dan Restrukturisasi APBN.

- Membuat daftar infrastrukur untuk mencapai jenjang idaman selanjutnya, misalnya

    1. Pemilu sukses, berhasil memilih pemimpin negara yang tepat.
    2. Infrastruktur ekonomi-makro dan ekonomi-moneter, stabilitas sistem keuangan.
    3. Infrastruktur budaya; rerata pendidikan, budaya produktif, rajin & kreatif, budaya mencipta/inovasi, budaya menabung & investasi.
    4. Definisi pasar, redefinisi pasar dan target pasar pada tingkat/level selanjutnya
    5. Definisi daya saing bangsa pada tingkat/level selanjutnya

1.4.2.4..Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Pindah Kelas.

Strategi dan kebijakan menghapus penghalang.

- Membangun budaya demi kesetaraan dengan budaya negara maju ekonomi, meningkatkan kualitas/syarat rerata pendidikan formal, membangun budaya pendidikan formal setara budaya negara maju.
- Mengubah budaya gaya-hidup santai, mengubah zona nyaman menjadi zona dinamis, mengubah budaya mudah puas/pasrah menjadi budaya ingin maju dan lebih makmur, membangun budaya produktif , berani, kreatif dan budaya etos kerja, membangun budaya inovatif.
- Membangun ekonomi kreatif berbasis iptek dan ekonomi nilai-tambah.
- Membuka lapangan kerja , kesempatan kerja, menghapus penghalang pendirian usaha dan pengembangan usaha para pemberi kerja.
- Berbagai teori peranan mendasar di bawah ini juga termasuk.

1.5. Merumuskan Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

Perumusan peran pemerintah untuk pembangunan ekonomi amat penting. Sejarah mencatat; lebih banyak kebijakan pemerintah mendegradasi perekonomian ketimbang menolong/melindungi/mendorong pertumbuhan perekonomian.

Hal hal yang harus dilakukan pemerintah adalah :

- Penyediaan prasarana dan keamanan.
- Mencipta perjanjian/kontrak, perlindungan hak milik dan penerapan hukum.
- Menjadi pengawal risiko.
- Mengelola ekonomi makro.
- Menetapkan kebijakan industrialisasi atau mikroekonomi.

Penjelasan sbb :

1.5.1. Pemerintah Menyediakan Prasarana dan Keamanan.

Terdapat risiko bangsa untuk turun kelas. Penyediaan pasarana & keamanan domestik , untuk kelancaran perekonomian domestik.Penyediaan keamanan internasional, misalnya perlindungan PMA, orang asing, wisatawan, cargo internasional dan-lain-lain untuk kelancaran perekonomian dan hubungan ekonomi antar negara. Kondisi ekonomi pro-pasar untuk pengendalian kejahatan diruang publik, pertikaian antar kelompok masyarakat berbasis sara, gerakan revolusioner berbasis kekerasan , dan invasi militer negara asing. Gerakan revolusioner berbasis kekerasan; Chechnya, Kashmir, Turki, Saudi Arabia , konflik India & Pakistan, organisasi Yakuza mendistorsi dinamika pasar bebas Jepang, di Afrika Selatan kejahatan individu amat tinggi, PMA segan masuk.

1.5.2. **Pemerintah Mencipta & Memelihara Hukum Positif** .

Hukum positif dirancang untuk menyuburkan demokrasi. Pemerintah mencipta/memelihara hukum positif dan efektif untuk perjanjian/kontrak perdagangan, hukum perlindungan hak milik dan penerapan hukum berjalan efektif. Kualitas sistem hukum yang terpercaya untuk pemberesan konflik bidang keuangan-perekonomian/bisnis untuk invidu maupun institusi-kelembagaan domestik & internasional. Kepastian hukum atas *property right*. Kepastian hukum perkreditan , perpajakan dan perbankan.Kualitas sistem perpajakan , pemungutan pajak dan sistem pengadilan. Di Meksiko dan Polandia (setelah 1990) hukum positif kredit tak menentu, pasar properti tak berfungsi.

1.5.3. Pemerintah Menjadi Pengawal Risiko.

Penyediaan perlindungan risiko melalui pembangunan sistem asuransi dilengkapi kebijakan perlindungan publik oleh pemerintah , seperti hukum positif perjanjian perburuhan, lingkungan hidup, fasilitas nuklir , perlindungan konsumen , perlindungan deposan, perlindungan iklim wirausaha, perlindungan perbankan dan kepastian hukum transaksi keuangan.

1.5.4. Pemerintah Mengelola kebijakan Ekonomi .

Pemerintah mengelola ekonomi makro & mikro, membuat kebijakan fiskal dan moneter, termasuk pencetakan dan distribusi uang, menjaga kekuatan mata uang domestik yang berarti menjaga mekanisme pasar bebas, ekonomi meso cq regional, ekonomi politik dan kebijakan menghindari jebakan inflasi-luar-biasa.

1.6. Pemerintah Menetapkan Kebijakan Industrialisasi atau Mikroekonomi.

Pemerintah membuat Kebijakan Tarif Perdagangan untuk mengatur perdagangan, FDI, persaingan. Pemerintah memberi subsidi industri tertentu. Pemerintah membuat UU Antimonopoli, mengatur monopoli tertentu, dan distribusi pendapatan. Kebijakan industrialisasi jangka-panjang visoner lintas-zaman harus konsisten lintas-kabinet , membentuk industri-tulang punggung perekonomian.

1.7. **Optimalisasi Kualitas Koordinasi**.

Kabinet melakukan koordinasi pemerintah pusat antara lain Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi , negara bagian atau pemerintah daerah membuat kebijakan ekonomi-kewilayahan *(regional economic policy)* berbasis konsep/ilmu/teori ekonomi-meso. Terdapat Menko peningkat koordinasi antar kementerian, antara PP dan Pemda.

1.8. Penerapan *Managerial Economics.*

Ilmu ekonomi manajerial adalah amalgamasi/peleburan teori ekonomi-mikro tentang penggunaan SD langka kedalam pengambilan-keputusan kabinet-kerja dan perencanaan-lapangan belanja APBN , dalam tupoksi, penciptaan program, proyek, kegiatan tiap-kementerian, bertujuan agar kinerja kabinet-optimal. Ekonomi manajerial berbasis *Theory of the Firm* , membantu analisis kebijakan harga nan-tepat, analisis produksi, penganggaran modal (*capital budgeting*), analisis risiko dan asesmen permintaan (*demand*) cq kebutuhan publik, menggunakan ekonometrik untuk penetapan sasaran-strategis, hambatan menuju sasaran rencana-aksi, berbagai alternatif solusi-masalah dan pilihan pengambilan keputusan. Seluruh lembaga kepemerintahan dalam sebuah negara menggunakan konsep ekonomi-manajerial untuk tujuan kemakmuran bangsa.Tugas menteri baru yang mahir ilmu ekonomi manajerial seharusnya lebih lancar dan sukses.

BAB 2
KEBIJAKAN
EKONOMI
digitalblasphemy.com

BAB 2 KEBIJAKAN EKONOMI

Sebuah *micro-macro-meso-meta-economics* disebut *systemnomics*. Kebijakan ekonomi sebuah kabinet merupakan kombinasian kebijakan ekonomi makro/mikro/meso/meta, terutama kebijakan fiskal/moneter/makro-prudensial , yang terpadu oleh sebuah atau beberapa sistem koordinasi, antara lain melalui KSSK dan Menko. Kebijakan ekonomi meso antara lain ilmu ekonomi pembangunan nasional/regional/daerah/desa , ekonomi kelautan/daratan, pertanian/kehutanan, ekonomi perubahan iklim, ekonomi industrialisasi dan politik ekonomi. Kebijakan ekonomi meta berbasis kesadaran hubungan lebih dalam/rumit antar subsistem perekonomian dan antar kelembagaan.

2.1.Kebijakan Ekonomi Pembangunan

2.1.1.Makna Ilmu Ekonomi Pembangunan.

Ilmu Ekonomi Pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menggelar , membahas dan mempelajari proses pembangunan perekonomian , mempelajari proses pertumbuhan ekonomi akibat proses atau kebijakan pembangunan ekonomi, mempelajari perubahan sosial & politik pada tataran rumah-tangga, daerah, nasional dan internasional akibat proses/hasil/dampak pembangunan tersebut.

2.1.2.Kebijakan Pembangunan Ekonomi.

Sukses pembangunan ekonomi diproksi besar penurunan tingkat pengangguran menuju pemerkerjaan-paripurna (*full employment*) , penurunan tingkat kemiskinan dan senjang kemiskinan , besar peningkatan pendapatan masyarakat agregat dan pendapatan perkapita berbasis mata-uang nan kuat/stabil,, tingkat kemajuan penyediaan/modernisasi prasarana & kualitas lingkungan-hidup/sosial, menunjang pertumbuhan industrialisasi tulang-punggung perekonomian bangsa.
Kebijakan pembangunan ekonomi berbagai bangsa pada paska PD II makin terfokus pada pembangunan GNP, GDP dan pendapatan perkapita melalui kebijakan akumulasi modal dan industrialisasi umumnya, pemanfaatan SDM, industri substitusi impor dan PMA khususnya , dengan opsi optimalisasi pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan . Pilihan optimalisasi pertumbuhan ekonomi berasumsi akan diikuti oleh pemerataan karena *trickle down effect*. Tahapan Pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh sejarah perekonomian bangsa-bangsa mencakupi tahap pertanian (agraris) dimana sebagian besar kegiatan ekonomi dan penduduk bekerja di bidang pertanian, tahap manufaktur (industri) dimana sebagian besar kegiatan ekonomi dan kegiatan penduduk pada sektor riil, dan tahap perkembangan sektor jasa (bidang jasa), dimana sebagian penduduk mulai beralih pekerjaan dari tenaga kerja ke sektor jasa.

2.1.3.Peringkat Pembangunan Ekonomi Negara

Proses pembangunan ekonomi sebagai negara kapitalis agraris menjadi negara kapitalis industrial (Djojohadikusumo (1994)) merupakan cita-cita bangsa melalui anak-tangga yang di awali dari paling-bawah ke atas; rumpun negara miskin(*poor*) berciri ekstraktif & agraris tradisional, kurang berkembang (*less developed countries*) atau berkembang (*developing countries*) berciri negara agraris modern sedang beralih ke industri, menjadi negara maju perekonomian (*developed countries*) berciri industrialis, walau mungkin saja tetap berfokus disektor agrikultur bagi NKRI sebagai negara 17.504 pulau yang seluas Eropa tersebut.
Industrialisasi digambarkan oleh dominasi nilai tambah proses produksi , seringkali digambarkan di luar sektor pertanian. Transformasi perekonomian pada umumnya berjalan dari sektor produksi primer (pertanian, perikanan, dan pertambangan) menjadi sektor produksi sekunder (manufaktur, konstruksi) dan kemudian menuju ke sektor tersier (jasa dan perdagangan), yang diiringi transformasi lapangan kerja, keakhlian dan pendidikan , transformasi transaksi domestik menjadi transaksi lintas bangsa atau internasional, menyebabkan bentuk perekonomian lebih terbuka. Ilmu ekonomi memisahkan pertumbuhan kemakmuran akibat ekonomi pertanian dan pertumbuhan ekonomi industri (pabrik) , dewasa ini merupakan konsep pisah-batas nan-sesat, karena terjadi difusi industrialisasi ekonomi pertanian yang mencakupi pertanian-modern dengan proses pengolahan hasil pertanian oleh industri modern. Ilmu pertanian modern padat teknologi pemuliaan , peningkatan produktivitas lahan , teknologi anti-hama-pertanian dan teknologi pelestarian lingkungan lahan termasuk akuakultur, sementara ilmu produksi/pengolahan hasil pertanian makin padat teknologi optimalisasi-nilai-tambah (*value added*).

Terkait perpindahan sektor perekonomian , dalam kurun waktu 1965 s/d 2017, sumbangan sektor pertanian NKRI dari 51 % menurun menjadi 14 %, sebaliknya sektor industri dari 13 % meningkat menjadi 40 %, sektor jasa dari 36 % meningkat menjadi 46 %. Situs *Trading Economics,* Sektor Pertanian , menggambarkan antara lain bahwa sampai bulan September 2021, PDB sektor pertanian sebesar IDR Miliar 79.372, PDB sektor manufaktur IDR Miliar 578.167, PDB sektor jasa IDR Miliar 48.242.

2.1.4. Indikator Sukses Pembangunan Ekonomi

Indikator hasil pembangunan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan nasional, meningkatnya produk nasional bruto , perkembangan kesempatan kerja , perekonomian stabil, surplus neraca pembayaran luar negeri, dan distribusi pendapatan merata. Pembangunan ekonomi bertujuan memerangi kemiskinan dan keterbelakangan, pengangguran, dan ketimpangan hasil pembangunan.Sumber lain menyatakan bahwa sukses pembangunan ekonomi diproksi kenaikan pendapatan rata-rata keluarga diproksi kecukupan kebutuhan pokok , kesehatan dan pendidikan, penurunan tingkat pengangguran , kenaikan tingkat melek huruf/teknologi dan rerata pendidikan bangsa, kualitas hidup antara lain diproksi kesehatan, waktu senggang , makan bersama keluarga dan perubahan harapan hidup, tingkat kebahagiaan lansia/duda/janda, termasuk rerata rawat inap di rumah sakit.

2.1.5. Teori Keterbatasan Strategi pembangunan

Membangun semua, semua gagal. Karena itu APBN setiap bangsa terfokus pada pembangunan industri andalan sebagai tulang punggung perekonomian. APBN juga terfokus perkembangan investasi mengikuti hukum alam dan hukum pasar bebas, sesuai prinsip ada gula (peluang) ada semut (investasi) , sehingga konsep/visi/kebijakan pemerataan pembangunan disegala sektor secara bersamaan adalah naif. Terdapat sektor strategis yang dikembangkan melalui rekayasa belanja APBN berbentuk subsidi atau semacamnya, sengaja dipilih oleh negara itu. Sebagai misal, bila sebuah bangsa berambisi menjadi pimpinan dunia dalam kecerdasan-rekayasaan (*artificial intelligence*) maka APBN belanja SDM membuat pengumpulan bibit unggulan bakalan-pakar multi-media , APBN sekolah ke LN untuk bidang itu , APBN memikat PMA berbasis AI, APBN pusat-pusat riset dan APBN pembangunan infrastruktur AI , yang merupakan belanja berjangka-panjang dan amat besar. Belanja APBN tanpa tujuan, raihan dan konsep jelas, misalnya alokasi APBN 20 % untuk dunia pendidikan , APBN Dana Desa, Tol Laut & Darat untuk peningkatan PDB dan pemerataan hasil pembangunan, adalah sebuah kesia-siaan bangsa. Tak pelak lagi, tulang punggung suratan nasib sebuah negara pada iklim tropis terdiri atas berbagai dataran air lautan & laut dengan dataran darat 17.504 pulau , adalah sebuah sistem perekonomian agrikultur ber SDA terpulihkan dalam *bentuk industrialisasi agrikultur & proses pengolahan hasil pertanian* modern berdimensi budaya tanah & air *(land & aqua culture)* melayani kebutuhan pasar global , sebagai sebuah keniscayaan.

2.2.Kebijakan Ekonomi Politik

2.2.1. Sejarah Ilmu Ekonomi Politik.

Sumber Wikipedia menjelaskan bahwa pada akhir abad 19, istilah ilmu ekonomi secara bertahap menggantikan istilah ekonomi politik dengan munculnya pemodelan matematika versi Alfred Marshal (1890), tahap penggantian itu berakhir pada tahun 1920, sehingga studi ilmu ekonomi menjadi lebih murni tatkala tidak-lagi menggunakan teori-teori ilmu politik dan sosial , dan istilah ilmu ekonomi politik (*political economy*) dipersepsi sebagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Namun, pada tahun 1970 terjadi (kembali) perluasan pemodelan kebijakan ekonomi terpolusi kekuatan-politik , bernuansa konflik antar kekuatan, yang ternyata berpengaruh kepada pilihan kebijakan-ekonomi murni.Will Kenton 2021 , dalam artikel berjudul Political Economy menjelaskan bahwa ilmu Ekonomi Politik adalah cabang lintas-disiplin ilmu dalam ranah ilmu sosial , membahas hubungan individu, pemerintah dan kebijakan publik. Pakar ekonomi politik menggunakan konsepsi sistem kapitalis, sosialis dan komunis yang menggunakan basis utilitarian dalam menggunakan sumber-daya terbatas agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar penduduk, sebagai dasar melihat interaksi politik dan ekonomi. Pada awalnya istilah ekonomi politik bermakna ilmu ekonomi bagi berbagai pakar seperti Adam Smith, John Stuart Mill, dan Jean-Jacques Rousseau, dewasa ini bermakna berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak kepada

perekonomian. Ilmu ekonomi politik membahas bagaimana kebijakan publik, situasi politik dan lembaga politik berdampak pada perilaku pemerintah dalam menetapkan sistem perekonomian dan merencanakan kondisi perekonomian bangsa di masa depan , yang diamati melalui sudut-pandang ilmu sosiologi, ilmu politik dan ilmu ekonomi. Adam Smith sebagai filsuf, ekonom dan pengarang yang disebut-sebut bapak ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi politik , memperkenalkan hukum-pasar-bebas yang mengatur dirinya sendiri. Stuart Mill mengombinasi ilmu ekonomi dengan ilmu filsafat menyatakan bahwa pemikiran/kegiatan berbasis itikad baik adalah benar , pemikiran/kegiatan yang menyebabkan kesengsaraan adalah salah.

Sumber lain menyatakan bahwa ilmu ekonomi politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan dan tata-niaga , dalam hubungan dengan hukum & pemerintah serta tata-distribusi kekayaan. Sebagai sebuah studi yang menjelaskan bagaimana teori ekonomi berdampak berbeda pada berbagai sistem-sosial-ekonomi yang berbeda - beda , misalnya pada sistem kapitalis, sosialis dan komunis, sehingga menjadi kebijakan-publik yang berbeda-beda. .

2.2.2.Teori Ekonomi Politik

Lazarski University, Warsaw, Poland, 2016, mengunggah bahan kuliah ekonomi politik, yaitu Chapter 6, berjudul *Introduction to the positive theory of economic policy*, antara lain mengupas (1) hubungan sistem/kualitas pemilu/demokrasi dengan situasi ekonomi, (2) pilihan mazhab ekonomi bangsa itu, (3) kualitas pemimpin hasil pemilu, kualitas perubahan kebijakan paska-pemilu oleh kabinet baru, masalah koalisi partai politik yang berpengaruh pada optimalisasi pengambilan keputusan pemerintah cq proses APBN di DPR yang melayani banyak kepentingan partai politik sehingga APBN suboptimal, kemampuan pemerintah membangun perimbangan kepentingan pengusaha dan pekerja untuk optimalisasi pertumbuhan PDB, kebijakan pembentukan tabungan nasional nan-optimal sebagai dasar pertumbuhan investasi sesuai teori *propensity to save* pemberi kerja, korporasi dan pekerja, kebijakan & belanja APBN untuk memikat PMA dan menyemarakkan pasar modal, , keputusan politik untuk kebijakan defisit APBN, perubahan APBN prapemilu, transparansi proses penentuan pihak-pihak yang menerima maslahat/keuntungan langsung alokasi APBN, kualitas / perilaku partai yang berkuasa apakah rent seeking atau tidak dalam membentuk APBN dan peningkatan selera ber-utang, kualitas belanja APBN sesuai keinginan-para pemilih pada pemilu dan ppengaruhnya pada pemilu selanjutnya, , alokasi APBN memenuhi berbagai perjanjian internasional dan multilateral, , unjuk rasa serikat buruh yang menengarai pertumbuhan ekonomi diiringi menyusutnya lapangan kerja, pertumbuhan inflasi dan penurunan-daya-beli mata-uang-domestik, kemampuan pemerintah/kabinet menjelaskan kebijakan tidak populer, publikasi berkala pertumbuhan demokrasi , iklim berusaha vs pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi vs pertumbuhan pemerataan pendapatan perkapita, pertumbuhan PDB vs perubahan % kelompok miskin , pertumbuhan keamanan vs ekonomi vs perkembangan pasar domestik, pengungkapan publik usulan-populist partai-politik nan-ilogis & merusak tatanan sistem perekonomian misalnya keberpihakan kepada ukm dan kaum miskin yang menghambat bahkan koraproduktif terhadap pertumbuhan GNP / GDP, , tumbuhnya kekuatan militer yang menurunkan tingkat

demokrasi, gaya kepemimpinan diktator , tersamar atau terang-terangan, pada sistem demokratis, kabinet cq belanja APBN yang melakukan pembiaran para koruptor .

Jeffry Frieden, 2020, *professor of government at Harvard University*, menyajikan artikel berjudul *The Political Economy of Economic Policy* , menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Pada era-pandemi, rakyat pemilih dan para pembuat kebijakan memberi perhatian khusus kepada pemilu yang akan datang yang masih berada pada lingkungan ketidak-pastian bentuk kehidupan sosial umat manusia di masa depan. Perembetan virus tak mengenal batas negara menyebabkan kewajiban kerja-sama internasional menanggulangi virus dan kerjasama keamanan, transportasi , perhotelan, perdagangan internasional cq ekpor/impor , kebijakan bersama restriksi dan lain-lain, sambil memahami kebijakan suatu negara pengaruh pada kebijakan perekonomian negara lain.

Ilmu ekonomi merupakan sarana politik tingkat tinggi, sebagian besar keputusan politik berdimensi ekonomi. Ilmu ekonomi politik (1) membahas berbagai kekuatan politik , antara lain pemilih , kelompok kepentingan dan lembaga-lembaga tertentu , yang berdampak pada perekonomian, (2) membahas/menilai bagaimana kebijakan & trend ekonomi makro menyuburkan kelompok kepentingan tertentu, menyusutkan kelompok kepentingan tertentu yang lain , bagaimana kebijakan ekonomi mikro mengubah fitur organisasi-pelaku-ekonomi , mengubah arah aktivitas politik, (3) studi ilmu politik berbasis ilmu ekonomi dan/atau kaidah ekonomi untuk lebih memahami fitur-fitur pemicu keputusan politis. Sebagai contoh, pilihan kebijakan pertama adalah optimalisasi pertumbuhan GNP/PDB, diikuti kebijakan pemerataan senjang penghasilan dan tingkat-kehidupan masyarakat dengan kebijakan pajak penghasilan dan pajak-properti. Pada iklim demokrasi, sistem pajak amat progresif menyebabkan para pemilih dari kelompok berpenghasilan besar/kaya mengurangi daya-dukungnya kepada pemerintah, berpengaruh pada pemilu selanjutnya, dan/atau melakukan lobi politik, bahkan penyuapan, untuk menahan laju kebijakan pajak makin progresif.Kebijakan kenaikan harga sembilan kebutuhan pokok , listrik, air dan BBM terus menerus sepanjang umur kabinet akan menurunkan daya-dukung rakyat banyak , sehingga muncul berbagai APBN subsidi bagi kelompok penghasilan rendah (mungkin) bertujuan menjaga jumlah pemilih/pendukung partai yang sedang memegang pemerintahan. Pemerintah populis membuka investasi asing pada wilayah yang belum dikerjakan investor dalam negeri, sepanjang tak melukai hati kedaerahan, menyadari bahwa kebijakan membuka pintu bagi PMA berisiko tak disukai perusahaan dalam negeri karena persaingan berdampak menurunkan dukungan politik kalangan pengusaha. Pemerintah juga membaca , berapa besar dan kekuatan kelompok ekonom aliran proteksionis yang menentang kebijakan ekonomi buka-pintu bagi PMA yang berpengaruh pada opini publik dan berupaya menurunkan popularitas pemerintah. Terdapat sisi politik pada setiap keputusan ekonomi rasional. Berbagai keputusan politis berbentuk belanja APBN subsidi bagi industri pertanian dan petani, menghindari pemajakan atas hasil panen industri agrikultur negara yang bermaksud mencapai cita-cita swasembada pangan, menyebabkan kelompok petani kaya juga ikut menikmati kebijakan tersebut. Sebagian negara pertanian yang sedang mendorong pertumbuhan industri (sarana produksi/pabrik, sarana pengolahan) hasil pertanian dengan betbagai belanja subsidi/bantuan APBN dan kebijakan perpajakan industrialisasi , bermaksud mentransformasi negara pertanian naik kelas menjadi negara industri.

Pengumuman upaya naik kelas negara agraris menjadi negara industri tersebut meningkatkan popularitas politik pemerintah. Pemantauan dukungan elektoral biasanya terfokus pada pemilih-mudah-putar haluan (*swing voters*) , biasanya kelompok ekonomi menengah atau kelompok tengah , di antara kelompok-miskin & tidak terpelajar dan kelompok kaya & berpenghasilan tinggi , sementara berbagai LSM dan partai politik ikut-arah-angin. Ekonomi politik adalah tentang popularitas dan dukungan publik, sehingga pilihan kebijakan kedua-terbaik (*second best*) menjadi opsi fragmatis para pembuatan kebijakan ekonomi, alih-alih kebijakan-terbaik yang tidak-populer atau sulit dipahami rakyat banyak , berisiko menghasilkan gelombang oposisi nan-dahsyat dan menurunkan popularitas kabinet. Pemerintah nan-rasional berlenggang tanpa tergesa (1) memilih kebijakan- kedua-terbaik karena DPR mengukur sukses raihan nyata dan sukses-implementasi-kebijakan yang disetujui DPR , (2) melanjutkan kebijakan tersebut dalam bentuk transformasi kebijakan secara bertahap pada tahun-tahun APBN selanjutnya, pelahan lahan menuju dan beralih kepada kebijakan terbaik. Kebijakan era-pandemi di muka bumi pada umumnya bukan kebijakan berbasis popularitas, namun lebih berbasis kemestian rasional dalam situasi gawat-darurat, tersesuai kekuatan keuangan dan tingkat perekonomian bangsa. Bangsa bangsa berbudaya tinggi (diproksi rerata tingkat pendidikan dan tingkat sukses melaksanakan HAM versi PBB) dan berstruktur hormon damai lebih mudah dipimpin melewati era prahara.

2.2.3.Gabungan Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ekonomi politik adalah lahan rumit yang mencakupi berbagai kepentingan politis , mencakupi berbagai rekomendasi ekonom kepada pemerintah terkait usulan kebijakan dari berbagai kekuatan politik. Perilaku politis dalam sebuah perkonomian dibentuk oleh kepentingan, gagasan, dan lembaga lembaga. Kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dalam perekonomian membentuk kebijakan ekonomi. Gagasan dan ideologi membentuk kebijakan ekonomi. Lembaga-lembaga , antara lain DPR , IMF dan PBB mempunyai pengaruh dan sebagian ikut serta membentuk kebijakan ekonomi bangsa. Dasar politik ekonomi adalah ideologi bangsa, apakah menganut aliran liberalisme , Marxisme atau ideologi khas bangsa itu, misalnya ideologi Pancasila untuk NKRI

Corporate Finance Institute dalam artikel berjudul *Political Economy*, antara lain menjelaskan bahwa ilmu ekonomi politik adalah lahan rumit yang mencakupi berbagai kepentingan politis , mencakupi berbagai rekomendasi ekonom kepada pemerintah terkait usulan kebijakan dari berbagai kekuatan politik.
Ekonomi politik terbagi menjadi (1) ilmu ekonomi politik klasik dengan tokoh bidang filsafat seperti Machiavelli, Adam Smith, dan Karl Marx dan (2) ilmu ekonomi politik modern dengan tokoh bidang filsafat, ekonomi dan ilmu politik seperti John Maynard Keynes, Milton Freidman, dan Friedrich Hayek.
Ilmu ekonomi, sosiologi dan ilmu politik yang secara bersama-sama terfokus pada ilmu-ekonomi berupaya memahami bagaimana sistem perekonomian, lembaga politik dan lingkungan saling mempengaruhi , melalui berbagai model ekonomi untuk proses politik, ekonomi politik internasional & dampaknya pada hubungan internasional, serta alokasi sumber-daya pada berbagai sistem-perekonomian berbeda-beda.

Ilmu ekonomi politik nan-baru memperlakukan kebijakan-ekonomi sebagai kepercayaan atau aksi yang harus dibahas lebih dalam bukan dengan sebuah kerangka-baku, sesuai perkembangan terakhir ilmu politik dan ilmu ekonomi , menolak pemeliharaan citra ideal agen pemerintahan , lebih mengakomodasi aspirasi publik dan mendorong perdebatan bebas.
Ilmu ekonomi politik internasional atau global membahas ilmu ekonomi dalam tataran hubungan internasional, adalah tentang bagaimana negara dan lembaga internasional menggunakan interaksi ekonomi global untuk membentuk sistem politik. Bingkai waktu peluang ekonomi-politik seringkali amat sempit , misalnya menggunakan jabatan kepemimpinan G20 untuk kepentingan global, G20 sendiri dan negara yang sedang mendapat giliran kepresidenan G20.

2.2.4.Kebijakan Ekonomi Pancasila

Berdasar pemikiran Soekarno, Hatta dan Emil Salim ; Prof.Dr. Mubyarto selanjutnya memformulasikan lima unsur Ekonomi Pancasila, yaitu adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat cq DPR ke arah pemerataan sosial berciri egalitarian sesuai asas-asas kemanusiaan, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi, koperasi merupakan sakaguru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama, dan adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kewilayahan untuk menjamin keadilan sosial secara umum ekonomi. Lima unsur tersebut terakomodasi pada berbagai hukum positif dan RAPBN, kecuali ekonomi berbasis koperasi . Ekonomi berbasis koperasi versi Hatta sulit dikembangkan mungkin karena mempunyai syarat terlampau berat, yaitu bahwa manusia adalah mahluk spiritual nan mulia, berjiwa sosial yang mengutamakan kebersamaan. Berbagai kabinet dan APBN berupaya mengembangkan ekonomi kerakyatan cq UMKM, ekonomi daerah yang berpuncak pada ekonomi desa terfokus pada desa tertinggal. Ekonomi nasional secara geografis dibentuk antara lain dengan pembangunan prasarana perekonomian lebih merata, misalnya pembangunan ratusan bendungan sungai diupayakan merata pada 17.504 pulau untuk pengairan dan PLTA , pembangunan tol darat dan tol laut. Berbagai ekonom lebih percaya pada strategi optimalisasi kemakmuran dengan mengarahkan pembangunan terfokus pada sektor paling bernilai tambah dan berdampak biliar, ketimbang strategi mengejar dua kelinci, yaitu optimalisasi pertumbuhan PDB dan pemerataan pendapatan perkapita , berisiko keduanya suboptimal.

2.3.Kebijakan Ekonomi Kewirausahaan

Lapangan kerja sektor formal adalah baik, namun sebuah sistem ekonomi ber-kewirausahaan akan mengurangi tekanan kebutuhan lapangan kerja di satu sisi, tekanan kebutuhan pertumbuhan PDB pada sisi lain. Apabila lapangan kerja formal tak memadai, jalan keluar bangsa adalah pembangunan ekonomi-kewirausahaan, di mana setiap individu mampu memperkerjakan diri-sendiri sebagai wirausaha mandiri. Ekonomi

kewirausahaan skala kecil antara-lain ditandai oleh persentase signifikan pengusaha kecil/mikro bergender wanita yang makin-besar.

2.3.1.Teori Ekonomi Kewirausahaan

Tujuan ekonomi kewirausahaan adalah optimalisasi pertumbuhan PDB dalam stabilitas keuangan nan-dinamis , pertumbuhan & pemerataan pendapatan perkapita melalui status pemerkerjaan penuh *(full employment)* dalam ekuilibrium kepuasan pemberi kerja dan pekerja , hapusnya kelompok miskin dalam sasyarakat. Sistem ekonomi negara demokratis bersistem kapitalis dan pasar terbuka berbasis kewirausahaan memiliki beberapa syarat. Kewirausahaan Pancasila berciri kewirausahaan berkemanusiaan dan berkeadilan sosial.

2.3.1.1.Syarat pertama adalah tentang kemudahan izin usaha. Kewirausahaan ditanggapi / direalisasi dengan kemudahan mendirikan usaha cq registrasi bisnis, hak perusahaan memperlakukan SDM, kemudahan penutupan usaha atau kepailitan. Sektor keuangan harus sehat, industri jasa keuangan harus sehat. Pada sistem kapitalisme apapun, registrasi hak milik dan izin usaha mudah dilakukan atau diperoleh, pendanaan berbasis agunan aset dimungkinkan dan dipermudah. Daya saing bangsa ditengarai oleh (1) efisiensi proses perizinan, yaitu waktu rerata proses izin usaha dan (2) efisiensi biaya perizinan, yaitu rerata perizinan usaha dibanding pendapatan perkapita pertahun. Makin pendek waktu proses izin dan makin kecil biaya izin, bangsa tersebut makin berdaya saing. Pada tahun 2005, Bank Dunia menengarai proses izin rerata 59 hari dan biaya izin 122 % pendapatan perkapita pertahun pada negara-negara termiskin, proses izin rerata 27 hari dan biaya izin 8 % pendapatan perkapita pertahun pada negara-negara OECD. Survei Klaver, Laeven dan Rajan (2004) menunjukkan bahwa sukses pemerintah menekan panjang proses dan biaya perizinan menyebabkan kenaikan pertumbuhan PDB (GDP *growth*) sampai 200 %. Sebuah sistem kapitalisme tanpa pendaftaran izin usaha menyebabkan kewirausahaan tumbuh liar nirkendali, tidak bertanggungjawab dan bisnis berjalan diluar jalur hukum. Hukum formal yang berkualitas harus mencegah praktik tidak sehat proses dan pemberian perizinan usaha. Pertumbuhan ekonomi berjalan lambat tatkala formalisasi bisnis cq proses perizinan lambat dan tidak transparan, pemberian izin tidak adil dan berbasis suap. Perizinan usaha tanpa syarat dan seleksi memadai menyebabkan badan usaha tidak berkualitas dan tidak mampu bersaing, menyebabkan jumlah izin usaha terlampau banyak menyebabkan persaingan tidak sehat. Pada *sistem kapitalisme berizin usaha*, tetap saja sebagian UKM mulai beroperasi tanpa izin usaha karena tidak paham hukum atau tidak mampu memenuhi syarat pendirian usaha resmi. Sebagian besar UKM tak mempunyai aset untuk agunan kredit dan/atau karena tak berizin usaha formal. Izin usaha menyebabkan suatu usaha terdaftar negara, sebagai basis kapitalisme terpimpin negara, basis perencanaan makroekonomi atau mikro ekonomi, perencanaan APBN pajak, perencanaan pembangunan SDM, prasarana dan lain-lain. Terkait pada strategi inovasi danpercepatan pembangunan, sebagian pemerintah memberi kemudahan PMA (investasi langsung) apapun yang membawa pengetahuan, teknologi, penggalaman sukses dan tatakelola-nanbaik (*good governance*). Sebagian pemerintah mengizinkan dan/atau memberi kemudahan hanya PMA berjenis usaha tertentu

(mis.Untuk melindungi industri DN), sebagian pemerintah melarang PMA dengan jenis usaha tertentu (mis. AS melarang PMA industri komunikasi dan pertahanan), dan sisanya adalah pemerintah yang melarang PMA jenis usaha apapun. Terdapat berbagai prasyarat untuk pilihan strategi buka pintu terhadap PMA, misalnya prasyarat pembersihan suap pada proses perizinan dan pajak, larangan pekerja anak-anak, penerapan HAM, hukum korporasi, hukum kepailitan dan hukum tanggungjawab sosial korporasi (CSR). Setara dengan izin usaha, izin menutup usaha juga harus direformasi. Tugas pemerintah mengusahakan proses keluar dari bisnis (*exit procedures*) secara mudah dan elegan. Bila hukum kepailitan dan pemberesan (kurator) terbukti berjalan efektif dan efisien, maka pengusaha lebih berani menutup usaha tak berpengharapan dan langsung mendirikan usaha baru.

2.3.1.2.Syarat kedua adalah akses terhadap sumber pembiayaan. Inovasi dan kewirausahaan seringkali disertai kekurangan modal awal usaha dan ketidakmampuan akses ke sumber-sumber pembiayaan seperti kredit bank dan pasar modal harus disikapi dan diatasi pemerintah berkewirausahaan. Pemerintah mengatur agar lembaga-lembaga perantara keuangan dan pasar modal menyalurkan pihak kelebihan dana (penabung) kepada para pemilik peluang (investor). Bila pasar modal , IKNB dan perbankan tumbuh baik dan efisien, maka inovasi dan kewirausahaan tumbuh subur. Kedalaman (*depth*) layanan jasa keuangan dan kematangan sistem keuangan bangsa menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tertengarai bahwa banyak pemerintahan makin sadar bahwa kunci pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah lembaga perantara keuangan. Lembaga-lembaga pembiayaan bagai pesulap, mengubah gagasan menjadi pertumbuhan ekonomi.

Untuk pembangunan sektor keuangan, *sistem kapitalisme yang berciri demokratisasi sistem keuangan* di AS dilakukan dengan (1) Melepas kepemilikan negara cq pemerintah federal atas bank, (2) Mendorong lebih jauh fungsi bank dari sekadar juru simpan aset likuid swasta, (3) Mendorong perkembangan Bank Pembangunan Daerah yang diizinkan beroperasi lintas wilayah daerah, (4) Pengembangan pasar modal untuk pendanaan perusahaan lama dan baru, mendorong surat berharga saham dan obligasi. Pendanaan perusahaan lama terfokus pada industri tulang punggung perekonomian, pertumbuhan perusahaan lama dan/atau perusahaan baru replikasian masih dibutuhkan bangsa untuk mengisi ruang pasar (*market space, idle space, idle market*) dan permintaan belum terlayani (*excess demand*), (5) Mendorong industri modal ventura[i] berteknologi tinggi dan paket pendanaan ekuitas (*equity financing*) bagi perusahaan baru, dengan sasaran segera masuk bursa saham. Sejarah mencatat kelahiran Intel, Sun, Amazon, Cisco dan Google dari pendanaan modal ventura. Pada tataran ilmu ekonomi pembangunan, industri modal ventura bersyarat pasar modal bangsa itu telah mapan cq transparansi dan proses IPO amat sehat, (6) Mengizinkan entitas nirlaba (universitas, yayasan, koperasi) berinvestasi maksimum 5% untuk keperluan modal ventura. Karena risiko tinggi, pulangan investor harus tinggi, selalu terdapat individu tertentu atau keluarga-keluarga kaya tertentu berspesialisasi pada investasi awal penuh risiko. Pada sejarah modal ventura di AS, tercatat bahwa sebagian besar investor yang terdiri kelompok investor konservatif memilih pembiayaan kedua atau ketiga, alih alih mendukung kelahiran pertama perusahaan inovatif berisiko tinggi. (7) Kewirausahaan OJK, bila otoritas jasa keuangan suatu bangsa membina dan mengutamakan kecenderungan lembaga pembiayaan untuk

membiayai perusahaan-perusahaan baru, maka *kapitalisme kewirausahaan* tumbuh dengan baik. Bila wirausaha memiliki lembaga keuangan, maka lembaga keuangan lebih berani mengambil risiko intermediari, seperti pendanaan proyek (*project financing*), pendanaan barang modal (*leasing*), pendanaan bisnis micro (*micro financing*), anjak piutang, kredit niragun dan modal ventura (*venture capital*). Pada sistem kapitalisme tertentu, otoritas jasa keuangan atau bank sentral memberi arahan pengutamaan pendanaan sektor industri tertentu sesuai kebijakan ekonomi pembangunan pemerintah mendorong kredit niragun dan mewajibkan persentase kredit tertentu diberikan kepada UKM. Pada sistem kapitalisme usaha besar, pemerintah memiliki bank pelat merah, bank tergoda untuk ikut memiliki debitur tertentu, dan menyebar pengaruh atas kepemilikan dan mengambil posisi direktur debitur. Dengan jalan itu, pemerintah mengendalikan perusahaan-perusahaan besar, dan *kapitalisme perusahaan besar* menjadi *kapitalisme terpimpin negara*.

2.3.1.3.Syarat ketiga adalah penghargaan kepada kewirausahaan produktif. Pembangunan ekonomi berbasis kewirausahaan dengan tidak cukup dengan kebijakan kemudahan, namun harus ditambah dengan penghargaan dan perlindungan berbentuk (1) Penegakan hukum yang berjalan efektif, (2) Perlindungan terhadap kepemilikan aset dalam berbagai bentuk atau jenis, misalnya hak milik atas tanah, deposito di bank, perlindungan terhadap nilai tukar, inflasi atau daya beli, (3) Penetapan bagian pemerintah atas laba usaha (misalnya pajak penghasilan, pungutan dll) yang mendorong semangat kewirausahaan, tidak mematikan naluri mengambil risiko baru, (4) Advokasi bagi wirausaha , edukasi masyarakat agar tidak takut atau anti pendirian usaha baru, (5) Kemudahan pendaftaran hak paten atau hak cipta, perlindungan hak paten dan hak cipta dari aktivitas replikasi dan imitasi yang melanggar hukum, dan (6) Perlindungan kekayaan bangsa (lingkungan hidup, lingkungan sosial, SDA, budaya dll) dari kreativitas kewirausahaan yang buruk.

2.3.1.4. Syarat keempat adalah penegakan hukum, hak milik atas harta, dan hak kontraktual. Bisnis berjalan dengan baik, tumbuh dengan cepat, apabila hukum lengkap, adil dan berlaku efektif di lapangan. Inilah bentuk sistem kapitalisme nan-sehat. Hasil kewirausahaan adalah harta, aset, tanah, properti, sarana fisik, pasar dan pelanggan, piutang dan uang tunai, setiap jenisnya harus dilindungi hukum formil/positif dan efektif. Tanpa jaminan keamanan perolehan tersebut, kewirausahaan akan merana dan mati. Kegiatan usaha diwarnai oleh pembuatan perjanjian atau kontrak perdata, perikatan dihormati pihak pihak terikat kontrak dan oleh hukum. Sistem peradilan harus indipenden, bersih suap, menegakkan hukum perikatan (perdata) secara konsekuen.

2.3.1.5.Syarat kelima adalah kebijakan perpajakan. Pemerintah mendorong laju GDP dengan laju kewirausahaan dan inovasi, segala penghalang semangat kewirausahaan harus dilenyapkan. Sistem perpajakan dirangkai agar mendorong semangat kewirausahaan, antara lain pajak penghasilan usaha bebas yang lebih kecil dari tarif pajak penghasilan lain, pajak atas kekayaan dan pewarisan tak menyurutkan akumulasi kekayaan, sistem perpajakan yang mendorong investasi DN, kegiatan inovasi dan tahun-tahun pertama pendirian usaha baru bebas pajak, pilihan tepat tarif PPN dan pajak penjualan yang tidak mengurangi hasrat konsumsi bila tarif terlampau tinggi atau

menabung bila tarif terlampau rendah. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan (a) Lapis penduduk miskin dan tunakarya diubah menjadi pengusaha untuk pertama kali, dengan syarat tujuan usaha harus jelas, (b) Bisnis replikatif (*me too*) adalah umum karena lapis penduduk miskin tidak inovatif, (c) Pinjaman mikro dengan tanggung renteng, penerima pinjaman bertanggungjawab kepada kelompoknya. Disaksikan oleh kelompok peminjam, bank menerima pengembalian pinjaman, langsung meminjamkan kembali kepada orang lain dalam kelompok tersebut. Konsep ini meniru gerakan kredit mikro Muhammad Yunus, Bangladesh. (d) Otoritas jasa keuangan membangun instrumen hukum pinjaman mikro, kredit lunak, kredit niragun dan pendanaan syariah. (e) Lembaga lembaga nirlaba memberi bantuan, dukungan dan subsidi kepada lembaga pendanaan mikro. (f) Kekuatan sistem kapitalisme apapun adalah akumulasi kapital produktif, dan kebijakan perpajakan tertentu dapat menghalangi akumulasi tersebut, sehingga bangsa menjadi lemah. (g) Diinsentif atas kepemilikan atas aset adalah *pajak atas kepemilikan aset*, dan berbagai pemerintahan memberi tekanan pada pajak penghasilan amat progresif saja. Secara teoretis, para pengusaha adalah para pekerja keras yang berhasil mengakumulasi aset setelah pajak penghasilan, merasa terdorong untuk terus bekerja keras apabila kepemilikan terlindungi. Bukan saja bagi pengusaha yang mundur dari dunia bisnis atau pensiun, mereka yang masih aktifpun merasa sangat tidak berbahagia apabila konsekuensi perolehan dikenai pajak penghasilan lalu kepemilikan aset hasil kerja keras setelah pajak penghasilan masih dikenai pajak atas aset, pajak penjualan atas properti atau pengalihan hak atas aset dan pajak warisan. (h) Secara teoretis, nilai aset dimiliki ter-erosi oleh kewajiban pajak atas kekayaan, pajak atas tanah dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor dan berbagai bentuk pajak atas aset. Pajak atau pungutan terhadap properti menyurutkan hasrat kepemilikan properti, dan akumulasi aset produktif bangsa sebagai intisari negara bersistem kapitalisme menjadi terhalang. Pajak warisan yang amat tinggi menyebabkan hal yang serupa, WP berfikir untuk apa menjadi amat kaya kalau tidak dapat diwariskan kepada anak kandung.(i) Sistem perpajakan jangan menjadi disinsentif kewirausahaan. Pemerintah melakukan edukasi wirausahawan dan WP secara terus menerus, menjelaskan bahwa pajak, pungutan, retribusi digunakan pemerintah untuk membangun dan memelihara berbagai sarana publik (prasarana, infrastruktur) dan belanja keamanan (kepolisian), sebagai syarat kelancaran perekonomian bangsa. Pemerintah harus mendengar. Pemerintah secara terus menerus membaca keluhan para pengusaha tentang pungutan dan pajak, memilah keluhan palsu dan sejati, mengevaluasi kelayakan keluhan sejati dan melakukan perubahan kebijakan responsif. Hanya dengan demikian pemerintah memperoleh legitimasi.

2.3.1.6.Syarat keenam adalah regulasi yang tepat. Sistem perizinan nan longgar menyebabkan (1) jumlah UMKM memenuhi jumlah ideal/sehat, (2) iklim persaingan usaha makin tajam, (3) rerata umur hidup UMKM makin pendek, (4) UKM sulit naik kelas menjadi Usaha Menengah, namun mungkin (5) dengan kebijakan mendorong UKM berbasis ekspor, pemanfaatan peluang pasar global menjadi lehih optimal. Sistem kapitalisme murni dapat menghasilkan pemerasan dan ketidak adilan. Pemerintah menetapkan UU antimonopoli, persaingan sehat dan pagu harga berbagai produk dan jasa untuk perlindungan konsumen dan menghindari ekonomi biaya mahal (*high cost economy*), inflasi dan dampak buruk lain. Perusahaan tidak efisien tak dapat

menghasilkan laba cukup dan harus menutup usaha. Pada sisi lain deregulasi, misalnya deregulasi industri transportasi membuka ruang inovasi, fleksibilitas layanan dan rute, mendorong sinergi antar berbagai moda transportasi, pengurangan jenis biaya tak bernilai tambah (*nonvalue added cost*), meningkatkan ragam dan luas layanan, kecepatan, efisiensi dan tarif transportasi. Unsur harga pokok produksi cq biaya bahan dan harga jual amat dipengaruhi elemen biaya transportasi. Apabila deregulasi membuka ruang inovasi industri tranportasi, regulasi mengatur keamanan transportasi, keduanya harus mengakomodasi keluwesan layanan transpor. Di Inggris, Margaret Thatcher menerapkan program privatisasi BUMN dan penyederhanaan hukum perburuhan, menghasilkan reformasi besar-besaran, restrukturisasi perusahaan dan peningkatan produktivitas nasional. Program Thatcher dilanjutkan dan diperkuat oleh Tony Blair dengan pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan PDB. Di luar Inggris Raya, sebelum 1968, Irlandia disebut "kumpulan orang miskin di Eropa", dan terapi kejut menghasilkan "keajaiban Irlandia". Irlandia menerapkan *pendidikan dasar gratis pada 1968, menurunkan PPh pada tahun 1980 , pemerintah membangun "kemitraan sosial" ; melakukan negosiasi dengan serikat buruh yang menghasilkan keleluasaan PHK dan mendorong wirausahawan berani merekrut SDM baru*. *Irlandia membuka diri, menarik perusahaan multinasional asing agar masuk, menghasilkan banjir PMA.* Gelombang PMA pertama adalah industri komputer seperti Intel, Dell, HP dan Microsoft, dan industri jasa keuangan. Irlandia kemudian mencapai laju pertumbuhan ekonomi tercepat di Eropa, dan melampaui kinerja AS.

2.3.1.7. Syarat Ketujuh adalah penghargaan kepada gagasan inovatif. Wirausaha adalah pejuang ekonomi nan inovatif. Gagasan inovatif adalah kerja intuitif syaraf dan imaginasi orang orang berbakat kreatif (berkempuan mencipta), yang muncul begitu saja tatkala berfikir, mengerjakan, melihat atau mendengar sesuatu, tanpa tahu dari mana asalnya. Orang-orang berbakat alamiah itu dapat secara sengaja meng-otak-atik segala sesuatu, sampai muncul suatu gagasan baru. Kesengajaan berfikir kreatif tersebut di atas dapat didorong oleh kebijakan pemerintah atau korporasi sendiri, misalnya

a. Memberi penghargaan - apa saja - pada penemu dan pencipta, di atas warga rata-rata. Sejak tahun 1300, Monarki di Eropa memberi hak eksklusif sementara pada para penumu atau inovator, kemudian satu abad kemudian berkembang di Inggris, AS memberi perlindungan penemuan sepanjang 17 tahun lalu menjadi 20 tahun, berbagai negara memberi perlindungan bagi yang pertama mendaftar tanpa batas waktu kadaluwarsa perlindungan. Hak paten bukan segala galanya. Secara empiris di AS, menerobos perlindungan hukum, perpindahan informasi inovasi kepada pesaing terjadi setelah 12 sampai 18 bulan melalui penjualan inovasi sukarela, mata-mata industri dan *reverse engineering*. Sejarah mencatat bahwa AS dan beberapa negara tertentu mempunyai *nisbah APBN riset terhadap PDB* (diluar militer) terbesar di muka bumi, untuk menjamin kepemimpinannya di dunia. APBN riset adalah belanja masa depan, membeli masa depan bangsa.

b. APBN membiayai kegiatan riset dan rekacipta, kemudahan pajak dan insentif lain bagi perusahaan besar yang mensponsori riset atau rekacipta. Untuk menjamin kelangsungan

inovasi dan kewirausahaan bangsa, APBN harus selalu dialokasikan kepada wilayah penelitian yang paling tidak diminati publik atau perusahaan, misalnya riset ilmiah dasar. Karena menggunakan APBN, hasil riset diumumkan kepada masyarakat. Masyarakat, perusahaan, dan para inovator mengembangkan hasil riset universitas atau lembaga pemerintah tersebut menjadi inovasi komersial dengan berbagai kebijakan insentif.

c. Komersialisasi inovasi perguruan tinggi di AS pada tahun 1980 melalui UU Bayh-Dole tentang pematenan hasil temuan dan bagian royalti kepada para guru besar penemu.

d. Pendidikan masyarakat agar inovatif, misalnya

- Pemerintah mengalokasikan APBN khusus untuk segmen inovasi pada siaran TV,
- Kementerian pendidikan mewajibkan program pelatihan otak kanan bagi siswa didik,
- Pembangunan pusat inovasi, meniru industri teknologi tinggi di Lembah Silikon, Industri otomotif di Detroit, Industri sarana rumah-kantor (*furniture*) di Carolina Utara, Industri hiburan di Los Angeles, industri sekuritas dan perbankan di New York, industri asuransi di Harford, industri pemrograman di Banglore, industri peralatan elektronik di Taiwan dan Jepang, serta industri mode di Italia. Denmark mengurangi paket perlindungan pekerja, mengganti paket tersebut dengan sistem pelatihan ulang sangat lengkap bagi para pekerja.

e. Penghargaan dan dukungan kepada *perguruan tinggi riset (Research University)*, kurikulum kewirausahaan, praktik kerja nyata, pengembangan laboratorium invensi & inovasi, pembangunan kerjasama perguruan tinggi dengan industri.

f. Replikasi inovatif adalah cara berfikir inovatif, dapat radikal dapat pula sekadar penyempurnaan atau penciptaan generasi selanjutnya.

g. Perusahaan perusahaan Jepang membangun budaya inovatif, memberi imbalan kinerja inovasi karyawan. Tiap perusahaan mencatat ribuan gagasan inovatif yang diusulkan karyawan pertahun, sebagian gagasan mendapat anggaran proyek untuk percobaan, pembuktian atau pengujian, sebagian lebih kecil dipatenkan dan digunakan secara komersial.

2.4. Hampiran Reformasi (*Reformation Approach*). Hampiran reformasi *sistem kapitalisme berbasis kewirausahaan* adalah strategi berkarakteristik khusus sebagai berikut.

(1) Pembangunan kewirausahaan replikatif teknologi & sistem perekonomian negara asing model percontohan, strategi menarik PMA, strategi kewajiban alih teknologi sebagai persyaratan PMA,
(2) Kewirausahaan inovatif tersesuai budaya dan keberlimpahan sumberdaya dalam negeri, baik pada industri produksi maupun industri jasa,
(3) Perubahan strategi *kapitalisme terpimpin negara* menjadi *kapitalisme ber-kewirausahaan* dilakukan secara bertahap,
(4) Strategi menjauhi sistem perekonomian oligarkis yang tidak memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, menghasilkan negara-negara miskin atau secara rata-rata lebih kaya dengan akibat senjang kaya-miskin yang lebar.
(5) Strategi pembangunan prasarana kewirausahaan, antara lain perlindungan khusus usahawan bergender wanita, lebih khusus-lagi adalah pengusaha berstatus janda..

2.5.Teori Bantuan Antar Negara

Sejarah mencatat Program *Millenium Challenge Account* kabinet Bush menyeleksi negara tujuan bantuan dengan persyaratan

(1) Pembangunan pemerintahan nan adil yang;
(1.1.) menjamin kemerdekaan sipil termasuk hak politik,
(1.2) menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil,
(1.3) melaksanakan pemerintahan nasional yang bertanggungjawab kepada rakyat,
(1.4) menegakkan hukum, mengendalikan korupsi,
(1.5) membatasi kekuasaan pemerintah dengan pemilu berkala,
(1.6) membentuk lembaga peradilan indipenden,dan menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers,

(2) Investasi SDM yang
(2.1) Menyediakan pendidikan primer bagi seluruh rakyat,
(2.2) Meningkatkan kualitas pengajaran, menjamin tingkat kelulusan yang tinggi,
(2.3) Melarang pemerkerjaan anak-anak,
(2.4)Mengizinkan anak perempuan bersekolah,
(2.5)Alokasi APBN bagi penanggulangan wabah penyakit dan penyakit yang mengurangi kekuatan produktif masyarakat moneter dan fiskal nan sehat, melakukan vaksinasi untuk menjaga kesehatan dasar masyarakat miskin,

(3) Menerapkan prinsip ekonomi nan sehat, yaitu
(3.1) Mengembangkan dan menegakkan hukum,
(3.2)Mendorong kebebasan ekonomi individu,
(3.3) Mendukung kebijakan
(3.5) Mengurangi jangkawaktu proses perizinan bisnis,
(3.6) Membuka pasar domestik untuk persaingan asing,
(3.7) Meningkatkan perdagangan internasional,
(3.8) Kebijakan PMA yang baik dan

(3.9) Menghindari penempatan dana berisiko dan pasar berisiko

2.6.Strategi Reformasi Nirgagal

Strategi anti-kegagalan reformasi (*Fail free strategies*) antara lain dengan (1) Memasuki gelanggang perekonomian global dengan konsep kerjasama, win-win (*nonzero sum*), persahabatan, bukan menang atau kalah, menghancurkan atau dihancurkan (*zero sum*), (2) Selalu menghampiri negara asing dengan tawaran maslahat (*benefit offer*) bagi negara itu, karena penawaran yang baik akan mencipta permintaan (Jean-Baptiste Say), (3) Pembangunan kewirausahaan berintelegensi sosial, kewirausahaan berkesadaran sosial, (4) Menghindari perubahan radikal, menerapkan kebijakan adaptif dengan situasi eksternal agar kapitalisme berkewirausahaan tetap produktif menghasilkan inovasi-inovasi, (5) Mengubah panorama (*landscape*) perekonomian bila skala ekonomi rumpun usaha kecil yang belum mencapai skala ekonomis ideal, bila skala usaha besar terlampau besar menyebabkan lamban dan tidak adaptif terhadap lingkungan, (6) Reformasi harus ditujukan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang terkendali, dan (7) Membuat resolusi strategis konflik antar generasi, program kesejahteraan karena peningkatan porsi penduduk di atas 65 tahun dan peningkatan PDB.

2.7.Sejarah Reformasi Ekonomi Kewirausahaan Eropa

MEE adalah sebuah kumpulan negara pada benua Eropa , praktis bersistem kapitalisme memuja kesejahteraan ekonomi berbasis Badan usaha dan hukum kepemilikan individu rakyatnya . Berdasar sumber Baily & Kirkegaard, 2005, Baily & Farrel, 2006 a & 2006 b, usulan reformasi Eropa tampak sbb

- Usulan untuk peningkatan produktivitas

- Reformasi tataruang untuk mendorong pendirian usaha baru
- Menghapus hambatan pendirian usaha baru
- Penghentian subsidi kepada perusahaan berkinerja buruk
- Menghapus kebijakan yang mendorong terbentuknya perusahaan unggulan
- Menghapus hambatan persaingan sehat pada industri tertentu
- Membuka sektor jasa bebas hambatan
- Penetapan standar Uni Eropa untuk profesi penunjang perekonomian cq bisnis
- Menghapus berbagai hambatan merger dan akuisisi bertujuan efisiensi

- Usulan insentif kerja dan fleksibilitas pasar tenaga kerja

- Mengurangi hambatan PHK, mengurangi hambatan penerimaan SDM baru
- Penyediaan tunjangan PHK yang memadai, menghapus hambatan atau keengganan pindah kerja
- Mendorong etos-kerja, membatasi tunjangan pengangguran, mencipta asuransi gaji untuk kompensasi penurunan gaji akibat pindah kerja
- Meningkatkan daya beli konsumsi, meringankan pajak pekerja berpenghasilan menengah atau rendah

- Mengizinkan tawar menawar gaji, penentuan gaji oleh perusahaan sendiri
- Menaikkan usia pensiun, reformasi program pensiun pemerintah
- Reformasi program kesehatan pemerintah, memperkenalkan insentif kinerja sesuai mekanisme pasar

➢ Usulan peningkatan kinerja ekonomi makro

- Mengizinkan target defisit APBN secara luwes
- Menerapkan kebijakan moneter secara fleksibel

2.8. Kebijakan Ekonomi Kewirausahaan NKRI

- Hukum Perdata NKRI mengakui hak-milik warga-negara dan hak-milik negara, UU PT NKRI sesuai hukum hak milik privat, sejalan dengan perekonomian sistem kapitalisme berwarna sosialis versi Pancasila. Ekonomi berbasis kewirausahaan dimulai dengan kebangkitan industri sektor komunikasi dan teknologi informasi, di akselerasi oleh persaingan dengan pihak asing. Perusahaan perusahaan besar dan mapan memperbaiki kualitas produk dan jasa menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi. SDM tetap merupakan faktor produksi terpenting, karena itu produktivitas bangsa dapat diproksi oleh produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas SDM periode tertentu menggambarkan standar hidup rata-rata penduduk periode tersebut. Laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja mengukur laju peningkatan standar hidup rata-rata. Disamping pertumbuhan produktivitas SDM, penyumbang pertumbuhan PDB yang lain adalah kemajuan teknologi - terutama teknologi informasi - dan ketersediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas memuaskan. Bila peningkatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sebesar 1,4 % pertahun, maka pada tahun ke 100 pendapatan perkapita menjadi empat kali lipat daya beli perkapita sekarang. Peningkatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 2,8% pertahun, maka pada tahun ke 100 pendapatan perkapita menjadi enam belas kali daya beli perkapita sekarang.

- Pemerintah harus mempertahankan dan mendorong kewirausahaan produktif, melalui berbagai cara seperti imbalan, penghargaan, jaminan keamanan inovasi dan jaminan keamanan berwirausaha. Setiap orang tak mempunyai halangan berwirausaha sepanjang memenuhi persyaratan hukum untuk menjadi wirausahawan yang layak.Kabinet-kabinet terakhir berupaya merelaksasi birokrasi, hambatan pendirian usaha produktif dihapus dan syarat legal operasi perusahaan dipermudah . Hambat pembangunan kemakmuran berbentuk
    a. Hambatan birokratis , berbagai perizinan, berbagai syarat perizinan
    b. Hambatan biaya teknis pendirian perusahaan baru, hambatan hukum, hambat kelembagaan

- Reformasi berdimensi sbb:

a. Reformasi perizinan-usaha menjadi sistem perizinan nirtatap muka, menghapus masalah jarak pemohon dan kantor pemerintahan, masalah antrean di loket dll dengan menggunakan sarana teknologi informasi, berbatas waktu dengan denda kelambatan kepada otoritas pemberi izin
b. Proses masuk bursa dipermudah dan dipercepat
c. Kerjasama kelembagaan antar perusahaan produktif dipermudah , misalnya kontrak outsourcing
d. UU Kepailitan, proses penutupan usaha, pemberesan perburuhan, pemasok dan hutang pajak, dibuat sederhana, praktis dan cepat
e. Wirausahawan harus merasa nyaman dan aman berbisnis, keberanian mengambil risiko bisnis dan kinerja usaha tidak dicemburui oleh yang lain
f. Masyarakat harus menghargai wirausaha dan kewirausahaan yang baik sebagai penyedia lapangan-kerja , penyediaan produk/jasa kebutuhan bangsa dengan harga bersaing dengan pasar-global cq impor, sama seperti penghargaan kepada para atlet atau pejuang pembangunan
g. Kinerja usaha dilindungi oleh UU dan negara
h. Menyuburkan pertumbuhan ekonomi kreatif, upaya inovasi dihargai, sistem paten menyebabkan para penemu giat memperoleh hak paten, hak paten mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dapat diperdagangkan
i. PPh tidak menyurutkan semangat kewirausahaan, kewirausahaan baru didukung oleh sistem perpajakan (misalnya *tax holiday* tiga tahun pertama perusahaan baru). Sistem pertanggungjawaban kewajiban pajak WP berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum, praktik akuntansi dan praktik audit LK berjalan dengan baik pada bangsa itu.
j. Kebijakan proteksi konstruktif harus dibentuk untuk perusahaan UKM padat inovasi yang lemah keuangan dan lemah pemasaran, mudah tertimpa UU Kepailitan dan sanksi UU Perpajakan. Hukum perpajakan bagi UKM hendaknya lebih sederhana, mengatur secara khusus pengurang pajak UKM dan pajak pribadi, bertarif sesuai dengan tahun tahun pertama masa pertumbuhan. Pemerintah waspada risiko gagal-usaha pada seribu-hari pertama UKM, dan melindungi UKM Baru dari risiko mati-muda. Pemerintah mendorong besaran usaha dari UKM agar beralih menjadi UM., dari layanan pasar domestik menjadi eksportir.
k. Pemerintah harus membatasi atau menghapus kegiatan kewirausahaan tidak produktif, misalnya bisnis ilegal, pembajakan hak paten, jasa-layanan tidak sehat, persaingan tidak sehat, pemerintah perlu mengawasi perilaku destruktif perusahaan besar pengakuisisi UKM berkandungan inovasi baru.
l. Pemerintah mendorong agar UKM berbentuk badan hukum PT, dengan berbagai insentif pendirian PT karena Perseroan Terbatas adalah entitas berpotensi membangun serikat buruh, WP Badan berbasis pembukuan, membangun program jaminan sosial, jaminan kesehatan, program pensiun, pendidikan berkelanjutan, kepuasan kerja, perlindungan hukum atas karya inovator para karyawan, membangun sistem SDM formal yang menghasilkan kesetiaan karyawan inovatif.
m. Kebijakan Penyelarasan & Sinergi UKM dan Usaha Besar. Bangsa kuat dan makmur memiliki banyak usaha skala besar dan iinternasional. Pemerintah harus memproteksi kinerja inovasi perusahaan besar dan menjaga persaingan

sehat tetap berlanjut. Perusahaan besar harus dibentuk menjadi *besar karya* inovasi melalui berbagai fasilitas perpajakan dan lain-lain. Perusahaan besar mempunyai hubungan kerja dengan UKM sebagai subkontraktor, pemasok input, pemasar dan mitra-binaan berhampiran win-win.

n. Pemerintah harus memperluas basis wajib pajak, meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBN, agar tidak selalu merasa perlu menaikkan tarif pajak untuk menutup defisit fiskal.

o. Pemerintah berupaya menggunakan sumber daya di luar APBN untuk pembangunan bangsa dan negara melalui strategi kemitraan pemerintah dan swasta (KPBU) , konsesi jasa , pemberdayaan aset negara terlantar atau terabaikan agar menghasilkan pendapatan negara dan mendorong kewirausahaan. Berserak butir peramai kumpulan bahan baku untuk strategi pembangunan ekonomi ber-kewirausahaan disepanjang Tol Laut Dan Darat NKRI, dan pada pusat-pusat pembangunan UKM Strategis pada 17.504 pulau, merupakan sumber gagasan bagi Kabinet nan cerdas. Terdapat pilihan khas Indonesia untuk strategi pengembangan tulang punggung bangsa, misalnya sektor agro dan sektor industri tulang punggung perekonomian, pembangunan strategi kewirausahaan nan-mulia yang peduli bangsa cq rakyat banyak.

2.9. Kebijakan Ekonomi-Lingkungan

Berbagai departemen pemerintahan melaksanakan tupoksi dan bertugas menerbitkan berbagai kebijakan departemental berbasis konsep ekonomi lingkungan yang mencakupi lingkungan hidup, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi.

2.9.1.Teori Ekonomi Lingkungan

Sumber Corporate Finance Institute menyajikan artikel berjudul *Environmental Economics* menjelaskan bahwa Ilmu Ekonomi Lingkungan adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan ilmu yang mengejar pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan rancang-bangun kebijakan dan implementasi kebijakan pro-lingkungan. Ilmu Ekonomi Lingkungan menggunakan premis berhampiran ekonomi klasik-baru (*neoclassical*) terkait (1) berbagai isu alokasi tidak efisien SDA dan isu kegagalan pasar (tak ada pasar udara jernih, iklim nyaman, sungai/danau/laut jernih , sinar matahari pas, dunia bersih sampah), (2) eksternalitas negatif dan(3) manajemen barang publik.

James Chen & Robert C.Kelly (2021, dalam artikel berjudul *What is Environmental Economics?* menjelaskan bahwa Ilmu Ekonomi Lingkungan adalah bagian Ilmu Ekonomi yang (1) mempelajari *dampak keuangan* kebijakan lingkungan pada perekonomian, (2) melakukan analisis dampak , untung-rugi kebijakan lingkungan yang berlaku , (3) bertujuan membantu para pengguna untuk merancang kebijakan lingkungan yang tepat. membantu membuat solusi masalah lingkungan dengan hampiran perspektif atau berdasar pertimbangan keuntungan/kerugian. Ekonomi lingkungan berlatar belakang lingkungan lintas negara dan dampaknya kepada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Teori ekonomi lingkungan mencakupi berbagai jenis dan sifat berbagai barang-lingkungan (*environmental goods*) bernilai-ekonomi sebagai komoditas-ekonomi yang sulit di privatisasi dan tidak mempunyai pasar, sebagai hikmah/bencana bagi

masyarakat, biaya lingkungan (*environmental cost*) dimasukkan sebagai unsur dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi, Karena sulit di privatisasi, berbagai barang-lingkungan seperti keanekaragaman hayati, udara-bersih, sungai bersih, mata-air , populasi pohon dalam hutan, lereng gunung terlindung pepohonan, lapisan udara penahan unsur ultra-violet sinar-matahari , berisiko diperlakukan secara tidak-pantas sehingga menyebabkan degradasi barang-lingkungan tersebut. Kebijakan ekonomi lingkungan berbasis eksternalitas-negatif misalnya kebijakan-ekonomi-sosial seperti usaha-terlarang, keamanan, informasi , toleransi sosial, anarki sosial, kebijakan ekonomi-lingkungan-hidup seperti kebijakan batas-emisi-karbon, insentif pajak bagi pabrik bersarana pembersih limbah, kebijakan pemeriksaan lingkungan berujung sanksi bagi pelanggar, kewajiban penduduk melaporkan pelanggaran hukum-lingkungan. Hukum lingkungan hidup biasa tidak dipatuhi masyarakat, kebijakan ekonomi lingkungan tertentu adalah biasa bila mendapat perlawanan sektor usaha dan politisi.

2.9.2.Perkembangan Teori Ekonomi Lingkungan

Jonathan M. Harris dan Brian Roach, 2021 menerbitkan buku-maya berjudul *Environmental and Natural Resource Economics*, antara lain membahas bahwa terjadi berbagai ragam hampiran ilmiah untuk memahami hubungan ilmu ekonomi dan alam-raya dalam konteks lingkungan-hidup-manusia. Muncul berbagai buku teks yang mengurai berbagai aspek lingkungan seperti bahan untuk energi, perubahan iklim, perekonomian lebih-hijau, populasi, hutan dan SDA air, tanah, dan udara dalam tataran ilmu ekonomi lingkungan dalam cakrawala lebih lega tentang ilmu ekonomi ekologis, memberi keseimbangan pengembangan teori dengan penggunaan sarana analisis , terkait isu terkini berperspektif global tentang pertumbuhan populasi, perubahan iklim global , *green economics*, dan *"green" national income accounting*, yang bermuara pada diskusi / konferensi tentang berbagai kebijakan-nyata berbagai negara antara lain Earth Summit dan Global Impact.

Lynne Lewis danTom Tietenberg, 2020, dalam buku berjudul *Environmental Economics and Policy* , menjelaskan tentang analisis ekonomi yang mencakupi peran ilmu ekonomi dalam perumusan kebijakan dan penerapan kebijakan, hampiran ekonomi atas hak-properti, masalah eksternalitas dan lingkungan, peran instrumen kebijakan dalam membangun manajemen-lingkungan nan-efisien, evaluasi untung-rugi menggunakan sarana Analisis Biaya-Maslahat dan sarana pengambilan-keputusan yang lain. Sesi Kebijakan lingkungan mencakupi teori ekosistem barang & jasa terkait kerusakan lingkungan, kebijakan perikanan, jenis tantang perubahan iklim, peran kebijakan energi dalam perubahan iklim, peran penetapan harga BBM dalam perubahan iklim, kebijakan adaptasi perubahan lingkungan, manajemen polusi industri transportasi, manajemen kualitas air sungai, danau dan laut , kebijakan penggunaan/perniagaan zat berbahaya, dan peran ilmu ekonomi dalam pelestarian lingkungan hidup, evaluasi untung-rugi menggunakan sarana Analisis Biaya-Maslahat dan sarana pengambilan-keputusan yang lain.

Buku berjudul *Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach* , Edisi V, terbitan Routledge , 2021, antara lain menjelaskan tentang sumber-

daya, lingkungan dan pembangunan perekonomian yang bermuara pada diskusi kebijakan pembangunan lestari. Pendapatan nasional dan akuntansi lingkungan membahas pengukuran PDB Hijau, Tabungan Neto Terkoreksi Biaya/Kerugian Lingkungan , Indikator Kemajuan Sejati, Indeks Taraf Hidup yang lebih tepat, dan tentang informasi/data baru pada Rekening Aset Lingkungan. Pada tataran eneregi , dibahas peralihan-akbar tentang perkembangan energi, tren/perubahan dramatis biaya energi matahari dan angin, tantangan pebangunan energi negara-berkembang dan isu ketidak-seimbangan energi, dan perubahan pasok-permintaan agregat terhadap energi, perubahan iklim global diperbincangkan berbagai hasil riset terkini, data baru tentang jumlah emisi karbon dan emisi perkapita, perencanaan global reduksi emisi dan target kesepakatan Paris , Kebijakan mencapai posisi "emisi nihil", prospek pemulihan-hijau, dan kebijakan iklim negara-negara, Produksi bahan-bakar-biologis (biofuel) global, Dekarbonisasi ekonomi global, Studi kasus krisis air di California, Nilai ekonomi lautan dunia, Meninggalkan bahan bakar fosil untuk penyelamatan iklim dunia,akuntansi eksternalitas emisi karbon dalam kebijakan lingkungan AS.

Ahmed M.Hussen, 2000, menerbitkan buku teks berjudul *Principle of Environmental Economics* antara lain membahas batas biofisikal pada pertumbuhan ekonomi pada perspektif ekonomi klasik-baru, hubungan kelangkaan sumberdaya, teknologi dan pertumbuhan ekonomi, ekonomi ekologis, hampiran ekonomi ekologis terhadap kelestarian, hampiran tolok ukur aman minimum terhadap kelestarian, akuntansi kelestarian penghasilan negara, teori ekonomi pengendalian polusi, menekan biaya pembuangan sampah, biaya kerusakan lingkungan, ekonomi regulasi lingkungan, ekonomi regulasi lingkungan berbentuk pajak polusi dan perizinan polusi, kebijakan tentang izin mentransfer polusi (misalnya limbah pabrik tertentu dibuang ke sungai/laut) , dan program pengendalian hujan asam (acid rain).

Universitas Bologna mengajarkan ilmu ekonomi lingkungan dan sumberdaya , menggelar latar belakang keilmuan yang bermuara pada kebijakan ekonomi-lingkungan , dengan dimensi teori eksternalitas lingkungan sebagai sumber utama degradasi lingkungan dan berbagai instrumen kebijakan untuk menahan degradasi-lingkungan tersebut . Teori dasar mencakupi konsep dasar ilmu ekonomi, eksternalitas lingkungan sebagai sumber kegagalan pasar-persaingan-bebas mencapai solusi efisiensi-pasar versi Pareto, termasuk kegagalan regulasi. Teori instrumen kebijakan dan praktik di dunia nyata mencakup bentuk (1) regulasi instruksi & pengendalian (batas dan tolok ukur), (2) instrumen berbasis pasar (pajak emisi polutan, subsidi, izin perdagangan berdimensi emisi, pajak bahan (*input taxes*) dan sistem deposito-jaminan-kepatuhan yang dikembalikan) , pembahasan model-model perjanjian/kesepakatan, teori negosiasi sebagai sarana membersihkan eksternalitas lingkungan.Teori lanjutan pertama mencakupi studi ekonomi-perubahan-lingkungan, menjelaskan sejarah tren perubahan iklim global, emisi dan kepekatan gas rumah-hijau (*greenhouse gasses*), anomali suhu dan perubahan suhu luar-biasa disekitar kutub serta dampaknya pada suhu global,APBN karbon, hubungan sistem perekonomian dan iklim, model penilaian terintegrasi (IAMs), kebijakan iklim berbentuk pajak-karbon, kebijakan pembatasan emisi karbon dan kebijakan yang mendorong penghematan dan optimalisasi laba karena keberhasilan badan-usaha mengurangi polutan/karbon dioksida (*cap & trade*), kebijakan penggunaan sarana-

penangkap-polutan dan penyimpanan limbah, upaya menekan aksi penggundulan hutan (deforestasi) dan degradasi-lingkungan, kebijakan adaptasi perubahan lingkungan, kebijakan perjanjian internasional tentang lingkungan hidup .Teori lanjutan kedua tentang hubungan antara dinamika perekonomian dengan kelestarian-lingkungan, mencakupi teori hampiran permodalan bagi pertumbuhan nan-lestari yang mencakupi berbagai jenis/bentuk modal/syarat ekonomi-kelestarian-lingkungan, bauran modal ekonomi-lingkungan nan-efisien, teori tingkat atau kuat/lemah kelestarian, teori keterbatasan SDA , teori pertumbuhan perekonomian berbatas sumber-daya, ditutup dengan diskusi persyaratan makro-keuangan (*macro-financial*) tentang (1) pengukuran berbagai aktivitas sektor keuangan yang mengandung risiko bagi perekonomian ,(2) interaksi kebijakan moneter dengan stabilitas keuangan , dalam skenario perubahan iklim. Tertandai bahwa berbagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Indonesia mendirikan jurusan khusus berbasis lingkungan.

Hubungan teori ekonomi lingkungan dengan kebutuhan praktis untuk keperluan pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut. Jurnal resmi masyarakat Eropa berbentuk *The Official Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists*, antara lain mengungkapkan bahwa terjadi proses ekplorasi lebih jauh diantara para pakar tentang sebab, konsekuensi dan kebijakan ekonomi-lingkungan semula bertaraf spasial & temporer menjadi isu global. Jurnal antara lain memuat evaluasi/pengembangan instrumen kebijakan lingkungan seperti analisis biaya-maslahat, analisis dampak kebijakan lingkungan sektoral, pemodelan dan simulasi, tugas dan kerja-sama kelembagaan dalam ekonomi-lingkungan, penetapan harga (*pricing*) sumber-daya-alam dan hasil-alam, indikator kualitas lingkungan, dan model optimalisasi ekonomi lingkungan. Jurnal mendorong kelahiran konsep/teori ekonomi-lingkungan yang baru atau diperbaharui, mendorong pengembangan teori pengambilan keputusan berbasis kaidah ekonomi-lingkungan, dan dengan rendah hati meminta kontribusi pemikiran para pakar yang tentu saja kemudian mendapat respons antusias para pakar untuk membeberkan temuan pada jurnal tersebut.

2.9.3.Cabang Ilmu Ekonomi Inovasi Berbasis Lingkungan

Tentang inovasi prolingkungan, David Popp, Adam B. Jaffe dkk, 2010 dalam buku berjudul *Handbook of Economics in Innovation* menjelaskan antar lain bahwa Ilmu Ekonomi Inovasi berpotensi menjadi cabang Ilmu Ekonomi lingkungan , sepanjang teknologi tersebut terkait pada isu lingkungan, misalnya teknologi sarana-hidup anti-polusi cq pabrik nir-polusi dan kendaraan nir-polusi.Ilmu pengetahuan, pengetahuan , keakhlian, pengalaman adalah barang ekonomi , makin banyak (jumlah pengguna, frekuensi penggunaan)dan makin luas penggunaan , makin tinggi nilai ekonominya. Kegiatan ekonomi berbentuk Riset & Pengembangan menyebabkan temuan menjadi barang-publik yang diperdagangkan, terdapat teori spill-over effect invensi-teknis menjadi inovasi- komersial, terjadi gejala *creative immitation* (tiru dan lompati) dan miniaturisasi (upaya pengecilan produk) diseluruh muka bumi, karena keuntungan peningkatan eksternalitas positif (*clean factory*, TQM & *zero waste concept*) , menurunkan bahkan menghapus eksternalitas negatif (pengambilan bahan baku merusak alam, limbah, produk mengandung zat berbahaya) penghematan bahan baku (reduksi

biaya produksi, biaya pengangkutan ke pasar, biaya penyimpanan, biaya sukucadang), peningkatan kapasitas , durabilitas , kepraktisan/fleksibilitas/kemudahan penggunaan antara lain multi-guna (multi purpose) dan mudah-pindah tempat (*portable*) merupakan dimensi makin populer pada ekonomi lingkungan, sebagian konsep digunakan pada industri jasa.

2.9.4.Kebijakan Insentif berbasis Ekonomi Lingkungan

Dewasa ini hanya hampir 10.000 perusahaan dari 160 negara di muka bumi yang menanda-tangani kesepakatan versi PBB tentang pemerkerjaan dan lingkungan hidup. Sepuluh prinsip Global Compact PBB adalah , bahwa tak boleh terjadi perlakuan semena-mena antar-manusia dalam perusahaan yang bertentangan dengan HAM versi PBB, pelaku bisnis harus memberi kebebasan SDM untuk berserikat dan melakukan tawar-menawar hubungan kerja kolektif dengan pemberi-kerja , kerja paksa di larang, larangan tenaga kerja anak-anak, korporasi wajib menghapus diskriminasi pemerkerjaan, tugas atau jabatan, pelaku bisnis harus mendukung hampiran siaga terhadap tantang lingkungan-hidup, pelaku bisnis wajib mengambil tanggung-jawab lebih besar terhadap lingkungan-hidup, pelaku bisnis hendaknya mendorong pengembangan & penggunaan teknologi ramah-lingkungan, kegiatan berbisnis harus melawan segala bentuk KKN.

Untuk kebijakan lingkungan, kebijakan insentif lebih efektif ketimbang kebijakan sanksi karena menemukan dan menangkap pelanggar adalah sulit dan mahal. Tentang kebijakan memikat kepatuhan, sumber EPA menyajikan artikel berjudul *The United States Experience with Economic Incentives for Pollution Control* , menjelaskan berbagai program pengendalian polusi berbentuk insentif bahwa regulasi tradisional berbentuk larangan dengan sanksi terbukti tidak mungkin karena pelanggaran dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. kebijakan pengurangan polusi sulfur dioksida yang berasal dari pusat-pembangkit- tenaga ber-bahan batu-bara menghasilkan hujan-aksid dan salju-aksid merusak/membunuh tatanan akuatik dan hutan diatasi dengan regulasi insentif bagi unit usaha bila mampu mengurangi emisi . Pusat pembangkit tenaga mendapat dua keuntungan, pertama beban operasi cq biaya bahan menurun, kedua mendapat insentif dari pemerintah. Subsidi bagi petani dan bidang usaha lain agar menjaga kelestarian habitat dan mengurang kegiatan penyebab polusi,mengatur penggunaan sumber air alam terutama penggunaan air untuk pembilasan atau proses produksi, memungut biaya emisi pabrik, peternakan dan lain-lain , antara lain meminta uang-titipan bagi pengusaha botol minuman agar melakukan daur ulang botol bekas, batere bekas , minyak bekas dan limbah berbahaya lain, menerapkan sanksi atas tumpahan minyak atau zat berbahaya, menerbitkan berbagai panduan dan informasi untuk mendorong pengurangan bahan berbahaya , kewajiban memasang label pada produk mengandung zat berbahaya, membuat berbagai acara dan kegiatan sosial sukarela memerangi polusi dengan hadiah/penghargaan.

2.10.Kebijakan Ekonomi SDM

2.10.1.Konsepsi Manajemen SDM Bangsa

Situs Mero Spark dari perguruan tinggi Nepal menyajikan artikel berjudul *Role of Human Resource in Economic Development of Country* antara lain mengungkapkan sebagai berikut. Sumber daya manusia sebuah bangsa adalah sekumpulan manusia produktif (tidak menganggur) , berpenghasilan, berkonsumsi barang/jasa ekonomi , karena sehat jasmani-rohani, berpendidikan yang berguna di bidang kerjanya , dan berkeakhlian profesional. Ilmu SDM terfokus pada upaya & proses meningkatkan kualitas cq efektivitas & efisiensi manusia. Berbagai pakar membuat formulasi SDM sebagai agregasi ilmu pengetahuan dan keakhlian, agregasi efektivitas & efisiensi, agregasi kapasitas fisik dan mental seluruh penduduk dari sebuah bangsa.

2.10.2.Teori Ekonomi SDM

Mayank Rai, 2021, dalam artikel berjudul *Human Resource and Economic Development* menguraikan antara lain sebagai berikut. Ekonomi SDM berbasis sistem bernegara (kapitalis/sosialis, otoritarian/demokratis), kualitas pimpinan negara & kabinet , kompetensi inti perekonomian bangsa yang berdimensi ukuran geografis dan kondisi alam/lingkungan hidup, tingkat perdagangan cq ekspor/impor, agri/pabrik/jasa, SDA/inovasi , dan kualitas budaya bangsa. Ekonomi SDM mencakupi aspek produktif SDM bangsa termasuk (1) aspek pasok hasil-produksi , (2) aspek pendapatan dan (3) aspek konsumsi atau aspek permintaan (demand) pasar SDM.

Pada tataran produktivitas dan produksi , ilmu ekonomi SDM membahas (1) peran SDM sebagai penyedia lapangan kerja, (2) SDM sebagai pengguna lapangan kerja tersedia sebagai pekerja, dalam tatanan (3) pilihan perekonomian padat SDM dan/atau padat teknologi pengganti SDM (robot, otomatisasi pabrik dan AI), (4) berlatar belakang budaya penyebab pertumbuhan penduduk, rerata tingkat pendidikan formal bangsa , budaya etos-kerja bangsa, (5) skala ekonomi SDM, (6) demografi angkatan kerja dan pengangguran, (7) tingkat tabungan hasil-kerja, dan(8) pembentukan modal pada sektor tulang-pungung perekonomian, (9) tingkat partisipasi masyarakat, serikat buruh, kekuatan politik dalam penetapan UU Tenaga Kerja dan Cipta Kerja, jumlah jam kerja, hari libur nasional, usia pensiun, pemerkerjaan wanita/penyandang cacat/anak-anak, kebijakan syarat kerja cq umur masuk lapangan kerja, dan bekerja dari/di rumah masa normal/pandemi.

Michaeljung dalam makalah berjudul *Human Resource Economy will often focus on assesing employment issues that impact greater economy* antara lain menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi SDM terfokus pada penilaian berbagai aspek pemerkerjaan (*employment*) dan dampaknya kepada perekonomian , adalah sebuah istilah tentang strategi-strategi dan hampiran (*approach*) terfokus kepada pendayagunaan SDM dalam angkatan-kerja agar memberi dampak optimal bagi perekonomian umumnya dalam konteks pemerkerjaan-paripurna (*full employment*).

2.10.4.Penerapan Ilmu Ekonomi SDM NKRI

Dalam tataran ilmu ekonomi, indikator pembangunan manusia setara indikator pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan GNP/GDP. Kebijakan pemerintah dalam SDM mencakupi kebijakan peningkatan kualitas hidup, kualitas SDM produktif berbudaya iptek dan berwasasan lingkungan dalam penyebaran geografis merata pada 17.504 pulau , dalam penyebaran sektoral sesuai pengutamaan sektor perekonomian dalam Propenas, misalnya sektor pertanian, industri, perdagangan dan sektor keuangan berbasis hukum dan kelembagaan penunjang cita-cita tersebut.

Kita sama mafhum bahwa alokasi APBN untuk dunia pendidikan sebesar 20 % sejak tahun 2015 tersebut mencakupi besaran sekitar Rp. 500 Triliun pertahun berbasis ilmu ekonomi SDM dengan target mengangkat rerata pendidikan formal setara SLTA dan berkemampuan matematika , bertujuan meningkatkan produktivitas bangsa dan ambisi masuk peringkat/kelompok negara terindustrialisasi baru (*new industrialized country*) pada sekitar tahun 2050. Alokasi APBN tersebut sampai hari ini belum efektif benar. Nidia Zuraya , 2019, menyajikan artikel berjudul Kualitas SDM Turunkan Peringkat Daya Saing Global Indonesia menyitir pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa mayoritas hasil pendidikan formal berakhir pada tingkat SD dan SMP tersebut perlu ditingkatkan agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri menyatakan bahwa indikator kualitas sumber daya manusia (SDM) cq peringkat daya saing global Indonesia turun dari posisi 45 menjadi 50 berdasarkan laporan World Economic Forum 2019. World Economic Forum mengeluarkan indeks daya saing global (GCI) tahun 2019 yang menempatkan Indonesia di rangking 50. Dalam laporan itu menyebutkan Indonesia mengumpulkan skor 64,6 atau turun tipis 0,3 dibandingkan tahun lalu. Kebijakan pemerintah dalam SDM mencakupi kebijakan peningkatan kualitas hidup, kualitas SDM produktif berbudaya iptek dan berwasasan lingkungan dalam penyebaran geografis lebih merata pada 17.504 pulau , dalam penyebaran sektoral sesuai pengutamaan sektor perekonomian tulang punggung dalam Propenas, misalnya sektor pertanian, industri, perdagangan dan sektor keuangan berbasis hukum dan kelembagaan penunjang cita-cita tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalokasikan Rp 508,1 triliun untuk sektor pendidikan, berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 172,2 triliun, TKDD Rp 306,9 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 29 triliun. Evaluasi terhadap realisasi penerapan APBN terkait aspek kurikulum, proses belajar dan mengajar, dan guru, sehingga bisa diperbaiki pada tahun berikutnya. Evaluasi bersama berapa tinggi efektivitas alokasi APBN Pendidikan dan upaya memperbaiki hasil nyata anggaran pendidikan. Pemerintah memberi insentif kepada daerah mereka berkontribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan pendidikan karena mayoritas anggaran untuk pendidikan itu dikelola oleh pemerintah daerah. Insentif fiskal bagi kegiatan pelatihan vokasi dan magang sehingga kualitas SDM masyarakat Indonesia semakin membaik. Pemerintah memantau dan meningkatkan pembangunan sekolah hingga kampus melalui anggaran belanja di kementerian/lembaga seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

2.10.5.Studi Kasus Kebijakan SDM Bangsa

Terkait program nasional pengembangan perekonomian nasional dalam konteks kondisi lingkungan & persaingan global, Jeanne Simeon,2018, Minister for Education and Human Resource Development negara *Seychelles* mengungkapkan kebijakan SDM nasional , yang mencakupi berbagai belanja APBN untuk penyusunan Pedoman Pengembangan Modal Manusia Nasional Nan Kompetitif yang mencakupi (1) cetakbiru Strategi SDM, (2) Rencana Implementasi Stratagi SDM, (3) rencana Pendidikan & Pelatihan SDM Nasional untuk pengembangan kapasitas-profesional, (4) berbagai kebijakan intervensi lintas-kementerian dan (5) pelibatan & pengikutsertaan para pemangku-kepentingan akan dunia pendidikan, Pembangunan sektor pendidikan berbasis riset kebutuhan pasar tenaga kerja akan tenaga kerja profesional tertentu sebagai basis pengembangan perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge based economy) terfokus pada kompetensi minimum dan sikap-hidup generasi-muda, riset ketidak cukupan gelar sarjana masuk lapangan-kerja, riset untuk pembangunan budaya belajar seumur hidup (*lifelong learning*),

2.11..Kebijakan Ekonomi Kelautan

2.11.1.Teori dan Praktik Ekonomi Kelautan

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019 menyajikan artikel berjudul Kebijakan Sektor Perikanan Menuju RPJM 2020-2024 dan Tantangan Global Perikanan Tangkap, menjelaskan antara lain sebagai berikut. Badan Pangan Dunia FAO menyebutkan satu dari lima ekor ikan yang dikonsumsi saat ini berasal dari kegiatan ilegal fishing. Sementara itu, negara-negara penghasil ikan mulai menggunakan kekuatan militernya untuk melindungi aset nasional tersebut. Sekitar 1 miliar penduduk bumi mengandalkan laut sebagai sumber protein. Dewasa ini terdapat 70 perjanjian tentang laut/lautan membutuhkan biaya penegakan hukum , tak semua negara memiliki kemampuan mengawasi apalagi menjaga ZEE nya.
Konsumsi negara berkembang diproyeksi akan ikan naik 21 % pada tahun 2022
Dengan asumsi konsumsi perkapita pertahun sebesar 50 Kg, kebutuhan akan ikan NKRI disekitar 12 juta ton pertahun pada tahun 2017, pada tahun 2045 diperkirakan menjadi sekitar 16 juta ton.

Sumber OECD menyatakan bahwa pada tahun 2010 gross value-added (GVA) ekonomi-kelautan sebesar USD 1, 5 Triliun, yang berkontribusi sebasar 2.5 % dari GVA , lebih dari 3% PDB dunia, atau 5 sampai 5 % ekonomi-sejati dunia (global “real economy”) dengan 31 juta pekerja dibidang ikan-tangkap , pertambangan laut-lepas, pelayaran/perniagaan laut, pembangunan kapal, budidaya laut, turisme laut, ilmu kelautan, kesehatan laut dan keamanan kelautan dewasa ini mengalami perkembangan pada teknologi energi kelautan terbarukan, bioteknologi kelautan, pertambangan laut-dalam , pengembangan teknologi penangkapan karbon , dan ilmu pergudangan. Inovasi ekonomi-kelautan berbasis riset dan analisis versi OECD/STI dilakukan pada empat wilayah, yaitu telaah kemajuan teknologi ekonomi-kelautan, membentuk pola baru kerjasama kelautan antar negaa, mengembangkan sarana pemindaian,valuasi dan analisis ekonomi kelautan, bauran kebijakan inovatif (*policy mix*) untuk laut-lebih-hijau (greening marine) dan aktivitas maritim (*maritime activities*) dalam pengejaran kemakmuran dunia

berbasis ekonomi-kelautan sambil menjaga kesehatan ekosistem-laut (*marine ecosystem*). Andrea Borgarello , The World Bank Group, 2022, menyajikan artikel berjudul *Blue Economy* menjelaskan antara lain bahwa laut sehat (*healthy sea*) menyediakan lapangan kerja dan makanan, menjaga kesinambungan perekonomian bangsa, mengatur sudu udara dan mendukung kehidupan 50 % umat manusia yang berdomisili 100 kilimeter dari pesisir. Laut memberi sumbangan nilai tambah ekonomi sebesar USD 1.5 Triliun pertahun, sehingga menjaga kesehatan laut adalah utama. Pada tahun 2017 FAO menaksir sekitar 39 juta jiwa bekerja sebagai nelayan , 20 juta sebagai pembudidaya ikan, dengan hasil sekitar 179 juta ton ikan dan hasil-laut , 60 % dari negara berkembang, protein dikonsumsi 3,3 miliar jiwa pertahun. Bank Dunia memperkirakan kerugian maslahat keekonomian sekitar USD 80 Miliar pertahun karena pemungutan ikan melebihi daya-dukung alam cq pemulihan-alam berlebihan menyebabkan trend laut-makin-miskin ikan dari masa ke masa, mungkin (?) sebagian dapat dipulihkan oleh manajemen-perikanan, investasi budidaya air berkelanjutan, dan program proteksi habitat-nan-sukses akan mengembalikan kekayaan alam berbagai negara-berkembang , menjamin pasok-makanan, pertumbuhan PDB dan lapangan-kerja. Laut dihancurkan oleh polusi lautan akibat tingkah laku manusia yang menyebar polutan plastik dan *microplastic* sepanjang rantai-makanan (*food chain*), udara, daratan, lautan dan air hujan. Dampak pandemi pada ekonomi kelautan mencakupi perikanan-tangkap, turisme umumnya, ecotourism khususnya. Bank dunia memprakarsai dan mendorong pembiayaan manajemen limbah agar tidak membuang limbah kesungai/laut, , proses dan bisnis daur-ulang, metode produksi-bersih (clean production) dan kebijakan *carbon pricing* (berupa tagihan kepada penerbit polusi).

Ekonomi kelautan global bernilai USD 1,5 Triliun perrtahun, pada tahun 2030 menurut sumber OECD akan mencapai sebesar USD 3 sampai 5 Triliun. Inisiatif Ekonomi Biru (*Blue Economy*) adalah tentang keprihatinan aktivitas-ekonomi pada ekosistem-bahari dan upaya-bersama membangun perekonomian-kelautan nan-lestari, diturunkan dari konsep ekonomi-hijau (green economy) yang didefinisikan *United Nations Environment Programme* (UNEP) sebagai sebuah model ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan umat-manusia dan berkeadilan sosial yang berupaya menurunkan risiko lingkungan-hidup dan kelangkaan sumberdaya ekologis Terfokus pada kesejahteraan negara-negara berpantai berstatus miskin dan kesejahteraan-ekonomi nelayan-ikan di muka bumi di mana ikan-tangkap sebagai mata-pencaharian dan makanan pokok berdimensi konflik kepentingan, nilai, budaya dan aksi kolektif. Berbagai negara memasukkan gagasan ekonomi-biru pada GBHN, propenas dan APBN untuk pertumbuhan PDB dan pelestarian lingkungan-hidup. Kebijakan Laut Biru negara mencakupi (1) pengembangan / diversifikasi kegiatan-ekonomi-kelautan lestari , menghapus kegiatan-ekonomi-kelautan yang merusak ekosistem , (2) mendorong PMA/PMDN untuk sektor usaha-kelautan-lestari , (3)membangun kerjasama antar-negara bdang ekonomi-kelautan , (4) menjaga kelestarian pantai dan keanekaragaman hayati, (5) menerapkan teknologi ramah-lingkungan pada pembangunan ekonomi-kelautan, (5) mengubah budaya bangsa melalui program nasional pendidikan ekonomi-bahari , mendorong penggunaan iptek dan inovasi sarana-produktif ramah lingkungan-bahari , agar menjadi bangsa-bahari. Melibatkan pemangku kepentingan lebih luas dalam manajemen-pesisir , manajemen pelabuhan, manajemen habitat flora-fauna sepanjang pantai, mengawasi kegiatan ekonomi ekstraktif

dan produktif yang berpotensi merusak lingkungan-pesisir dan kualitas perairan, melakukan pembagian tanggung-jawab pemerintah pusat, pemda dan para-pemangku-kepentingan pro-lingkungan-lestari , mengubah budaya bangsa menjadi budaya-bahari , memilih pimpinan pemda sadar-laut bahkan akhli ekonomi-kelautan. Membangun jaringan-kerja (*network*) proteksi & pemugaran alam antar-kelembagaan dan antar-negara, menggunakan kearifan leluhur (termasuk pamali yang seringkali rasional) atau budaya lama dalam budaya mencintai alam sebagai bunda , mengangkat kearifan tersebut dalam hukum-positif bangsa, misalnya penangkapan-ikan-ilegal, dalam menjaga populasi mangrove dan berbagai jenis pohon pantai anti-abrasi, membangun sistem tanda-bahaya menyusutnya keanekaragaman hayati tertentu, kerusakan karang dan menetapkan wilayah wilayah non-hunian atau hutan-lindung , perlakuan/pendidikan untuk pembangunan kesadaran generasi muda tentang pentingnya kelestarian-alam dan kemampuan melihat degradasi lingkungan dalam bingkai waktu nanpanjang. Situs *Common Wealth*, 2021, menyajikan artikel *Blue Economy* menjelaskan bahwa Piagam Biru Pesemakmuran (*Commonwealth Blue Charter*) menjelaskan hubungan laut, perubahan iklim, dan perilaku nan-baik, ,didalamnya termasuk keikutsertaan publik dalam pengambilan keputusan kelautan dan kepesisiran, sesuai Sasaran Pengembangan Berkelanjutan PBB (*United Nations' Sustainable Development Goals* atau SDGs), khususnya SDG14 tentang "kehidupan dibawah air", yang memaksa berbagai usaha-besar bidang perkapalan, perikanan-laut, pertambangan minyak, gas, mineral dll untuk bertanggung-jawab atas dampak-negatif aktvitasnya. Negara berukuran kecil berlaut mempunyai peluang besar untuk pengembangan perekonomian berbasis ekonomi-kelautan , juga menghadapi ancaman degradasi pesisir & perairannya Pemodelan negara pesisir atau berpesisir dalam Ekonomi Biru dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan sumber-daya kelautan. Potensi pasar dan pemasaran hasil-laut terpadu dengan proteksi & pelestarian SD Kelautan terkait perubahan-iklim. Piagam Biru berhampiran terintegrasi dalam pembangunan Ekonomi Biru , sehingga mencakupi berbagai butir yang biasanya terlewatkan, seperti nelayan-tangkap-tradisional, peran wanita dan generasi muda dalam ekonomi-kelautan. Sumber lain menyatakan bahwa Negara negara Nordic mempunyai strategi kerjasama kelautan dan memposisikan sebagai negara berbasis ekonomi-kelautan terbaik dunia pada tahun 2030. Berbagai Kabinet NKRI cq Departemen Kelautan & Perikanan nan-cerdas diramalkan mengundang berkala para pakar negara-negara Nordic tersebut untuk keperluan *bencmarking*.

Artikel berjudul *Ocean Finance: Financing the Transition to a Sustainable Ocean Economy* dengan Lead Authors U. Rashid Sumaila, Melissa Walsh, Kelly Hoareau & Anthony Coxserta Contributing Authors Patrízia Abdallah, Wisdom Akpalu, Zuzy Anna, Dominique Benzaken,Beatrice Crona, Timothy Fitzgerald, Louise Heaps, Katia Karousakis,Glenn-Marie Lange, Amanda Leland, Dana Miller, Karen Sack, DurreenShahnaz, Louise Teh, Torsten Thiele, Niels Vestergaard, Nobuyuki Yagi dan Junjie Zhang menjelaskan aktivitas *Ocean Panel* sebagai sebuah LSM Kelautan sebagai berikut. LSM *Ocean Panel* didirikan dengan tujuan agar lautan-lestari memfasilitasi kehidupan manusia secara lebih baik, beranggota Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norway, Palau dan Portugal dengan dukungan Sekretaris-Jenderal PBB urusan kelautan. LSM tersebut membangun basis ilmu pengetahuan tentang kelautan yang digunakan sebagai dasar kegiatan organisasi

selanjutnya, sejalan program PBB untuk pembangunan nan-lestari versi *UN Sustainable Development Goals* atau SDG. LSM Ocean Panel tersebut berpotensi sebagai obyek *benchmarking* yang baik bagi Departemen kelautan NKRI.

Berbagai pemerintahan negara-negara berpesisir memperhatikan berbagai proyek OECD cq *The OECD project on The Ocean Economy and Innovation* dalam berbagai tema seperti eksplorasi kemajuan teknologi untuk dimanfaatkan pada ekonomi-kelautan, investigasi/menilai pola/platform kerja sama ekonomi-kelautan antar negara , untuk digunakan sebagai dasar-kebijakan ekonomi-kelautan.

Situs *Natural Resources* menyajikan artikel berjudul *13 Importance of Ocean to Economic Development* menjelaskan bahwa 71 % muka bumi adalah pemukaan air laut yang berfungsi sebagai sumber perekonomian perikanan-tangkap, ,sumber energi, wilayah pertambangan di laut, , alga (*algae*) atau ganggang antara lain rumput laut , , pemanfaatan bebatuan-kapur (*coral reef*) sebagai sebuah atau beberapa koloni habitat laut , budidaya kelautan, misalnya lobster, udang biasa dan bandeng, , bahan untuk industri garam, iodium, farmasi cq obat-obatan, , sebagai media transportasi di muka bumi cq jalan-air, sebagai sarana rekreasi cq turisme bahari, , penghasil mutiara baik dari kerang-liar atau peternakan kerang-mutiara, laut sebagai penghasil minyak bumi dan gas bumi berasal dari fosil plankton, berbagai tumbuh-tumbuhan diluar rumpun alga seperti marine grass untuk bahan baku kertas, pupuk, bahan obat, rokok, dan wilayah wisata laut , , hutan mangrove sebagai pelindung pesisir dari abrasi, hunian tetap dan/atau rumah sakit bersalin berbagai hewan laut.

2.11.2.Kebijakan Ekonomi Kelautan Global

Jane Lubchenco, Peter M.Haugan & Mari Elka Pangestu , 2020, menyajikan makalah *Five priorities for a sustainable ocean economy*, membahas tentang pemanfaatan/pelestarian laut dan keanekaragaman-hayati terkait ekploitasi destruktif, perubahan iklim, jaminan kelestarian pasok bahan makanan. Laut bertugas menyerap sekitar 90 % kelebihan panas terperangkap dalam emisi-gas-rumah-hijau (*green house-gas emissions*) dan sepertiga emisi karbon-dioksida budaya manusia, sehingga air laut menjadi lebih hangat , lebih mengandung aksid dan menurunkan kadar-oksigen pada air. Budaya kehidupan manusia dan perikanan-tangkap berlebih-batas menghandurkan tatanan alam kelautan dan pesisir. Disamping *Ocean Panel*, terdapat *Advisory Network* mencakupi 135 organisasi yang mewakili industri, lembaga keuangan dan LSM yang antara lain membahas energi-laut-terbarukan , pangan-laut atau *ocean accounting*. Lima prioritas ekonomi-kelautan nan-lestari mencakupi (1) pengelolaan/manajemen produksi pangan-laut nan-lestari , terutama ikan, hewan bercangkang (kepiting, udang , kerang, dll) dan moluska yang menyumbang 17 % pasok makanan bagi umat manusia , yang akan meningkat karena pertumbuhan penduduk mencapai 10 miliar jiwa tahun 2050, (2) mitigasi perubahan iklim dengan berbagai kebijakan perlindungan laut setara daratan, (3) kebijakan transportasi laut dan reduksi emisi-karbon , (4) kebijakan bersama untuk mengurangi kecepatan kenaikan suhu-dunia pertahun, mencegah hilangnya pokok-pokok keanekaragaman-hayati (stem) yang lenyap dengan kebijakan perlindungan species, wilayah cagar alam, (5) kebijakan larangan dan sanksi perusakan habitat, pemulihan biru (*blue recovery*) ekonomi kelautan karena pandemi terutama pada pemulihan lapangan

kerja dan turisme, manajemen pembuangan limbah ke laut, pengelolaan laut secara menyeluruh antara lain evaluasi dampak pembangunan di pesisir dan di laut pada kualitas-kehidupan-laut cq keaneka-ragaman hayati berbasis konsep manajemen-kelautan-terintegrasi (*integrated ocean management*) berbasis aksi/kebijakan terkoordinasi negara-negara berpesisir.

Emekine Ozhan, 2022, menyajikan makalah berjudul *The Ocean Economy in 2030: Blue Growth Potential as far as the Eye can See*, antara lain mengungkapkan bahwa dari sekarang sampai 2030 ekonomi kelautan akan bertransformasi menangggapi berbagai tantangan baru, berbagai industri harus menerapkan teknologi baru yang sadar lingkungan dan efisien. WWF menaksir nilai ekonomi laut sebesar USD 24 Triliun. Berbasis destruksi-kreatif ala Mazhab Schumpeterian menyikapi penangkapan-ikan berlebihan, polusi CO2 , naiknya PH dan suhu air laut. Berbagai industri kelautan akan dilarang , misalnya trawl , sejenis alat penangkap ikan perusak lingkungan. Hasil laut terbesar adalah tambang migas lepas pantai. Pada tahun 2030, konsumsi makanan hasil-laut menjadi 2 kali lipat sekarang , sebagian mengganti konsumsi daging hewan-darat , sebagian karena pertumbuhan penduduk dan perubahan selera kelas ekonomi menengah. Paris Climate Agreement memutuskan emisi CO2 harus turun 40 % pada tahun 2030 dibanding emisi tahun 2008 , dan laut akan menjadi pusat perkembangan teknologi terbesar, misalnya bertugas rekayasa industri kelautan didorong untuk menemukan kapal efisien energi, dengan pertumbuhan tahunan ekonomi-kelautan sebesar 3,7 % pertahun versi OECD.

2.11.3. Luas Laut dan Lautan NKRI

Livi, 2015, menyajikan makalah berjudul Sumber Daya Alam Laut Indonesia, antara lain mengungkapkan bahwa luas NKRI 5,0 juta km^2 , perairan nasional seluas 3,1 juta km^2, luas daratan sekitar 1,9 juta km^2, luas ZEE (*Exlusive Economic Zone*) sekitar 3,0 juta km^2, panjang garis pantai 81.497 km^2 dan jumlah pulau 17.504 pulau , dengan dimensi ekonomi kelautan berupa perikanan laut (tuna/cakalang, udang, demersal, pelagis kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 15.105.011.400. Potensi kelautan terdiri atas *mariculture* (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 567.080.000, perairan umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 1.068.060.000, budidaya tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 10.000.000.000, budidaya air tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 5.195.500.000. Potensi bioteknologi kelautan tiap tahun sebesar US$ 40 Miliar, secara jumlah potensi sumber daya perikanan Indonesia senilai US$ 71.935.651.400, dimanfaatkan sekitar US$ 17.620.302.800 atau 24,5%, belum termasuk potensi ekonomi hutan mangrove, terumbu karang serta energi terbarukan(seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energi Conversion*) serta industri jasa seperti transportasi, wisata-bahari , perhotelan , industri wisata-kuliner, sektor riil sarana ekonomi-kelautan dan jasa transportasi laut dan hub.

Kemerdekaan NKRI menyebabkan bangsa Indonesia tiba-tiba memiliki sebuah negara seluas Eropa dengan 2/3 bagian adalah permukaan laut. Pembangunan ekonomi kelautan NKRI dimulai oleh Presiden Abdurahman Wahid dengan pembentukan Kementerian

Kelautan, diteruskan oleh Presiden Jokowi, terhalang budaya agraris cq budaya pertanian darat sepanjang ribuan tahun. Isu kelautan mencakupi pendirian pangkalan militer asing di tengah laut, penangkapan ikan kapal-nelayan asing tanpa izin, munculnya pulau baru kepermukaan laut pada batas teritori antar-negara , saling klaim pulau, pembuangan polutan pada suatu teritori negara, kerjasama kelautan dengan negara tetangga, perompak laut, penggunaan satelit untuk manajemen kelautan, penyewaan pulau kepada swasta, kerusakan alam akibat kegiatan ekstarktif, penangkapan dan pembakaran kapal asing. Departemen Kelautan dan Perikanan, serta berbagai Kementerian menggunakan prinsip ekonomi-kelautan dalam membuay rencana-aksi dan berbagai kebijakan ekonomi-kelautan. Tommy Hendra Purwaka, 2014, menyajikan artikel berjudul *Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia* antara lain menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Batas wilayah laut NKRI merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementeriaan Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa Indonesia memiliki 17.449 pulau dalam sebuah wilayah wilayah sebesar 7,81 juta kilometer persegi , di dalamnya termaktub seluas Melalui jurnal 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan. Konvensi Hukum Laut PBB (KHL) pada 1982 menyatakan bahwa laut lepas menjadi perairan kepulauan yang kemudian menyatukan wilayah NKRI. Dalam KHL, batas wilayah laut Indonesia diatur karena laut merupakan salah satu bagian dari kesatuan wilayah NKRI yang merupakan wilayah kepulauan selain pulau dan udara. Selain mempertahankan kesatuan wilayah, batas laut secara hukum kemudian menjadi dasar utama pengelolaan wilayah laut Indonesia, demi terciptanya kemakmuran bangsa. Berbeda dengan data di atas, sumber lain menyatakan NKRI memiliki 18.110 pulau dengan 2/3 bagian luas negara adalah permukaan laut dengan pantai 95.181 km, berpotensi menyediakan lapangan kerja bagi 180 juta SDM. Pertama, batas laut teritorial merupakan kedaulatan perairan NKRI selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Pada batas laut wilayah Indonesia ini, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah laut, dasar laut, *subsoil* (tanah lapisan bawah), hingga udara yang ada di atasnya, dan juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia mempunyai kewajiban dalam menjamin pelaksanaan hak lintas damai berbagai pelayaran internasional melalui alur-alur kepulauan dan alur-alur tradisional yang diatur melalui pasal 49, 52, dan 53 KHL 1982. Kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi pula perairan yang ditutup oleh garis pangkal lurus kepulauan, yang ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UNCLOS 82 yang disebut dengan perairan kepulauan (*archipelagic waters*), tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara diatas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah dibawahnya, serta sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" menyebabkan di antara pulau-pulau tersebut tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia secara hukum internasional menarik garis pangkal (*baselines*) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (*the outermost points of the outermost islands and drying reefs*). Kedua, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan area perairan laut sebesar 200 mil laut yang diukur dari pangkal kepulauan atau selebar 188 mil laut jika diukur dari batas luar laut. Pada batas laut wilayah Indonesia versi ZEE, negara kita memiliki hak-hak berdaulat dalam melakukan kegiatan konservasi, eksplorasi, eksploitasi, dan juga pengelolaan SDA hayati dan non hayati yang terdapat di perairan, dasar laut dan *subsoil*. ZEE juga berarti Indonesia diperbolehkan juga untuk mendirikan bangunan laut, penelitian ilmiah terhadap kelautan, hingga

perlindungan terhadap lingkungan laut. Berbeda dengan batas laut teritorial, perairan ZEE ini memiliki status laut lepas berikut udara yang ada di atasnya. Ada kebabasan untuk pelayaran dan juga penerbangan. Hukum mengenai ZEE diatur di UU nomor 5 tahun 1980 dan Bab V pada KHL 1982. Ketiga, Menggunakan landasan kontinen (*continent shelf*) , batas wilayah laut Indonesia adalah wilayah dasar laut berikut dengan subsoil yang juga merupakan kelanjutan alamiah dari daratan-daratan pulau-pulau milik Indonesia. Terdapat dua kelanjutan alamiah, yaitu kelanjutan alamiah landai dan curam. Kelanjutan alamiah landai ditandai dengan adanya *continental slope* atau *rise*. Untuk kelanjutan alamiah curam secara tiba-tiba yang terjadi tidak jauh dari letak garis pangkal kepulauan, maka batas luar ZEE nya yaitu 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan dimana batas terluar landas kontinenya berhimpit dengan batas luar ZEE.

2.11.4.Kebijakan Ekonomi Kelautan NKRI

Target PNBP dari sektor perikanan dan kelautan pada 2022 sebesar Rp1,4 triliun, dari kinerja 2021 sebesar Rp960 miliar. Target akan dicapai dengan kebijakan penangkapan ikan secara terukur, yaitu berdasar kuota penangkapan pelaku usaha dan nelayan, untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi, berbasis prinsip ekonomi biru . Kebijakan penangkapan terukur yang ditetapkan Kementerian KP sangat sesuai untuk menjawab tantangan global mengenai tingginya praktik illegal fishing dna sebagai strategi dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Nelayan akan sejajar dengan investor, karena masing-masing memiliki kuota. Riset KKP menunjukkan bahwa kebutuhan investasi bidang kelautan dan perikanan 2021 sebesar Rp 6,02 triliun, yaitu investasi perikanan budidaya sebanyak 30 persen dan investasi pengolahan 27 persen, lalu investasi penangkapan (perikanan tangkap) serta investasi perdagangan.

Tempo.co, 2022, menyajikan makalah berjudul *KKP Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan di 2022* antara lain menjelaskan bahwa program terobosan Kementerian KKP berupa promosi peluang investasi dalam bentuk *Marine and Fisheries Business and Investment Forum* pada Maret 2022 , KKP menjelaskan berbagai peluang usaha bidang kelautan dan perikanan dan berbagai kebijakan kemudahan investasi. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur membawa berbagai peluang usaha turunan seperti penangkapan yang sistemnya akan diatur dalam zonasi dan kuota, docking kapal, kebutuhan perbekalan melaut, bahan bakar minyak, hingga jasa angkutan hasil tangkapan.

Pointer Briefing RB KKP , 24 Januari 2022 , menjelaskan rencana aksi Kementerian yang mencakupi inventarisasi/ identifikasi/analisis/pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat, penyelarasan kebijakan dengan kebijakan lebih tinggi dan kebijakan terkait lain, perubahan/ pencabutan/penggantian/penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat, bimbingan teknis Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bimbingan teknis penyusunan *Regulatory Impact Analysis*, *p*elaksanaan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat.

*Sharif Cicip Sutardjo,2014, menyajikan artikel berjudul Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan, mengungkapkan bahwa k*onsep negara kepulauan sangat besar manfaatnya bagi Indonesia, karena dapat menjadikan laut sebagai penyatu pulau-pulau serta memperluas wilayah perairan kita. Sumber daya kelautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya ikan tangkap laut sebesar 6,5 juta ton per tahun, potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar dan potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar. Selain itu laut Indonesia memiliki potensi migas dan wisata yang besar. Hasil pembangunan kelautan dan perikanan telah dapat meningkatkan PDB perikanan menjadi 6,48 % dengan nilai nominal sebesar Rp 57,69 triliun dan meningkatkan ekspor dengan surplus sebesar US$ 3,52 milyar. Selain itu juga dapat meningkatkan produksi perikanan, tingkat konsumsi ikan, produk olahan dan surplus produksi garam. Luas kawasan konservasi juga meningkat tajam, begitu juga pengelolaan pulau pulau kecil dan pengawasan. Keberhasilan pembangunan perikanan tersebut tercapai berkat program industrialisasi perikanan dengan pendekatan ekonomi biru. Kebijakan pembangunan ke depan adalah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dengan mempertimbangkan konsep negara kepulauan dan potensi kelautan yang besar.

Kebijakan pemerintah NKRI bidang kelautan & perikanan disusun berdasar Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan,Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (Revisi UU No.9 Tahun 1985 Tentang Perikanan) dan Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.NKRI menggunakan hampiran Integrated Coastal Zone Management (ICZM) atau *pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu* .

Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas , 2021 menyajikan artikel berjudul Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut. Dimulai dengan tujuan ke-14 dalam SDGs yang menyepakati ekosistem samudera, laut dan sumber daya yang terkandungnya diupayakan (dipastikan ?) agar dikelola secara berkelanjutan, kebijakan pembangunanperikanan dan kelautan Indonesia harus dilandasi dengan tekad menjaga terpeliharanya keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumberdaya laut secara bertanggungjawab. Tujuan ke-14 dalam SDGs dijabarkan secara konkrit selama lima tahun kedepan. Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan dengan basis spasial mengikuti deliniasi geografis di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Salah satu indikator pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) dibawah 80 persen *maximum sustainable yield* (MSY). Indikator tersebut mengatur keberlanjutan SDI yang dimanfaatkan agar tetap lestari. Pengelolaan perikanan

berkelanjutan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) memperhatikan ketersediaan alamiah (stok) sumberdaya merupakan target pembangunan dalam SDG 14. Upaya mencapai pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan pembangunan perikanan melalui pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) membutuhkan transformasi kelembagaan dan fungsi serta penguatan pendataan dan langkah penyempurnaan lain, bukan sekadar perhitungan stok ikan, dikelola berbasis karakteristik khusus biota, berbasis kondisi nyata/terkini biota, daya dukung sampai kondisi sosial ekonomi masyarakat masyarakat pada WPP tersebut. Pengelolaan WPP ini harus dilengkapi data dan informasi akurat sebagai prasyarat dalam menentukan model pengelolaan yang tepat (*science-based policy)*. Terkait pendekatan pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan untuk mendukung keberlanjutan sumberdaya serta pertumbuhan ekonomi di WPP, pengaturan input dan output untuk jenis tertentu menjadi faktor penting bermuara pada Kebijakan PerWPP tentang jumlah/jenis kapal dan alat tangkap , Kebijakan larangan penggunaan trawl atau cantrang, tuba dan peledak.

2.11.5.Kebijakan Perizinan dan Zona

Kebijakan perizinan mendukung rencana pertumbuhan PDB berbasis ekonmi kelautan.Izin yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan meliputi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. Setiap setiap Orang (“orang” dalam istilah hukum termasuk orang dewasa nan-mampu secara hukum, PT, Koperasi) yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan sesuai UU NO 1 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi sesuai UU. 32 Tahun 2014 Pasal 47. Berbagai izin pengelolaan yang dikeluarkan Menteri KP mencakupi Produksi Garam Bioteknologi Laut, Pengangkatan BMKT, Wisata Bahari, Pemanfaatan air laut selain energi, Biofarmakologi laut, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Kementerian membuat kebijakan zonasi, sebagai dasar untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin mencakupi Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional, Rencana Zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu, Rencana “kawasan antarwilayah” meliputi Teluk misalnya Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk Cendrawasih, Selat misalnya Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Karimata, Laut misalnya Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Sawu.

Lima kebijakan Menteri Susi Pudjiastu adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/Permen-KP/2014 yang merupakan revisi atas Nomor 30/Men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di Indonesia, untuk menghapus praktik *transhipment* atau bongkar muat barang di tengah laut. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/Permen/KP/2014 tentang disiplin pegawai aparatur sipil negara di lingkungan KKP dalam pelaksanaan kebijakan penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan di laut dan penggunaan nahkoda anak buah kapal asing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 1 Tahun 2015 soal pembatasan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan yang menghadapi kepnuahan. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia , dengan hasil pertumbuhan sektor perikanan pada kuartal akhir 2014 bisa mencapai 8,2% dan akhir 2015 naik menjadi 8,9% atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional , dan meningkat pada tahun selanjutnya. Nilai Tukar Nelayan naik dari 102 menjadi 107 pada 2015 tergantung indeks harga konsumen.

2.11.6.Kebijakan Industri Garam

Situs Kemenperin, 2020, menyajikan artikel berjudul Kemenperin Olah Strategi Tingkatkan Produksi Garam Lokal, antara lain mengungkapkan bahwa Kementerian mendorong swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan industri nasional. Impor garam sebenarnya merupakan keterpaksaan, demi menjamin kepastian pasokan bahan baku garam bagi industri dalam negeri, khususnya sektor alkali*(chlor alcali plant/CAP)*, pulp, kertas, aneka pangan, farmasi, kosmetik, dan pengeboran minyak, pada tahun 2019, nilai impor garam industri sebesar 108 juta dolar AS, sedangkan ekspor produk yang dihasilkan mencapai 37,7 miliar dolar AS. Pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas garam produksi dalam negeri, di antaranya melalui perbaikan metode produksi serta penerapan teknologi baik di lahan maupun di industri pengolah garam, dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga.ain.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi telah mencanangkan beberapa program untuk dapat meningkatkan pemanfaatan garam lokal untuk sektor industri, antara lain implementasi teknologi garam tanpa lahan yang merupakan garam dari *rejected brine* PLTU, mendorong pabrik pemurnian garam rakyat menjadi garam industri. Pemerintah merevitalisasi dan pengembangan pabrik garam farmasi oleh PT Kimia Farma dan mendayagunakan pabrik garam terbaik sebagai mitra untuk reformasi industri garam rakyat. PT Unichemcandi Indonesia merupakan salah satu industri pengolahan garam yang memasok garam sebagai bahan baku bagi industri makanan dan minuman, pengeboran minyak, perusahaan memproduksi garam konsumsi beriodium dalam negeri dengan metode pencucian *(washing salt)* dan juga metode rafinasi *(refine salt).* Partisipasi PT terfokus pada

berbagai upaya pemerintah untuk subtitusi impor garam, pengolahan garam lokal menjadi garam konsumsi maupun garam industri. Belanja APBN mulai mempertimbangkan pabrik pemurnian (*refinery*) garam pada berbagai BUMN Garam dan di berbagai tempat strategis, antara lain pulau Madura, untuk mendukung perekonomian rakyat cq industri garam rakyat. Kementerian Kelautan mengalokasikan belanja bantuan bagi para petani garam untuk perbaikan tanggul, pemadatan tanah, dan gudang sementara, serta bantuan sarana, antara lain pompa, mesin dan lainnya secara adil merata di seluruh pulau penghasil garam.

2.11.7. Kebijakan Tol Laut

Terdapat berbagai upaya penyatuan sejati NKRI, antara lain Tol Laut gagasan Presiden Jokowi. Perwujudan negara maritim dengan transformasi budaya pertanian-darat ke budaya maritim-kelautan adalah tidak mudah permasalahan tidak mudah. Pada awalnya inisiatif Jokowi yang tertuang dalam *RPJMN 2015-2019 dan Implementasi 2015*, strategi pembangunan tol laut bertujuan membangun negara kesatuan nyata berbasis transportasi laut (*space shrinking strategy*) , memanfaatkan *global trade flow* (40 % melewati wilayah Indonesia) dengan membangun Indonesia sebagai salah-satu poros maritim dunia, meningkatkan indeks-dayasaing-global, pengembangan perekonomian berbasis logistik dan perdagangan domestik & internasional lewat-laut, strategi jaringan pelabuhan dengan pembangunan 24 pelabuhan strategis pendukung-tol laut , pelabuhan sebagai hub dan feeder, penerapan konsep rute pendulum, modernisasi pelayaran dan penangkapan-ikan rakyat, ASDP dan pengangkutan laut jarak pendek, modernisasi pelayaran dan penangkapan-ikan rakyat untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, ASDP dan pengangkutan laut jarak pendek untuk saluran industri kewilayahan/kepulauan, pariwisata, pemasaran hasil-bumi dan/atau komoditas-wilayah terfokus pada pelayaran dari Indonesia Bagian Timur sebagai penghasil/penjual menuju Indonesia Bagian Barat sebagai pasar, meningkatkan perdagangan antar-pulau.

M Ambari, 2019, menyajikan artikel berjudul *Seperti Apa Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Kedaulatan Maritim?*, menguraikan berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kebijakan kelautan cq diplomasi kelautan mencakupi perlindungan kedaulatan wilayah nasional, kesejahteraan dan keterhubungan, stabilitas kawasan dan global, serta pembangunan kapasitas ekonomi-kelautan nasional. Kementerian Perhubungan bertugas mengelola dan mengawasi lalu lintas kapal-kapal asing, baik kapal dagang ataupun perikanan yang melintas di perairan Indonesia dengan sistem alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dengan alat yang dibuat oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Bagi Sekretaris Jenderal KIARA ; Susan Herawati, dalam membangun poros maritim dunia, Indonesia harus membangun lima pilar utama sebagai dasar berpijak, yaitu (1) membangun budaya maritim Indonesia; (2) menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; (3) memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim, (4) diplomasi maritim melalui peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan,

sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa/negara dan (5) membangun kekuatan maritim sebagai perlindungan keselamatan pelayaran/keamanan maritim.

Sapto Andika Candra , 2020, menyajikan artikel berjudul *Efektifkan Tol Laut, Insentif Industri di Timur Ditambah*, menguraikan antara lain bahwa sumbangan transportasi laut terhadap PDB nasional pada tahun 2019 sebesar 0,32 persen, menurun dari tahun 2014 sebesar 0,34 persen, kontribusi transportasi darat terhadap PDB yakni sebesar 2,47 persen dan transportasi udara sebesar 1,62 persen pada 2019. Berbagai kebijakan ekonomi-kelautan mencakupi *tax holiday* untuk industri makanan di Indonesia Timur (20 tahun) lebih panjang , agar Indonesia Timur melepas ketergantungan pasok bahan makanan dari Indonesia Barat , , menekan disparitas harga antar-wilayah , menekan biaya logistik nasional dari pelabuhan ke pelabuhan sampai ke lokasi penerimaan akhir, mengupayakan pemenuhan angkutan kapal kosong dari Indonesia Timur ke Barat dengan membangun hubungan pusat-pusat produksi di Timur dengan trayek kapal menuju Barat. Pemerintah juga mensubsidi untuk meningkatkan efektivitas 26 trayek , memperketat pengawasan distribusi barang agar nirmonopoli dan berdampak buruk meningkatkan harga pasar. Presiden meminta investigasi , mengapa biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura.

2.11.8.Kebijakan PNBP Kelautan

Luas Indonesia seluruhnya 5.193.250 km², luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² dengan kontribusi pertanian pada PDB sekitar 12 % PDB, kehutanan menyumbang 1, 2 % PDB, luas lautan sekitar 3.273.810 km² dengan kontribusi sektor kelautan & perikanan sekitar 3,7 % PDB . Menteri KKP Trenggono menyatakan bahwa hasil PNBP perikanan akan disalurkan kembali untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia,antara lain pembangunan/perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, jaminan sosial kepada nelayan dan ABK, sarana dan prasarana pelabuhan modern untuk meningkatkan daya-layan pada kapal-kapal nelayan. Sumber Depkeu 2019 menyatakan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional sekitar 2% setiap tahunnya, 2,32% di tahun 2014 dan 2,6% di tahun 2018 dengan nominal yang terus meningkat dari Rp.245,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.385,9 triliun pada tahun 2018. Kontribusi PNBP PHP terhadap penerimaan negara pada tahun 2017 sekitar Rp.491,03 miliar dan di tahun 2018 turun menjadi Rp.448,03 miliar.

2.12. Kebijakan Ekonomi Kehutanan

2.12.1. Teori Ekonomi Kehutanan

Pada awal tahun 2022, Kabinet mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) , dan 192 unit perizinan terkait penguasaan lahan kehutanan dan HGU Perkebunan seluas 3.126.439,36 hektare atau 3 % luas hutan NKRI. Hasil ekspor produk kehutanan disekitar USD 12 Miliar pertahun mungkin akan menuju USD 15 Miliar pertahun, dewasa ini menduduki peringkat kedua penyumbang APBN terbesar

setelah Ekspor Migas. Hasil hutan utama di NKRI adalah produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, produksi HHBK dan berbagai produk kehutanan non-kayu.

Wahyu Wiriadinata , 2012, menyajikan artikel berjudul Kehutanan Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Ekosistem dan Hukum antara lain menguraikan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat , mencakupi hutan seisinya, antaralain 11 % spesies tumbuhan yang terdapat di permukaan bumi, 10 % spesies mamalia dari total mamalia di muka bumi, dan 16 % spesies burung dimuka bumi. Komoditas kayu hasil hutan merupakan salah satu komoditas paling stabil di pasar dunia, dengan harga jual cenderung meningkat sesuai hukum pasok-permintaan pasar berbasis kelangkaan kayu.

Aspek GCG pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan,.setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak minimum tertentu dari tepi waduk atau danau, tepi mata air, kiri kanan sungai di daerah rawa, sungai,anak sungai, tebing, jurang,pasang surut laut, membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang; menerima, membeli/menjual, menerima tukar/titipan/ menyimpan/ memiliki hasil hutan tidak sah dll. Aspek ekonomi-kerakyatan sesuai UUD , bahwa bumi/alam NKRI dan seisinya digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat , adalah kebijakan pembentukan sebuah *sistem pengelolaan Hutan lestari* yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai *pelaku utama* untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan sesuai PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ps. 1 .

Ilmu ekonomi-kehutanan bersanding dengan ilmu ekonomi-kelautan berada di bawah payung ilmu ekonomi lingkungan. Ilmu ekonomi kehutanan pada awalnya menjelaskan batasan ekonomi kehutanan dan ekonomi sumber daya hutan, pengertian hutan dan kawasan hutan Ilmu tersebut mencakupi pengetahuan akan sifat khusus ekonomi produksi kayu, ruang lingkup kehutanan dan ilmu pengurusan/manajemen hutan yang mencakupi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian, pelatihan, penyuluhan kehutanan dan ilmu pengawasan terhadap pengusahaan hutan. Ilmuwan wajib menguasai konsep penilaian ekonomi SDH yang mencakupi konsep nilai hutan terkait konsep nilai, keragaman nilai SDH, nilai hutan sebagai sebuah ekosistem, penggunaan/maslahat penilaian SDH dan berbagai jenis metode penilaian hutan dalam tataran ketepatan identifikasi nilai guna (*use value*) dan nilai non-guna (non-use value) .Ilmu tersebut

mencakupi preferensi waktu dalam pengusahaan hutan, menguraikan teori preferensi waktu, teori risiko, ketidakpastian dan harapan dan teori suku bunga. Ilmu tersebut mencakupi ilmu manajemen hutan lestari umumnya, berbagai konsep khusus tentang THPB (Tebang Habis Permudaaan Buatan), THPA (Tebang Habis Permudaaan Alami) dan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia).
Ilmu tersebut mencakupi evaluasi mekanisme pengaturan produksi hasil hutan kayu yang mencakupi pemahaman tentang pengaturan etat luas, pengaturan etat volume, MAI (*Mean Annual Increament*) dan AAC (*Allowed Annual Cut*). Ekonomi kehutanan mencakupi analisis pemanenanhasil hutan, analisis marjinal pemanenan kayu yangmenjelaskan prinsip marjinal, mencakupi pemahaman tentang kayu atau pohon marjinal. Pengetahuan tentang kedudukan ekonomi kehutanan mencakupi teori permintaan dan penawaran, konsep konsumen dan produksi hasil hutan, pengertian pasar dan harga, elastisitas permintaan kayu dan non kayu, penawaran atau pasok jangka panjang dan jangkapendek produksi kehutanan. Konsep ekonomi diterapkan dalam menilai lahan, modal dan tenaga kerja kehutanan mencakupi pemahaman nilai ekonomi lahan,nilai ekonomi modaldan nilai ekonomi tenaga kerja. Ilmu pengambilan keputusan dalam investasi kehutanan , sumberdaya lahan dan pertumbuhan tanamanmencakupi analisis investasi kehutanan antara lain mencakupi konsep NPV, BCR, IRR, Pay Back Period, harga bayangan dan *discount factor*. Ilmu ekonomi kehutan pada akhirnya mencakupi aspek evaluasi ekonomi kehutanan , antara lain jasa lingkunganh hutan, pemanasan global, kebakaran hutan, illegal logging dan konservasi keanekaragaman hayati.

2.12.2. Kebijakan Ekonomi Kehutanan

Kebijakan ekonomi kehutanan berbasis sumbangan fiskal ekonomi kehutanan, ilmu ekonomi-regional, ilmu ekonomi-lingkungan dan ilmu ekonomi-SDM terfokus pada sasaran (1) hutan lestari melalui berbagai kebijakan pencegahan/penjagaan hutan terhadap risiko degradasi kualitas hutan terfokus pada hutan produksi , belanja APBN untuk SDM polisi-hutan & iptek cq penginderaan-jauh berbasis satelit untuk deteksi pelanggaran & kebakaran, alokasi tahunan APBN restorasi hutan terdegradasi dan sebaliknya , berupa (2) berbagai kebijakan untuk meningkatkan sumbangan ekonomi-kehutanan kepada PDB, antara lain kebijakan investasi ramah-lingkungan & sosial, kebijakan penguatan SDM pelaku ekonomi kehutanan, pembentukan pasar hasil hutan dan berbagai kebijakan fiskal propertumbuhan.

Proporsi hutan terhadap total luas lahan dimuka bumi turun dari 31,9 persen pada 2000 menjadi 31,2 persen pada 2020, sehingga sekarang luas hutan di bumi menjadi sekitar 4,1 miliar *hectare*. Luas hutan NKRI sebesar 95,6 juta hektare atau 51 persen luas daratan NKRI, pada tahun 2020 jenis hutan terdiri dari sekitar 46,9 juta hektare adalah hutan primer, 43,1 juta hektare hutan sekunder dan 5,4 juta hektare hutan tanaman. Wilayah pesisir Indonesia terdiri dari hutan payau dengan luas ±10 juta km^2, hutan mangrove ±3,6 juta km^2 dan tambak dengan luas ± 438.010 ha.Daratan non-hutan sekitar 92,1 juta hektare ,didalamnya termaktub 10,52 juta Hektar lahan pertanian (versi BPS 2021) menghasilkan gabah-kering sekitar 54,6 juta ton. Lahan pertanian tersebut menghasilkan sekitar 30 ton bahan makanan pertahun bagi sekitar 272 juta penduduk Indonesia.

Diatas telah di bahas tentang Kebijakan Perhutanan Sosial sesuai UUD , bahwa bumi/alam NKRI dan seisinya digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat , adalah sebuah *sistem pengelolaan Hutan lestari* yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai *pelaku utama* untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. *(PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ps. 1)* . Pada awal tahun 2021, luas hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial menjadi 7.855.437,72 hektare, dengan izin total secara keseluruhan 9.785 SK, dengan 133 SK diantaranya adalah hutan adat , atau sekitar 8 % dari seluruh hutan NKRI seluas hampir 100 juta Hektare, sangat membutuhkan supervisi BPK /BPKP dan kebijakan pengarahan Kementerian .

Insentif fiskal dari Kementerian Keuangan berupa keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), serta pengurangan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan dari areal IUPHHK RE diperlukan untuk mendorong pelaksanaan IUPHHK RE setara kebijakan belanja pajak.

Kepala Pusat Humas Kehutanan, 2012, membuat Siaran Pers menjelaskan bahwa kontribusi ekonomi-kehutanan bagi pertumbuhan PDB Indonesia tertinggi kedua di dunia , menguraikan bahwa kontribusi sektor Kehutanan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat desa sehingga mereka mempunyai daya beli yang tinggi, meningkatkan konsumsi rakyat pedesaan , dan memberi kontribusi pertumbuhan sekitar 4% dari pertumbuhan Nasional sekitar 6,5%.Pada era tahun 2012, beberapa kebijakan Kemenhut terkait dalam penciptaan lapangan kerja adalah pemberian akses legal kepada rakyat di pedesaan dengan cara mengusahakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) sehingga masyarakat pedesaan mempunyai lapangan kerja secara terus menerus sepanjang tahun yang tidak perlu keahlian pada kegiatan usaha Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sepanjang tahun melalui anggaran APBN rata-rata Rp. 2,6 triliun. Terdapat usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 232 unit seluas 9.778.734 ha, dengan rata-rata penanaman seluas 500.000-600.000 ha pertahun menghasilkan berbagai pekerjaan di desa sepanjang tahun berupa pekerjaan persemaian, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran. Disediakan dana sebesar Rp. 2,5 triliun untuk kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Rakyat (HR), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan kredit dana bergulir melalui BLU. Realisasi penyaluran dana tersebut menyebabkan Pembangunan HTR meningkat. Akses legal izin wisata alam juga diberikan oleh Kementerian Kehutanan pada masyarakat melalui Permenhut P.48/Menhut-II/2010 dimana rakyat tidak hanya menjual souvenir atau transportasi saja, tapi juga sebagai pengelola/manajemen usaha wisata alam. Upaya kemudahan legislasi kayu rakyat dilakukan dengan memberi wewenang penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) oleh Lurah/Kades,bahkan untuk kayu sengon, cukup dengan Nota

Penjualan tanpa SKAU. Bupati mendapat wewenang mengatur investasi rotan, sagu, getah, biji dan madu sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Biro Hubungan Masyarakat, KLHK menyajikan dokumen beridentifikasi Nomor: SP. 244/HUMAS/PP/HMS.3/08/2021, 2021, menyajikan artikel berjudul Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Nasional Tetap Meningkat di Masa Pandemi, antara lain menjelaskan bahwa kinerja sub sektor kehutanan pada kuartal pertama dan kedua Tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada Tahun 2020. Peningkatan tersebut meliputi produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, produksi HHBK dan nilai ekspor produk kehutanan. Produksi kayu bulat baik dari Hutan Alam (HA) maupun Hutan Tanaman (HT) berada pada kisaran 45 juta meter kubik petahun, karena pada kuartal kedua Tahun 2020 yaitu 11,56 juta meter kubik, menjadi 12,8 juta meter kubik pada kuartal kedua Tahun 2021, artinya meningkat 10,74 persen. Sementara, produksi kayu olahan kuartal pertama Tahun 2021, mengalami peningkatan 5,94% dibanding 2020, dan pada kuartal kedua relatif sama dengan tahun lalu. Nilai ekspor produk kehutanan secara akumulatif meningkat 70,33 persen, dimana pada kuartal kedua Tahun 2020 yaitu USD 2,59 juta, menjadi USD 4,41 juta pada kuartal kedua Tahun 2021. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada kuartal kedua Tahun 2020 yaitu 130 ribu ton, dan kuartal kedua tahun 2021 yaitu 192 ribu ton, secara akumulatif kuantitas meningkat 47,60 persen.

Untuk percepatan peningkatan pertumbuhan sub sektor kehutanan, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain relaksasi kebijakan fiskal, percepatan implementasi UUCK dan turunannya, serta fasilitasi pembiayaan sertifikasi legalitas kayu untuk UMKM industri hasil hutan dan hutan rakyat. Selain itu, pemerintah cq KLHK melakukan promosi & kerjasama perdagangan, menerapkan pelayanan berbasis digital kepada pelaku usaha.

KLHK (1) melanjutkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan menjaga produktifitas dan keberlangsungan usaha, antara lain melalui penguatan insentif kebijakan fiskal,(2) melakukan percepatan Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, (3) meningkatkan peran dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan berbasis *agroforestry* dalam rangka peningkatan produktifitas hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Perhutanan Sosial antara lain Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan kemitraan, untuk mendukung industri pengolahan hasil hutan dan industri lainnya. Keempat, meningkatkan pelayanan pemanfaatan hutan berbasis digital yang terintegrasi mulai dari Perencanaan, Produksi, Pembayaran PNBP, Peredaran, Pemasaran hingga Ekspor melalui penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SI-PHPL).

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM. (Plt. Direktur Jenderal PHPL, KLHK) melalui situs FakultasKehutanan UGM ,2020, menyajikan artikel berjudul Mendongkrak Pertumbuhan 2020 melalui Transformasi Ekonomi Kehutanan, antara lain menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan 3 strategi ekonomi-kehutanan yang mencakupi (1) penguatan neraca perdagangan guna meningkatkan kinerja ekspor hasil hutan, (2) penguatan permintaan domestik melalui peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat akan hasil

hutan, dan (3) transformasi struktural melalui revitalisasi industri pengolahan berbasis sumberdaya alam cq hasil hutan berhampiran hilirisasi produk dan komoditas. Dengan luas pemanfaatan hutan produksi (HP)yang mencapai 30,6 juta hektar, terbukalah semua peluang dan kemungkinan pengembangan ekonomi-kehutanan. Izin konsesi HTI sebanyak 293 unit seluas 11.3 juta hektar, izin konsesi Hutan Alam (HPH) sebanyak 255 unit seluas 18.7 juta hektar, izin konsesi Restorasi Ekosistem (RE) sebanyak 16 unit seluas 622.861 hektar. Strategi transformasi ekonomi kehutanan dilakukan dengan peningkatan investasi untuk penimngkatan produktivitas hutan produksi, meningkatkan kinerja ekspor melalui pertambahan nilai (value added) dan daya saing produk hasil hutan industri pengolahan hulu dan hilir dengan kebijakan penganekaragaman produksi hasil hutan baik kayumaupun nonkayu, jasa lingkungan dan wanawisata. Strategi ekonomi kehutanan mencakupi manajemen jarak, penyatuan hulu-hilir, , dengan kebijakan mendekatkan hutan dan industri produksi hasil hutan dan ekspor hasil hutan,melalui kemudahan perizinan industri pengolahan. Pemegang konsesi HTI dapat memperoleh izin usaha industri hasil hutan kayu pada wilayah konsesi hutan, penggunaan bio-energi berbasis kayu tanaman, penganekaragaman produk ,antara lain industri serpih kayu, wood pellet, arang kayu, biofuel, dan biogas sesuai konsep TRI SAKTI versi Presiden Jokowi. KLHK membuat kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan HHBK, pemegang konsesi HTI yang menghasilkan produk samping berupa HHBK dapat memperoleh izin usaha industri pengolahan HHBK antaralain pengawetan/pengolahan rotan, bambu dan sejenisnya, pengolahan pati, tepung, lemak dan sejenisnya, pengolahan getah, resin, dan sejenisnya, pengolahan biji-bijian, pengolahan madu, pengolahan nira, minyak atsiri, industri karet remah (crumb rubber). Pemerintah mendorong kerjasama kemitraan antara korporasi pemegang HTI dengan masyarakat desa hutan untiuk membangun industri pengolahan hasil pengembangan agroforestri skala kecil dan menengah dalam areal kerjanya. Kebijakan meredam konflik masyarakat desa dengan pemegang HTI berbasis dua skema, pertama, berbagi manfaat melalui kerjasama kemitraan perusahaan dengan masyarakat, kedua, pemerintah melakukan addendum izin konsesi HTI, menjadi skema HTI Mini berskema HTR, dimana pemegang konsesi HTI bisa menjadi pembeli kayu hasil HTR milik masyarakat.

Pada tahun 2020, untuk percepatan peningkatan pertumbuhan sub sektor kehutanan, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain (1) relaksasi kebijakan fiskal, (2) percepatan implementasi UUCK dan turunannya,(3) memfasilitasi pembiayaan sertifikasi legalitas kayu untuk UMKM industri hasil hutan dan hutan rakyat, (4) melakukan promosi perdagangan dan kerja sama dengan mitra dagang, serta (5) menerapkan pelayanan berbasis digital kepada pelaku usaha.

Sektor kehutanan memberi sumbangan sekitar 1,2 % PDB.

2.12.3.Kebijakan Perizinan dan Tata Ruang

Penyederhanaan perizinan , kepastian kawasan usaha, kepastian waktu usaha atas investasi baru sektor hulu kehutanan melalui peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung,reformasi timber management menjadi landscape management, perluasan izin berusaha tidak hanya sebatas kegiatan ekstaktif /agrikultur kayu semata, tetapi dapat

sekaligus dengan HHBK, Wisata Alam, Agroforestry, Silvopastura, silvofishery. Optimalisasi pemanfaatan dan produktivitas Hutan Produksi (HP) bertujuan meningkatkan PNBP sektor kehutanan. APHI membentu pemerintah pada bidang penciptaan lapangan kerja sektor kehutanan,strategi investasi sektor hulu kehutanan padat karya, pembangunan kehutanan secara lestari dalam era Pengelolaan Hutan 4.0 Indonesia Maju, dengan target ekspor tahunan mungkin sampai USD 15 Miliar.

2.13.Kebijakan Ekonomi Agraria

Negara maju ekonomi berciri sukses industrialisasi, termasuk industrialisasi agrikultur berbasis teknologi canggih. Ardiansyah Fadli, 2021, menyajikan artikel pada Kompas.com, berjudul Pemerintah menargetkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 9 juta hektar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menguraikan bahwa legalisasi aset tanah Kementerian ATR telah melampaui target mencapai 155,4 persen atau 6,99 juta hektar, redistribusi tanah baru mencapai 29,32 persen atau 1,37 juta hektar. Pada pada tahun 2025 semua bidang tanah diharapkan sudah selesai terdaftar sehingga bila semua bidang terdaftar, terjadi kepastian hukum bahwa tanah tersebut telah/belum dimiliki oleh seseorang, sehingga (1) kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah terwujud, (2) pembagian lahan pertanian kepada petani nirlahan atau petani gurem menjadi lebih dipastikan.

Gagasan Nawacita atau sembilan cita-cita versi kontestan Jokowi-JK saat pemilu menjadi dasar utama reformasi agaria Kabinet Kerja 2014-2019, bahwa hutan dan lahan pertanian untuk kepentingan rakyat desa. Pada bulan April tahun 2017 Presiden telah mencanangkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, dengan bertumpu kepada tiga pilar besar, yaitu penyediaan lahan, penyediaan kesempatan berusaha, dan peningkatan keterampilan. Ketiga pilar tersebut dilaksanakan terutama melalui program Reforma Agraria. Salah satu instrumen penting dalam penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria adalah melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Instrumen lain kebijakan Pemerintah yang menjadi pendukung dalam pemerataan dan keadilan ekonomi adalah melalui program Perhutanan Sosial. Beradasarkan Permen LHK Nomor 83 tahun 2016 program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan, Pengembangan Hutan Rakyat dan pemberian akses pembiayaan melalui pinjaman dana bergulir untuk meningkatkan modal dan akses pasar , APBN/D Belanja infrastruktur jalan& irigasi, prasarana pascapanen, pendidikan dan pelatihan, kredit usaha, serta pendampingan pemasaran. Prinsip dasar Reforma adalah keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.

Reformasi Agraria sejak tahun 2014 untuk 9 juta Ha lahan dari luas daratan NKRI sebesar 1.919.440 Kilometer Persegi, adalah program penataan aset (*asset reform*) ditambah penataan akses (*access reform*) berupa kebijakan penunjang paska-pembagian tanah seperti kebijakan APBN bantuan keuangan & bantuan prasarana pertanian, kebijakan pelatihan budidaya, kewirausahaan & pemasaran bagi petani, program/kebijakan mengurangi jumlah/potensi konflik pertanahan dengan reformasi/perubahan (1) hukum/kebijakan agraria tentang tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah ,

(2) program / kebijakan untuk mengatasi kelambanan dan ketidakadilan keputusan-hukum sengketa tanah. Program penataan aset adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset disertai Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , pemerintah melakukan reformasi agraria. Kementerian KLH, 2020, menyajikan berita berjudul Pemerintah Tetapkan Pola Penyelesaian PPTKH di 54 Kabupaten atau Kota, antara lain mengungkapkan bahwa pemerintah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Tahap III untuk objek PPTKH seluas 377.310,5 hektare pada 54 Kabupaten/Kota dalam 15 Provinsi sesuai rekomendasi Gubernur. Pada tahun 2020 dibentuk pula berbagaI kebijakan pola perubahan batas kawasan hutan, perhutanan sosial, tukar menukar kawasan hutan, dan Penyelesaian-ulang (*resettlement).* Pada tahun 2019 dilaksanakan Rakor Tim Percepatan PPTKH Tahap I dan II untuk membentuk pola penyelesaian PPTKH di 130 Kabupaten/Kota dengan total luas 330 ribu hektare. Untuk 130 Kabupaten/Kota tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan 65 Surat Keputusan (SK) Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA (SK Biru) pada 64 Kabupaten/ Kota, seluas 88.904,33 hektare, yang tidak berhenti pada penerbitan SK Biru, tetapi dilanjutkan melalui penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Proyek Strategis Nasional (PSN) bertujuan pemerataan/penguatan ekonomi rakyat melalui program Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, serta Peremajaan Perkebunan Rakyat. Tujuan Program Reforma Agraria, termasuk PPTKH adalah mencipta daya ungkit (*leverage*) terhadap kelesuan kondisi perekonomianan era-pandemi , terfokus pada kesejahteraan rakyat kecil pedesaan, petani, pekebun, dan nelayan, yang memperoleh tanah sebagai modal usaha produktif, bantuan modal usaha, sarana dan prasarana produksi, akses pemasaran, serta pendampingan usaha. Redistribusi TORA dari kawasan hutan, termasuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan dan tata batas persil tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat hak tanah untuk masyarakat dilakukan Kementerian LHK dengan Kementerian ATR/BPN berbasis Peraturan Bersama atau Permenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional mendukung pelaksanaan PPTKH sebagai bagian dari program redistribusi tanah negara bagi masyarakat kecil yang perlu dipercepat sebagai perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan. PPTKH juga menjadi salah satu sumber TORA untuk diredistribusikan /dibagikan-ulang kepada masyarakat melalui program Reforma Agraria. Proyek Strategis Nasional (PSN) bertujuan pemerataan/penguatan ekonomi rakyat melalui program Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, serta Peremajaan Perkebunan Rakyat. Tujuan Program Reforma Agraria, termasuk PPTKH adalah mencipta daya ungkit (*leverage*) terhadap kelesuan kondisi perekonomianan era-pandemi , terfokus pada kesejahteraan rakyat kecil pedesaan, petani, pekebun, dan nelayan, yang memperoleh tanah sebagai modal usaha produktif, bantuan modal usaha, sarana dan prasarana produksi, akses pemasaran, serta pendampingan usaha. Redistribusi TORA dari kawasan hutan, termasuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan dan tata batas persil tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat hak tanah untuk masyarakat dilakukan Kementerian LHK dengan Kementerian ATR/BPN berbasis Peraturan Bersama atau Permenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional mendukung pelaksanaan PPTKH sebagai bagian dari program redistribusi tanah negara bagi masyarakat kecil

yang perlu dipercepat sebagai perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan. PPTKH juga menjadi salah satu sumber TORA untuk diredistribusikan /dibagikan-ulang kepada masyarakat melalui program Reforma Agraria.

Reformasi Agraria adalah sebuah program memecahkan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan & kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah serta pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa , dengan tingkat kesulitan tinggi pada aspek pelaksanaan , penuh konflik kepentingan (termasuk kepentingan materi) yang perlu didampingi BPKP Wilayah , BPK Wilayah dan KPK Wilayah.

Syarif Hasan Salampessy , 2022, menyaijkan artikel berjudul Reforma Agraria Jadi Ujung Tombak Pembangunan Ekonomi Reforma Agraria diprioritaskan selain Perhutanan Sosial serta Peremajaan Perkebunan Rakyat, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut. Kementerian ATR/BPN bertugas sebagai pelaksana Reforma Agraria melalui GTRA di seluruh wilayah. Kementerian ATR/BPN memang bertugas untuk melakukan pendaftaran tanah milik rakyat, namun Kementerian ATR/BPN juga perlu memikirkan bagaimana sertifikat tanah tersebut dapat berperan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan Kebijakan Akses Salah satu bagian dari Reforma Agraria adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, dengan output sertifikat tanah bagi kesejahteraan masyarakat agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh 25-30% melalui strategi pemberdayaan cq pendampingan awal usaha, operasional dan pemasaran.Reforma Agraria merupakan kerja bersama, untuk melaksanakannya Kementerian ATR/BPN bersinergi dari berbagai pihak melalui GTRA sebagai wadah kerja bersama antara Kanwil BPN Provinsi, Pemerintah Provinsi, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi. Kementerian ATR/BPN bertugas untuk melakukan pendaftaran tanah milik rakyat, dan bertugas agar sertifikat tanah tersebut dapat berperan meningkatkan perekonomian masyarakat.Salah satu bagian dari Reforma Agraria adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, melalui program penyediaan data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai dasar kegiatan redistribusi tanah , legalisasi aset, pemberdayaan masyarakatdan penyelesaian konflik dengan output sertifikat tanah bagi kesejahteraan masyarakat agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh 25-30% melalui strategi pemberdayaan cq pendampingan awal usaha, operasional dan pemasaran.Reforma Agraria merupakan kerja bersama, untuk melaksanakannya Kementerian ATR/BPN bersinergi dari berbagai pihak melalui GTRA sebagai wadah kerja bersama antara Kanwil BPN Provinsi, Pemerintah Provinsi, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi.

2.14. Kebijakan Ekonomi Pertanian.

Sektor pertanian menyumbang sekitar 12 % PDB. Kebijakan pemberdayaan Ekonomi Kelautan dan Ekonomi Pertanian berbasis perubahan budaya bangsa yang berada pada

wilayah Kementerian Sosial , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan budaya sulit dilakukan dalam sebuah bingkai waktu kabinet atau seorang presiden . Ekonomi kelautan menuntut budaya kelautan yang terbiasa hidup di air dan menghadapi sifat laut tak menentu dan ganas , yang bertolak belakang dengan dunia tenteram dan damai agraria/pertanian , sementara ekonomi pertanian menghadapi fenomena bahwa (1) generasi milenial putra-petani tak bercita-cita menjadi petani , (2) kecenderungan umum masyarakat mengonversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Terdapat gejala konversi sawah menjadi sarana nonpertanian , menyebabkan lahan sawah menyusut dari tahun ketahun. Terdapat tren keengganan putra keluarga petani untuk berprofesi sebagai petani, terdapat tren keengganan para putri desa menikah dengan pemuda petani. Terdapat kesadaran akan paradigma baru bahwa modernisasi/mekanisasi pertanian perlu diterapkan bagi petani milenial yang tak bersedia mencangkul sawah. Menurut BPS, produksi beras NKRI tahun 2018 sebesar 59,2 juta ton , tahun 2019 54,6 juta ton dan tahun 2020 sebesar 54,65 juta ton. Konsumsi beras dalam rumah tangga per kapita cenderung menurun yakni dari 107,71 kg/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi 93,78 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 . Luas lahan sawah untuk padi sebesar 8,2 juta hektar pada 33 provinsi, dengan delapan provinsi andalan yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Terdapat pula sembilan provinsi utama dan 16 provinsi penyangga. Kementan juga mempunyai lima Cara Bertindak (CB) tambahan selain MT I dan MT 2. Pada CB 1 , Kementan melakukan pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah sebesar 164 ribu hektar.

Sumber Bisnis.Com, 2021 , menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa stok beras Indonesia pada 2021 dalam kondisi aman. Menurut BPS, Indonesia tercatat mengimpor beras Japonica, Basmati, serta Jasmine sebanyak 24.081 ton selama periode Januari sampai September 2021, impor beras ketan tercatat berjumlah 15.850 ton pada periode yang sama, beras Hom Mali sebanyak 600 ton, dan beras kukus sebanyak 359,98 ton. Impor beras untuk kebutuhan industri berupa impor beras pecah sampai September 2021 mencapai 252.376 ton dengan nilai US$107,61 juta.

Berbagai kebijakan ketahanan pangan mencakupi kemudahan perizinan , sinergi badan pangan nasional dengan BUMN untuk distribusi pangan pasca panen, pembentukan kerja sama pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), kebijakan stabilisasi harga , stabilisasi pasok pangan, pengembangan Kawasan Hortikultura Orientasi Ekspor, pengembangan sawit rakyat, pengembangan usaha peternakan terintegrasi, serta pengembangan korporasi petani dan nelayan. Penyaluran KUR di sektor pertanian berperingkat kedua terbesar dalam KUR sektor produksi sebesar 30,1% setelah sektor perdagangan sebesar 44,7%.

Salah satu program Kementerian Pertanian adalah Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, sedang kegiatan utama BKP adalah program pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, program pemantapan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, dan program pemantapan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.

Strategi Badan Ketahanan Pangan antara lain adalah strategi Penguatan ketersediaan pangan, strategi Penguatan aksesibilitas pangan, dan strategi Penguatan pemanfaatan pangan. Program pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan meliputi Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Diversifikasi pangan, Analis situasi, kebutuhan dan pola konsumsi pangan, Penguatan keamanan dan mutu pangan segar. Program pemantapan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan meliputi Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui skema penyaluran/distribusi bahan pangan oleh PMT/TTIC/TMT/TTI, Sistem logistik pangan nasional, Fasilitas distribusi pangan, Go Digital Marketing, Panel harga pangan pokok strategis, dan Monitoring stok pangan di pedagang dan penggilingan.

Situs Gerbang Nasional, 2022, menyajikan artikel Program dan Kebijakan Ditjen PSP Tahun 2022, antara lain mengungkapkan bahwa pembangunan pertanian yang maju mandiri dan modern dilengkapi berbagai kebijakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas, pertanian rendah biaya, mekanisasi dan research dan ekspansi pertanian. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo(SYL) menyebut di tahun 2022 inovasi dan teknologi menjadi kunci pembangunan pertanian di Indonesia. Integrated farming merupakan integrasi beberapa komoditas di dalam beberapa komoditas pertanian kita, adalah upaya optimalisasi lahan, memelihara siklus yang bisa dimanfaatkan dari masing-masing komoditas sehingga terciptanya zero waste. Aspek prasarana/sarana pertanian tetap menjadi prioritas dan aspek strategis dalam pembangunan pertanian yang akan datang.

Cetak biru kebijakan pertanian berlatar belakang trend keengganan keturunan petani menjadi petani pula , dan makin disadari bahwa generasi milenial tak mungkin diminta berkotor-kotor lumpur dan mencangkul lahan . Deptan membangun kebijakan budidaya-cerdas-lingkungan (*climate smart agriculture* atau CSA) berbentuk program SIMURP (*Strategic Irrigation and Urgent Rehabiitation Project*) berhampiran mekanisasi-pertanian mengganti tenaga-fisik SDM untuk peningkatan efektivitas & efisiensi modernisasi-pertanian cq bantuan fasilitas-produksi & mesin bertujuan meningkatkan IP, menurunkan emisi GRK, dan meningkatkan pendapatan petani.

Kebijakan program strategis ditjen PSP TA 2022 meliputi Perlindungan Lahan Pertanian LP2B, Data Lahan, Optimalisasi Lahan melalui kegiatan optimalisasi lahan dan Food Estate, Suplesi air irigasi untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui kegiatan RJIT, Pembangunan Embung/Dam Parit/Longstorage, Pembangunan Irigasi Perpompaan/Perpipaan, antisipasi anomali iklim, Asuransi Pertanian : AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi) dan Fasilitasi KUR, Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO),dan 5Pengembangan Alsintan Pra Panen (Traktor R-2, Traktor R-4, Pompa Air, *Transplanter*, *Chopper*, *Cultivator*, *Hand sprayer*, *Exscavator*, dll. Basis pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP yaitu Padat karya,Swakelola oleh kelompoktani/ penerima manfaat dengan pola Padat Karya (*cash for work*), mendayagunakan tenaga kerja di perdesaan dan meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan. Kegiatan aspek PSP pola padat karya meliputi RJIT, Pembangunan embung, Perpompaan/Perpipaan, Optimasi lahan rawa dan food estate, jalan usaha tani dan unit pengolahan pupuk organik. Penyediaan prasarana/

sarana pertanian bertujuan mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian 2022 dengan sasaran produksi padi 57,50 juta ton GKG, produksi jagung 26 juta ton PK, kedelai 0,71 juta ton, produksi daging 444,55 ribu ton, bawang merah 1,64 juta ton, cabai 2,87 juta ton, bawang putih 91,51 ribu ton, kopi 798,45 ribu ton, kakao 771,93 ribu ton, tebu 34,99 juta ton dan kelapa 2,79 juta ton. Target KUR tahun 2022 sebesar 80 Triliun.

2.15. Kebijakan Ekonomi Luar Biasa

Kebijakan luar biasa (*extraordinary measure*) disebut pula kebijakan nonkonvensional, kebijakan nonreguler, kebijakan tidak lazim, kebijakan era-abnormal. Pada bulan pertama tahun 2022 Perdana Menteri Inggris membuat kebijakan pembebasan perilaku publik warganya dalam sebuah kehidupan global berstatus endemik. Belum ada kepastian bentuk solusi global mengatasi pandemi dan kepastian kapan ramalan pandemi berakhir. Covid-19 dan mutasi selanjutnya menyebabkan berbagai negara berkembang mengalami arus-keluar modal asing, harga migas jatuh pada akhir April 2020, Wall Street kehilangan kepercayaan investor , diterpa turun-harga efek pada minggu kedua Maret 2020 karena larangan-perjalanan AS dan pembekuan tarif bunga bank sentral Eropa. Terjadi kontraksi global akan output dan kredit , konsumsi dan investasi, lapangan kerja, kinerja industri dan unit usaha cq kinerja penjualan & laba, pasar asuransi dan properti. Pada era pandemi, pasar modal kehilangan *budaya meniru* (*herding behaviour*) perilaku investor besar. Pasar modal lesu karena ketidak pastian kondisi pasar dan gejala menurun pulangan investasi , berbagai investasi dan/atau pembiayaan proyek di tunda/dihentikan karena kesulitan likuiditas dan ketidak-pastian pulangan. Terdapat pemulihan bursa pada beberapa negara pada tahun 2021.

Nilai tukar terkait langsung dengan neraca-perdagangan, daya saing ekspor, utang LN, arus modal, dan stabilitas nilai tukar. Peningkatan volatilitas nilai tukar dan depresiasi mata uang akibat arus keluar modal-asing dan sentimen-pasar berlatar-belakang pandemi berdampak pada pasar-uang, berdampak pada harga-saham, aliran-masuk modal asing, defisit neraca perdagangan, instabilitas keuangan dan kewajiban keuangan , berlangsung sampai bulan April 2021 secara tidak seragam. Beberapa negara mengalami depresiasi mata-uang berlanjut, beberapa yang lain mengalami apresiasi mata -uangnya.

Lock down berakibat turunnya permintaan akan migas, penurunan kinerja industri sektor migas , berdampak pada harga-saham pasar modal. Pandemi cq *lock-down* berdampak fatal pada industri migas. Pasar migas menjadi inefisien, teridentifikasi hubungan negatif antara minyak dan pulangan saham, hubungan positif negara-peng-ekspor- migas-neto dengan negara-peng-impor- migas-neto.

Perekonomian *net-oil-importing-countries berbasis input migas* menerima keuntungan turun-harga-pasar migas, biaya produksi sektor riil menurun, harga jual dapat diturunkan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada berbagai *net-oil-exporting-countries* seperti Rusia, Saudi Arabia dan Nigeria , terjadi penurunan pendapatan migas, harga saham jatuh, pasar uang gonjang-ganjing, neraca perdagangan terluka.

Instrumen kebijakan lazim kala normal harus ditambah instrumen kebijakan luarbiasa (*extraordinary measure*) pada situasi luar-biasa, misalnya instrumen kebijakan ekonomi masa pandemi.

2.15.1. Prinsip Ekonomi Pandemi

Derek Thompson, 2020 menggungah artikel berjudul The Four Rules of Pandemic Economics , memberi hikmah pemahaman , antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat teori dikotomi "menyelamatkan perekonomian " vs " "menyelamatkan nyawa", praktis seluruh bangsa di bumi tak mau menganut teori tersebut. Sebagian besar bangsa percaya, penduduk nan sehat adalah dasar perekonomian nan sehat . Terdapat berbagai definisi "kaya", antara lain, sebuah status kehidupan dimana anda dapat hidup wajar sampai akhir hayat tanpa bekerja, berlaku hanya bagi sebagian kecil umat manusia. Sebagian besar umat manusia tetap perlu mencari nafkah dan melakukan hubungan sosial walau berhadapan dengan risiko terinfeksi. APBN setiap negara terdistorsi oleh pandemi, berupa gangguan/penurunan PDB, pendapatan perkapita dan APBN Pajak Penghasilan & PPN. Apabila belanja negara menurun, maka kegiatan ekonomi era pandemi makin menurun. Dengan otak dan kreativitas , para pencari nafkah untuk hidup itu, berupaya memperoleh nafkah sambil berupaya agar tak terinfeksi virus. Setiap pemerintahan membangun prasarana-ekonomi-era-pandemi yang mengamankan jiwa manusia pada satu sisi, mengupayakan pemulihan dalam bentuk *kegiatan ekonomi bentuk baru* sedemikian rupa, agar pemulihan-kondisi-perekonomian , sekadarnya atau untuk mencapai tingkat minimum kebutuhan-berbangsa-bernegara. Prinsip pemerintahan lazimnya menyelamatkan jiwa & perekonomian sekaligus, bahwa jangan sampai kebijakan mengatasi masalah justru memperbesar salah satu atau kedua masalah tersebut. Kedua, pengutamaan kelanjutan hidup dengan imunisasi/vaksinasi, pengobatan rumah-sakit dan kewajiban-tinggal-dirumah bertunjangan oleh APBN , lalu dilonggarkan bertahap dengan aktivitas ekonomi bersyarat; antara lain, kegiatan ekonomi tidak-bergerombol-fisik, kewajiban ber-masker & jaga-jarak-sosial untuk memberi kesempatan mencari nafkah sehari-hari, agar sistem perekonomian tetap berjalan . *Lock down* bermakna pembekuan hubungan sosial dalam perekonomian, harus diikuti deregulasi sektor perbankan dalam bentuk pelonggaran syarat-perbankan, perubahan suku-bunga deposito dan kredit, jadwal-ulang kredit berfokus pada penykedulan-ulang pembayaran kembali pokok kredit , *hair cut* , penghapusan denda & bunga bagi debitur, deregulasi sektor perpajakan dan program pengampunan pajak masa pandemi , termasuk pajak konsumsi dan Pajak Bumi Bangunan. Beberapa negara maju & kuat APBN seperti Denmark dan berbagai negara Eropa Utara membantu perusahaan padat-karya dengan subsidi upah/gaji, mencegah moral hazard PHK massal bagi perekonomian. Berbagai pemerintah amat sadar bahaya PHK, bahwa bila seluruh sektor riil dan jasa lumpuh, sulit dibangkitkan kembali tatkala pandemi berlalu , menyebabkan kondisi ekonomi-terpuruk menjadi berkepanjangan. Ketiga, usaha mati dan industri mati sulit dihidupkan kembali. Sistem perekonomian adalah sebuah jaringan pasok-permintaan nir-putus, maka sebuah

pasar runtuh berdampak domino pada pasar yang lain. Sebagai contoh, tiap sekolah, perguruan tinggi, taksi, bus kota, cafe,warung, hotel, bioskop,mal , bank dan pasar modal , bahkan rumah sakit kehilangan pelanggan yang dalam kondisi nir-penghasilan & *lock-down* . Sebuah rumah makan menghentikan pembelian bahan makanan-minuman dari pemasok, produsen dan petani. Seluruh sektor riil kehilangan pasar, sektor UMKM atau sebagian besar-entitas pada tiap negara, paling cepat mengalami kebangkrutan. Rehabilitasi kondisi ekonomi harus berupa paket lengkap dan menyeluruh , membutuhkan dana APBN , sementara pendapatan negara berbentuk pajak makin sulit diperoleh. Jumlah tarikan-minyak-dari-perut-bumi juga tak dapat diperbesar , karena harga pasar minyak dunia melemah karena lock-down menyebabkan permintaan (demand) berbasis konsumsi migas menurun. Keempat, Sistem Perekonomian Baru. Terjadi budaya baru kehidupan manusia *hidup berdampingan dengan virus* bila bersifat endemik, mengubah cara berfikir dan pola penggunaan teknologi dalam kegiatan perekonomian. Sebagai misal, sedang di upayakan oleh pemerintah Jerman ; pada tiap tubuh manusia tersandang sarana-uji-elektronik apakah ia-bebas-virus atau pembawa-virus. Sarana-uji harus andal terpercaya, tak dapat direkayasa/dipalsukan. Sarana-pelindung tetap wajib di pakai, misalnya masker, karenas elalu terdapat para terorist, penjahat cq pembunuh bayaran yang menembakkan virus, secara tersembunyi.

2.15.2. Instrumen Kebijakan Luar Biasa

2.15.2.1. Kebijakan Tiga Pilar Persatuan Bangsa-Bangsa

PBB yang menyadari gejala kenaikan harga pangan global, pengangguran dan inflasi , membuat tanggapan global bagi seluruh negara di muka bumi, berupaya mengurangi dampak keterpurukan dunia, membangun ketahan global terhadap paddemi, menghapus berbagai ketimpangan kondisi dan penanganan pandemi antar negara. PBB membangun tiga pilar operasional, yaitu (1) membangun sebuah tanggapan kesehatan berskala global yang lengkap dan terkoordinasi, (2) adopsi berbagai kebijakan untuk memerangi penurunan tingkat sosial-ekonomi, kemanusiaan dan HAM, dan (3) membangun sebuah proses pemulihan dunia.

2.15.2.2. Himbauan WHO

WHO menerbitkan dokumen berjudul *the COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP) for 2021* , dapat digunakan sebagai dasar penyusunan APBN Penanggulangan Covid di NKRI. Didampingi Mari Pangestu sebagai Managing Director of Development Policy and Patnerships, World Bank Group, David Malpass , World Bank Group President , (1) mendorong agar negara berlebih vaksin berbagi dengan negara-negara kekurangan vaksin, (2) mendorong pelonggaran perdagangan, (3) mendorong peningkatan produksi pabrik vaksin, (4) mendorong relaksasi perdagangan internasional untuk vaksin dan sarana pencegahan/pengobatan virus. , (5) mendorong pembentukan iklim keuangan global tersesuai kondisi pandemi, (6) mendorong pengintegrasian riset & pengembangan, pendanaan lintas negara, (7) mendorong pembiayaan di muka bumi terutama untuk pengembangan teknologi & pembangunan infrastruktur umum sadar energi , sadar pandemi , sadar lapangan kerja, dan sadar

agrikultur tersesuai iklim,diungkapkan pada perhelatan World Bank Group Senior Leadership Engagement at UNGA 76.

2.15.2.3. Kebijakan Empat Pilar ILO.

ILO dari PBB membentuk empat pilar yaitu (1) pembangunan kebijakan fiskal nan-aktif, kebijakan moneter nan-akomodatif , dukungan pinjaman dan keuangan untuk berbagai sektor strategis, termasuk sektor kesehatan, (2) perluasan proteksi sosial menjangkau keseluruhan, kebijakan anti PHK, kebijakan pelonggaran keuangan & perpajakan bagi badan-usaha, (3) perlindungan pekerja , kebijakan keselamatan kerja, penerapan hampiran tempat kerja (teleworking), bangun kesetaraan-kesamaan , hindari diskriminasi pekerja, penyediaan fasiliitas kesehatan bagi semua karyawan, tingkatkan sistem upah/gaji tersesuai pandemi, (4) meningkatkan dialog konstruktif antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja, (5) membangun kebersamaan/kerukunan antar lembaga, dan (6) meningkatkan kapasitas pemerintah untuk mengkoordinasi berbagai pemangku-kepentingan melalui dialog-sosial dalam keprihatinan bersama.

2.15.2.4. Pemikiran OECD

William Horobin, 2021, mengunggah artikel berjudul World Faces Fiscal Problems Much Worse Than Those From Covid, OECD Warns, menguraikan berbagai hal sebagai berikut. Dalam upaya memelihara tingkat layanan publik , manajemen utang dan lingkungan, berbagai pemerintahan perlu meningkatkan PDB sebesar 8 %, bahkan mungkin lebih dari 10 % untuk beberapa negara seperti Jepang dan Perancis untuk penanggulangan perubahan iklim. OECD berpendapat bahwa di masa depan APBN tiap negara akan menghadapi harga-harga umum meningkat, bahwa kenaikan pajak harus dihindari , ruang kerja formal diperbesar dan umur-usia-kerja sebaiknya diperpanjang.

2.15.2.5. Kebijakan Fiskal Luar Biasa Uni Eropa

Uni Eropa berharap penyediaan vaksin berhasil dilakukan pada awal 2021, mencakupi BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen yang telah terotorisasi EU, mungkin ditambah Novavax, Curevac and Sputnik V. Pada pertengahan 2021, tertarget 50% penduduk EU telah tervaksin satu kali. Pada awal 2022 Perdana Menteri Inggris membuat kebijakan pelonggaran maksimum bagi warganya pada era endemi, antara lain menghapus jagajarak-sosial dan penggunaan masker. Strategi membuka kembali perekonomian Eropa tertuang pada panduan Komisi Eropa tentang Kerangka Bersama antar Negara Anggota , mencakupi kriteria reduksi berkelanjutan wabah, kapasitas sistem kesehatan dan kapasitas pemantauan kondisi lapangan. Pada awal Mei 2021, Komisi Eropa membuka pintu kedatangan dari negara lain, bersyarat tertentu , sambil menyiapkan kemampuan tutup-pintu kembali setiap saat dibutuhkan Eropa. Pada awal Juli 2021 negara-negara anggota dapat menerbitkan Sertfikat Digital Covid Uni Eropa. Pada tataran fiskal, para pimpinan negara menyetujui anggaran Uni Eropa dan program pemulihan generasi-berikut (NGEU) sebesar €750 Miliar , terbagi sebagai *grant* sebesar €390 Miliar dan *loan* sebesar €360 Miliar, akan disalurkan pada periode 2021-22 melalui Fasilitas Pemulihan dan Ketahanan dan tambahan pada program

anggaran Uni Eropa, tersesuai kebutuhan APBN negara-anggota dengan perhatian khusus kepada anggota terluka-berat , misalnya Italia, Spanyol dan beberapa negara Eropa Timur. Sejarah tahun 2020 mencatat kebijakan fiskal mencakupi jejaring-pengaman sosial, perlindungan kerja , pekerjaan dan pekerja, jaminan peminjaman, dan keluwesan aturan fiskal. Untuk jejaring-pengaman sosial, disediakan Mekanisme Stabilitas Eropa sebesar 2% PDB tiap negara anggota dalam paket Pandemic Crisis Support atau PCS, ternyata tak ada yang berminat menggunakan. Untuk perlindungan kerja , pekerjaan dan pekerja, berupa pinjaman sampai €100 Miliar, praktis seluruhnya dimanfaatkan. Untuk jaminan peminjaman, berupa jaminan pemerintah kepada Bank Investasi Eropa sebesar €25 Miliar terfokus pada unit usaha UKM. Untuk keluwesan aturan fiskal, Komisi Eropa membangun klausula pelepasan (*general escape clause*) dalam aturan fiskal Uni Eropa sepanjang tahun 2021, akan diperpanjang untuk tahun 2022, berupa penundaan kewajiban koreksi fiskal. Komisi Eropa mendorong paket kompensasi bagi kerusakan unit-usaha tertimpa bencana, terutama sektor berdampak biliar seperti penerbangan dan turisme, mengadopsi amandemen kedua dukungan negara untuk rekapitalisasi dan kebijakan khusus bagi utang-subordinasi pada era pandemi.

2.15.2.6. Kebijakan Moneter Luar Biasa.

Pertama, Teori Kebijakan Moneter era Normal. Kebijakan moneter bertujuan agar inflasi terkendali , pertumbuhan ekonomi dan kekuatan mata-uang terjaga. Instrumen kebijakan moneter kala-normal adalah kebijakan-tarif-bunga dan kebijakan komunikasi/informasi publik seperti ramalan inflasi dan ramalan pengangguran dimana sistem keuangan nan-tangguh & cepat-pulih dari distorsi apapun (*resilience*) , mampu memenuhi tiga fungsi utama sistem keuangan bangsa , yaitu transformasi tabungan menjadi pembiayaan, manajemen risiko nan-baik, dan tranmisi pembayaran. Instrumen makroprudensial adalah supervisi, regulasi dan komunikasi, antara lain kewajiban kecukupan modal dan likuiditas, *loan-to-value (LTV) caps* atau nisbah pinjaman vs agunan, laporan-stabilitas-keuangan terutama *stress-test* atau kecukupan-modal pada kondisi resesi atau semacamnya , bagi Lembaga Keuangan. **Kedua**, Kebijakan Moneter Luar Biasa. RBI Bulletin March 2021, mengunggah makalah berjudul *Unconventional Monetary Policy in Times of COVID-19*, antara lain menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Berbagai bank sentral melakukan berrbagai penyesuaian pada operasi-pasar mereka terkait stress-pasar-uang cq kontraksi-pasar cq kehancuran bisnis simpan-pinjam perbankan karena pandemi sebagai berikut. Tertengarai berbagai kebijakan luar biasa (1) injeksi likuiditas dadakan, (2) penganekaragaman bertujuan perluasan jenis agunan, (3) pelonggaran kisaran “pihak lain yang memenuhi syarat”, (4) Kebijakan suku bunga negatif masa pandemi, misalnya Bank Nasional Swiss menggunakan tarif – 0.75 %, ECB menggunakan tarif deposito -0,50 %, (5) dukungan likuiditas melalui instrumen baru. Berupa(5.1) menurunkan kewajiban cadangan (reserve requirement) , (5.2) relaksasi persyaratan agunan & jaminan , (5.3) meningkatkan skala transaksi beli-kembali (5.4) membentuk skema kredit khusus bagi UMKM , (5.5) membentuk skema kredit dalam mata-uang tertentu. (5.6) The Fed mencipta kelonggaran operasi-semalam (*overnight*) dan syarat beli-kembali (*repo*) dan (5.7) mencipta berbagai instrumen untuk mendukung aliran-kredit, antara lain (5.7.1) fasilitas pendanaan surat-komersial untuk penerbit pemerintah dan perusahaan tertentu, (5.7.2) fasilitas likuiditas pasar uang dana-bersama (

mutual fund) , (5.7.3) fasilitas kredit khusus bagi dealer-utama untuk pendanaan dealer-utama,(5.8) fasilitas kredit bagi lembaga-simpanan untuk pembelian-aset, (5.9) pinjaman bagi korporasi agar mampu membeli emisi obligasi yang menguntungkan, (5.10) fasilitas kredit korporasi bagi para emiten obligasi, (5.11) pembentukan pinjaman bersyarat sekuritas-berjamin-aset bagi penerbit sekuritas-berjamin-aset proteksi pembayaran imbalan-kerja bagi entitas-yang-berupaya-tidak-mem-PHK, (5.12) pembentukan program pinjaman untuk membeli kredit baru atau tambahan kredit bagi UMKM terlibas pandemi, (5.13) pembentukan fasilitas likuiditas kotapraja untuk membeli sekuritas jangka pendek pemerintah/pemda. BoJ Jepang menggencarkan pasok dana dengan memperluas pihak-layak-transaksi (selaras butir 3 diatas) dan memperlonggar agunan untuk pinjaman pribadi (sejalan butir 5.2 di atas) , BoJ memperkenalkan pemrovisian dana untuk mendukung pembiayaan UMKM (sesuai butir 5.4 di atas) . Pada tatarana negara-negara EME, Bank Indonesia (sejalan butir 5.6 di atas) meningkatkan durasi maksimum untuk transaksi beli-kembali dan beli-kembali-balik (reverse repo) sampai 12 bulan dan memperkenalkan lelang-harian. RBSA Afrika Selatan membuka peluang pinjaman bagi lembaga keuangan dengan obligasi-korporasi sebagai agunan (sejalan butir 5.9 di atas) . BoT Thailand membuka fasilitas pinjaman bagi lembaga keuangan dengan bunga-lebih-murah untuk keperluan kredit bagi UKM dan fasilitas perbankan khusus sebagai penjaga likuiditas entitas dana-bersama (mutual fund) .(6) strategi pembelian aset. BoE England memperbanyak pemegangan obligasi pemerintah dan obligasi-koporasi nir-peringkat-keuangan sampai £300 M , the US Fed berkomitmen membeli sekuritas perbendaharaan negara. ECB Eropa membuat program-beli-gawat-darurat-pandemi (the pandemic emergency purchase program atau PEPP) sampai 1.85 T Euro dengan perpanjangan durasi sampai akhir Maret 2022. BoJ Jepang meningkatkan pembelian obligasi-pemerintah nirbatas , surat-berharga-pasar-modal dan obligasi korporasi tertentu.

Directorate General Communications, 2021 mengunggah artikel berjudul *ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability* , antara lain menyatakan sebagai berikut. Aset-agunan-berpasar tetap-boleh-digunakan (grandfather) pada sistem-kredit-Eropa sampai September 2021, kebijakan *haircut* akan dilakukan untuk aset yang berada di bawah-kualitas-minimum sebagai agunan. Berbagai bank sentral negara-negara EME seperti Indonesia, Afsel, Filipina dan Thailand meluncurkan program beli-obligasi , Indonesia dan Filipina me-monetasi utang dengan aksi beli obligasi langsung dari pemerintah, Mexico dan Brazil menjalankan *operation twist* berupa penurunan suku-bunga-pinjaman-jangka-panjang dengan cara menjual obligasi-perbendaharaan-hampir-jauh-tempo dan membeli obligasi-berdurasi-panjang, menghasilkan kurva-hasil dimana hasil-jangka-pendek meningkat dan suku-bunga-jangka-panjang turun-simultan. (7) strategi menunggu momentum pemulihan.Sarana penargetan nanluwes The Fed AS berupa pernyataan bahwa tarif bunga akan tetap rendah sampai kondisi ekonomi dan lapangan-kerja terpulihkan. (8) Berbagai bank sentral mengupayakan reduksi siklus-balik bantalan-modal (reduction in counter-cyclical capital buffers), relaksasi nisbah-likuiditas, menunda bagi dividen dan aksi beli-kembali, relaksasi proses restrukturisasi-utang dan pemrovisian kerugian, relaksasi aturan prudensial tertentu, pelonggaran kewajiban pelaporan dan kepatuhan tertentu. (9) Industri perbankan didorong untuk re-negosiasi dengan debitur bermasalah, menggunakan bantalan modal dan bantalan likuiditas, menggunakan berbagai aturan hukum dan akuntansi untuk menyerap kerugian sesuai BIS,2020. (10) Kebijakan lazim bank sentral

adalah pengurangan pada kebijakan-beli-balik dan penurunan nisbah cadangan kas, sementara kebijakan luar-biasa mencakupi perpanjangan dana operasional dan dukungan likuiditas berhampiran pembiayaan-ulang, beli aset termasuk pelintir-operasional (operation twists atau OTs), operasi dukung likuiditas, yang mencakupi kebijakan perpanjangan jangka pendanaan/peminjaman. Di India, dukungan likuiditas dengan pembiayaan-ulang kepada bank agri,bank UKM , bank pedesaan dan bank/lembaga keuangan perumahan, fasilitas kredit bagi bank ekspor-impor 90 hari boleh-diperpanjang tersedia dengan fasilitas lindung nilai USD, bantuan penutupan utang lembaga dana-bersama *(mutual fund)* dan suatu fasilitas penunjang likuiditas, program Beli Aset dengan cara jual sekuritas-jangka-pendek, beli sekuritas-jangka-panjang. Kedepan, reserve bank India akan selalu berkomunikasi dan mendukung berbagai kebijakan komite kebijakan moneter nasional India. (11) Pada tataran bauran kebijakan moneter dan makro-prudensial, bank sentral Eropa ECB memutuskan kebijakan dukungan moneter melalui tambahan pembelian aset sebesar €120 Miliar sampai akhir 2020 , lelang tambahan temporer fasilitas-likuiditas ber tarif bunga tetap, peringanan beban bunga pinjaman-jangka-panjang untuk pembiayaan-kembali proyek-proyek tertentu jatuh-waktu mejadi berjangka-lebih-panjang, program pembelian-gawat-darurat-era-pandemi ((*Pandemic Emergency Purchase Program* atau PEPP),) berbagai sekuritas-berharga sektor-privat dan sektor-publik tertentu.ECB menerbitkan aturan pelonggaran aset-layak-beli dan relaksasi tolok-ukur jaminan/agunan kredit seperti pemotongan-agunan tak-berpasar-bebas bersifat permanen (*a permanent collateral haircut reduction of 20 percent for non-marketable assets*). Ketiga, Kebijakan Moneter Luar Biasa di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral (1) menggunakan cadangan devisa untuk upaya stabilisasi mata-uang-rupiah , memasok valas di pasar, memperoleh REPO Line dari the Fed untuk penguatan cadangan devisa , (2) emisi berbagai kebijakan untuk memitigasi dampak negatif pandemi, yaitu dengan (2.1) menurunkan suku-bunga-kebijakan, (2.2) meningkatkan intervensi-tiga-titik pada pasar spot, (2.3) menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas bank umum konvenional, (2.4) memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah dan menambah frekuensi lelang FX Swap menjadi setiap hari untuk memastikan kecukupan likuiditas, (2.5) memperluas jenis underlying transaksi DNDF sehingga dapat mendorong lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, (2.6) menurunkan GWM Rupiah untuk bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor, pembiayaan kepada UMKM dan/atau sektor prioritas lain, (2.7) melonggarkan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), (2.8) menyediakan uang higienis, menurunkan biaya SKNBI, (2.9) penetapan MDR QRIS 0% untuk merchant usaha mikro, (2.10) mendukung penyaluran dana nontunai program-program pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BNPT, Program Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar, (2.11) membeli Beli Surat Utang Pemerintah NKRI, dan (2.12) melakukan intervensi pasar dengan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS), (2.13) penerbitan global Surat Berharga Negara (SBN) seri RI1030, RI 1050, dan RI 0470, lalu masuk ke pasar dengan membeli surat utang pemerintah di pasar perdana dalam keadaan tidak normal (abnormal) dimana suku bunga yield terlalu tinggi atau bila pasar tak mungkin lagi bisa menyerap. Bila kapasitas pasar tidak cukup, misalnya suku bunga melonjak tinggi, maka BI membeli dari pasar perdana, (2.14) mensinergikan kebijakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mitigasi dampak COVID-19 dan mengurangi kepanikan pasar keuangan.

2.15.2.6.Kebijakan Makro-Prudensial Luar Biasa

Kebijakan makroprudensial mempunyai fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan , dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan , serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan makroprudensial dalam setiap negara berbeda-beda. Implementasi instrumen kebijakan makroprudensial di Indonesia dengan menggunakan (a)Perubahan Reserve Requirement digunakan sebagai tujuan untuk membatasi pertumbuhan kredit, mengelola likuiditas, dan sebagai komplemen bagi kebijakan moneter untuk mencapai tujuan makroprudensial (b) Pembatasan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko, khususnya terkait dengan risiko kredit dan likuiditas. Berbagai kebijakan makroprudensial masa-pandemi mencakupi (1) relaksasi modal industri perbankan, (2) penundaan pembayaran kembali kredit dan relaksasi likuiditas, (3) industri perbankan diizinkan menanggung rugi lebih besar dan mendukung kebutuhan masyarakat akan dana kredit, (4) melakukan modifikasi perjanjian-kredit bagi para debitur terluka-bisnis, (5) percepatan aliran bantuan untuk kebutuhan darurat rumah-tangga, bisnis dan likuiditas pasar, diuraikan lebih lanjut di bawah ini. **Pertama**, relaksasi kebutuhan modal minimum bank melalui manajemen CcyB *(countercyclical capital buffer)* sejalan aturan Basel III.Kanada menurunkan bantalan-stabilitas-domestik (*domestic stability buffer*) sejalan CcyB. Berbagai negara membuat panduan untuk bank beroperasi di bawah bantalan-pengaman-operasional (*operational buffer*) , ECB (The European Central Bank) mengawasi secara khusus bank-bank yang beroperasi lebih-rendah dari Pilar II , AS mendorong penggunaan bantalan-pengaman pada masa-krisis, the Fed mengizinkan bank-bank grup-usaha untuk sementara mengeluarkan cadangan dan sekuritas perbendaharaan dari perhitungan total-assets dalam penentuan nisbah-utang suplementer. Inggris , Swedia, Norwegia dll mendorong penggunaan bantalan-pengaman-bank terkait ECL dan bantuan-kredit gawat-darurat , bank diharapkan mengurangi rencana beli-kembali saham-beredar, mengurangi rencana dividen dan bonus SDM untuk meningkatkan daya-serap akan kerugian masa-depan. **Kedua**, Hampiran relaksasi kredit bermasalah. Berbagai negara mendorong bank dan lembaga-keuangan-lain untuk bekerjasama dengan peminjam dalam melewati masa-krisis, berbagai otoritas memberi panduan relaksasi pengembalian kredit , tak serta merta menurunkan pringkat kredit & debitur karena kondisi-pandemi menyebabkan pemeringkatan masa-normal menjadi tidak masuk akal. Bank sentral Inggris meminta agar mempertimbangkan berbagai bantuan-pemerintah , antara lain relaksasi pembayaran kembali, perpajakan dll dalam menghgitung ECL, ECB mempelajari berbagai kiat-fleksibilitas klasifikasi-debitur yang tak mungkin memenuhi kewajiban karena pandemi. Ketiga, Menggunakan bantalan likuiditas (*liquidity buffer*). Otoritas berbagai negara menyadari bahwa kalau semua bank menggunakan pola manajemen lukuiditas kala-normal, maka akan terjadi kelangkaan/kelaparan likuiditas pada sistem keuangan. Berbagai otoritas perbankan merelaksasi persyaratan likuiditas bank berbasis kebijakan mikroprudensial, yang berada di bawah nisbah-liput-likuiditas versi Basel III (below Basel III liquidity coverage ratios (LCRs)) yaitu nisbah aset-likuid-berkualitas-tinggi banding kewajiban-jangka-pendek, agar masing masing bank tersebut mampu menjaga lukuiditas minimum masing-masing. Otoritas perbankan Eropa memberi panduan

penggunaan LCR kala-stress, menghindari kebijakan berdampak fragmentasi pasar pendanaan, bank diizinkan beroperasi-temporer di bawah LCR. Bank Swedia lalu memperluas pemberlakuan tersebut bagi berbagai mata-uang , secara individual dan/atau gabungan.The Fed mendukung upaya penggunaan bantalan-likuiditas bertatacara nan-baik. Bank Sentral Afsel menurunkan LCR ke 80 % dari 100%. Sebagian besar otoritas perbankan tak menggariskan berapa banyak bank boleh menggunakan bantalan-lukuiditasnya. Beberapa bank sentral merelaksasi batas LCR valas. Sebagian besar bank sentral tak mengatur besar tarikan, kecuali bank sentral Korea yang menurunkan foreign exchange LCR dari 80 % menjadi 70 %.Berbagai bank sentral menurunkan persyaratan cadangan bagi lembaga keuangan simpanan. Pada tataran teori,pengaturan cadangan tersebut tergolong kebijakan moneter, pada masa krisis digunakan sebagai penyokong likuiditas dan kemampuan-memberi-kredit. The Federal Reserve menurunkan syarat-cadangan sampai nihil, agar bank lebih mampu menolong bisnis dan rumah tangga. The *Reserve Bank of India* menurunkan nisbah cadangan kas dari 4 % menjadi 3 % untuk memberi kelegaan-lukuiditas satu tahun ke depan. Bank sentral Malaysia dan Iceland menurunkan persyaratan-cadangan untuk menjaga lukuiditas domestik. Keempat, Berbagai kebijakan lain. Undang-Undang Peduli versi AS mengizinkan para debitur rumah-tangga mengajukan pelonggaran hipotik-berjamin-pemerintah, bank sentral Filipina menaikkan batas pinjaman-perorangan, regulator keuangan Swedia me-relaksasi aturan-makroprudensial tentang *high-loan-to-value borrowers* untuk meng-amortisasi pinjaman hipotik. Berbagai otoritas perbankan berupaya membebaskan berbagai biaya-kepatuhan , agar mereka dapat memfokuskan diri pada optimalisasi-penggunaan sumber-daya terbatas dan pemberesan-debitur-bermasalah , adalah sebuah jenis kebijakan makro-prudensial. *The Bank of England* and ECB menunda penerapan uji-stress 2020, Komite Bassel menunda penerapan Basel III agar bank mampu mengatasi masalah operasionalnya kala-pandemi. Otoritas Kanada menunda konsultasi masalah regulasi sampai kondisi stabil, *The Fed* menghapus berbagai aktivitas pengujian/pemeriksaan dan melonggarkan batas waktu pelaporan wajib, regulator AS mengizinkan entitas bank menunda implementasi SAK Internasional terkait *current expected credit losses*. Dua sasaran *the Fed* adalah stabilitas harga dan pemerkerjaan penuh, yaitu stabilisasi inflasi disekitar target-inflasi the Fed dan pemerkerjaan pada tingkat-berkesinambungan-jangka-panjang.

Sebagai kesimpulan, kebijakan makroprudensial adalah sebuah perlengkapan penting bagi berbagai aksi fiskal, moneter, dan krisis likuiditas masa pandemi untuk mencegah kerusakan-perekonomian negara itu, yang sama-sekali berbeda dengan strategi & tatacara penanganan krisis-keuangan-global. Sedia payung sebelum hujan, era pandemi mengajarkan bahwa tiap-negara harus selalu waspada dan sadar pentingnya pembangunan bantalan-pengaman tatkala perekonomian negara itu membaik, agar dapat menggunakannya tatkala terjadi kontraksi ekonomi.

2.15.2.7. Kebijakan Fiskal Luar Biasa

Tujuan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan adalah mendorong permintaan agregat dan menyediakan bantalan-penahan fiskal (*fiscal buffer*) , menggunakan sarana khusus seperti *tax and discretionary countercyclical measures.* Dari perspektif fiskal, kebijakan

pemerintah untuk mensubsidi investasi dan meluncurkan program investasi-publik mungkin mendorong iklim investasi. Kebijakan fiskal bertujuan agar APBN terkelola dengan baik . Jeffrey Franks, Bertrand Gruss, Manasa Patnam, and Sebastian Weber , dari IMF, 2021, mengunggah makalah berjudul *Five Charts on France's Policy Priorities to Navigate the COVID-19 Crisis*, menjelaskan berbagai hal tentang kebijakan fiskal negara Perancis, sebagai berikut. Sebagai negara terterpa pandemi, Perancis memilih kebijakan dengan prioritas menyelamatkan nyawa sambil menekan dampak buruk pada perekonomian. Pemerintah Perancis memelihara daya-dukung fiskal pada rumah-tangga dan unit-usaha , melindungi stabilitas keuangan negara/bangsa, mendorong transformasi-ekonomi dana era-pemulihan. **Pertama**, pandemi dan kebijakan lockdown yang tak-terduga menyebabkan resesi terbesar setelah resesi paska perang-dunia. Pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran virus, perekonomian Perancis turun sekitar 9 % pada tahun 2020, tak dapat diestimasi pada tahun 2021. **Kedua**, Kebijakan respons terhadap krisis tepat waktu, luwes, dan proporsional.Perencanaan fiskal 2020-22 untuk penanggulangan gawat darurat dan upaya-pemulihan mencakupi 26 % GDP Perancis , dilakukan secara luwes sesuai perkembangan situsi terakhir yang tak-menentu, mencakupi berbagai penyediaan fasilitas kesehatan publik, pemeliharaan likuiditas rumah-tangga dan unit-usaha , perlindungan pekerja dan lapangan kerja, dan *the Next Generation EU Recovery Fund* terfokus pada ekonomi-digital dan ekonomi-hijau, peningkatan kemampuan dan daya saing bangsa. **Ketiga**, pada era-pemulihan, dibangun berbagai kebijakan lanjutan, untuk restrukturisasi perekonomian , terfokus pada wilayah yang paling-strategis bagi bangsa, pembangunan kredibilitas fiskal, pembangunan jejaring-keamanan-sosial bagi kelompok penduduk pramilenial yang terdampak-negatif oleh perubahan karena ekonomi-digital.**Keempat**, tatkala industri perbankan Perancis masuk era-krisis dengan bantalan-pengaman nan-nyaman (*comfortable buffers*), pemulihan ekonomi harus berbasis penguatan neraca korporasi dengan berbagai hampiran, antara lain jaminan-kredit dan bantuan likuiditas keuangan korporasi oleh pemerintah. Pada era-pemulihan ekonomi, pemerintah Perancis akan mendorong partisipasi publik untuk penguatan ekuitas korporasi. Sebagai kesimpulan, tak ada hal berbeda kebijakan Perancis dengan teori kebijakan fiskal populer yang lazim di dunia. Tertengarai bahwa Perancis menggunakan *big wave surfing strategy* (strategi menunggangi gelombang besar) , tak kepalang tanggung, menggunakan momentum-pandemi sebagai sarana transformasi budaya bangsa menjadi budaya-digital. Pemerintah Perancis juga membuat APBN perlindungan generasi pra-milenial yang terlanda perubahan tersebut.

2.15.2.8. Kebijakan Luar Biasa NKRI

Pada tahun 2019, 10 negara berdaya-tahan terbaik menghadapi bencana adalah Norwegia, Denmark, Swiss, Jerman, Finlandia, Swedia, Luxembourg, Australia, US Sentral, dan Inggris.Diantara negara negara dunia , pada *global resilience index* berskala 0 sampai dengan 100, NKRI mendapat nilai (*score*) peringkat (rank) 43.4/100 dan perinhkat (*rank*) 82/130. Presiden nkri memandang penting hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan ekonomi hijau. Alokasi APBN sebesar Rp 405.1 T atau USD 20.3 M , Rp.75 T digunakan untuk peralatan dan insentif pekerja kesehatan, proteksi sosial sebesar Rp.110 T untuk program transfer tunai dan bahan konsumsi, kartu prakerja Rp.20 T, potongan

tagihan listrik tiga bulan, insentif pajak Rp.70.1 T, bebas PPh perorangan sepanjang 6 bulan untuk para pekerja sektor riil berpenghasilan di bawah Rp.200 juta, penundaan pembayaran pajak impor sepanjang 6 bulan untuk 19 sektor produksi, penurunan tarif PPh 25 % menjadi 22 %, penundaan pembayaran kembali KUR selama 6 bulan, pemulihan ekonomi nasional Rp.150 T untuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan UKM. Disiplin fiskal berupa batas defisit APBN di bawah 3 % PDB sejak krisis keuangan Asia 1998 , dengan estimasi defisit akan mencapai 5.07 % PDB. Untuk kebijakan moneter, BI menurunkan kebijakan tarif cq tarif *reverse repo* 7 harian dari 5 % pada Januari 2020 menjadi 3.50 % dalam bulan Februari 2021. Skema *burden sharing* antara Kemenkeu & BI yang pertama,adalah untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 yang bersifat publik *goods* di bidang kesehatan, bantuan sosial dan belanja untuk pemulihan daerah dan sektoral, pembiayaan defisit APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang tidak melalui lelang atau melalui mekanisme pasar, namun langsung di beli BI melalui *private placement*. SBN berbunga nol persen. Skema *burden sharing* kedua, berfungsi sebagai pembeli siaga atau *standby buyers* dalam lelang SBN di pasar perdana. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang akan terus dilaksanakan sampai 2022.

2.15.2.9. Ramalan Trend Perekonomian Paska Covid

Para pakar pada Monitor Deloitte , 2020, mengunggah makalah *12 macro-economic trends creating post-covid's new normal*, menyatakan pendapat sebagai berikut. Pada tataran politik dan regulasi , diramalkan terjadi (1) intervensi pasar semakin besar terkait stimulus fiskal yang mengatur tatacara beraktivitas yang baru bagi korporasi dan rumah tangga, (2) terjadi bentuk nasionalisme baru dan kelompok masyarakat yang mengatur pola-hidup & bisnis paska *lock-down* secara khusus berbasis budaya , generasi dan kewilayahan terutama pada wilayah Asia-Pasifik, yang memaksa (3) perubahan tata-kepemerintahan baru pada setiap negara.

Pada tataran ekonomi dan lingkungan-hidup, diramalkan (1) terpengaruh oleh keterbatasan likuiditas masyarakat, menyusutnya permintaan pasar akan barang/jasa, (2) terjadi berbagai kegiatan restrukturisasi, penutupan, pembukaan baru berbagai badan-usaha dengan hampiran baru ekonomi-digital paska-pandemi, (3) pasar uang dan pasar modal menanggapi sikap-baru-terhadap-risiko, perubahan strategi korporasi tersesuai ciri-ciri baru ketahanan-usaha tersesuai bahaya laten virus dan perubahan-iklim-global, (4) berbagai negara berkembang jatuh pada keterpurukan ekonomi , negara miskin makin terpuruk, senjang antara negara miskin-kaya makin membesar, menyebabkan tata-ekonomi baru berbasis penjajahan-versi-baru dari negara-negara adikuasa, (5) DK PBB merumuskan strategi keamanan dunia paska-pandemi , diwarnai oleh kehendak negara-negara adikuasa.

Pada tataran bersifat sosial dan teknologi, akan terjadi (1) perubahan infrastruktur global dan tiap negara berbasis digital, (2) menyebabkan bentuk baru hubungan masyarakat berbasis kepatuhan-sistem dan pola baru kepercayaan (*trust*) antar manusia dan antar negara, kebutuhan akan *privacy & security*, (3) wirausahawan pemberi kerja & lapangan kerja makin didominasi generasi milenial dan generasi setelahnya, sehingga terjadi

perubahan bentuk harapan-pemberi kerja, harapan-calon-pekerja, syarat-pemerkerjaan, ikatan-kerja, jenis-pekerjaan, kualifikasi pekerja, virtualisasi hubungan-kerja dan tempat-kerja,perubahan ukuran-kinerja dan perubahan skema imbalan-kerja.

Pada pertengahan tahun 2022 , muncul BA.4 BA.5 sebagai subvarian Omicron yang memiliki mutasi yang dimiliki oleh *variant of concern* Delta seperti L4.52, dampak tak sehebat Delta Varian, namun mudah sekali menular pada semua orang, termasuk obyek telah divaksinasi.

BAB 3
KEBIJAKAN FISKAL

BAB 3. KEBIJAKAN FISKAL

3.1. Pendahuluan

Globalisasi dunia berbasis teknologi informasi membuat gejolak fiskal sebuah negara mengontaminasi negara negara lain. Dua negara yang mewarnai perekonomian dunia adalah AS dan RRT. NKRI sebagai *emerging market* menerima dampak kebijakan fiskal AS dan RRT. Rata-rata nilai tukar rupiah di 2021 diperkirakan berada di kisaran Rp14.100-Rp14.600 per dolar AS dan bergerak pada Rp14.100-Rp14.500 per dolar as di 2022..Nilai Rupiah secara fluktuatif berkecenderungan (*trend*) terus melemah , fluktuasi menyulitkan perumusan indikator ekonomi dan menyulitkan perumusan perencanaan strategis pada kalangan bisnis.

Ilmu ekonomi konvensional menggunakan basis kondisi normal, sementara pada kehidupan nyata kita setiap hari menghadapi berbagai hal tidak normal. Ilmu ekonomi kontemporer memberi perspektif atau sudut pandang berbeda dari kondisi normal dan teori ekonomi tradisional. Ilmu ekonomi konvensional menjadi dasar pembentukan ilmu ekonomi non-konvensional, misalnya ilmu ekonomi masa-pandemi.

Kebijakan fiskal penting untuk alokasi optimal sumber-daya (SDM, bahan, uang dll) sebuah bangsa, sebagai sarana distribusi kemakmuran dan pendapatan dari kelompok besar penghasilan atau kaya kepada kelompok berpenghasilan lebih rendah melalui sistem perpajakan, menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi & harga kebutuhan pokok dan pemerkerjaan penuh (*full employment*) melalui struktur perpajakan konsumsi, tabungan dan investasi , dan kebijakan belanja APBN.

3.2. Ragam Kebijakan Fiskal

- Terdapat kebijakan fiskal netral (APBN berimbang), ekspansif dan kontraktif.
- Terdapat kebijakan fiskal melawan arus (*countercyclical*), sesuai arus (*procyclical*) , silang-arus (*cross cyclical*) dan tak terkait arus (*acyclical*).
- Kebijakan Fiskal terbagi atas Kebijakan Fiskal dalam APBN dan Kebijakan Fiskal di Luar APBN..
- Kebijakan fiskal terbagi menjadi kebijakan fiskal era normal dan kebijakan fiskal era krisis , misalnya kebijakan menghadapi krisis keuangan dunia atau resesi dunia, dan kebijakan fiskal era-pandemi.

3.3. Kebijakan Fiskal dalam APBN

Kebijakan Fiskal digunakan berbagai pemerintah sebagai pedoman belanja APBN dan perpajakan, terdiri atas fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Kegiatan alokasi mencakupi proses pembagian seluruh sumber-daya tersedia di APBN yang digunakan sektor privat dan barang-sosial, dalam sebuah ramuan harmonis. Fungsi distribusi adalah proses mengubah distribusi-pendapatan atau kemakmuran untuk menjamin keselarasan & keadilan masyarakat. Fungsi stabilisasi adalah kegiatan mendukung upaya pencapaian

sasaran makro-ekonomi , untuk menjamin pertumbuhan perekonomian, stabilitas harga dan kesinambungan neraca pembayaran. Pada sistem perekonomian terbuka, neraca pembayaran mengandung *current account* yang tergantung pada besar pendapatan APBN dan nilai tukar dan *capital account* yang tergantung tingkat suku-bunga domestik. Ekspansi fiskal pada sistem perekonomian terbuka berdasar asumsi tingkat mobilitas modal.

BKF Departemen Keuangan NKRI merumuskan kebijakan APBN berbasis kondisi perekonomian global dan domestik, berbasis program pembangunan nasional, berbasis kondisi keuangan negara , kondisi sosial ekonomi negara, pelanjutan kebijakan sukses tahun tahun APBN lalu, penghentian mata anggaran yang tak berbuah sukses, terfokus pada pemanfaatan sumber-daya terpulihkan bernilai-tambah-tinggi, pemanfaatan strategis berbagai sumber-daya tak-terpulihkan secara amat berhati hati , terfokus pada pembangunan struktural cq pembangunan, pemeliharaan, pemutahiran infrastruktur perekonomian antara lain pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan penyempurnaan tata-kelola keuangan-negara terfokus pada percepatan penyerapan anggaran berbasis kinerja agar 3 fungsi pokok kebijakan fiskal , yaitu kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, berjalan efektif , berbasis penentuan nan-tepat asumsi dasar ekonomi makro dan fiskal bertujuan pengendalian batas aman keseimbangan primer menuju positif dan peningkatan nisbah pajak (*tax ratio*) , fundamendal perekonomian nan baik dan inflasi terkendali.

3.4.Kebijakan Makro Fiskal

Tentang hampiran makro-fiskal , Israel Fainboim dan Ian Lienert , 2018 mengunggah artikel berjudul *Strengthening the Macro-Fiscal Function in Ministries of Finance* , menyitir *IMF Technical Note and Manual* , bahwa BKF dalam Kementerian Keuangan tiap negara dituntut memiliki kemampuan-kuat dalam analisis makro-fiskal sebagai sarana pembentukan kebijakan-fiskal, sedemikian rupa , agar BKF (dengan / tanpa bantuan sub-organisasi Kemenkeu yang lain) mampu menerbitkan keluaran tentang (1) dokumen strategi fiskal jangka-menengah yang mencakupi proyeksi ekonomi-makro jangka-menengah dan proyeksi fiskal jangka-menengah, (2) strategi makro-fiskal , kebijakan prioritas untuk dasar penganggaran APBN tahunan yang dimutahirkan oleh telaah-berkala APBN vs Realisasi APBN tengah tahun, (3) pernyataan risiko fiskal, (4) kemampuan keberlanjutan menanggung utang (pembiayaan) , (4) laporan kepatuhan/pelanggaran terhadap kaidah fiskal , laporan kondisi perekonomian & fiskal tahun berjalan, dan (5) proyeksi fiskal jangka-panjang , diantara 20 -50 tahun . Pada beberapa negara, fungsi makro-fiskal dilaksanakan Kementerian Keuangan sendirian, atau bersama kementerian perencanaan/BAPENAS , KSSK dan / atau Bank Sentral.

Secara bertahap NKRI melakukan perubahan struktur APBN, dari fokus sumber penerimaan dari SDA kepada sumber pendapatan perpajakan karena hasil SDA fluktuatif, dengan hampiran perluasan cakupan pajak, penganekaragaman jenis pajak, meningkatkan jumlah WP aktif bayar, meningkatkan kepatuhan pajak, mencegah kebocoran sistem perpajakan , reformasi kelembagaan perpajakan, pergeseran belanja konsumtif kepada belanja produktif, reformasi belanja subsidi agar lebih tepat jumlah & tepat sasaran.

APBN terfokus pada belanja produktif, belanja infrastruktur; belanja infrastruktur dasar, belanja kesehatan, belanja pengembangan kualitas SDM, belanja tranfer ke Daerah terutama Dana Desa. APBN berbasis strategi target defisit APBN nan-aman dan terkendali, strategi perolehan sumber pendanaan berkelanjutan (*sustainable*), pembentukan strategi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, perencanaan strategis pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi risiko ekonomi global bersifat negatif, membentuk berbagai kebijakan perlindungan daya beli masyarakat dan kebijakan membangun iklim investasi kondusif.

3.5. Kebijakan Fiskal Peduli Moneter

Setiap bangsa lazimnya menentukan prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi-makro, arah kebijakan fiskal, kebijakan & program K/L & kewilayahan , serta kebijakan partisipasi masyarakat. Departemen Keuangan adalah otoritas fiskal NKRI , namun kebijakan fiskal dirumuskan berdasar partisipasi seluruh komponen bangsa. Sesuai azas manajemen-strategi nan-ideal, kebijakan fiskal dirumuskan pula berdasar pengetahuan akan lingkungan eksternal cq lingkungan global NKRI, antara lain interdependensi antar negara, mobilitas keuangan dunia, mobilitas SDM dunia, perambatan krisis keuangan suatu negara ke negara lain menuju krisis global. Kebijakan fiskal terharmonisasi dengan kebijakan moneter, terfokus pada stabilitas moneter dan pertumbuhan perekonomian. Kedua kebijakan tersebut mempunyai berbagai persamaan target, misalnya target stabilitas-harga umum. Departemen Keuangan memiliki Badan Kebijakan Fiskal yang bertugas merumuskan kebijakan fiskal NKRI nan berkualitas dalam lingkungan eksternal cq kondisi global nan penuh ketidak pastian. Rumusan kebijakan fiskal BKF bertujuan mempengaruhi kondisi dan dinamika perekonomian NKRI untuk mencapai tujuan pembangunan. Setara Bank Sentral, BKF harus memperoleh dan menjaga kepercayaan publik. Tujuan kebijakan fiskal NKRI adalah (1) Memindahkan kelas NKRI sebagai negara kelas menengah meningkat menjadi kelas negara maju, (2) Harmonisasi kebijakan fiskal dengan kebijakan fiskal-moneter untuk menjaga kinerja transaksi modal dan transaksi keuangan, (3)Mendukung sektor listrik, gas dan air, (4) Pengembangan ekonomi kreatif, (5) menggunakan sarana reformasi perpajakan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, (6) mencipta stimulus dengan upaya menurunkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk menjaga daya beli masyarakat, (7) Pengetatan Belanja Subsidi nan boros dan tidak tepat sasaran, (8) Subsidi energi listrik, (9) Subsidi pupuk, (10) membentuk skema pembiayaan perubahan iklim untuk perlindungan lingkungan hidup

3.6. Teori APBN Perubahan

Menghadapi turbulensi global, muncullah mekanisme APBN-Perubahan sejak tahun 2015, agar kebijakan fiskal optimal berfungsi sebagai motor penggerak utama perekonomian menuju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan makin berkelanjutan. *Demographic dividend* atau eksistensi sumberdaya manusia diarahkan untuk meningkatkan produktivitas per tenaga kerja, Cetak Biru SDM berbasis ekonomi kreatif, dan Cetak Biru SDM berbasis ekonomi digital. Pada aspek sumberdaya alam , terdapat Program Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) KPK, bertujuan memperbaiki aspek tata kelola di sektor tersebut , terkait kebijakan fiskal dan penerimaan negara di sektor kehutanan, perkebunan sawit, pertambangan minerba, serta kelautan dan

perikanan. Program GNP SDA meningkatkan penerimaan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Program GNP SDA mendorong penataan perizinan, membangun sistem informasi penatausahaan dan penerimaan negara, pertukaran data, dan sinergi antar-kementerian., ditambah perbaikan sistem informasi penerimaan negara, perbaikan kebijakan insentif dan disinsentif untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum perlindungan SDA._ Kesinambungan fiskal terkait pemanfaatan / eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pemerintah hendaknya menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan fiskal lintas periode, membentuk *sovereign wealth fund*, serta mendorong perkembangan diversifikasi ekonomi .

3.7. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam APBN.

Instrumen Kebijakan Fiskal dalam APBN adalah berbagai penetapan (1)Arah pembangunan , tujuan, sasaran, target pembangunan jangka panjang dan isntrumen kebijakan,(2) Tujuan, sasaran, target pembangunan jangka pendek dan isntrumen kebijakan, (3)Keselarasan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter, (4) Skala prioritas dalam APBN, (5) Reformasi APBN , berbasis SDA menjadi berbasis Pajak, (6) Reformasi pendapatan dalam RAPBN, membangun aktivitas ekonomi fundamental, mengurangi fluktuasi anggaran & ketergantungan pada pendapatan ekstraktif SDA, (7) Reformasi jenis belanja, mengurangi belanja konsumtif dan belanja subsidi, meningkatkan belanja produktif, yaitu belanja modal dan belanja pengembangan SDM NKRI, (8) Menurunkan,menambah, menghapus dan merealokasi belanja subsidi (a) yang mendistorsi mekanisme hukum pasar bebas, (b) mendistorsi pembangunan ekonomi, (c) subsidi tidak tepat jumlah , tidak tepat momentum atau tidak tepat sasaran,(d) yang melemahkan sendi sendi ketahanan bangsa mandiri, (e) yang mencipta pengangguran terselubung (*disguise unemployment*) ,(9) Realokasi belanja pegawai, barang dan operasional ke belanja pengembangan SDM NKRI, (10) Realokasi APBN belanja modal , agar makin terfokus kepada belanja infrastruktur, penajaman / realokasi antar belanja infrastruktur itu sendiri.

3.8.Contoh Penerapan Kebijakan Fiskal

Contoh Perumusan Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut.
Pertama, penetapan dasar kebijakan. Di Indonesia, dasar perumusan Kebijakan Fiskal adalah perkembangan kondisi fiskal , antara lain adalah Rasio Pajak terhadap Product Domestic Bruto (PDB) atau tax ratio tahun 2014-2019 sekitar 10-14 persen sedangkan rata-rata rasio PNBP tahun 2014-2019 sebesar 2,63 persen. Pada tahun 2020, pemerintah telah merevisi target penerimaan pajak dan PNBP yang diprediksi meleset dari target akibat pandemi Covid-19. Pemerintah dalam merespon tantangan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kemudian melakukan perubahan postur APBN TA 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 selanjutnya dilakukan penyesuaian kembali terhadap perubahan postur APBN TA 2020 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Dalam Perpres tersebut terjadi perubahan target penerimaan pajak dan PNBP tahun 2020. Outlook penerimaan perpajakan tahun 2021 berdasarkan data

Kemenkeu diproyeksikan dalam kisaran 8,25 – 8,63 persen terhadap PDB, sedangkan outlook PNBP tahun 2021 diproyeksikan dalam kisaran 1,6-2,3 persen terhadap PDB dengan memerhatikan perekonomian Indonesia belum pulih sepenuhnya akibat dampak Covid-19 dan masih melemahnya harga komoditas utama dunia. Tantangan meningkatkan penerimaan perpajakan tahun 2021 yaitu tantangan untuk meningkatkan *tax ratio* ditengah pemulihan ekonomi nasional yang tidak mudah, perlambatan pertumbuhan sektor-sektor pajak yang memiliki kontribusi tinggi pada penerimaan perpajakan, pertumbuhan kelas menengah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita Indonesia yang memengaruhi penerimaan pajak. Disisi lain, tantangan penerimaan PNBP tahun 2021 yaitu perkembangan ekonomi dunia dan kondisi geopolitik yang berpengaruh terhadap harga minyak, gas, dan minerba, kecenderungan penurunan produksi migas (*lifting migas*) disebabkan tidak ada penemuan cadangan baru. PNBP sebagian besar masih menggantungkan pada penerimaan dari SDA, belum pada penerimaan PNBP Non SDA, terkait dengan aspek kepatuhan wajib bayar PNBP dan mengatasi permasalahan asset menganggur. Optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak dan PNBP di tahun 2021 dengan kebijakan baru luar-biasa (extraordinary measure), penyederhanaan administrasi perpajakan dan PNBP, penyesuaian pola sosialisasi insentif fiskal kepada pelaku usaha terdampak pandemi, perbaikan kebijakan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan terukur , menyelesaikan regulasi turunan UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, penggalian potensi baru dengan perubahan formula perhitungan terhadap jenis dan tarif yang sudah ada, mengintensifkan kewajiban instansi pengelolaan PNBP (IP-PNBP) dalam melakukan verifikasi dan pemantauan PNBP terintegrasi dan pengawasan PNBP oleh K/L, Pemda dan APIP), reformasi teknologi informasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam pengelolaan PNBP.

Kedua, Perumusan Fungsi Alokatif Kebijakan Fiskal. Fungsi alokatif Kebijakan Fiskal adalah sebagai instrumen meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas penggunaan dan alokasi sumber daya antar bidang/program/kegiatan dan sektor. Fungsi distributif Kebijakan Fiskal adalah sebagai alat pemerataan dan mencapai keadilan antar-kelompok penghasilan masyarakat dan antar wilayah. Kebijakan Fiskal adalah alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, sebagai instrumen meredam krisis, menstabilkan fluktuasi perekonomian dan menjaga stabilitas harga[1]. Target pembangunan tahunan biasanya mencakupi target tingkat kemiskinan, target tingkat pengangguran terbuka dan target rasio gini, target penambahan kesempatan kerja. Sebagai misal, pada suatu tahun fiskal, tema kebijakan adalah memantapkan pengelolaan fiskal untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dengan tema RKP memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan.

[1] Pada kebijakan moneter bank sentral, hubungan penargetan inflasi dan penargetan tingkat-harga adalah bahwa guncangan-kagetan inflasi merupakan dasar membentuk aksi-penargetan tingkat harga.

Ketiga, Pilihan Tujuan Fiskal atau Destinasi Fiskal. Contoh pilihan tujuan kebijakan fiskal adalah peningkatan belanja modal , pem-fokusan ulang (*refocusing*) anggaran prioritas (Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan), sinergi antara program yang relevan., peningkatan efisiensi belanja non prioritas (belanja barang & subsidi tepat sasaran), memperkuat Desentralisasi Fiskal, melaksanakan keberlanjutan & Efisiensi Pembiayaan, pengendalian defisit APBN/D dengan pembatasan nisbah defisit terhadap PDB tertentu, program/jadwal pengendalian cq penurunan nisbah utang terhadap PDB , upaya pengendalian defisit agar keseimbangan primer menuju positif , menggelar upaya pengembangan *creative financing* , penetapan target pajak terhadap PDB (*tax ratio*), program optimalisasi penggalian potensi, program peningkatan *sustainable compliance*, desain insentif perpajakan nan-efektif, perubahan tertentu hukum perpajakan, program reformasi administrasi perpajakan tertentu, penetapan target PNBP terhadap PDB, perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan BLU dan pemanfaatan BMN, program pengawasan dan pengelolaan SDA air,udara, kehutanan, kelautan & pertambangan. Pada tahun APBN tersebut, Belanja K/L antara lain berupa penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga, serta memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pengalokasian TKDD dilakukan sesuai dengan prinsip *money follows functions* dan *money follows program*,dengan memerhatikan pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan. Peningkatan efektivitas Penganggaran alokasi dan penggunaan TKDD untuk mengatasi kemiskinan dan senjang antardaerah dan antarwilayah. Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & raihan output. Pembentukan program/jadwal DBH untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal antara Pusat & Daerah, program/jadwal DTK untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur & layanan publik antar Daerah, rancangan alokasi Dana Otsus & Dais untuk mendukung pelaksanaan Otsus dan Keistimewaan DIY, program DID untuk memberikan penghargaan/perlakuan khusus kepada daerah berkinerja baik, program alokasi/supervisi Dana Desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa, dan program DAU untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah.

3.9 Kebijakan FiskaL Diluar APBN/D

Instrumen Kebijakan Fiskal Diluar APBN/D adalah sebagai berikut.

- Mendorong investasi swasta pada sektor sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan bangsa, dengan berbagai insentif fiskal, terutama perpajakan.
- Mengurangi hasrat masyarakat cq pebisnis menggunakan cadangan devisa dengan berbagai kebijakan , antar lain kebijakan tarif dan non-tarif impor barang / jasa konsumsi dan barang mewah.
- Menentukan arah pembangunan, tujuan, sasaran, target pembangunan jangka panjang dan instrumen kebijakan
- Menetapkan tujuan, sasaran, target pembangunan jangka pendek dan isntrumen kebijakan
- Menjaga keselarasan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Dalam jangka panjang , kebijakan fiskal harus seiring sejalan dan mendukung pencapaian target inflasi dan stabilitas nilai tukar. Dalam jangka pendek kebijakan fiskal tersesuai strategi terpilih KSSK sepanjang tahun berjalan.

3.10. Sejarah APBN NKRI

Kebijakan fiskal utama adalah kebijakan belanja APBN dan kebijakan perpajakan. Dibawah ini adalah laporan hasil riset sejarah APBN sejak 2019 (menjelang dan awal era pandemi) sampai dengan 2021 tak penuh, ditambah APBN 2022 adalah sebagai berikut.

Pertama, Dasar APBN. RJPMN 2020-2024 mengungkapkan tiga prinsip pembangunan, yaitu membangun kemandirian bangsa, menjamin keadilan, pembangunan berkelanjutan lestari.
Empat Arus Utama sebagai hampiran pembangunan adalah pengarus utamaan (kesetaraan) gender, 118 target pembangunan berkelanjutan, tambah 3 dan 4, memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi global minus sekitar 5 %, diwarnai penurunan pertumbuhan AS, Jerman, Rusia, Eropa,India berpotensi sampair minus 7 - 8 %, sementara negara Tiongkok dan Vietnam berpertumbuhan ekonomi positif. Pada tahun 2020 NKRI mulai mengalami pertumbuhan positif menjadi disekitar minus 2,07 %.
Pemulihan perekonomian NKRI dilakukan dengan optimalisasi penyerapan belanja APBN/APBD 2020 terfokus pada penanggulangan pandemi, memelihara daya-beli masyarakat, perlindungan sosial masyarakat dan unit-usaha. Stimulus Fiskal antara lain UU Cipta Kerja merupakan instrumen penanganan PC-PEN untuk konsumsi pemerintah , rumah tangga cq stabilitas dayabeli masyarakat berpenghasilan rendah dan investasi.

Kedua, APBN 2019. Kementerian Keuangan NKRI via http//www.kemenkeu.go.id/apbn2019 antara lain menyatakan bahwa tema besar APBN 2019 adalah adil, sehat dan mandiri, yang bermakna berdefisit makin rendah, berkeseimbangan primer makin positif, mencipta lapangan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi senjang pendapatan & kemakmuran antar-wilayah, pendapatan perpajakan mendukung kemandirian fiskal dan target pembangunan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 %, inflasi 3,5 %, nilai tukar Rp.15.000/USD, suku-bunga SPN 5,3 %, harga minyak bumi USD 70 perbarel , penambangan minyak 775 ribu barel perhari, penambangan gas 1.250 ribu barel perhari, dan cost recovery USD 10,22 M.

Realisasi APBN 2019 menunjukkan nisbah defisit APBN vs defisit keseimbangan primer terendah sejak tahun APBN 2013 antara lain karena pembiayaan utang karena penerimaan dalam negeri mencapai 90,3 % dari APBN, belanja pemerintah pusat 91,1 % dari APBN, transfer ke pemerintah daerah dan desa mencapai 98,1 % APBN, mengakibatkan keseimbangan primer mencapai 326,1 % APBN, surplus/defisit mencapai 115.2% APBN atau 2.12 % PDB 2019, pembiayaan utang 119,6 % APBN, sementara pembiayaan investasi mencapai 65,1 % APBN sesuai sumber djpb.kemenkeu yang berjudul Realisasi APBN Per 31 Desember 2019

.**Ketiga,** APBN 2020. Kontraksi ekonomi tahun 2020 terlihat pada penurunan volume transaksi sektor transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi , penyediaan makan-minum, industri jasa, perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaran. Terlihat berbagai sektor masih tumbuh positif, yaitu jasa kesehatan, jasa sosial tertentu terutama layanan

kesehatan, sektor informasi & komunikasi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, real estate, pertanian antara lain hortikultura dan palawija, kehutanan dan perikanan.

Virus masuk NKRI awal Maret 2020. Adrianta Ras Sembiring, 2020, pada Kolom detikNews , mengunggah artikel berjudul *Pandemi dan Revisi APBN* menjelaskan antara lain bahwa belanja negara meningkat dari Rp.2.540,4 T menjadi Rp.2.739,2 T dengan fokus-ulang kepada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian sebesar Rp.695,2 T , dengan memotong & mengalihkan berbagai belanja bukan prioritas, defisit APBN sebesar - 6,34 % PDB.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona l/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan RKP 2020 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR pada tanggal 28 Agustus 2019. RKP 2020 mencakupi pembangunan SDM, pemerataan wilayah, pertumbuhan ekonomi berbasis investasi dan ekspor. Lima prioritas nasional adalah pembangunan manusia & pengentasan kemiskinkan, pembangunan infrastrukur dan pemerataan kewilayahan, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan-hidup, stabilitas pertahanan dan keamanan. Dengan target defisit 6,34 % atau 1,76% PDB atau Rp.307 T .

Sumber Kemenkeu cq paparan Kemenkeu tentang 5 Fokus belanja. APBN 2020 menjelaskan adalah (1) penguatan daya saing SDM dengan target menurunkan penaggguran menjadi sekitar 5%, (2) penguatan perlindungan soaial dengan target menurunkan angka kemiskinan menjadi sekitar 9 %, gini ratio menjadi sekitar 0.380,akselerasi pembangunan infrastruktur untuk transformasi ekonomi-digital, desentralisasi fiskal dan reformassi birokrasi.
PC PEN APBN 2020 sebesar Rp.695,2 T atau USD 51,3 M diwarnai dua rumpun besar belanja negara, yaitu Rp.99,50 T untuk sektor kesehatan atau PC dan Rp. 595,70 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.

Sumber KEM-PPKF 2020 menjelaskan 5 Fokus belanja APBN 2020. Kebijakan Ekonomi Makro - Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dengan tema APBN penguatan kualitas SDM & daya saing bangsa selaras Rencana Kerja Pemerintah tentang peningkatan SDM untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam bingkai visi NKRI 2024 dan era digital. Tiga hampiran kebijakan fiskal adalah bahwa (1) kebijakan fiskal menghasilkan stimulus pertumbuhan ekonomi berbasis sektor-riil , investasi dan daya saing,(2) pengelolaan pendapatan,belanja dan pembiayaan nan efektif-efisien, dan (3) peningkatan kualitas kondisi neraca keuangan kepemerintahan , berbasis peningkatan kualitas SDM dan sistem-terelektronisasi.

Sasaran strategis kebijakan fiskal 2020 adalah (1) meningkatkan nisbah-pajak (*tax ratio*), (2) mencapai target surplus/defisit APBN, (3) pendapatan terfokus pada kebijakan perpajakan dan manajemen pendapatan pajak, (4) belanja terfokus pada pengeluaran strategis PP dan kebijakan transfer APBN ke Pemda dan Dana Desa. Belanja peningkatan kualitas ASN agar makin produktif & berintegritas dengan reformasi pelatihan, reformasi

imbalan & sanksi terfokus pada imbalan kerja, gaji ke 13, THR dan reformasi skema pensiun.
Tiga strategi penyehatan fiskal adalah mobilisasi pendapatan berbasis reformasi hukum perpajakan dan reformasi PNBP, peningkatan kualitas belanja, dan skema pembiayaan kreatif.

Reformasi belanja barang APBN 2020 bertujuan meningkatkan efektivitas & efisiensi belanja-barang, untuk mengurangi risiko defisit APBN, memberi ruang meningkatkan belanja-modal dan menekan defisit pada LO. Skema pembiayaan kreatif antara lain berbasis program KPBU. Belanja Bansos tahun 2020 terfokus pada ketepatan sasaran cq reidentifikasi target berisiko-sosial era-pandemi , pemanfaatan ICT, penguatan pemantauan dan evaluasi , pengutamaan perlindungan sosial yang berdampak pada produktivitas. Belanja subsidi 2020 terdiri atas subsidi energi bagi rumah tangga tak-mampu dan subsidi non-energi misalnya subsidi pupuk bagi petani dan SSB. Pada era pandemi, belanja modal tahun 2020 bertujuan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Belanja Transfer 2020 diwarnai perubahan dahsyat standar layanan minumum pemda dan pemdes pada era-pandemi, penyempurnaan formula DAU untuk pembangunan & layanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, reformulasi alokasi Dana Desa.

Pemulihan perekonomian NKRI dilakukan dengan optimalisasi penyerapan belanja APBN/APBD 2020 terfokus pada penanggulangan pandemi, memelihara daya-beli masyarakat, perlindungan sosial masyarakat dan unit-usaha. Stimulus Fiskal antara lain UU Cipta Kerja merupakan instrumen penanganan PC-PEN untuk konsumsi pemerintah , rumah tangga cq stabilitas dayabeli masyarakat berpenghasilan rendah dan investasi.

Sumber Siaran Pers Menko Ekuin, 2020 , menjelaskan antara lain bahwa Program PC PEN mencakupi 6 sektor yaitu sektor kesehatan, perlindungan sosial,kementerian dan lembaga, pemda, UMKM, koporasi dan insentif usaha berbasis UU 2/2020, Perpres 54/2020, Perpres 72/2020, PP 23/2020 dan PP 43/2020, berbagai Permenkeu, Permendagri 20/2020.

UU 2/2020 mengizinkan defisit APBN lebih dari 3% PDB, perubahan/pergeseran belanja/beban sesuai perkembangan situasi eksternal terakhir, penggunaan SAL, dana abadi, akumulasi dana abadi pendidikan, dana dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana dikelola BLU,dana pengurangan penyertaan-modal-negarapada BUMN, emisi Surat Utang Negara, peluasan sumber pembiayaan LN, memberi pinjaman kepada LPS, memfokusan ulang & realokasi transfer dan dana-desa, mengizinkan hibah dari PP kepada Pemda.
PP23/2020 mengatur 4 modalitas instrumen APBN PEN, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah pada perbankan, investasi pemerintah dan penjaminan pemerintah. Selanjutnya, PP43/2020 mengatur investasi langsung atau pinjaman kepada BUMN dan Pinjaman PEN Daerah.

Pada tahun 2020 sebagai tahun puncak pertama era pandemi, ternyata revisi APBN pendapatan negara (hanya ?) mencapai sekitar 10 %. Makalah Nurdian Akhmad, 2020, berjudul *Postur APBN-P 2020: Pendapatan Turun, Utang Membengkak*, menguraikan

bahwa mengantisipasi dampak pandemi virus corona atau Covid-19 terhadap pendapatan dan belanja negara tahun ini, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Perpres tersebut untuk melengkapi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi . Pemerintah mengubah perkiraan pendapatan dan belanja negara, defisit anggaran, hingga pembiayaan. Termasuk pembiayaan utang yang membengkak hampir tiga kali lipat. Perkiraan pendapatan negara diturunkan menjadi Rp 1.760,8 triliun, turun sekitar10 persen atau sekitar Rp 472,3 triliun dari pagu sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 2.540 triliun. Anggaran belanja membengkak Rp 73 triliun menjadi Rp 2.233,19 triliun. Defisit anggaran ditetapkan Rp 852,93 triliun atau 5,07 % PDB dari target defisit semula sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76 % PDB , defisit keseimbangan primer dari Rp 12 triliun menjadi Rp 517,7 triliun. Pendapatan negara dalam APBN-P 2020 terdiri dari penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar Rp 1.462 triliun dari Rp 1.865 triliun, PNBP diperkirakan Rp 297,7 triliun dari Rp 366,9 triliun, pendapatan APBN berbentuk hibah tetap sama, sebesar Rp 498,74 triliun. Terfokus pada belanja kesehatan cq vaksinasi, jaring pengaman sosial dan penjagaan/pemulihan kondisi perekonomian, APBN belanja negara terdiri dari pemerintah pusat Rp 1.851 triliun, membengkak dari sebelumnya Rp 1.683 triliun, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari Rp 856,9 triliun menjadi Rp 762,7 triliun. Anggaran dana desa akan digunakan untuk jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan penanganan wabah.

Perpres 72/2020 terfokus belanja Rp.695,2 T tersesuai dinamika/perubahan kebijakan-stimulus , terfokus pada sektor kesehatan dan bantuan-tunai pada enam kluster , antara lain Kluster Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM, Insentif Korporasi , dan Kesehatan. Kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal berbentuk 5 Prioritas Nasional pada RKP 2020 sebagai dasar APBN 2020 . Nilai tukar Rp/USD pada tahun 2020 disekitar 14.577, ditandai 16.741 pada awal April, dan 14.105 akhir Desember.

Pada tataran teori, *Countercyclical policy* adalah kebijakan fiskal melawan suatu tendensi alamiah perekonomian bertujuan membalik siklus alamiah nan-buruk tersebut, *procyclical policy* adalah kebijakan fiskal selaras bahkan menunganggi kondisi alamiah perekonomian bersiklus baik. Pada situasi perekonomian bersiklus menurun dalam masa pandemi, pemerintah dan banks sentral membuat berbagai kebijakan mencegah pelanjutan siklus buruk tersebut dan membalik siklus menjadi siklus naik perekonomian (*counter cyclical*) , dengan stimulus fiskal berupa penurunan tarif pajak dan pelonggaran kewajiban pajak, berbagai subsidi dan bansos kepada masyarakat dan bantuan keuangan bagi UKM. Pada tataran teori, *extraordinary measure* (*piranti luarbiasa*) adalah strategi , kebijakan (policy) , tindakan, cara, metode, hampiran tidak lazim untuk menghentikan sesuatu yang tidak diinginkan, antara lain dengan membuat kebijakan fiskal tertentu untuk menghentikan siklus-alamiah nan-merugikan.

Sumber DJPB dari Kemenkeu menjelaskan antara lain bahwa pada tahun 2020, realisasi APBN untuk perlindungan sosial Rp.216,59 T, kesehatan Rp.62,67 T, kegiatan padat karya K/K dan Pemda dan kegiatan lain Rp.65,22 T, UMKM Rp.112,26 T, korporasi Rp. 60,73 T, insentif pajak dll sebagai insentif usaha Rp.58,38 T., kegiatan non-PEN

Rp.13,16 T oleh tiap K/L terutama untuk perlindungan pegawai negeri. Pada akhir 2020 NKRI memasuki tahap *new normal* , tahun 2021 memasuki tahap pemulihan ekonomi nasional. Defisit APBN 2020 dua kali lipat batas maksimum atau 3 % PDB , realisasi sebesar 6,1 % PDB antara lain karena kenaikan 12, 2 % belanja negara karena konsumsi pemerintah dan dukungan langsung konsumsi rumah tangga & investasi terfokus pada masyarakat berdaya-beli rendah & rentan virus. Indikator investasi antara lain adalah volume penjualan semen dan volume impor barang modal, terkait komponen PMBT. Neraca perdagangan surplus USD 21,74 M . Ekspor 2020 didominasi non-migas sekitar 95% . Besar eskpor sebesar USD 167,68 M menurun 2,61 % dibanding 2019, indikator ekspor antara lain adalah CPO dan batu-bara , berrbagai jenis barang dan jasa, antara lain logam dasar mulia. Impor 2020 sebagian besar atau hampir 90% adalah impor nonmigas sebesar USD 127,31 M, impor migas sebesar USD 14,26 M.Cadangan devisa akhir 2020 sebesar USD135,90 M, cukup sehat karena berada diatas tolok-ukur internasional dalam besaran minimum 3 bulan impor.

Keempat, APBN 2021. Sumber *APBN Kita* dari Kemenkeu , Edisi Desember 2020, menjelaskan antara lain bahwa APBN Tahun 2021 terfokus pada empat hal yaitu penanganan kesehatan fokus pada vaksinasi, perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan, dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha dan reformasi struktural bidang kesehatan,pendidikan, perlindungan sosial.

KEM-PPKF 2021 terdiri atas kebijakan makro, fiskal dan penganggaran cq belanja masa pandemi untuk percepatan pemulihan sosial-ekonomi sebagai kelanjutan APBN cq belanja APBN 2020 dan reformasi struktural untuk menghindari risiko stagnasi perekenomian (*middle income trap*) menuju target 2045. BKF Depkeu merumuskan kebijakan APBN berbasis kondisi perekonomian global dan domestik, berbasis program pembangunan nasional, berbasis kondisi keuangan negara , kondisi sosial ekonomi negara, pelanjutan kebijakan sukses tahun tahun APBN lalu, penghentian mata anggaran yang tak berbuah sukses, terfokus pada pemanfaatan sumber-daya terpulihkan bernilai-tambah-tinggi, pemanfaatan strategis berbagai sumber-daya tak-terpulihkan secara amat berhati hati , terfokus pada pembangunan struktural cq pembangunan, pemeliharaan, pemutahiran infrastruktur perekonomian antara lain pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan penyempurnaan tata-kelola keuangan-negara terfokus pada percepatan penyerapan anggaran berbasis kinerja agar 3 fungsi pokok kebijakan fiskal , yaitu kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, berjalan efektif , berbasis penentuan nan-tepat asumsi dasar ekonomi makro dan fiskal bertujuan pengendalian batas aman keseimbangan primer menuju positif dan peningkatan nisbah pajak (tax ratio) , fundamendal perekonomian nan baik dan inflasi terkendali.

Pada APBN 2021, KEM-PPKF mencakupi 3 prinsip utama, yaitu kerangka-kerja makro-ekonomi (kebijakan pembangunan ekonomi) , kebijakan fiskal (jangka-menengah, jangka-pendek, kebijakan fiskal tahun-yang-akan-datang dan risiko fiskal), dan Kebijakan APBN bagi K/L terfokus pada belanja prioritas masa-pandemi , belanja proyek/program/kegiatan reformasi keuangan NKRI & proyek/program/kegiatan pembebasan stagnasi NKRI dari kondisi negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

APBN 2021 terfokus pada program vaksinasi nasional dan penyediaan sarana kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan dan dukungan kepada dunia usaha, dan reformasi struktural. Kebijakan belanja 2021 mencakupi PP sebesar Rp.1.951,3 T, transfer ke Daerah Rp.796,3 T . Target vaksinasi gratis tahun 2021 adalah 185 juta jiwa , ditambah pembelian APD dan perbaikan fasilitas kesehatan. .Asumsi makro RAPBN 2021 mencakupi asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5 %, laju inflasi 3 %, nilai tukar Rp.14.600/per USD, tingkat bunga SUN berjangka 10 tahunan 7,29 %, harga minyak mentah Indonesia USD 45 perbarel, penambangan harian minyak-bumi 705 ribu barel perhari, gas-bumi 1.007 barel perhari. Pendapatan perpajakan Rp.1.481, 9 T , PNBP Rp. 293,5 T, Hibah Rp.0,9 T.

Lizsa Egeham, 2021, mengunggah artikel berjudul; *Jokowi Minta Kementerian dan Lembaga Percepat Realisasi APBN dan APBD 2021* , menjelaskan antara lain sebagai berikut. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penyerapan APBN 2021 sampai bulan September 2021 mencapai Rp 1.806,8 triliun. APBN tahun 2021 masih banyak digunakan untuk penanganan Covid-19, sehingga pemerintah berhasil dalam penanganan dari sisi kesehatan dan memulihkan kembali perekonomian nasional secara bertahap.Penggunaan dana PEN sampai 22 Oktober 2021 sebesar 58,3 persen dari pagu anggaran RP 744,77 triliun.Kerja keras APBN untuk penanganan covid cukup berhasil memulihkan ekonomi secara bertahap. Selfie Miftahul Jannah , 2021, mengunggah artikel berjudul *Sri Mulyani Sebut Pendapatan Negara 2021 Capai 67,5% per Agustus*, menyatakan berbagai hal sebagai berikut. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Agustus 2021 mencapai Rp1.177,6 triliun atau sekitar 67,5 persen dari target realisasi pendapatan APBN 2021 yang mencapai Rp1.743,6 triliun, dari penerimaan negara dari pajak Rp741,3 triliun, bea dan cukai Rp158 triliun, dan PNBP sebesar Rp277,7 triliun .Capaian penerimaan negara dari pajak menyumbang pemasukan terbesar yaitu senilai 60 persen dari target APBN yang telah ditentukan di 2021 yaitu sebesar Rp1.229,6 triliun,bea dan cukai sebesar Rp158 triliun atau 73,5 persen dari total target penerimaan negara dalam satu tahun yaitu Rp215 triliun, PNBP pada 31 Agustus 2021 sebesar Rp277,7 triliun atau 93,1 persen dari target Rp298,2 triliun.

Syaharani Putri, 2021, mengunggah artikel berjudul *Faisal Basri Prediksi Utang Pemerintah Capai Rp 8,1 Kuadriliun: Sudah Merongrong* , antara lain mengungkapkan sebagai berikut.Hingga Agustus 2021, utang pemerintah mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 40,85 persen, karena bertambahnya utang yang diterbitkan berupa Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebesar Rp 80,1 triliun. Sementara utang SBN dalam valuta asing berkurang sebesar Rp 15,42 triliun. Begitu juga pinjaman yang turun Rp 9,41 triliun. Dari total utang Rp 6.625,43 triliun itu, mayoritas sebesar 87,43 persen di antaranya berasal dari SBN senilai Rp 5.702,49 triliun dan pinjaman Rp 833,04 triliun. Dari SBN terbagi menjadi domestik dan valas masing-masing sebesar RP 4.517,71 triliun dan Rp 1.274,68 triliun. Sedangkan total pinjaman sebesar Rp 833,04 triliun itu terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri masing-masing sebesar Rp 12,64 triliun dan Rp 820,4 triliun. Faisal Basri menilai Indonesia tidak akan terancam gagal dalam pelunasan kewajibannya. Ia yakin pemerintah akan mengambil tindakan agar utang Indonesia lekas dibayar.

Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan , 2022, menerbitkan siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan , 2022, berjudul APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional , antara lain mengungkapkan sebagai berikut. Kinerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021, meskipun tertahan pandemi .Terjadi gangguan sisi pasok/*supply* & tekanan inflasi di muka bumi, menyebabkan kebijakan pelonggaran restriksi sosial untuk peningkatan aktivitas ekonomi global, menyebabkan penurunan angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekpansi, dan meningkatnya aktifitas perdagangan dunia. APBN Indonesia menyalurkan 276 juta dosis kepada masyarakat , mencapai sekitar 51% populasi di akhir tahun 2021, mendudukkan NKRI sebagai negara nomor lima tertinggi di dunia.

Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 , Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) berjalan efektif menjaga momentum pemulihan ekonomi, inflasi terjaga pada tingkat rendah dan stabil, stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik diproksi stabilitas nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Sektor perbankan relatif solid , tingkat kecukupan modal memadai, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh menyebabkan pertumbuhan kredit.

Perdagangan global dan kinerja perekonomian domestik kembali pulih , mendorong kenaikan kinerja Pendapatan APBN tahun 2021, diakselerasi kebijakan insentif perpajakan bagi dunia usaha. Peningkatan harga komoditas global mendorong perbaikan kinerja penerimaan APBN dari sisi perdagangan internasional dan PNBP, pembiayaan utang dapat ditekan lebih rendah dari target/rencana.

Pada tataran ekonomi makro , pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1-2021 terkontraksi 0,7% karena kenaikan Covid-19 setelah periode Nataru, pertumbuhan ekonomi Q2-2021 menguat 7,1% ketika pandemi terkendali, pertumbuhan Q3-2021 kembali mengalami perlambatan ke 3,5% karena varian Delta, namun masih lebih baik dibanding Thailand dan Malaysia. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan November 2021 meningkat signifikan ke level 118,5, sementara Mandiri Spending Index per 19 Desember pada tingkat 132,8, atau 32,8 pesen lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Dari sisi investasi, konsumsi listrik industri dan bisnis November masing-masing tumbuh 14,5% dan 5,7%, penjualan kendaraan niaga tumbuh 28,4%, impor bahan baku dan barang modal tumbuh 23,1% dan 60,5%. PMI manufaktur November berada pada tingkat ekspansif 53,9. Tingkat inflasi 2021 sebesar 1,87% (yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi 2020, terjaga pada tingkat rendah dan stabil seiring berkat bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, koordinasi pemerintah pusat, daerah dengan otoritas moneter. Pemerintah menjaga akses pangan masyarakat, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi. Program perlindungan sosial berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, terjadi penurunan tingkat pengangguran dari 7,07 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,49 persen pada Agustus 2021, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 10,19 persen pada September 2020 menjadi 10,14 persen pada Maret 2021, tingkat ketimpangan turun dari 0,385 pada September 2020 menjadi 0,384 pada Maret 2021. Kinerja Pelaksanaan APBN diproksi realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, atau 114,9% dari target , dengan kinerja pertumbuhan 21,6% dibandingkan realisasi 2020.. Realisasi penerimaan perpajakan Rp1.546,5 triliun atau 107,1% dari target APBN 2021 , setara tingkat pra-pandemi 2019 sebesar Rp1.546,1 triliun, karena stimulus pajak. Penerimaan

PNBP berlatar belakang meningkatnya harga pasar komoditas minyak mentah, minerba, dan CPO), perbaikan layanan PNBP K/L , realisasi penerimaan hibah mencapai Rp4,6 triliun. Pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun , atau 21,6% lebih tinggi dari APBN Rp 1.743,6 triliun. Realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun , meningkat 7,4 persen dari realisasi 2020, untuk mengatasi varian delta pada paruh kedua tahun 2021 dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.001,1 triliun atau meningkat 9,2 persen dari realisasi tahun 2020, terdiri dari Realisasi belanja K/L Rp1.189,1 triliun lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 sebesar 12,2 persen. Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan covid-19 dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan juga bantuan pelaku UMKM. Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk program vaksinasi, biaya perawatan pasien covid, insentif nakes, serta dukungan sarpras di Rumah Sakit. Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial tertuju pada Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah, serta Bantuan Subsidi Kuota Internet.

Realisasi belanja non-K/L mencapai Rp812,0 triliun meningkat 5,0 persen dibanding realisasi 2020, antara lain terdiri dari Pembayaran bunga utang mencapai Rp343,5 triliun atau lebih rendah dari pagu dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp373,3 triliun , belanja Subsidi sebesar Rp243,1 triliun atau meningkat 23,9 persen dari tahun 2020 untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pembebasan/diskon listrik, subsidi bunga UMKM, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi, dan subsidi pajak DTP.

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 mencapai Rp785,7 triliun atau 98,8 % APBN, meningkat 3,0 persen dibandingkan 2020, terkait kemampuan pemenuhan persyaratan untuk tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa.

Pembiayaan 2021 terfokus untuk menutup defisit dengan realisasi Rp868,6 triliun atau 86,3 persen dari target APBN sebesar Rp1.006,4 triliun. Anggaran defisit sebagian untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung penguatan reformasi. Realisasi pembiayaan utang di tahun 2021 mencapai Rp867,4 triliun atau 73,7 persen dari targetnya dalam APBN sebesar Rp1.177,4 triliun, sebagian dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU sebesar Rp142,5 triliun.

Karena sukses kinerja menekan defisit agar lebih rendah, peningkatan pendapatan negara, strategi optimalisasi pembiayaan anggaran, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp84,9 triliun, jauh lebih rendah dari tahun 2020 sebesar Rp245,6 triliun, bertujuan dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah yang tertunda, agar kesehatan fiskal APBN ke depan semakin baik dalam mendukung konsolidasi fiskal 2023.

Kelima, APBN 2022.

APBN Tahun 2022 berlatar belakang meredanya tingkat kematian massal, ppelanjutan Program PEN, pembangunan Ibu Kota Baru, persiapan Pemilu 2024 dan prioritas nasional lain, dengan kesadaran pentinya sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta pemangku kebijakan di sektor riil untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, implementasi UU HPP berlatar belakang partisipasi masyarakat terutama dalam Program Pengungkapan Sukarela

APBN 2022 telah disahkan DPR. Dengan asumsi era-new-normal, APBN 2022 terfokus pada sektor kesehatan, perlindungan sosial masyarakat berisiko sosial, peningkatan kualitas SDM bangsa, pembangunan infrastruktur, desentralisasi fiskal dan pemerataan kemakmuran daerah, reformsai APBN berbasis *zero-based budgeting* , terfokus pada (1) program prioritas, dan berbagai kebijakan paripurna pengendalian pandemi 2022, (2) reformasi program perlindungan sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, UU Cipta-Kerja cq Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, (3) reformasi pembangunan SDM cq reformasi pendidikan berdimensi pembangunan industri pengajaran dan industri riset cqprogram adopsi teknologi dan program beasiswa, pencocokan strategi pembangunan bangsa, kebutuhan tenaga terdidik, lapangan kerja , materi pendidikan formal , vokasi dan program pemagangan, sarana pendidikan, dan program merdeka belajar, (4) penguatan layanan dasar , peningkatan produktivitas bangsa melalui infrastruktur konektivitas & mobilitas berbasis teknologi-informasi, penyediaan infrastruktur energi & pangan tersesuai daya-beli berbasis KPBU, (5) manajemen Dana Transfer Umum , Dana Alokasi Fisik, dana Alokasi Non Fisik , dana Otonomi Khusus Papu dan optimalisasi Dana Desa , (6) penguatan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui reformasi perrpajakan, PNBP .

APBN 2022 bertema pemulihan ekonomi cq dunia-usaha dan reformasi struktural , bertarget pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5 % , dengan perkiraan kurs Rp.14.600 per USD, bunga SBN berjangka 10 tahun disekitar 7,29 %, harga minyak mentah USD 45 perbarel, target penambangan 705 ribu barel minyak bumi perhari dan 1,007 barel gas-bumi setara minyak perhari, target defisit APBN 5,5 % PDB sebesar Rp.971, 2 T.
APBN untuk kesehatan Rp. 169, 7 T, pendidikan Rp.550 T, perlindungan sosial Rp.186, 64 T, kesehatan Rp.214,95 T, kegiatan prioritas padat karya K/K dan Pemda dan kegiatan lain Rp.117,94 T, UMKM dan, korporasi Rp. 162,83 T, insentif pajak dll sebagai insentif usaha Rp.62,83 T, kegiatan non-PEN terfokus pada peningkatan akuntabilitas K/L dan Pemda. Konsolidasi fiskal tercermin pada realisasi APBN 2021 diharapkan sebagian besar berkemungkinan sesuai rencana, antara lain target pendapatan negara, target penerimaan pajak Rp.1,229, 6 T dan target defisit terhadap PDB. Belanja K/L Rp.1.032 T, transfer ke daerah dan dana Desa Rp.795, 5 T.

APBN 2022 berlandas asumsi perekonomian global makin membaik dengan latar belakang perubahan sistem perekonomian digital berdampingan dengan covid , dalam lingkungan hidup ketidakpastian varian baru & sukses kerjasama global masih tidak menentu. Asumsi makro RAPBN 2022 mencakupi asumsi pertumbuhan ekonomi 5,0 sampai 5,5 %, laju inflasi 3 %, nilai tukar Rp.14.350/per USD, tingkat bunga SUN berjangka 10 tahunan 6,82 %, Harga minyak mentah Indonesia USD 63 perbarel, penambangan harian minyak-bumi 703 ribu barel perhari, gas-bumi 1.036 baerl perhari. Target pembangunan 2022 mencakupi capaian pengangguran-terbuka 5,5-6,3 %, target

tingkat kemiskinan 8,5-9 %, target tingkat ketimpangan (nisbah gini) 0,376- 0,378, indeks pembangunan manusia 7341-73,46,nilai-tukar-petani 103-105, nilai-tukar-nelayan 104-106. Pendapatan 2022 sebesar Rp.1.846, T, terdiri atas perpajakan Rp.1.510 T, PNBP Rp.335 T, hibah Rp.0,6 T.Belanja PP Rp.1.944,5 T. APBN Belanja 2022 sebesar Rp.1.944,5 T, target defisit APBN 4,85 % PDB sebesar Rp.868 T dengan sokongan APBN Pembiayaan Rp.868 T.

Keenam, APBN 2023.

Warta Ekonomi, 2022, mengutip berbagai keterangan-publik MenKeu NKRI, menyajikan artikel berjudul RAPBN 2023: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,3% - 5,9%, antara lain mengurai berbagai hal sebagai berikut. Pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023, diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% sampai dengan. 5,9%. Adapun inflasi 2,0% sampai dengan 4,0%, nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp14.300 sampai dengan Rp14.800 per USD dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34% sampai dengan 9,16%. Untuk harga minyak mentah Indonesia diusulkan sebesar USD80 sampai dengan USD100 per barel, lifting minyak bumi 619 ribu sampai dengan 680 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,02 juta sampai dengan 1,11 juta barel setara minyak per hari. Pendapatan negara akan meningkat dalam kisaran 11,19% sampai dengan 11,70% PDB, belanja negara mencapai 13,80% sampai dengan 14,60% PDB serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46% sampai dengan -0,65% PDB. Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3% antara -2,61% sampai dengan -2,90% PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58% sampai dengan 42,42% PDB. Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah yaitu (1) lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia - Ukraina dan (2) percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat, ditambah berbagai potensi risiko lain misalnya (3) biaya dana (*cost of fund*) yang tinggi, (4) kenaikan harga komoditas, dan (5) risiko stagflasi. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu (1) krisis pangan, (2) krisis energi dan (3) krisis keuangan.Untuk merespon kondisi tersebut, APBN didorong berfungsi sebagai *shock absorber* dengan cara melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi di tahun 2023 yang merupakan tahun pertama defisit maksimal 3% PDB sejak merespons kondisi luar biasa pandemi.

3.11.Teori Kebijakan Fiskal

Teori Kebijakan Fiskal terbagi menjadi teori kebijakan masa normal dan masa pandemi.

3.11.1.Domain Kebijakan Fiskal

Hulu Kebijakan Fiskal adalah teori ekonomi umum yang bertujuan mencapai kondisi ekonomi ber-pemerkerjaan-penuh, pertumbuhan ekonomi berlambar stabilitas harga (*full employment, economic growth, dan price stability*) .

Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : (1)Kebijakan ekonomi mikro, adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut, (2)Kebijakan ekonomi meso, adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu, dalam tataran ilmu ekonomi regional dan (3) Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang mencakupi semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat), kebijakan makro yang mempengaruhi kebijakan meso dan kebijakan mikro.

Kebijakan fiskal yang terharmonisasi dengan kebijakan moneter yang terfokus pada stabilitas moneter dan pertumbuhan perekonomian. Kedua kebijakan tersebut mempunyai berbagai persamaan target, misalnya target stabilitas-harga umum.

Stabilitas ekonomi-makro digambarkan oleh hubungan-seimbang-selaras antara berbagai aspek-utama ekonomi-makro , yaitu (1) permintaan domestik dan output domestik, (2) neraca pembayaran (*balance of payment*), tersesuai rencana defisit APBN, pendapatan & pinjaman (pembiayaan), (3) pendapatan fiskal dan pengeluaran APBN, (4) tabungan dan investasi.

Tak ada ukuran baku bertaraf global untuk stabilitas/instabilitas tiap variabel ekonomi-makro seperti pertumbuhan PDB, inflasi, defisit fiskal, defisit neraca-berjalan, dan besar cadangan internasional. Instabilitas ekonomi-makro ditandai oleh (1) Defisit neraca-berjalan dibiayai pinjaman-publik jangka-pendek, (2) Gejala peningkatan besar utang-publik, (3) Inflasi berdigit-ganda dan (4) Stagnasi / penurunan PDB.

Terdapat tiga hampiran kebijakan ekonomi-makro, yaitu (1) hampiran terfokus pada permintaan versi Keynesian, (2) hampiran harapan-rasional dan pasar-efisien versi hampiran-neoklasik, dan (3) hampiran terfokus pada pertumbuhan jangka-panjang berbasis inovasi versi ekonomi-inovasi.

Kebijakan pemerintah terbagi atas kebijakan ekonomi dan kebijakan nonekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah terbagi atas kebijakan ekonomi-makro dan kebijakan ekonomi-mikro.

Kebijakan ekonomi-makro mencakupi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pengendalian nilai tukar dan kebijakan penghasilan dan harga. Untuk pengendalian nilai tukar, sebagian negara (1) mengizinkan mata uangnya mengambang bebas pada tarif harga pasar , (2) sebagian negara menggunakan nilai tukar tetap atau mengelola apresiasi-depresiasi mata uangnya. Apabila nilai tukar dikendalikan, pemerintah menerapkan berbagai sarana kendali antara lain belanja modal atau aliran modal masuk-keluar negeri. Sebagai sarana yang jarang berhasil, *Income Policy* adalah sarana pengendalian ekonomi makro yang ke empat ; berupa pengendalian langsung upah dan harga, merupakan sarana gawat-darurat pengendalian inflasi tatkala kebijakan moneter utama tak berdampak cukup baik, misalnya pengendalian harga BBM, UMR dll.

Kebijakan ekonomi mikro antara lain kebijakan penetapan harga minimum/maksimum untuk suatu komoditas.

3.11.2. Kebijakan Ekonomi-Makro Pemerintah dan Bank Sentral.

Ilmu ekonomi-makro mencakupi studi kecenderungan hakiki perekonomian seperti inflasi, tingkat pertumbuhan perekonomian, PDB, dan pendapatan nasional (national income) , serta perubahan tingkat pemerkerjaan (employment).Narayana Kocherlakota , 2009 mengunggah artikel berjudul *Modern Macroeconomic Models as Tools for Economic Policy* , menjelaskan bahwa pemodelan ekonomi-makro perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber-daya negara tersebut, keterbatasan rancang-bangun APBN oleh pendapatan, menjelaskan preferensi individual tiap negara dan sasaran unit-usaha, menjelaskan perubahan perilaku cq ekspektasi-rasional rumah tangga dan perusahaan, dalam bentuk pemodelan matematis dalam tatanan *dynamic stochastic general equilibrium modeling*.

Kebijakan ekonomi makro mencakupi antara lain (1) kebijakan moneter (bank sentral) , (2) kebijakan fiskal (pemerintah) dan (3) kebijakan perdagangan LN , dijelaskan sebagai berikut.

1. Diluar kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan ekonomi moneter bank-sentral dilakukan terutama melalui operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan batas maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, perubahan tingkat suku bunga diskonto, jual-beli surat berharga SBI dan SBPU untuk pengendalian tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar .
2. Kebijakan Fiskal di bidang perpajakan bertujuan untuk mencapai target pendapatan APBN, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Kebijakan perdagangan luar negeri mencakupi kebijakan subsidi, akselerasi pertumbuhan industri tertentu , deregulasi peraturan ekspor, kebijakan tarif ekspor-impor, substitusi impor, harmonisasi dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan jetenagakerjaan, dan kebijakan industri.

3.11.3. Teori Kebijakan Fiskal.

Terjalin dengan kebijakan moneter bank-sentral, kebijakan fiskal pemerintah dilakukan melalui pengaturan belanja-APBN dan tarif pajak dalam perencanaan/penargetan pertumbuhan perekonomian. Kebijakan fiskal dan moneter harus serasi-terpadu. Kebijakan-fiskal dirancang pada tataran stabilisasi-aliran sumberdaya-sektor publik kedalam siklus bisnis. Stabilitas sektor publik diproksi nisbah *net worth* banding *national income, current expenditure* banding *national income*, dan *public sector income* banding *national income*. Strategi fiskal sebuah bangsa bertujuan agar pendapatan nasional (*national income*) berkembang , menyebabkan *net worth* positif , menyebabkan surplus pendapatan APBN vs belanja APBN.

Adam Hayes, 2021, dalam artikel berjudul *Fiscal Policy* menjelaskan antara lain sebagai berikut. Kebijakan fiskal merujuk kepada keputusan pengeluaran APBN dan kebijakan perpajakan yang bertujuan mempengaruhi kondisi perekonomian umumnya, kondisi ekonomi-makro khususnya , termasuk permintaan agregat akan barang & jasa, pemerkerjaan, inflasi dan pertumbuhan perekonomian. Kebijakan fiskal seringkali dibedakan dengan kebijakan moneter bank sentral. Kebijakan fiskal pada umumnya

berdasar gagasan John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa pemerintah dapat menstabilisasi siklus bisnis dan mengatur output perekonomian. Pada situasi resesi, pemerintah menerapkan kebijakan-fiskal-eskpansif dengan kebijakan pemurunan tarif pajak penghasilan untuk meningkatkan permintaan- agregat dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Menghadapi gejala peningkatan laju-inflasi dan pertumbuhan perekonomian berlebih-batas-sehat, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal kontraktif dengan meningkatkan tarif PPh untuk mengurangi hasrat konsumsi , mengurangi belanja APBN, menyebabkan APBN mengalami surplus. Pemerintah memilih kebijakan APBN defisit pada kondisi perekonomian melesu, memilih kebijakan APBN surplus pada kondisi perekonomian berkembang

Sumber lain menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait dengan tingkat pengeluaran tersesuai pendapatan APBN Kebijakan fiskal menjabarkan perilaku pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan APBN untuk mendanai pengeluaran rutin APBN dan transfer kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Pendapatan pemerintah diperoleh dari menghimpun pajak dan pinjaman, selain endowmen seperti cadangan migas dan hasil tambang lain.

Sumber <="" div=""> , 2021, menunggah artikel berjudul *Fiscal Policy: Meaning and Instrument* menjelaskan berbagai hal sebagai berikut.

- Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pengaturan/penargetan pendapatan APBN dan belanja APBN yang bertujuan mencapai tingkat pendapatan nasional tertentu, tingkat produksi dan tingkat pemerkerjaan (*employment*) tertentu , yang bertujuan menghapus/menghindari berbagai hambatan menuju tujuan tersebut. Penurunan tarif pajak yang tidak ditabung meningkatkan konsumsi publik & permintaan (demand) akan barang/jasa, peningkatan APBN belanja publik (*public expenditure*) masa depresi-ekonomi meningkatkan permintaan agregat barang/jasa, mendorong unit usaha memperbesar volume pruduksi dan menyebabkan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan APBN melalui dampak-multiplier.
- Kebijakan APBN Defisit diterapkan kala depresi ekonomi karena meningkatkan pendapatan-nasional .Kondisi defisit adalah lebihan belanja APBN di atas perolehan pendapatan APBN bertujuan meningkatkan pendapatan-nasional oleh dampak-berantai (*multiplier effect*) kenaikan belanja APBN. Sebagai misal, bila MPC sebesar 2/3, dampak-berantai adalah 3 , berarti setiap Rupiah kenaikan belanja APBN menyebabkan kenaikan pendapatan-nasional 3 kali lipat. Kebijakan penurunan tarif pajak PPh karena itu haris bersamaan dengan peningkatan besar belanja APBN.
- Kebijakan APBN Surplus dipilih pada saat perekonomian-berkembang , dimana APBN pendapatan diatur lebih besar dari APBN pengeluaran , bertujuan mengendalikan tekanan-inflasi pada perekonomian , dengan cara menaikkan tarif PPh untuk mengurangi hasrat konsumsi dengan/tanpa penurunan besar belanja APBN.
- Kebijakan APBN seimbang adalah kebijakan fiskal berdampak ekspansi perekonomian , apabila kenaikan jumlah belanja APBN diatur sebesar taksiran

kenaikan pendapatan APBN pajak , berdampak meningkatkan pendapatan-nasional-neto , karena reduksi konsumsi akibat kenaikan pajak tidak-sebesar belanja APBN.

- Kebijakan fiskal kompensasian (*compensatory fiscal policy*) secara berkesinambungan lintas-tahun fiskal untuk mengkompensasi kecenderungan inflasi/deflasi pekeronomian dengan manipulasi pajak dan pengeluaran APBN.
- Kecenderungan ekonomi-deflasi dilawan dengan peningkatan pengeluaran APBN melalui kebijakan APBN Defisit dan penurunan tarif pajak , sebagai upaya kompensasi kelesuan investasi-privat dan meningkatkan permintaan-efektif, pemerkerjaan (*employment*), PDB dan penghasilan.
- Bila terdapat kecenderungan inflasi , APBN pengeluaran diperkecil sehingga mencapai saldo surplus APBN dan tarif PPh dinaikkan untuk stabilisasi perekonomian pada tingkat pemerkerjaan paripurna (*full employment level*).
- Terdapat dua hampiran kebijakan fiskal kompensasian (*compensatory fiscal policy*), yaitu kebijakan fiskal ber-stabilisator (*built in stabilizer*) dan Kebijakan fiskal sukarela (*discretionary fiscal policy*) , dijelaskan di bawah ini.

3.11.3.1. Kebijakan Fiskal Ber-Stabilisator .

Kebijakan fiskal ber-stabilisator (*built in stabilizer*) , adalah penyesuaian-otomatis pengeluaran APBN dan pajak terkait perubahan naik/turun perekonomian yang berulang , tanpa perlu aksi-pemerintah. Instrumen penyesuaian otomatis berbentuk kebijakan tarif PPh korporasi, PPh perorangan, pajak atas komoditas tertentu (excise tax) seperti BBM dan rokok, pajak usia tua, asuransi dan tunjangan tuna-karya, dengan rancang-bangun tersesuai perubahan pendapatan-nasional (national income). Mekanisme otomatis misalnya adalah , bila bisnis melesu, pendapatan nasional menurun, maka badan usaha dan perorangan sebagai WP terkena tarif pajak pada kisaran/range lebih rendah, menyebabkan target APBN pajak lebih rendah , belanja APBN untuk bantuan-sosial & tunjangan-pengangguran meninngkat. Bila ekonomi-naik-daun, WP naik-hasil kena-pajak, otomatis masuk tarif pajak kisaran/range lebih tinggi.

Maslahat Kebijakan Fiskal Berstabilisator Otomatis adalah

- Sebagai bantalan-peredam-kerjut (cushion) bila daya-beli-privat menurun , mengurangi derita konsumsi saat deflasi,
- Melindungi kejatuhan pendapatan nasional dan belanja konsumsi masyarakat,
- Sifat otomatis kebijakan tersesuai situasi-kondisi mengurangi tugas regulator dalam koreksi-regulasi ,
- Hampiran kebijakan fiskal ber stabilisator otomatis mengurangi salah-ramal dan salah APBN menghadapi ketidak pastian masa-depan, (5) kebijakan ini berlaku sebagai kebijakan jangka pendek dan jangka-panjang.

Kebijakan-fiskal-berstabilisator tergantung pada

- Elastisitas penerimaan pajak,
- Tingkat / tarif perpajakan, dan
- Fleksibilitas belanja APBN.

Makin tinggi elastisitas penerimaan pajak, stabilisator-otomatis makin bekerja-efektif dalam mengendalikan kecenderungan inflasioner atau deflasioner. Pada umumnya elstisitas-penerimaan-pajak tidak cukup tinggi untuk dapat berfungsi sebagai stabilisator-otomatis , terutama pada situasi penciutan (*downsizing*), dampak pada penghasilan setelah PPh dan dampak pada konsumsi tak seberapa jelas, demikian juga pengaruhnya pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor privat, dan dampak pada era-pemulihan perekonomian tak menguntungkan, sehingga harus dilengkapi dengan kebijakan fiskal sukahati.

3.11.3.2. Kebijakan Fiskal Sukahati

Kebijakan Fiskal Sukahati (*discretionary fiscal policy*) menuntut perubahan APBN tatkala terjadi perubahan tarif pajak dan/atau belanja APBN.

a. Bila *tarif pajak diturunkan sementara pengeluaran APBN dipertahankan*, maka terjadi kenaikan kemampuan belanja rumah tangga dan unit usaha. Penurunan (1) tarif makin besar dengan (2) durasi waktu pemberlakuan makin panjang , dan (3) terfokus pada kelas masyarakat berpenghasilan menengah , menyebabkan kenaikan kemampuan belanja makin besar, berdampak pada pertumbuhan besar permintaan agregat. Bila kebijakan menyentuh hanya kelompok pendapatan lebih rendah, maka kebijakan tak berpengaruh besar pada pertumbuhan permintaan agregat. Kebijakan penurunan tarif PPh yang dipersepsi publik hanya bersifat temporer , akan di abaikan publik, dan menjadi tidak efektif. Kebijakan peningkatan tarif PPh akan efektif mengendalikan inflasi, karena penghasilan-yang-dapat-dibelanjakan (disposable income) menurun.

b. Bila *tarif pajak dipertahankan sementara pengeluaran APBN untuk belanja barang/jasa diperbesar*, maka terjadi kenaikan agregat demand. Pada sisi lain, pengurangan pengeluaran APBN pada masa-inflasi tak seberapa efektif karena perekonomian berpengharapan-tinggi pada bisnis sehingga tak-seberapa menurunkan agregat demand.

c. Kebijakan fiskal sukahati adalah hampiran ganda dan paling efektif, untuk (1) mengendalikan inflasi tarif maka *PPh dinaikkan dan belanja APBN akan barang/jasa dikurangi* , untuk (2) mengendalikan deflasi maka *tarif PPh diturunkan dan belanja APBN ditingkatkan*.

Discretionary fiscal policy mengandung berbagai kelemahan sebagai berikut.

1. Kebijakan fiskal reaktif , tiba masa tiba akal, kebijakan dilakukan setelah terjadi perubahan kondisi perekonomian ke arah yang tidak diharapkan , tidak berdasar estimasi/proyeksi/ramalan kondisi ekonomi yang akan datang yang menghasilkan kebijakan antisitapif.
2. Dampak kebijakan belanja publik (APBN belanja barang/jasa) membutuhkan jeda-waktu (*time-lag*) , yaitu waktu yang dibutuhkan dari perumusan APBN Perubahan , persetujuan legislatif , sampai waktu eksekusi belanja barang/jasa diperbesar.
3. Peningkatan belanja masyarakat dan unit-usaha karena Tarif PPh menurun dan *disposable-income* meningkat, juga tidak terjadi serta merta. Tertengarai bahwa kebijakan perubahan tarif pajak menyebabkan perubahan lebih segera (*time lag* lebih kecil) ketimbang kebijakan perubahan APBN belanja barang/jasa.

3.11.4.Tujuan Kebijakan Fiskal.

Kebijakan-fiskal dirancang pada tataran stabilisasi-aliran sumberdaya-sektor publik kedalam siklus bisnis. Stabilitas sektor publik diproksi nisbah *net worth* banding *national income, current expenditure* banding *national income*, dan *public sector income* banding *national income*. Strategi fiskal sebuah bangsa bertujuan agar pendapatan nasional (*national income*) berkembang , menyebabkan *net worth* positif , menyebabkan surplus pendapatan APBN vs belanja APBN.
Kebijakan fiskal bertujuan agar APBN terkelola dengan baik . Sebagai misal, disiplin fiskal NKRI suatu tahun APBN berupa batas defisit APBN di bawah 3 % PDB sejak krisis keuangan Asia 1998 , dengan estimasi defisit akan mencapai 5.07 % PDB. Memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi, dengan kebijakan perolehan pendapatan APBN dan alokasi APBN, untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal terfokus atau bertujuan khusus antara lain berbentuk kebijakan pajak/subsidi untuk barang/jasa tertentu dengan tujuan penyehatan perekonomian-makro, kebijakan bantuan belanja APBN bagi daerah tertinggal, kebijakan bantuan APBN bagi populasi tertentu, misalnya bantuan bagi janda yang harus membesarkan & menyediakan biaya sekolah anak-anak. Kebijakan fiskal terfokus antara lain kebijakan fiskal era-pandemi berdimensi (1) membangun/memelihara tingkat kesehatan masyarakat, (2) menjaga kelangsungan hidup perorangan dan rumah tangga, (3) membangun sistem-ekonomi-baru berdampingan dengan virus, (4) pemulihan perekonomian cq pemulihan kondisi produktivitas nasional, perbankan , pasar modal , pemberi-kerja dan lapangan kerja.

3.11.6. Ruang Lingkup dan Komponen Kebijakan Fiskal

a. Kebijakan fiskal nan-strategis harus secara aktif/agresif membentuk panorama (*landscape*) perekonomian bangsa, selaras konsep ILO PBB.
b. Tujuan kebijakan fiskal adalah belanja strategis bangsa melalui APBN, antara lain namun terutama belanja infrastruktur strategis antara lain berbentuk dukungan-fiskal bagi sektor usaha tertentu , pendidikan dan kesehatan, dapat dipenuhi oleh pendapatan bukan pinjaman. Secara ideal tujuan kebijakan fiskal adalah mencapai keseimbangan APBN Pendapatan dan APBN Belanja.
c. Sebagai Aturan Emas, pinjaman pemerintah cq belanja APBN Pembiayaan hanya digunakan untuk investasi bagi generasi yang akan datang, tidak boleh untuk belanja (rutin, operasional) APBN tahun berjalan.
d. Kebijakan investasi harus sesuai posisi utang , perencanaan tingkat-utang negara dan pendapatan pajak , aturan pajak dipastikan harus berterima batin generasi yang akan datang.
e. Kebijakan fiskal apapun, sebaiknya tidak diamandemen terlampau sering.
f. Karakteristik ideal Kebijakan Fiskal adalah (1) selalu memberi manfaat dan keuntungan bagi publik kini dan masa-yang akan datang, walaupun kondisi sosial-ekonomi-lingkungan-politik tiba-tiba berubah, (2) tidak berbuah tuduhan "nyaman bagi perbendaharaan, tidak nyaman bagi rakyat", (3) nyaman bagi kabinet sekarang, beban bagi kabinet selanjutnya , apalagi (4) sekadar bertahan hidup tahun ini , tahun depan belum terpikirkan, (5) transparan, tidak mengandung perangkap/risiko karena penggelembungan utang.

3.11.7. Kebijakan Fiskal Era Pandemi.

a. Kebijakan pajak dan kebijakan penghindaran-siklus-berulang penurunan-perekonomian yang tak-disukai (*countercyclical measures*) bertujuan mendorong permintaan agregat dan menyediakan bantalan-penahan (*cushion*) fiskal.
b. Pada era pandemi berdampak pelesuan-perekonomian, kebijakan pemerintah berbentuk subsidi investasi dan meluncurkan program investasi-publik untuk mendorong iklim investasi. Kebijakan fiskal bertujuan agar APBN terkelola dengan baik
c. Pada era pandemi, pemerintah memelihara daya-dukung fiskal pada rumah-tangga dan unit-usaha , melindungi stabilitas keuangan negara/bangsa, mendorong transformasi-ekonomi dan menyambut era-pemulihan.
d. Dalam upaya memelihara tingkat layanan publik , pemulihan PDB, manajemen utang dan lingkungan termasuk perubahan iklim & perubahan harga-harga umum karena pandemi, berbagai pemerintahan berupaya meningkatkan PDB, memperbesar ruang kerja formal dengan pelonggaran syarat-kerja, lokasi kerja , jam-kerja dan memperpanjang umur-usia-kerja.
e. Pada era pandemi, arah kebijakan terfokus pada penyediaan fasilitas kesehatan publik, pemeliharaan likuiditas rumah-tangga dan unit-usaha , perlindungan pekerja dan lapangan kerja, pemulihan perekonomian pada era ekonomi-digital dan ekonomi-hijau, peningkatan kemampuan dan daya saing bangsa.
f. Pada era-pemulihan, dibangun berbagai kebijakan lanjutan, untuk restrukturisasi perekonomian , terfokus pada wilayah/industri yang paling-strategis bagi bangsa,

pembangunan kredibilitas fiskal, pembangunan jejaring-keamanan-sosial bagi kelompok penduduk pramilenial yang terdampak-negatif ekonomi-digital.

g. Pemulihan ekonomi harus berbasis penguatan neraca korporasi dengan berbagai hampiran, antara lain jaminan-kredit dan bantuan likuiditas keuangan korporasi oleh pemerintah dan partisipasi publik untuk penguatan ekuitas unit-usaha.
h. Pandemi menyebabkan defisit APBN tatkala negara importir mengurangi impor mereka. Bila APBN berisiko defisit, bank sentral membantu masalah keuangan pemerintah dengan pinjaman langsung atau monetesisasi / pembelian obligasi pemerintah pada (1) pasar primer dan/atau (2) pasar sekunder, serta hampiran (3) pembelian obligasi negara pada pasar sekunder dengan pengendalian kurva-hasil atau Lindung-Nilai-Jatuh-tempo (*Secondary Market Purchases: Yield Curve Control or Maturity Swap*).

3.11.8. Aturan Emas Kebijakan Fiskal.

Kebijakan-fiskal dirancang pada tataran stabilisasi-aliran sumberdaya-sektor publik kedalam siklus bisnis. Stabilitas sektor publik diproksi nisbah *net worth* banding *national income, current expenditure* banding *national income*, dan *public sector income* banding *national income*. Strategi fiskal sebuah bangsa bertujuan agar pendapatan nasional (*national income*) berkembang , menyebabkan *net worth* positif , menyebabkan surplus pendapatan APBN vs belanja APBN.Walau pemerintah dapat saja menggalang pendapat/dukungan publik, pada akhirnya kebijakan perpajakan dan belanja APBN adalah keputusan politik antara pemerintah dan parlemen, yang dilakukan secara demokratis. Sistem perbendaharaan pemerintah Inggris berpegang pada Aturan-Emas yaitu bahwa sepanjang siklus ekonomi, pinjaman pemerintah hanya digunakan untuk investasi bagi generasi yang akan datang, tidak boleh untuk belanja APBN tahun berjalan, Aturan Investasi Berkelanjutan , sistem perbendaharaan negara yang memastikan pendapatan pajak dan belanja tersesuai kondisi APBN. Dengan demikian, Aturan Emas mengutamakan keadilan dan maslahat belanja berbasis APBN nan-seimbang , sebagai investasi bagi generasi masa-yang-akan-datang. Kebijakan investasi harus sesuai posisi utang , perencanaan tingkat-utang negara dan pendapatan pajak , aturan pajak dipastikan harus berterima batin generasi yang akan datang.

Konsistensi kebijakan adalah penting. Kebijakan fiskal apapun, sebaiknya tidak diamandemen terlampau sering, kebijakan fiskal dirumuskan/dirangkai menimbang berbagai risiko/skenario agar (1) selalu memberi manfaat dan keuntungan bagi publik ,sekalipun kondisi sosial-ekonomi-lingkungan tiba-tiba berubah, (2) tidak berbuah tuduhan “enak bagi perbendaharaan, tidak enak bagi rakyat”, (3) enak bagi kabinet sekarang, beban bagi kabinet selanjutnya , apalagi (4) sekadar bertahan hidup tahun ini , tahun depan kita pikir lagi, (5) transparan, tidak mengandung perangkap atau risiko ledakan karena peng-gembungan utang.

Pada tataran teori cq konseptual , Aturan Emas (*golden rule*) berasal dari teori makro-ekonomi , dimana terdapat kerangka-berfikir yang mewajibkan kebijakan-fiskal dirancang pada tataran stabilisasi-aliran sumberdaya-sektor publik kedalam siklus bisnis. Stabilitas sektor publik diproksi nisbah *net worth* banding *national income, current*

expenditure banding *national income*, dan *public sector income* banding *national income*. Strategi fiskal sebuah bangsa bertujuan agar pendapatan nasional (*national income*) berkembang , menyebabkan *net worth* positif , menyebabkan surplus pendapatan APBN vs belanja APBN. Kenaikan utang pemerintah disadari menaikkan tingkat suku-bunga nyata, berkonsekuensi penurunan investasi karena pulangan-investasi harus-makin-besar menyebabkan syarat-laba-usaha-minimum meningkat.

3.11.9. Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Kebijakan lain

3.11.9. 1. Pengaruh Kebijakan Lain Terhadap Kebijakan Fiskal .

- Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu kebijakan fiskal ialah kewajiban pengeluaran APBN serta pajak , sedangkan yang mempengaruhi kebijakan moneter diantaranya adalah GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga..
- Aturan Emas berasal dari teori makro-ekonomi , dimana adalah kerangka-berfikir yang mewajibkan kebijakan-fiskal dirancang untuk stabilisasi-aliran sumberdaya-sektor publik kedalam siklus bisnis .
- Kebijakan moneter Bank Sentra berpengaruh kepada APBN pendapatan dan belanja, sehingga harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan fiskal.
- Berbagai pakar menyatakan bahwa kebijakan makroprudensial Bank Sentral adalah sebuah perlengkapan penting bagi berbagai aksi fiskal. Dari sini, disimpulkan bahwa kebijakan makro-prudensial ditetapkan lebih dahulu, sebagai dasar kebijakan fiskal.
- Tujuan dari kebijakan moneter Bank Sentral adalah menjaga stabilitas nilai uang, menjaga likuiditas perekonomian, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan keterpenuhan lapangan kerja, serta keseimbangan *Balance of Payment* (BOP) yang berarti menyentuh wilayah ber APBN atau kebijakan fiskal. Dari sini , disimpulkan bahwa kebijakan moneter bank-sentral dan kebijakan fiskal pemerintah bersinergi untuk merealisasi target APBN nihil, surplus atau defisit.
- Model Makro-Ekonomi Modern memiliki 5 fitur, antara lain berupa batasan APBN bagi rumahtangga.
- Kebijakan makroprudensial Bank Sentral tertentu sering ditafsir sebagai kebijakan untuk membantu entitas bank tertentu atau *systematically important financial institutions t*ertentu yang *"too big too fail"* (yang berarti mikro-prudensial).

3.11.9. 2. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Kebijakan Lain .

- Kebijakan kenaikan pajak yang berpotensi menghalangi rencana bisnis unit-usaha untuk ekspansi harus dihindari agar daya tampung pemberi kerja dapat terjaga bahkan meningkat, ruang kerja formal diperbesar dan dan umur-usia-kerja dapat diperpanjang.
- Kebijakan fiskal mempengaruhi berbagai variabel ekonomi-makro seperti tingkat pemerkerjaan (*employment rate*) , tingkat harga, dan tingkat GDP.
- Berbagai kebijakan fiskal berpengaruh pada inflasi dan lapangan-kerja, sehingga harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan moneter.

- Kebijakan fiskal tertentu berdampak pada perekonomian-makro , berpengaruh terhadap permintaan agregat serta penawaran agregat, lalu permintaan agregat dan penawaran agregat menentukan pasar barang dan jasa, mendorong kebijakan berhampiran makro-fiskal.
- Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi alat dalam perencanaan ekonomi (economic planning) , agar sebuah bangsa dapat mengendalikan perekonomian-makro.
- Perpaduan harmonis kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas tingkat pertumbuhan ekonomi dengan inflasi rendah & terkendali, tingkat pengangguran rendah dan harga-harga umum stabil. Ditemukan banyak dikotomi diantara dua kebijakan tersebut dan tak ada formula optimasi/optimalisasi perpaduan-keduanya.
- Berbagai APBN seperti Denmark dan berbagai negara Eropa Utara membantu perusahaan padat-karya dengan subsidi upah/gaji, mencegah moral hazard PHK massal. Pemerintah amat sadar bahaya PHK, bahwa bila seluruh sektor riil lumpuh, perekonomian sulit dibangkitkan kembali tatkala pandemi berlalu , menyebabkan kondisi ekonomi-terpuruk menjadi berkepanjangan.

3.11.9.3. Harmonisasi Kebijakan .

Kebijakan fiskal terharmonisasi dengan kebijakan moneter, terfokus pada stabilitas moneter dan pertumbuhan perekonomian. Kedua kebijakan tersebut mempunyai berbagai persamaan target, misalnya target stabilitas-harga umum.

3.11.10. Berbagai Wacana Kebijakan Fiskal.

3.11.10. 1. Wacana Kebijakan Fiskal.

1. Pengaruh kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berdampak pada perekonomian bangsa , penerimaan APBN dari perekonomian , serta pengeluaran/belanja APBN untuk menjaga/memulihkan perekonomian. Kebijakan fiskal berdampak pada perekonomian karena penerimaan Negara (APBN Pendapatan) serta pengeluaran Negara (APBN Belanja), sedang kebijakan moneter akan berdampak pada pasar uang dan pasar surat berharga, pasar uang . Pasar surat berharga menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat PDB. Kebijakan fiskal akan berpengaruh terhadap permintaan agregat serta penawaran agregat.Permintaan agregat dan penawaran agregat menentukan pasar barang dan jasa. Kondisi pasar barang dan jasa menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja, berdampak pada tingkat pendapatan serta tingkat upah yang diharapkan. Pendapatan APBN berpengaruh terhadap permintaan agregat barang/jasa, tingkat upah berdampak pada penawaran agregat barang/jasa, pasar uang dan surat berharga. Keberadaan pasar uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, harga uang dinyatakan dalam “tingkat suku bunga”. Jika uang semakin langka, maka tingkat suku bunga semakin mahal. Pada saat tingkat suku bunga tinggi, maka permintaan terhadap investasi akan berkurang yang

selanjutnya dapat menurunkan laju pertumbuhan *output*.Tingkat suku bunga rendah akan menyebabkan permintaan investasi meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan output bangsa. Pemikiran ini yang mendasari teori bahwa kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor riil, karena jika tingkat bunga diturunkan (kebijakan fiskal) maka investasi akan meningkat dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cq output cq pertumbuhan PDB.

2. Kebijakan fiskal mempengaruhi variabel ekonomi makro seperti tingkat pekerjaan, tingkat harga, dan tingkat GDP.
3. Kebijakan fiskal nan aktif. John Weeks, 2018, mengunggah *Active fiscal policy is key to building a fair and stable economy* , menjelaskan makna kebijakan fiskal aktif sebagai berikut. Sebuah kebijakan fiskal aktif bersifat balik-siklus (*countercyclical*) adalah pemberdayaan investasi publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang ,sementara belanja periode APBN adalah sarana menjaga agar perekonomian tetap stabil pada tingkat produksi dan pemerkerjaan nan-tinggi. Investasi publik bidang pendidikan dan transportasi mendorong pertumbuhan ekonomi , pertumbuhan APBN belanja mendorong investasi privat dan ekspor untuk memerangi gejala kenaikan inflasi dan penurunan kegiatan ekonomi bersifat resesional. Pemerintah wajib , mengetahui perilaku sektor privat, kenaikan permintaan terjadi bila sektor privat bermental wira-saha, belanja sektor privat nan-lemah menyebabkan defisit fiskal.

3.11.10.2. Wacana Kebijakan Fiskal & Kebijakan Moneter.

1. Mencapai tujuan stabilitas & pertumbuhan ekonomi. Laman Akuntonom , 2013, mengunggah artikel berjudul Hubungan Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Ekonomi Regional Dengan Akuntansi, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait dengan tingkat pengeluaran dan pendapatan. Kebijakan fiskal menjabarkan perilaku pemerintah dalam meningkatkan pendapatan untuk mendanai pengeluaran rutin dan untuk mentransfer pembayaran kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Pendapatan pemerintah dapat diperoleh dari pendapatan pajak dan PNBP , dan dilengkapi pinjaman apabila pendapatan negara tak memadai untuk kebutuhan belanja minimum penting. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk memastikan stabilitas ekonomi, untuk mengalokasikan dana pemerintah, dan untuk meningkatkan distribusi pendapatan.
2. Koordinasi kebijakan kala krisis. Krisis ekonomi dan keuangan global memaksa tiap negara untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan mengkoordinasi kebijakan makroekonomi cq koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bangsa itu.
3. Dampak Ekspansi Fiskal dan/atau Moneter. Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan defisit-fiskal , ditandai kenaikan defisit-neraca-berjalan karena mendukung hipotesis-defisit-kembar (*twin deficit hypothesis*) antara defisit fiskal (pendapatan APBN – Belanja APBN) dan defisit neraca-berjalan (current-account, yang terdiri atas ekspor + pendapatan investasi (atau deviden) dari LN + penerimaan bunga dan cicilan dari LN + saldo penerimaan dan transfer uang dari

LN – impor-pembayaran dividen ke LN-pembayaran bunga & cicilan LN- saldo pembayaran/transfer uang ke LN). Maka negara harus meminjam atau cetak-uang untuk pembiayaan-defisit APBN, menyebabkan kenaikan jumlah utang LN dan menyebabkan kenaikan tingkat inflasi. Kenaikan saldo hutang LN mencipta masalah APBN pembayaran bunga dan pengembalian pokok pada tahun-tahun fiskal yang akan datang, kenaikan inflasi menyebabkan keruntuhan tingkat-bunga-sejati sehingga mencipta arus-modal-keluar. Terdapat beberapa implikasi pilihan kebijakan . Ekspansi moneter meningkatkan permintaan-agregat, mendorong investasi perusahaan dari sudut-pandang moneter.

4. Kebijakan APBN khusus. Dari perspektif fiskal, kebijakan pemerintah untuk mensubsidi investasi dan meluncurkan program investasi-publik mungkin mendorong iklim investasi. Ekspansi moneter dapat jatuh kedalam perangkap stagnasi terpicu-ekspektasi , berdampak negatif pada pertumbuhan perekonomian-fundamental. Teori makroekonomi konvensional harus dimodifikasi sesuai situasi berkembang, harus terkoordinasi dalam tugas menjaga ekuilibrium pasok-permintaan secara efektif. Disamping 3 jenis kebijakan makroprudensial, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kebijakan makroekonomi dan kebijakan APBN harus terfokus pada penanggulangan-lapangan situasi gawat-darurat akibat Covid -19.
5. Dasar perumusan kebijakan fiskal. Tentang hubungan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal , Fakultas Ekonomi Online,2016 cq Fery KOOL mengunggah artikel berjudul *Hubungan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal*, menguraikan beberapa hal sebagai berikut. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi alat dalam perencanaan ekonomi di Indonesia agar dapat mengendalikan perekonomian makro. *Kedua kebijkan tersebut berhubungan erat dengan empat sektor yaitu sektor rumah tangga, sector perusahaan, sector pemerintahan dan sektor internasional , yang memiliki interaksi masing-masing dalam upaya menciptakan pendapatan serta pengeluaran pemerintah.* Yang mempengaruhi kebijakan fiskal ialah pengeluaran APBN serta pajak sedangkan yang mempengaruhi kebijakan moneter diantaranya GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Kebijakan fiskal berdampak pada perekonomian dengan penerimaan Negara serta pengeluaran Negara, sedangkan kebijakan moneter akan berdampak pada pasar uang dan pasar surat berharga, pasar uang .Pasar surat berharga menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat PDB. Kebijakan fiskal akan berpengaruh terhadap permintaan agregat serta penawaran agregat, permintaan agregat dan penawaran agregat menentukan pasar barang dan jasa. Kondisi pasar barang dan jasa menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja, berdampak pada tingkat pendapatan serta tingkat upah yang diharapkan. Pendapatan memberikan berpengaruh terhadap permintaan agregat barang/jasa, tingkat upah berdampak pada penawaran agregat barang/jasa, pasar uang dan surat berharga.
6. Dikotomi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Solusi masalah perekonomian-nasional tertentu melalui Kebijakan fiskal atau Kebijakan Moneter ? Adam Hayes, 2021 mengunggah artikel berjudul *Fiscal Policy vs. Monetary Policy: Pros and Cons* , menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Pro-Kontra Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut; Kebijakan belanja APBN untuk proyek dan

kegiatan , dapat menyurutkan atau mendorong laju PDB. Kebijakan fiskal berdampak lebih cepat dibanding kebijakan moneter. Kebijakan fskal dapat menurunkan/menaikkan pendapatan APBN bidang perpajakan. Sebaliknya, kebijakan menaikkan pajak menurunkan popularitas kabinet , disukai lawan politik. Stimulus fiskal nirmanfaat bila uang-dialirkan ke perekonomian melalui penghematan-pajak atau belanja-impor. Kebijakan fiskal berpotensi mencipta defisit APBN tatkala terjadi penimgkatan besar belanja dan bila pendapatan APBN pajak menurun , defisit APBN berkesinambungan berbahaya bagi negara. Sebagai kesimpulan, perpaduan harmonis kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas tingkat pertumbuhan ekonomi dengan inflasi rendah & terkendali, tingkat pengangguran rendah dan harga-harga umum stabil. Sayang sekali ditemukan banyak dikotomi diantara dua kebijakan tersebut dan tak ada formula optimasi/optimalisasi perpaduan-keduanya.

7. Kerjasama otoritas fiskal dan moneter. Skema *burden sharing* antara Kemenkeu & BI yang pertama, adalah untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 yang bersifat publik *goods* di bidang kesehatan, bantuan sosial dan belanja untuk pemulihan daerah dan sektoral, pembiayaan defisit APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang tidak melalui lelang atau melalui mekanisme pasar, namun langsung di beli BI melalui *private placement*. SBN berbunga nol persen. Skema *burden sharing* kedua, berfungsi sebagai pembeli siaga atau *standby buyers* dalam lelang SBN di pasar perdana. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang akan terus dilaksanakan sampai 2022.
8. Dukungan fiskal kepada Neraca Bank Sentral. Seok Gil Park,2012, menyajikan IMF Working Paper berjudul Central Banks Quasi-Fiscal Policies and Inflation , antara lain menyatakan sebagai berikut, Kebijakan fiskal-kuasi adalah kebijakan moneter BS yang berdampak pada neraca BS , misalnya operasi relaksasi-kredit berdampak pada aset BS. Bila otoritas fiskal tak-mengganti kerugian tersebut, maka keputusan tersebut tergolong kebijakan fiskal-kuasi yang sesungguhnya “mengukuhkan” besar-modal BS yang baru. Beberapa pengamat cemas bahwa pertimbangan dampak/konsekuensi negatif kebijakan moneter kepada neraca BS berisiko menyebabkan BS tidak memilih kebijakan moneter tersebut. Guncangan pada neraca BS berpengaruh pada inflasi melalui perubahan-portofolio rumah-tangga , bila otoritas fiskal tidak bersedia mendukung neraca BS. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berinteraksi secara koheren , meng-konsolidasi keterbatasan anggaran BS dan otoritas-fiskal dalam sebuah persamaan. Otoritas fiskal pada umumnya tak peduli utang BS dan merekapitalisasi defisit ekuitas BS. George Dorgan , 2014, dalam artikel berjudul Central Banks’ Quasi-Fiscal Deficits and Potential Hyperinflation , antara lain menyatakan bahwa BS sebaiknya tak berperan sebagai agen quasi-fiskal dari otoritas fiskal , karena akan mengurangi kapasitas BS menjaga stabilitas ekonomi-makro, membahayakan neraca BS , mengacaukan pertanggungjawaban tugas pokok masing masing otoritas. Peran tersebut tak terpahami oleh publik. Hiperinflasi atau kematian mata-uang disebabkan defisit kuasi-fiskal (quasi-fiscal deficits) atau defisit pada BS. Seok G Park, 2012, dalam artikel berjudul Central Banks Quasi-Fiscal Policies and Inflation, menyatakan bahwa bila neraca BS tak mendapat dukungan penuh dari otoritas fiskal , suatu aksi undur-diri (exit) dari relaksasi-kuantitatif (

quantitative easing) boleh jadi berdampak inflatoir, dan BS tak selalu mampu membereskan neraca yang mengecil, sehingga disimpulkan bahwa perlindungan/dukungan penuh otoritas fiskal terhadap operasi kuasi-fiskal otoritas-moneter adalah syarat sebuah kebujakan moneter nan-efektif.

9. Terdapat dukungan bank sentral kepada kondisi fiskal nan-buruk , antara lain aksi beli BS akan SUN atau Obligasi Negara yang beredar di pasar bebas.

3.11.10.3. Wacana Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Makro-Prudensial.

Hubungan Kebijakan Makro-Prudensial bank sentral dan Kebijakan Fiskal menteri keuangan adalah sebagai berikut, kebijakan makroprudensial pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Secara spesifik, kebijakan ini digunakan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik, mengurangi dampak resiko sistemik, dan memperkuat daya tahan sistem keuangan_dari krisis. Menurut IMF, FSB, dan BIS risiko sistemik adalah risiko dari gangguan jasa keuangan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya semua atau sebagian dari sistem keuangan yang mempunyai potensi dampak negatif terhadap perekonomian. Dengan demikian orientasi kebijakan ini bukan pada keamanan dan kesehatan individual institusi keuangan, namun pada sistem keuangan secara menyeluruh (system wide). Kebijakan makroprudensial ini juga sering ditafsir sebagai kebijakan untuk meng-address entitas bank tertentu atau *systematically important financial institutions t*ertentu yang *"too big too fail"* .

3.11.10.4. Wacana Kebijakan Fiskal Kala Krisis.

1. Pemulihan pertumbuhan PDB bangsa-bangsa tahun 2022. World Bank Group, 2021, mengunggah artikel *The Global Economy: on Track for Strong but Uneven Growth as COVID-19 Still Weighs*, antara lain menyatakan sebagai berikut. Pemulihan paska-ledakan-pandemi terjadi pada berbagai negara secara tak merata, pertumbuhan global pada tahun 2021 diharapkan menjadi 5.6 % diwarnai oleh negara-berperekonomian-besar seperti AS yang mungkin mencapai 6.8 % dan RRC yang mungkin mencapai 8.5 % karena sukses kebijakan fiskal, stabilitas keuangan dan vaksinasi. Agregasi pertumbuhan ekonomi dunia selebihnya diperkirakan dapat mencapai 4.4 % pada tahun 2021 dan 4.7 % pada tahun 2022.AS dan RRC masing masing mempengaruhi seperempat pertumbuhan global.
2. Kombinasi Kebijakan nan ideal. ILO dari PBB membentuk empat pilar ekonomi-pandemi sebagai berikut. Pilar pertama, pembangunan *kebijakan fiskal nan-aktif*, kebijakan moneter nan-akomodatif , dukungan pinjaman dan keuangan untuk berbagai sektor strategis, termasuk sektor kesehatan. Pilar kedua, perluasan proteksi sosial menjangkau keseluruhan, kebijakan anti PHK, kebijakan pelonggaran keuangan & perpajakan bagi badan-usaha. Pilar ketiga, perlindungan

pekerja , kebijakan keselamatan kerja, penerapan hampiran tempat kerja (teleworking), bangun kesetaraan-kesamaan , hindari diskriminasi pekerja, penyediaan fasiliitas kesehatan bagi semua karyawan, tingkatkan sistem upah/gaji tersesuai pandemi. Pilar ke empat, tingkatkan dialog antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja, bangun kebersamaan/kerukunan antar lembaga, tingkatkan kapasitas pemerintah untuk mengkoordinasi melalui dialog-sosial dalam keprihatinan bersama. Kebijakan aktif bersifat bebas (discretionary policy) bermakna kebijakan yang diambil pemerintah atau bank sentral menanggapi kondisi /perubahan perekonomian , pada kebijakan fiskal berarti antara-lain kebijakan tarif pajak dan APBN Perubahan Belanja.

3. Kenaikan belanja APBN era-pandemi. William Horobin, 2021, mengunggah artikel berjudul *World Faces Fiscal Problems Much Worse Than Those From Covid, OECD Warns,* menguraikan berbagai hal sebagai berikut. Dalam upaya memelihara tingkat layanan publik , manajemen utang dan lingkungan, berbagai pemerintahan perlu meningkatkan PDB sebesar 8 %, bahkan mungkin lebih dari 10 % untuk beberapa negara seperti Jepang dan Perancis untuk penanggulangan perubahan iklim. OECD berpendapat bahwa di masa depan APBN akan menghadapi harga-harga umum meningkat, bahwa *kenaikan pajak harus dihindari* , ruang kerja formal diperbesar dan umur-usia-kerja sebaiknya diperpanjang.
4. Kebijakan relaksasi fiskal masa-pandemi. Untuk keluwesan aturan fiskal, Komisi Eropa membangun klausula pelepasan (*general escape clause*) dalam aturan fiskal Uni Eropa sepanjang tahun 2021, akan diperpanjang untuk tahun 2022, berupa penundaan kewajiban koreksi fiskal. Komisi Eropa mendorong paket kompensasi bagi kerusakan unit-usaha tertimpa bencana, terutama sektor berdampak biliar seperti penerbangan dan turisme,mengadopsi amandemen kedua dukungan negara untuk rekapitalisasi dan kebijakan khusus bagi utang-subordinasi pada era pandemi.
5. Kebijakan sinergestis antara pemerintah dan bank sentral masa-pandemi. Krisis ekonomi dan keuangan global memaksa tiap negara untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan mengkoordinasi kebijakan makroekonomi cq koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bangsa itu.
6. Kebijakan bangsa cq BS mencetak uang bukan solusi. Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan defisit-fiskal , ditandai kenaikan defisit-neraca-berjalan karena mendukung hipotesis-defisit-kembar (*twin deficit hypothesis*) antara defisit fiskal (pendapatan APBN – Belanja APBN) dan defisit neraca-berjalan (current-account, yang terdiri atas ekspor + pendapatan investasi (atau deviden) dari LN + penerimaan bunga dan cicilan dari LN + saldo penerimaan dan transfer uang dari LN – impor-pembayaran dividen ke LN-pembayaran bunga & cicilan LN- saldo pembayaran/transfer uang ke LN). Maka negara harus meminjam atau cetak-uang untuk pembiayaan-defisit APBN, menyebabkan kenaikan jumlah utang LN dan menyebabkan kenaikan tingkat inflasi. Kenaikan saldo hutang LN mencipta masalah APBN pembayaran bunga dan pengembalian pokok pada tahun-tahun fiskal yang akan datang, kenaikan inflasi menyebabkan keruntuhan tingkat-bunga-sejati sehingga mencipta arus-modal-keluar. Terdapat beberapa implikasi

pilihan kebijakan . Ekspansi moneter meningkatkan permintaan-agregat, mendorong investasi perusahaan dari sudut-pandang moneter.

7. Kebijakan subsidi kala-pandemi. Dari perspektif fiskal, kebijakan pemerintah untuk mensubsidi investasi dan meluncurkan program investasi-publik mungkin mendorong iklim investasi. Ekspansi moneter dapat jatuh kedalam perangkap stagnasi terpicu-ekspektasi , berdampak negatif pada pertumbuhan perekonomian-fundamental. Teori makroekonomi konvensional harus dimodifikasi sesuai situasi berkembang, harus terkoordinasi dalam tugas menjaga ekuilibrium pasok-permintaan secara efektif. Disamping 3 jenis kebijakan makroprudensial, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kebijakan makroekonomi dan kebijakan APBN harus terfokus pada penanggulangan-lapangan situasi gawat-darurat akibat Covid -19.
8. Kebijakan Monetasi : Bank Sentral membeli Surat Utang Negara. Jesus Felipe, Scott Fullwiler, Gemma Estrada, Maria Hanna Jaber, Mary Ann Magadia, and Remrick Patagan, menerbitkan ADB Economics Working Paper Series tentang *How "Monetization" Really Works—Examples from Nations' Policy Responses to COVID-19*, menjelaskan antara lain sebagai berikut. Pada era pandemi, pendapatan pajak pemerintahan menurun, belanja untuk menanggulangi pandemi dan pemulihan perekonomian meningkat , dan bank sentral membantu masalah keuangan pemerintah dengan pinjaman langsung atau monetesisasi / pembelian obligasi pemerintah pada (1) pasar primer dan/atau (2) pasar sekunder, serta hampiran (3) pasar sekunder dengan pengendalian kurva-hasil atau Lindung-Nilai-Jatuh-tempo (Secondary Market Purchases: Yield Curve Control or Maturity Swap). Dalam tataran pembukuan-berpasangan, aliran masuk-keluar keuangan pemerintah berdampak sebaliknya kepada sirkulasi Reserve Balance (RB) bank-sentral.
9. Kebijakan Gotong Royong Kala-Pandemi. Skema *burden sharing* antara Kemenkeu & BI yang pertama, adalah untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 yang bersifat publik *goods* di bidang kesehatan, bantuan sosial dan belanja untuk pemulihan daerah dan sektoral, pembiayaan defisit APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang tidak melalui lelang atau melalui mekanisme pasar, namun langsung di beli BI melalui *private placement*. SBN berbunga nol persen. Skema *burden sharing* kedua, berfungsi sebagai pembeli siaga atau *standby buyers* dalam lelang SBN di pasar perdana. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang akan terus dilaksanakan sampai 2022.
10. Persiapan pemulihan pada masa-pandemi. Derek Thompson, 2020 menggungah artikel berjudul *The Four Rules of Pandemic Economics* , memberi hikmah pemahaman , antara lain sebagai berikut. APBN setiap negara terdistorsi oleh pandemi, berupa gangguan/penurunan PDB, pendapatan perkapita dan APBN Pajak Penghasilan & PPN. Apabila belanja negara menurun, maka kegiatan ekonomi era pandemi terdorong makin menurun. Pada era pandemi , muncul budaya baru; dengan pikiran dan kreativitasnya , para pencari nafkah era pandemi berupaya memperoleh nafkah sambil berupaya agar tak terinfeksi virus. Para konsumen barang/jasa juga memilih hampiran konsumsi aman virus , mengubah budaya belanja/konsumsi. Pada tataran belanja APBN, setiap pemerintahan membangun prasarana-ekonomi-era-pandemi yang mengamankan jiwa manusia

pada satu sisi, mengupayakan pemulihan dalam bentuk *kegiatan ekonomi bentuk baru* sedemikian rupa (antara lain perekonomian digital) , agar pemulihan-kondisi-perekonomian. APBN seperti Denmark dan berbagai negara Eropa Utara membantu perusahaan padat-karya dengan subsidi upah/gaji, mencegah moral hazard PHK massal. Pemerintah amat sadar bahaya PHK, bahwa bila seluruh sektor riil lumpuh, maka perekonomian akan lebih sulit dibangkitkan kembali tatkala pandemi berlalu , menyebabkan kondisi ekonomi-terpuruk negara itu menjadi berkepanjangan dibanding negara lain yang memelihara lapangan-kerja saat pandemi.

3.11.11. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan , teori kebijakan fiskal konvensional pada umumnya tetap berlaku pada masa pandemi di tambah kebijakan-tambahan khas-era-pandemi (*extraordinary measure*) , yang terpadu dan tanpa pemilahan tegas, terutama bagi-negara-maju dan sehat APBN, dengan contoh Rusia, AS, jepang dan Jerman sebagai berikut.

- Reformasi anggaran pada masa pendemi, *extraordinary measure* berbentuk strategi pendanaan sektor kesehatan habis-habisan (all out) oleh APBN berbentuk fasilitas seperti RS Khusus, supplies seperti tabung O2 & material seperti test kits, ventilator dll, penambahan jumlah nakes , sarana dan pelatihan nakes serta imbalan-kerja berisiko tinggi, karena merupakan syarat utama pemulihan (recovery) perekonomian negara itu.
- Bukan proteksi-sosial biasa, namun meningkat menjadi (1) proteksi fisik/nyawa dengan berbagai larangan keluar rumah (lock down) , jarak minimum, penggunaan masker dan sarana sanitasi lain, (2) APBN tunjangan pengangguran bagi pekerja ter PHK, APBN anti-rasionalisasi bagi pemberi kerja, perbesaran BOS bagi keluarga-berketurunan (mempunyai anak) -nir-penghasilan , (3) pelonggaran pengembalian-kredit bagi unit-usaha kehilangan 30 % pendapatan di Rusia, (4) transfer APBN kepada APBD untuk perubahan struktur belanja Pemda tersesuai butir 1 dan 2 ini.
- Berbagai negara mengembangkan program dukungan bagi rumah tangga dan komunitas bisnis , disamping program anti PHK tersebut diatas, berbentuk pinjaman-nir-bunga & nir-jaminan untuk pembayaran upah/gaji karyawan, bantuan teknis perubahan aktivitas-bisnis,subsidi, penjaminan oleh negara, kebijakan perpajakan sektor tertentu UMKM kecuali pajak-pertambahan-nilai, penundaan tagihan biaya sewa properti pemerintah untuk dunia-usaha , pelonggaran kontrak belanja APBN barang/jasa dari UMKM , penurunan batas tidak-kena PPh, pengunduran/pelonggaran status kebangkrutan korporasi versi UUPT, berbagai perubahan jaminan-sosial anti-risiko-denda dan kebangkrutan UMKM.
- UU Peduli versi AS cq alokasi APBN AS terfokus pada tunjangan-pengangguran, dukungan likuiditas rumah-tangga dan usaha, APBN pengembangan/pengujian vaksin dan obat terapi virus , perbesaran tunjangan sakit karyawan, tunjangan rumah-sakit, bantuan pangan ,

pendanaan (funding) asuransi nir-kerja (pengangguran). Subsidi gaji langsung pada pemberi kerja dilakukan Jerman dan Jepang, tidak dilakukan di AS, namun (1) memberi pembebasan kewajiban-pengembalian-utang UKM yang berjuan tidak melakukan PHK, (2) kredit UKM berbunga rendah dan konsesi pinjaman khusus bagi industri tertimpa-stress ,dengan (3) keppres rekapitalisasi fasilitas pinjaman usaha, APBN pengujian paparan & vaksin , dan dukungan APBN kepada RS.

- Sebagai fenomena besaran relatif terhadap APBN terbesar di muka bumi, negara Jepang cq Tokyo menyediakan APBN sampai 40% PDB nya untuk kebijakan khusus masa pandemi dan kebijakan likuiditas, pembayaran tunai kepada individu/penduduk dan unit-usaha, transfer pembebasan biaya sewa bagi keluarga-miskin, subsidi upah/gaji UKM sampai 90 %, usaha besar sampai 75 % , mendorong peluang kerja-sambilan (part timer worker), voucher konsumsi dan berbagai program pemeliharaan rantai-pasok, menghapus buku pinjaman berbunga rendah kepada dunia bisnis , APBN memberi subsidi untuk fasilitas-pinjaman-konsesional dari bank-pelat-merah, subsidi gaji, pemberian tunai bertarget dan tunjangan biaya sewa bagi UKM , dukungan khusus kepada RS dan pemasok medis. APBN peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan kecerdasan artifisial, anggaran tambahan untuk penangguhan-pembayaran pajak dan jaminan-sosial untuk kalangan bisnis , ditambah jaminan pinjaman dan pembiayaan-konsesional melalui lembaga publik dan privat , menyebabkan jumlah peristiwa kepailitan terendah sepanjang 31 tahun terakhir walau mencipta juga berbagai perusahaan-zombie akibat bailout pemerintah, akan dilanjutkan APBN memerangi resesi-ekonomi umumnya, mendorong sektor turisme & restauran khususnya melalui peningkatan UMR..
- Negara Jerman nan-tersohor akan kemampuan menghindari defisit APBN, adalah juara alokasi APBN untuk paket-pemulihan terbesar di Uni Eropa, sehingga sebagian di patokduga oleh Jepang, memberi respon besar-besaran terhadap krisis berbasis program pemulihan Empat T, yaitu bertarget, tepat-waktu, bersifat-sementara dan bersifat-transformatif , dengan tambahan belanja APBN sebesar 8,3 % PDB Jerman tanpa peduli penurunan pendapatan APBN sekitar 30,8 % PDB itu ,terfokus pada dukungan-likuiditas berbentuk pinjaman, seoran modal, dan penjaminan. APBN suplemen memperbesar belanja pelonggaran pajak , hibah pada UMKM, meningkatkan kesejahteraan keluarga , tunjangan khusus bagi RS dan pamsok medis, mengembangkan program subsidi gaji dan penggantian akibat penundaan imbalan-kerja karyawan-dirumahkan-sementara sampai 60 % dari gaji masa-normal, jaminan pinjaman dan investasi-ekuitas bagi unit-usaha terdampak-pandemi, , dilanjutkan paket bantuan pemulihan berjangka panjang , bantuan tiap-anak dalam keluarga, kompensasi biaya opearsi UKM terancam pailit dan pemotongan pajak-nilai-tambah , dan paket modernisasi sistem perekonomian-hijau-digital Jerman .

3.11.12. Kebijakan Fiskal Negara Maju Ekonomi

Pada saat sebuah negara menjadi lebih makmur, prioritas optimalisasi (sekadar) pertumbuhan-ekonomi beralih kepada kualitas pertumbuhan, berupa upaya menutup senjang miskin-kaya berdasar *teori penurunan maslahat-tambahan pendapatan* (*diminishing marginal utility of income*) , kenaikan itikad berbela-rasa sejajar dengan kenaikan pendapatan yang memungkinkan kebijakan redistribusi pendapatan (pajak progresif) yang digambarkan nisbah pajak (tax ratio), kenaikan nisbah APBN Pendapatan Pajak vs PDB. Pemerintah negara maju ekonomi lebih mampu mengarahkan belanja APBN untuk pembangunan kesetaraan sosial melalui APBN pendidikan, kesehatan, perlindungan-sosial, transfer dan subsidi , yang digambarkan oleh kenaikan nisbah belanja tersebut terhadap PDB. Berikut ini adalah beberapa contoh. Pertama, Model kebijakan fiskal cq redistribusi pendapatan pada negara negara Nordic (Belgia, Denmark, Finlandia, Netherlands, Swedia) ditandai APBN belanja proteksi sosial dan kesehatan masyarakat , intervensi fiskal pada pasar tenaga-kerja, dalam kombinasian-harmonis pembangunan-perekonomian & proteksi-sosial. Kedua, Model kebijakan fiskal Anglo Saxon (Australia, Ireland, Japan, New Zealand, the United Kingdom (UK), the US.) mengutamakan asistensi-sosial , transfer kas , kebijakan pajak dan kebijakan skema-imbalan-kerja sesuai kelompok-umur-pekerja dan pensiunan, memerangi senjang-pendapatan angkatan-kerja. Ketiga, Kebijakan fiskal model benua Eropa diwarnai oleh program asuransi, tunjangan pengangguran dan pensiunan berbasis tawar-menawar kolektif pemerintah, pemberi kerja dengan serikat buruh nan perkasa. Bantuan tunai terfokus pada pensiunan, bauran-pajak tak mengutamakan redistribusi-pendapatan.
Sebagai kesimpulan, pada umumnya kebijakan fiskal negara maju perekonomian bertujuan mendorong pertumbuhan-ekonomi dan mendorong pertumbuhan keadilan-sosial cq mengurangi senjang-sosial melalui kebijakan belanja bantuan sosial dan kebijakan perpajakan bersifat redistributif. Walau terbukti berhasil menurunkan nisbah-gini dan mengurangi senjang-penghasilan-untuk-belanja (*disposable income gap*) , disadari bahwa kebijakan redistribusi-pendapatan (pajak progresif) dan kebijakan transfer APBN berpotensi menimbulkan inefisiensi-ekonomi , seperti menyuburkan penghindaran/penggelapan pajak, menyuburkan perilaku rente-ekonomi dan mencipta generasi/budaya malas-mencari nafkah. Terdapat pontensi dampak-regresif pajak konsumsi dan real-estat, ditemukan secara empiris bahwa pembebasan pajak terkait penghasilan-pribadi menguntungkan golongan-kaya , sementara pemotongan belanja APBN nonredistributif terbukti mendorong pertumbuhan-perekonomian dan mengurangi-senjang penghasilan. APBN belanja bantuan sosial dan kredit pajak terbukti ampuh untuk mengurangi senjang-kemiskinan. Multiplier pajak cq dampak kebijakan pajak pada PDB terbukti lebih tinggi pada saat resesi , konsolidasi pajak cq upaya memerangi defisit APBN menurunkan dampak tersebut. Pemotongan pajak dan peningkatan belanja bansos APBN mendorong perekonominan.

3.11.13.Kebijakan Fiskal Negara Berkembang

APBN negara berkembang lebih-terbatas dan tidak-seperkasa APBN negara-maju perekonomian. Pada era-normal, negara berkembang berada dalam lingkaran-kemiskinan-nirputus , diramalkan akan lebih miskin ketimbang mampu beralih ketingkat

yang lebih baik karena kekurangan infrastruktur, bergantung hanya pada sedikit jenis sektor ekonomi cq industri , terutama pertanian (tradisional ?), pertambangan dan kekayaan alam , menghadapi masalah defisit APBN tatkala negara importir mengurangi impor mereka. Pada era pandemi negara-negara tersebut kekurangan likuiditas dan hambatan investasi.

Schnell Abnehmen, 2021, mengunggah artikel berjudul *Objectives of Fiscal Policy in a Developing Economy*, antara lain memaparkan berbagai ciri khas sebagai berikut. Tak ada kebijakan fiskal seragam untuk negara berkembang, karena tergantung kondisi perekonomian masing-masing. Terdapat persamaan situasi kondisi perekonomian negara berkembang, sehingga terdapat berbagai persamaan peran/tugas/tujuan kebijakan fiskal seperti pembentukan dan pemeliharaan modal dan investasi sesuai propenas, mendorong pertumbuhan & distribusi PDB berkeadilan berbasis pengejaran posisi pemekerjaan-paripurna (*full employment*) , menjaga stabilitas kegairahan pasar produk/jasa keperluan hidup rakyat banyak. Terdapat tujuan khas atau sekurang-kurangnya tekanan-penting-khusus kebijakan fiskal negara berkembang, yaitu

1. Mobilisasi sumber daya melalui kebijakan perpajakan , kebijakan mendorong tabungan , investasi dan fasilitas APBN belanja, kredit perbankan dan dana PM.
2. Mendorong pertumbuhan berkesinambungan PDB jangka-panjang , melalui pemungutan pajak hanya pada sektor produktif/bernilai-tambah , belanja APBN mendorong kegiatan perekonomian, tarif pajak progresif , subsidi dan pembebasan pajak terseleksi mendorong investasi & kegiatan sektor riil.
3. Menekan ketimpangan/senjang pendapatan dan kekayaan melalui tarif pajak progresif dan pajak properti , diferensiasi pajak konsumsi yang mendorong konsumsi tertentu dan mengurangi selera konsumsi tertentu yang lain (misalnya barang mewah) , memberi perlakuan khusus untuk jenis komoditas tertentu (misalnya 9 kebutuhan pokok kualitas tertentu) bagi rakyat berpenghasilan rendah, sistem perpajakan yang mengurangi ruang barang/jasa tidak kena-pajak , sambil mewaspadai dampak negatif aspek-keadilan sosial terhadap pertumbuhan-perekonomian & daya saing bangsa.
4. Kebijakan fiskal untuk memperbesar peluang kerja dan tingkat pemerkerjaan (*employment*) adalah kebijakan APBN belanja utang & belanja barang/jasa dan belanja modal cq belanja infrastruktur padat-karya sebagai sarana lawan-kecenderungan-siklikal (*counter cyclical*) tertentu yang merugikan , kebijakan tarif PPh 21 , keringanan tarif PPh 21 ditanggung pemberi-kerja,perluasan tunjangan-kerja tidak-kena-pajak, dilengkapi dengan kebijakan non-fiskal seperti kebijakan kemudahan investasi, keamanan usaha (misalnya kepolisian nan efektif dll) , kenyamanan usaha (prasarana publik, terutama prasarana pabrik, perdagangan dan mobilitas pencari kerja lintas daerah), kemudahan perluasan usaha, kemudahan pemerkerjaan (opsi hubungan kerja nan-fleksibel)bagi pemberi kerja (UU Ketenaga-kerjaan) & syarat kerja bagi pencari kerja.
5. Kebijakan fiskal untuk memelihara stabilitas harga melalui pengendalian tingkat inflasi , dengan mengurangi daya-beli-berlebih masyarakat melalui

kenaikan tarif pajak konsumsi dan PPh, pendapatan pajak digunakan untuk APBN belanja, dan kebijakan pajak pemikat tabungan masyarakat.

3.11.14.Teori Kebijakan Fiskal Prosiklus dan Kontrasiklus.

1. Dibawah ini diuraikan berbagai kebijakan fiskal prosiklus (*procyclical*) , kontasiklus (*countercyclical*) , asiklus (*acycle*) dan silang-siklus (*cross cycle*). Sebuah variabel ekonomi-makro yang prosiklus (procyclical) bila penyimpangannya dari tren terkorelasi-positif dengan senjang-output, lawansiklus (countercyclical) bila penyimpangannya dari tren terkorelasi-negatif, asiklus (acyclical) bukan variabel prosiklus atau lawansiklus, bila bila penyimpangannya tak- terkorelasi dengan senjang-output . Pada intinya, terdapat dua dimensi besar Teori Prosiklus dan/atau Lawan-Siklus, (1) dalam tataran makro-ekonomi Prosiklus atau komponen Lawan-Siklus (misalnya pada siklus pelesuan perekonomian , terjadi tren meningkat jumlah pengangguran) , (2) dalam tataran kebijakan Prosiklus atau komponen Lawan-Siklus.

2. Kebijakan Prosiklus. © 2009-2021 - myCourseHelp.com , 2021, mengunggah artikel berjudul Which of the following macroeconomic variables is procyclical and leads the business, antara lain menjelaskan sebagai berikut.Berbagai variabel ekonomi-makro bersifat prosiklus dan mendorong siklus-bisnis adalah investasi-tetap bisnis, investasi wilayah, suku bunga nominal, dan pemerekerjaan (employment). Berbagai variabel ekonomi-makro bersifat a-siklus adalah suku bunga aktual, pengangguran, pasok uang beredar, konsumsi. Variabel ekonomi-makro bersifat prosiklus namun ber jeda-waktu dengan siklus-bisnis adalah investasi tetap bisnis, pemerkerjaan, harga saham, suku bunga nominal. Siklus perekonomian meningkat (upward slope aconomic condition) ditandai kenaikan konsumsi barang/jasa publik , menyebabkan produsen memperbesar kapasitas produksi , menyebabkan biaya-tetap perunit menurun , menyebabkan BEP menurun dan laba pernit meningkat , menyebabkan sebagian produsen menurunkan harga jual untuk memperrbesar omzet dan laba-bersih tahunan . Harga jual turun menyebabkan permintaan (demand) meningkat , dan perekonomian menuju kondisi puncak (boom). Pada tataran kebijakan-fiskal, terdapat kebijakan prosiklikal (procyclical) dan/atau kebijakan melawan siklus bisnis (counter cyclical). Kebijakan pro-siklus-bisnis (procyclical policy) pada era-perekonomian-naik-daun (boom) namun belum pada tingkat memuaskan (belum mencapai puncak) , diakselerasi oleh kebijakan fiskal berupa perbesaran belanja APBN dan kebijakan fiskal berupa menurunkan tarif pajak. Kebijakan lawan-siklus-bisnis (countercyclical policy) pada era- perekonomian-naik-daun dengan tanda-tanda kebablasan berisiko boom-burst (meledak) sehingga harus di rem, dilakukan dengan kebijakan fiskal mengurangi belanja APBN dan kebijakan fiskal menaikkan pajak pada masa boom perekonomian. Perilaku dan aksi prosiklus barang/jasa tertentu yang bergerak secara tandem dengan kondisi siklikal perekonomian. Sebuah kondisi berkorelasi positif antara nilai sebuah barang/jasa atau sebuah indikator ekonomi dengan kondisi menyeluruh sebuah perekonomian, misalnya sebagian besar barang-konsumsi, PDB, tenaga kerja dan

biaya-marginal. Kebijakan prosiklus digunakan pada periode perekonomian naik daun.

3. Kebijakan Antisiklus (*counter cyclical measure*). Siklus yang harus dilawan (di *counter*) adalah siklus perekonomian melesu (*economics downward slope*) ditandai penurunan konsumsi suatu barang/jasa , berisiko menyebabkan produsen kehilangan skala ekonomi ideal dan mencipta kapasitas-menganggur (*idle capacity*), biaya tetap perunit meningkat karena jumlah unit produksi/layanan menurun, menyebabkan harga-pokok-produksi perunit meningkat, menyebabkan perubahan titik-pulang-pokok (*break-even point*) meningkat. Bila produsen meminta laba-satuan tetap-sama, maka ia menaikkan harga jual. Sebagian konsumen keberatan & menolak membeli barang/jasa yang sama dengan harga yang lebih tinggi tersebut, menyebabkan permintaan (*demand*) terhadap barang/jasa tersebut menurun lagi , volume produksi menurun lagi, dstnya. Pada umumnya tidak terdapat kebijakan pro-siklus-bisnis pada siklus-perekonomian-turun-daun menuju krisis-ekonomi , karena sifat manusia menghindari hal yang merugikan. Kebijakan membalik-siklus-bisnis pada era- perekonomian-turun-daun yang berisiko menuju krisis/resesi ekonomi, yang harus di hentikan dan dipulihkan-kembali (*rebound*) , dilakukan dengan kebijakan fiskal meningkatkan belanja APBN bidang pra-sarana untuk membuka lapangan kerja dan membeli barang/jasa publik , dan kebijakan fiskal menurunkan pajak pada masa lesu-perekonomian untuk meningkatkan permintaan akan barang/jasa dan meningkatkan PDB.
4. Kebijakan Silang-siklus. Kebijakan Siklus-Silang (*cross-cyclical policy*) adalah kebijakan gerak-cepat lebih-dahulu (*preemptive move*) dalam sebuah bingkai-pemikiran berdurasi-lebih-panjang , yang menyimpang dari kebijakan kontrasiklus , tatkala bank sentral dan pemerintah menambah stimulus untuk mendorong perekonomian sedang melambat, antara lain membuka restriksi tertentu dan tetap menahan restriksi selebihnya, misalnya bank sentral menurunkan nisbah kewajiban cadangan (*reserve requirement ratio*) untuk meningkatkan likuiditas bank. Sebagai misal, untuk negara RRC, kebijakan *cross-cyclical* bertujuan menyeimbangkan risiko keuangan bangsa dengan pertumbuhan perekonomian , antara lain dengan menjaga stabilitas nisbah utang , memperbaiki struktur utang , menghapus kegiatan utang-piutang antar lembaga-pemerintahan yang dirancang di luar neraca dengan pinjaman bank-sentral. Kebijakan moneter dan fiskal bersasaran jangka menengah panjang dibentuk untuk mendukung UKM, industri inovatif dan kemandirian teknologi. Kebijakan pasok dalam perekonomian mendorong modal privat industri pendidikan, obat & pengobatan, dan turisme. Kebijakan permintaan terfokus pada upaya memperbesar permintaan & konsumsi dalam negeri, ketimbang upaya memperbesar kinerja ekspor, dijelaskan oleh sumber *Explainer* , 2021, dalam artikel berjudul *What is China's cross-cyclical economic policy strategy and how does it differ from countercyclical?*
5. Kebijakan Asiklus. Kebijakan asiklus adalah kebijakan bukan prosiklus atau antisiklus , misalnya (1) alokasi APBN sebesar 20 % untuk pendidikan , walau mungkin berdampakatau menyerupai pro atau anti siklus, (2) perolehan APBN

dari pembiayaan tak boleh digunakan untuk belanja rutin birokrasi , atau (3) kebijakan membantu atau tak-peduli defisit neraca bank sentral..

6. Teori Variabel Pemandu. Variabel pemandu (*leading variable*) adalah sebuah variabel pemrediksi pergerakan fiskal, misalnya PDB nyata yang akan datang, variabel pengikut (lagging variabel) adalah variabel ekonomi-makro yang mengikuti pergerakan PDB nyata , variabel kebetulan (coincidence variable) bukan variabel pemandu atau variabel pengikut yang terkorelasi dengan PDB. Indikator-indikator ekonomi pemandu adalah sebuah indeks mencakupi beberapa indikator-ekonomi , yang dibangun dengan teknik peramalan statistika, sesuai sumber *Business Cycle Measurement, ECO 305: Intermediate Macroeconomics.*

3.11.15 Manajemen Risiko Fiskal

3.11.15.1. Tujuan.

Tujuan manajemen risiko fiskal adalah untuk lebih menjamin stabilitas makro-ekonomi dan manajemen keuangan negara nan sehat.
Manajemen risiko fiskal antara lain berbentuk (1) penilaian paripurna & terintegrasi ancaman bahaya & guncangan terhadap manajemen-keuangan-pemerintahan , memberi masukan kepada pembuat kebijakan fiskal dalam menyikapi risiko , dalam peramalan fiskal , menentukan tingkat kerawanan fiskal cq solvabilitas & likuiditas nasional, sebagai dasar perencanaan dan aksi pembiayaan APBN untuk jangka pendek,(2) analisis kesinambungan fiskal jangka-panjang, dan (3) menyiapkan bahan pelatihan bagi organisasi pembuat kebijakan fiskal dan organisasi perumus RAPBN, menurut sumber USAID/EGSA.
Manajemen Risiko Fiskal departemen Keuangan pada umumnya memiliki Daftar Risiko Fiskal (*Fiscal Risk Register*) yang mencakupi Risiko Makro-Ekonomi, Risiko Sektor keuangan, Risiko Pendapatan, Risiko Neraca, dan Risiko Belanja.

3.11.15.2. Manajemen Risiko Fiskal Versi IMF

IMF, Fiscal Affair Department, 2021, mengunggah materi berjudul Pillar III: Fiscal Risk Analysis and Management , menjelaskan bahwa risiko fiskal adalah berbagai faktor yang mungkin menyebabkan keluaran fiskal menyimpang dari harapan fiskal atau proyeksi fiskal. Risiko fiskal berasal dari risiko makro-ekonomi dan risiko-fiskal-khusus. Risiko makro-ekonomi adalah perbedaan kenyataan dengan ramalan berbagai variabel ekonomi-makro seperti PDB, inflasi, pengangguran, tingkat suku bunga, harga komoditas dan nilai tukar , sebagai determinan kinerja fiskal. Penyimpangan pertumbuhan nominal PDB berdampak pada pendapatan APBN, belanja APBN dan pembiayaan/utang APBN. Risiko-fiskal-khusus muncul dari realisasi liabilitas-kontinjen atau kejadian tak-pasti lain seperti bencana-alam, kewajiban *bailout* entitas korporasi/entitas kepemerintahan bermasalah/kolaps oleh pemerintah pusat cq APBN.Keterpurukan fiskal suatu negara tergantung struktur perekonomian, organisasi sektor publik dan hubungan sektor privat & sektor publik. Guncangan ekonomi-makro dan muculnya risiko fiskal-khusus sering terjadi , terjadi berkala secara tak beraturan dan merugikan manajemen keuangan publik dalam besar terhadap PDB cukup signifikan.

Kualitas respons terhadap risiko fiskal antara lain tergantung pada kualitas sistem-informasi faktor-penyebab guncangan ekonomi-makro. IMF menengarai bahwa pada umumnya pemerintah belum mampu memantau /mengelola tiap jenis risiko fiskal secara paripurna dan berkualitas, sepertiga negara dunia telah mencapai GCG berbentuk publikasi. Penilaian kuantitatif risiko makro-fiskal berbasis analisis-kepekaan , lebih sedikit negara yang mengaplikasikan model skenario yang mengurai dampak guncangan kepada beberapa parameter makro secara simultan. Sebagian besar negara melakukan analisis makro-fiskal mengeksplorasi guncangan skala-menengah, mengasumsikan bahwa risiko-risiko itu indipenden, simetris dan linear. Sangat sedikit negara membuat proyeksi stokastis dari agregat utama fiskal dalam bentuk Bagan Fan (bagan dalam kondisi ketidak pastian) untuk memahami lebih dalam ketidak-pastian disekitar proyeksi utama. Hasil identifikasi, analisis dan pemahaman berbagai risiko-kunci dalam public-finance digunakan untuk formulasi mitigasi risiko-risiko tersebut, antara lain realokasi APBN, pembangunan dana-penahan guncangan (buffer fund), menetapkan batas toleransi terhadap risiko tertentu, membuat kebijakan fiskal untuk mencegah publik melakukan berbagai aksi yang memperbesar risiko tersebut , menggunakan instrumen pasar untuk mengelola/memindahkan risiko, tergantung kekuatan APBN dan perekonomian negara itu dan pertimbangan/keputusan mitigasi/akseptasi risiko tertentu. Terdapat hukum alam bahwa berbagai risiko makro-fiskal terlampau besar untuk ditanggung APBN sebuah bangsa, terlampau besar biaya untuk di mitigasi bagi bangsa itu, sebagian risiko tak terpahami secara jelas , tepat dan pasti.

Bagi IMF, sarana kerja (tool kit) manajemen risiko fiskal terbagi dalam empat tahap, yaitu (1) sarana identifikasi sumber risiko, besar dan penampakan bentuk-nyata risiko, tingkat kemungkinan terjadi dan besar-dampak kerugian fiskal, (2) menetapkan kebijakan/tindakan untuk menekan risiko tersebut dengan pengendalian/pengawasan langsung, perubahan regulasi (misalnya mengubah struktur modal bank), berbagi risiko dan mengurangi kecenderungan-ambil-risiko, serta transfer risiko dengan berbagai fasilitas asuransi cq lindung nilai, pemfaktoran dll. (3) penganggaran risiko-tak terhindarkan dengan apropriasi-biaya (bukan apropriasi tunai), apropriasi kontinjensi dan penciptaan tabungan/cadangan/bantalan penahan (buffer fund) untuk pengeluaran APBN penanggulangan bencana terkait risiko tersebut . (4) pembangunan margin pengaman berupa batasan ber-utang.

Pemerintah menerbitkan laporan berkala tentang estimasi/proyeksi risiko-fiskal masa yang akan datang , yang menjelaskan (1)posisi bangsa/negara terhadap risiko-fiskal , (2) hubungan/interaksi antar jenis-risiko.

Laporan tersebut mencakupi risiko ekonomi-makro dan risiko fiskal , menjelaskan kemungkinan bahwa realisasi risiko menjadi bencana-nyata tak sesuai proyeksi, dalam publikasi-evolusioner-berkala perkembangan kondisi & dinamika manajemen keuangan publik (public finance). Makin banyak negara membuat laporan tersebut tersendiri, terpisah dari laporan realisasi APBN tahun berjalan.

Bagi IMF, sebuah Laporan Risiko Fiskal mencakupi

- Risiko ekonomi-makro yang mencakupi perbandingan asumsi-dasar vs kenyataan , kondisi nyata makro vs ramalan/proyeksi, RAPBN vs APBN vs Realisasi APBN , nisbah utang terhadap berbagai asumsi-ekonomi nan-relevan, dalam berbagai skenario makro-fiskal dan fan chart.
- Utang publik, perkembangan saldo utang, laporan kemampu-bayaran-utang (debt service) terkait perubahan parameter, antara lain suku bunga dan nilai-tukar , dan debt-sustainability analysis.
- Program peminjaman pemerintah, evaluasi kesehatan program peminjaman (lending programm), jumlah saldo peminjaman berkatagori rumpun-peminjam dan tujuan peminjaman, kinerja peminjaman termasuk rumpun pinjaman-nir-kinerja dan macet , sejarah restrukturisasi pinjaman.
- Jaminan Pemerintah, jenis jaminan, tujuan/manfaat diharapkan, sasaran kelompok-masyarakat, jumlah per-jaminan , realisasi kinerja penjaminan berupa analisis biaya vs maslahat nyata , pelaporan penjaminan gagal/tidak efektif , alokasi APBN untuk kegiatan ini.
- KPBU, rumpun jenis KPBU , besar proyek, risiko gagal, laporan kenyataan KPBU sukses dan gagal, risiko dan liabilitas kontinjen yang ditimbulkan KPBU , dan laporan realiasi risiko menjadi kenyataan bencana/kerugian ber KPBU.
- Korporasi publik, jenis tugas-pokok dan kewajiban-umum (obligation) , hubungan dengan kondisi fiskal negara, laporan agregat per-rumpun-jenis-industri korporasi-publik , rumpun korporasi publik selalu ber-laba dan menyumbang APBN, dan rumpun sebaliknya.
- Pemerintahan subnasional, antara lain pemerintah daerah, hubungan operasional, hubungan keuangan antara PP dan Pemda, sumbangan Pemda kepada PDB dan APBN.
- Sistem keuangan, kewajiban kepada sektor-keuangan , besar sektor keuangan, penilaian kesehatan sistem-keuangan nasional terkait analisis stabilitas kondisi keuangan bangsa.
- Bencana alam , sifat dan besar , kaitan dengan APBN bencana alam , ringkasan manajemen bencana-alam dan peng-asuransi-an.
- Tuntutan legal, meliputi jenis, , besar dan frekuensi pertahun APBN, estimasi APBN selanjutnya.
- Berbagai risiko lain sepanjang relevan dan material, misalnya risiko geopolitis, risiko keamanan, risiko ganti rugi tertentu, risiko kekalahan pengadilan internasional tertentu, berbagai komitmen fiskal dan kewajiban setoran modal belum dilaksanakan, risiko terkandung dalam kebijakan perpajakan , risiko hilangnya daya-tarik negara bagi PMA dan turisme.

IMF Country Report No. 20/208 , 2020 , memberi contoh format analisis bentuk-tabel berjudul Template: Fiscal Risk Register, dengan sumber Mission.Index Source of fiscal risk , membagi risiko fiskal menjadi 13 butir , yaitu risiko pendapatan APBN, risiko pengeluaran APBN, bencana alam, pinjaman (loan) diterbitkan pemerintah, kinerja keuangan PSU, risiko portofolio utang pemerintah, tunggakan utang, kewajiban pensiun, KPBU, jaminan pemerintah, tuntutan hukum dan liabilitas kontinjen lain, dengan keterangan besar/besaran risiko, dimensi penampakan/perwujudan risiko tersebut, kematerialan , tingkat kegawatan risiko, aksi mitigasi dan identitas pemilik risiko.

3.11.15.3. Manajemen Risiko Fiskal versi Bank Dunia

Risiko Makro-Ekonomi

- Pertumbuhan menurun PDB paska-krisis
- Resesi diambang pintu dan daftar risiko yang mentertai.
- APBN defisit berkesinambungan.
- Tingkat bunga terhadap pertunbuhan PDB.
- Risiko ekonomi terkait tarif impor dan ekspor.
- Defisit Keuangan Rumah tangga.
- Risiko volatilitas nilai tukar.
- Kenaikan jumlah/volume surat berharga
- Peningkatan kepekaan belanja bunga APBN karena peningkatan risiko inflasi dan risiko suku bunga.
- Dampak penurunan biaya pinjaman pemerintah
- Kebijakan fiskal pada sektor real-estate.
- Pertumbuhan bisnis penjaminan infrastruktur dan perumahan.
- Pelanggaran belanja pada realisasi APBNP.
- Persiapan menghadapi kemungkinan besar guncangan yad dalam waktu dekat

Risiko Sektor keuangan

- Sejarah frekuensi krisis keuangan, sejarah biaya fiskal.
- Tren pelonggaran kebijakan fiskal masa-krisis pada era post-krisis.
- Kondisi bank-bank sistemik dan penting saat krisis.
- Dampak kesepakatan regional pada sistem keuangan dan penerimaan APBN Pajak.
- Risiko sektor keuangan karena ancaman ekonomi digital dan pengamanan transaksi maya.

Risiko Pendapatan

- Tekanan pada APBN Pendapatan Pajak, Cukai dan PNBP karena perubahan lingkungan, budaya dan teknologi.
- Ketidakpastian biaya/pembiayaan infrastrukur bagi industri migas.
- Meningkatnya kerumitan sistem perpajakan.
- Risiko menyusutnya NPWP yang telah ada.
- Kesalahan Kebijakan Perpajakan dan frekuensi tambal sulam peraturan perpajakan. Hubungan tarif pajak , perubahan perolehan pendapatan APBN Pajak terhadap PDB.
- Senjang pajak untuk pajak self assesment dan capital gain tax.
- Ketergantungan dan ketidakpastian APBN pada kebijakan anti-penghindaran dan anti-penggelapan pajak.

- Dampak pelebaran/penyempitan basis pajak.

Risiko Belanja,

- Penurunan belanja tertentu akibat kebijakan fiskal. 38 Jumlah moneter kekalahan pengadilan atas pengadilan perpajakan .
- Peningkatan/penurunan risiko imbalan kerja terhadap APBN.
- Peningkatan/penurunan risiko APBN karena perubahan UU Pensiun dan/atau UU Imbalan kerja.
- Risiko/biaya APBN karena sistem jaminan sosial.
- Tekanan APBN karena trend/besar APBN Kesehatan dan Pengobatan.
- Tekanan tunjangan kesehatan SDM pada APBN.
- Dampak UU Kependudukan dan mobilitas penduduk pada APBN Biaya Sosial * Biaya Kesehatan.
- Risiko tugas bail-out pemerintahan untuk bank sistemik dan badan-usaha pelaksana program kesehatan cq rumah-sakit besar yang mengalami kesulitan keuangan.
- Kondisi cadangan devisa
- Pengambil-alihan investasi komersial privat bermasalah.
- Naik/turun kapasitas meminjam pemerintah.
- jumlah dan kemungkinan realisasi konstruksi proyek pemerintah yang melebihi anggaran.

Risiko Neraca

- Kerusakan besar aset neto sektor publik karena krisis.
- Penundaan pelepasan aset negara dan/atau ekspaktasi realisasi pelepasan di bawah harga semula.
- Proyeksi/Ramalan penjualan piutang negara (factoring).
- Perubahan/ekspansi neraca sektor publik
- Dampak ilusi fiskal dalam akuntansi yang menghasilkan kebijakan fiskal tertentu

3.11.15.4. Contoh Implementasi Manajemen Risiko Fiskal

Sebagai studi kasus , sumber Kementerian Keuangan Negara-Bagian Georgia menyatakan bahwa identifikasi risiko ekonomi-makro sebagai dasar penentuan risiko-fiskal.

- Analisis ekonomi-makro adalah dasar pembuatan tiga skenario pengembangan ekonomi-makro , yaitu skenario dasar (kondisi perekonomian stabil) , optimis (kondisi perekonomian naik-daun) dan pesimis (kondisi perekonomian melesu) dan cetak-biru sikap/kebijakan/perubahan APBN bila perekonomian melesu.
- Indikator ekonomi makro untuk sektor fiskal adalah pertumbuhan perekonomian, inflasi, nilai tukar, suku bunga , dan besar pengaruh deviasi positif/negatif dari ramalan/ekpektasi.

- Parameter operasional terpenting untuk sektor fiskal adalah pertumbuhan perekonomian dan tingkat harga umum, suku bunga dan nilai tukar berpengaruh kecil pada sektor fiskal. Dengan demikian, skenario ekonomi-makro dikalkulasi berdasar pertumbuhan perekonomian dan guncangan inflasi.
- Neraca sektor publik menggambarkan kekayaan publik (public wealth) , memasukkan seluruh aset dan kewajiban keuangan dalam kendali pemerintah. Makin sehat-kuat neraca tersebut, makin baik negara itu menghadapi krisis perekonomian.
- Manajemen risiko target PDB tidak tercapai mencakupi berbagai risiko produksi nasional sektor riil dan sektor jasa tak tercapai.
- *Penargetan inflasi dilakukan bank-sentral* , mempertimbangkan (1) perubahan kebijakan , (2) perubahan harga-internasional , (3) perubahan harga komoditas utama dan pola-pergerakan kekuatan mata-uang dan nilai-tukar.
- Manajemen risiko fiskal menyikapi depresiasi/apresiasi bulanan nilai tukar mata uang setempat terhadap USD dan Euro terkait pertumbuhan perekonomian nasional , produksi pada sektor bisnis,perubahan volume ekspor/impor bulanan , perubahan kondisi/sikap negara mitra-dagang utama terkait perubahan ekspor/impor,mencakupi pemantauan volume berbagai produk/jasa utama bagi perekonomian, pemantauan penghasilan utama penduduk dan volume tabungan terkait upaya mengurangi defisit neraca-berjalan .
- Kebijakan APBN terfokus pada stabilitas fiskal , besar relatif defisit anggaran terhadap PDB , terkait pada pengumuman berbagai kebijakan baru , terutama kebijakan reformasi pendidikan,nisbah utang pemerintah terhadap PDB terkait pada perubahan nilai-tukar , manajemen portofolio utang (konversi utang jangka pendek menjadi jangka lebih panjang) terkait perubahan kemampu-bayaran-utang, pemantauan kinerja investasi asing langsung (FDI) terkait upaya mengurangi defisit neraca-berjalan melalui kebijakan kepemilikan-privat , mengelola hubungan dengan negara-negara mitra-investasi utama,menyediakan infrastruktur bagi jenis usaha yang paling diminati investor asing ditambah perbaikan prasarana turisme (terutama jalan raya) , restoran dan sektor energi.
- Kebijakan memelihara hubungan baik dan dukungan IMF, bank dunia dan pihak lain, membangun kebijakan menekan biaya administrasi kepemerintahan, kebijakan perpajakan pro-pertumbuhan-ekonomi, meningkatkan efektivitas tiap mata belanja APBN antara lain dalam program pembangunan sistem asuransi deposit nan-efektif, pembangunan infrastrukur KPBU, antara lain agen-khusus urusan KPBU , kebijakan memikat mitra dan hukum KPBU berbasis prinsip kemerdekaan, non-diskriminasi, transparan dan berakuntabilitas. Risiko ekonomi-makro di identifikasi dan di mitigasi , kebijakan mendorong menggunakan mata-uang domestik , kebijakan lalu lintas udara antara negara , mengembangkan hubungan/dukungan kepada organisasi pemeringkatan (rating agency).
- Kebijakan PPh amat progresif digunakan untuk mengurangi defisit APBN dan pengembalian kelebihan setoran-pajak.
- Identifikasi berbagai faktor penyebab risiko ekonomi-makro mencakupi faktor kecukupan kegiatan ekonomi internasional , kecukupan wilayah perdagangan bebas cq kecukupan/pemutahiran perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara di muka bumi , terutama untuk transportasi (perjanjian kemudahan direct

flight) , lalu lintas barang (perdagangan) & orang (turisme), investasi langsung (FDI).

- Perubahan tingkat kepercayaan dunia dan FDI dipantau terkait pada masuknya teknologi-baru bersama investasi, penggunaan mata uang-domestik melalui kebijakan de-dolarisasi.
- UU Pensiun makin terfokus pada pembangunan lembaga investasi nasional untuk mendukung industri dana-pensiun , mendorong investasi PMDN untuk membantu memerangi defisit fiskal dan meningkatkan PDB, reformasi perpajakan bertujuan mendorong gairah berbisnis dan kewirausahaan , meningkatkan PDB , meningkatkan kepercayaan domestik dan internasional akan kondisi ekonomi-makro.
- Pemantauan intensif situasi global bertujuan mengidentifikasi kenaikan risiko destabilisasi seperti ancaman kerusakan hubungan dagang antar negara , ancaman perdagangan LN dan ancaman terhadap kondisi perekonomian & pertumbuhan PDB dengan tanda-tanda penurunan intensitas perekonomian-regional , menyusutnya rekan-dagang, melemahnya nilai tukar mata-uang-domestik , ditandai tren inflasi dan penaikan suku-bunga bank-sentral satu-point demi satu-point secara berantai-berkala sebagai sinyal pengetatan-moneter, pemantauan perubahan besar belanja infrastrukur lintas-tahun APBN , terkait upaya mendorong pertumbuhan perekonomian.
- Analisis kualitas skenario ekonomi-makro terkait upaya stabilisasi sektor-sektor perekonomian yang penting mencakupi perpaduan harmonis-selaras (saling dukung) kebijakan makro, kebijakan APBN seimbang/defisit/rurplus, kebijakan APBN Belanja , kebijakan perpajakan dan kebijakan pembiayaan (utang).
- Skenario ekonomi-makro diformulasi untuk meng-kuantifikasi deviasi terhadap APBN terkait peristiwa tak-terduga , statistik kesalahan-baku digunakan untuk penentuan magnitude guncangan berdasar data-historis 10 tahun terakhir mencakup kesalahan-baku (standard error), pertumbuhan PDB , inflasi dan nilai tukar pada tiga tataran skenario dasar, positif dan negatif.

3.11.16. Bauran Kebijakan Fiskal Pemerintah dan Daerah.

Studi-kasus di atas bertujuan untuk memberi sumber-inspirasi bagi pemerintah daerah NKRI. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional termaktub pada UU Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Kebijakan fiskal pemerintah daerah bersinergi dengan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat , yang dilakukan antara lain melalui (1) penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah, (2) penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, (3) pengendalian dalam kondisi darurat, dan (4) sinergi bagan akun standar, didukung sistem informasi yang mengonsolidasi laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar , (5) secara agregat menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional, (6) sebagai dasar pemantauan, evaluasi dan bahan pembuatan kebijakan fiskal selanjutnya.

BAB 4
KEBIJAKAN
MONETER

BAB 4 KEBIJAKAN MONETER

4.1.Sistem Keuangan Negara

4.1.1. Makna Sistem Keuangan Negara.

- Sistem moneter merupakan pusat-syaraf sistem-keuangan negara.
- Sumber IMF, 2021 berjudul *Financial System Soundness*, menjelaskan bahwa sebuah sistem keuangan sebuah negara mencakupi (1) perbankan, (2) pemberi pinjaman bukan bank, (3) pasar sekuritas, (4) entitas dana pensiun, (5) *mutual* dan (6) berbagai entitas-dana investasi, (7) (7a) penyedia dan (7b) pelanggan/penikmat jasa lindung nilai bukan asuransi.
- Sistem keuangan sebuah negara terdiri atas (1) hukum-positif tentang tata-cara bertransaksi keuangan pada sebuah negara, antara lain (1a) hukum positif perbankan dan LKBB, (1b) hukum positif pasar uang dan pasar modal , terutama untuk (2) keperluan transaksi (2a) jual-beli barang modal dan operasional, (2b) transaksi investasi, (2c) transaksi keuangan bersifat spekulatif melalui (3) industri jasa-keuangan berbentuk kelembagaan perbankan, LKBB, industri asuransi dan lindung-nilai lain dengan (4) dukungan lembaga penunjang seperti pasar uang, pasar modal, pasar komoditas, pasar tenaga-kerja dan (5) transaksi keuangan (5a) privat (misalnya jual-beli, waris, hibah,wakaf) antar (5b) badan. Istilah “badan” mencakupi (1) individu mampu bertransaksi secara hukum dan (2) badan hukum seperti PT, Yayasan, Koperasi, berbagai otoritas keuangan, otoritas industri jasa keuangan dan badan (hukum) negara seperti LPS dan KSSK.
- Pada hukum positif NKRI, sistem keuangan Indonesia dibedakan dalam dua jenis yaitu (1) sistem perbankan dan (2) sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank dapat menerima simpanan dari masyarakat, disebut *depository financial institutions* yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah lembaga keuangan selain bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- Sumber lain menyatakan bahwa sistem keuangan sebuah bangsa adalah sebuah sistem tata-kelola sebuah negara dalam bidang perekonomian yang memiliki fungsi utama menyediakan berbagai jasa dalam bidang keuangan dan di implementasikan pada pembentukan lembaga keuangan dan lembaga penunjangnya pada sebuah pasar modal dan juga pasar uang. Sebuah sistem keuangan yang ada dalam sebuah negara misalnya di Indonesia terdiri dari beberapa elemen di dalamnya yaitu sebuah lembaga atau otoritas keuangan (Bank Indonesia, Departemen keuangan dan Lembaga penjamin Simpanan), sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan non bank.
- Sumber lain menyatakan bahwa sistem keuangan adalah suatu aturan, sistem, atau tehnik dimana mengatur segala sesuatu tentang surat berharga yang diperdagangkan, berapa tingkat suku bunga yang harus ditetapkan, dan jasa keuangan yang ditawarkan di seluruh dunia. Sistem keuangan terdiri dari

beberapa sistem, yaitu sistem keuangan bank atau sistem perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan otoritas keuangan.

- Sebuah sistem keuangan terdiri dari unsur unit ke-lembaga-an keuangan dan pasar yang berinteraksi dalam berbagai tatacara nan-rumit , bertujuan untuk me-mobilisasi dana untuk keperluan investasi dan penyediaan berbagai fasilitas, antara lain sistem pembayaran untuk pembiayaan aktivitas komersial. Peranan lembaga keuangan dalam sistem-keuangan adalah sebagai perantara antara penyedia-dana dan pihak-butuh-dana , terkait berbagai jenis-risiko keuangan bagi tiap pihak. Pasar keuangan menyediakan forum berbasis hukum dan tata-cara tersepakati untuk mengatur hak-kewajiban-keuangan. Sistem keuangan dapat bergerak karena aktivitas rumah-tangga sebagai deposan , aktivitas lembaga penyimpan uang (bank) dan pemanfaat deposito (debitur bank) atau emiten pasar modal.
- Stabilitas keuangan global dengan keputusan moneter sebagai pusat sistem keuangan, harus dibantu oleh kebijakan moneter terkoordinasi antar-negara.

4.1.2.Infrastruktur Sistem Keuangan Negara

Sistem keuangan negara terdiri atas sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Sumber IMF, 2021 berjudul *Financial System Soundness*, menjelaskan bahwa infrastruktur sistem keuangan antara lain adalah pusat-kliring , penyedia pembayaran, bank sentral, berbagai otoritas pengatur/pengawas sistem keuangan. Berbagai lembaga dan pasar menyediakan kerangka pelaksanaan transaksi-ekonomi dan kebijakan moneter, membantu penyaluran tabungan dan investasi , yang secara keseluruhan dimaksud mendorong pertumbuhan perekonomian.

Teori perbedaan/persamaan Sistem Keuangan Negara Sosialis Komunis dan Negara Kapitalis diuraikan Dr. Cheng-Yun Tsang , 2016 dalam artikel berjudul The Chinese Financial System vs. the Western Financial System: Differences and Similarities , menjelaskan antara lain sebagai berikut. Sistem keuangan negara negara sosialis - komunis berada dalam tatanan sistem keuangan global, terutama pada saat bertransaksi keuangan. Sistem keuangan dan perbankan negara RRC berciri khas sebagai berikut.

(1) Pasar perekonomian sosialis adalah sarana negara, dibentuk berlandas model ideologis dan ekonomi, infrastruktur pasar dan mekanisme pasar digunakan sebagai sarana pengumpulan informasi bagi pembuat kebijakan. Sistem keuangan RRC di dominasi bank pelat merah , sistem keuangan dan liberalisasi pasar dilakukan sepanjang tak mengganggu kekuasan-monopoli partai.
(2) Kebijakan ekonomi dan keuangan di tentukan & dikendalikan sebuah komite khusus atau polit-biro bersama komite pusat partai cq para senior tertentu , dilaksanakan melalui Departemen Organisasi Pusat (*Central Organization Department*) dan Kelompok Kecil Pimpinan Keuangan dan Perekonomian (*Central Finance and Economy Leading Small Group*) yang mempunyai pengaruh terhadap State Council yang membawahi lembaga penerbit Kebijakan Keuangan dibawah kemauan politis pimpinan partai.

(3) Sistem keuangan RRC di dominasi oleh industri-perbankan karena pasar-modal belum dikembangkan , dengan tanda-tanda suku bunga mulai di liberalisasi dan sektor perbankan bayangan (shadow banking sector) yang terdiri atas pemberi pinjaman, upa-duta-perantara dan perantara kredit di luar sistem perbankan yang pada umumnya belum diregulasi sebaik sektor perbankan.

Terdapat berbagai persamaan sistem keuangan RRC dengan AS, antara lain hubungan pemerintah dan entitas bank terjalin erat, bank sebagai agen fiskal , bank sebagai juru simpan dan juru bayar pemerintah, para pemain dalam sistem keuangan sama-sama bereaksi terhadap pengendalian suku-bunga, jaminan pemerintah dan regulasi kredit , beraksi terhadap risiko sistem keuangan.

4.1.3. Fungsi Pokok Sistem Keuangan Negara.

Sistem keuangan mempunyai 7 fungsi pokok, peran pokok, tugas pokok yaitu :

- Fungsi tabungan atau *Saving Function*; Menyimpan dan mengalokasikan dana dari masyarakat.
- Fungsi kekayaan atau wealth function; Sebagai sarana masyarakat untuk menimbun kekayaan yang dimiliki.
- Fungsi likuiditas atau *liquidity function*;
- Fungsi kredit atau *Credit Function*; Menyalurkan dana dari masyarakat yang memepunyai kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan kredit.
- Fungsi pembayaran atau *Payment Function*; Sebagai alat untuk mengatur lalulintas pembayaran
- Fungsi risiko atau *Risk Function.*
- Fungsi kebijakan atau P*olicy Function;* Pengatur kebijakan mengenai sektor – sektor keuangan yang ada. Dan untuk mencapai sistem keuangan yang stabil berikut ini ada misi, tujuan, strategi dan beberapa instrument lainnya.

4.1.4.Tujuan Sistem Keuangan Negara

Tujuan sistem keuangan adalah mencapai/memelihara stabilitas sistem-perbankan dan sistem lembaga-keuangan-nonbank (LKBB) yang berkaitan dengan transaksi keuangan pada suatu negara, sehingga memperlancar kegiatan ekonomi dan pada akhirnya sebuah sistem-keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

4.1.5. Ukuran Sukses Sistem Keuangan Negara

- Ukuran Sukses Sistem Keuangan adalah kondisi/situasi keuangan negara yang sehat dan stabil .
- Stabilitas sistem keuangan diproksi oleh efektivitas/efisiensi sistem keuangan cq sistem perbankan dan sistem LKBB yang mampu berfungsi secara baik pada kondisi perekonomian baik atau buruk , kondisi perekonomian sedang membaik atau sedang memburuk, kondisi perekonomian tenteram / damai atau turbulen ,

karena seluruh unsur pembentuk sistem keuangan, antara lain industri perbankan dan industri jasa-keuangan non-bank selalu dijaga agar selalu memenuhi segala syarat GCG.

- Stabilitas keuangan bangsa antara lain dilihat dari (1) tingkat kesehatan ekonomi fundamental, (2) kinerja intermediasi industri jasa keuangan, (3) stabilitas nilai tukar mata uang domestik , (4) kinerja pasar SBN dan surat utang korporasi sambil mewaspadai kondisi global antara lain kebijakan moneter BS AS, (5) memantau kondisi kenormalan neraca BS AS, (6) berbagai program relaksasi-kuantitatif diberbagai negara atau kelompok negara terkemuka di muka bumi, (7) dinamika suhu politik DN dan ketegangan KSSK , (8) *country risk*, antara lain dengan memperhatikan kasus dan jumlah bank bermasalah DN, penurunan daya beli domestik, potensi kenaikan inflasi terutama bagi *volatile food*, serta gejolak politik pra-pemilu.
- Instabilitas kondisi keuangan bangsa ditengarai/diterangkan sebagai berikut.
    1. Berbagai masalah sistem keuangan mengganggu intermediasi-keuangan , menurunkan efektivitas kebijakan moneter BS, menimbulkan arus penurunan perekonomian , mendorong pelarian-modal, menimbulkan tekanan pada nilai-tukar, mencipta biaya-fiskal nan-besar untuk penyelamatan lembaga-keuangan.
    2. Sebuah guncangan sistem keuangan pada suatu bangsa/negara secara cepat berjangkit lintas sektor-sektor keuangan dan lintas negara , karena konektivitas antar lembaga-keuangan, munculnya perusahaan *fintech*, hubungan erat perdagangan dan keuangan antar-negara. Terdapat rantai sebab-akibat antara stabilitas keuangan, kedalaman keuangan, dan inklusivitas keuangan.

4.1.6.Lembaga Pengelola Stabilitas Keuangan Negara

4.1.6.1. Lembaga Pemelihara Stabilitas Keuangan Global.

- *The Bank for International Settlements* (BIS) berkantor pusat di Basel , pada negara Swiss, di dirikan tahun 1930 oleh beberapa bank sentral berbagai negara, melayani anggotanya dalam upaya meningkatkan stabilitas moneter & keuangan internasional dalam bentuk kerjasama antar BS. Misi BIS adalah mendukung upaya BS meraih stabilitas moneter & keuangan melalui kerjasama internasional antar BS , dan (2) sebagai bank bagi BS anggota BIS yang membutuhkan bantuan likuiditas dalam bentuk layanan-kredit, beli-kembali sekuritas-diperdagangkan , sebagai trustee kegiatan-keuangan-internasional dalam upaya pengembangan stabilitas keuangan & moneter di muka bumi.
- *The International Monetary Fund* (IMF) dibentuk sebagai hasil konferensi Bretton Woods Conference tahun 1944 dan di dirikan pada tahun 1946 sebagai penjaga-pelindung tatacara keuangan-internasional nan-baik berdasar proposal negara Inggris yang disusun John Maynard Keynes sehingga disebut Keynes Plan , dan proposal negara AS yang disusun Harry Dexter White sehingga disebut

White Plan , terkait (1) pengaturan mekanisme pembentukan nilai-tukar dan (2) strategi pembiayaan untuk mengatasi kondisi ketidakseimbangan-eksternal, dewasa ini mempunyai 182 anggota.

- *The World Bank* (Bank Dunia) sebelumnya bernama the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) adalah saudara-wanita IMF , dewasa ini berfokus pada pemandu-kebijakan & pembiayaan proyek-pembangunan negara-negara berkembang.
- Kerjasama antar lembaga pemelihara stabilitas sistem keuangan dunia. Christine Lagarde, 2018, menjelaskan kerjasama IMF dan BIS dalam artikel berjudul *IMF and BIS-Working Together to Boost Financial Stability*, sebagai berikut. IMF dan BIS mendorong pertumbuhan stabilitas keuangan dan pertumbuhan PDB umumnya, mengantisipasi & mengatasi krisis-keuangan-global khususnya , lebih khusus pengembangan aliran-dana untuk kegiatan investasi tepat sasaran umumnya, khususnya untuk investasi infrastrukur yang mendorong produktivitas, pendapatan dan lapangan-kerja, melalui pengembangan kapasitas tiap BS berbasis pengetahuan. Sejak tahun berdiri IMF tahun 1960 menyediakan asistensi-teknis bagi BS dalam tema pengembangan-kapasitas-BS 189 negara anggota. Pengembangan kapasitas BS terfokus pada kapasitas manusia dengan hampiran tim-kerja yang saling-belajar-mengajar, terfokus pada Pilar dalam kerangka Basel, penilaian modal-bank-sentral , , metode pengujian-stress (*stress test method*) , tersesuai kondisi domestik BS dan negara masing masing. Pengembangan daya-kredit lembaga bank & LKBB untuk mendukung pertumbuhan PDB dan pemerkerjaan, supervisi entitas asuransi dan entitas sekuritas sebagai landasan stabilitas sistem keuangan , dan berbagai hampiran pengembangan-kapasitas BS khas negara tersebut. Pengembangan fintech , mata uang virtual dan pemodelan-bisnis yang baru , meningkatkan keberanian BS ambil-risiko dalam penerapan inovasi-keuangan , misalnya untuk pengawasan pencucian-uang dalam konteks pengamanan-maya *(cybersecurity)* . Tercatat sejarah berbagai bantuan keuangan dari negara anggota IMF baik bantuan umum maupun bertujuan-khusus untuk pelatihan 10.000 SDM BS di muka-bumi pertahun.

4.1.6.2. Lembaga Pemelihara Stabilitas Keuangan Nasional.

4.1.6.2.1. Misi atau tugas pokok KSSK.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK melaksanakan pencegahan/penanggulangan krisis pada sistem keuangan nasional NKRI sesuai kepentingan ketahanan negara di bidang perekonomian. Anggota KSSK terdiri dari Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara, Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan masing-masing sebagai anggota dengan hak suara. KSSK bertugas (1) melakukan koordinasi dalam kegiatan pemantauan dalam rangka pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan penanggulangian Krisis Sistem Keuangan , membereskan permasalahan Bank Sistemik yang berpengaruh pada Stabilitas Sistem Keuangan.

KSSK bertugas/berwenang menetapkan keputusan mengenai tata kelola KSSK, membentuk gugus-tugas/kelompok-kerja untuk membantu KSSK, menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi SSK, melakukan asesemen/penilaian kondisi SSK , menetapkan langkah koordinatif untuk mencegah/menenggulangi krisis, merekomendasikan kepada Presiden untuk (1) penetapan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, (2) penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan,dan l(3) langkah penanganan krisis. KSSK berwenang menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan langkah-penanganan kepada LPS, KSSK menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan.K untuk penanganan Bank.

4.1.6.2. 2. KSSK sebagai Manajemen Grup Stabilitas Keuangan Negara.

Pada tataran manajemen strategi, KSSK sebagai holding-manajemen stabilitas-sektor-keuangan mempunyai keunggulan sebagai berikut.

- *Powerhouse* sektor keuangan NKRI. Sebagian pemerintah di muka bumi sadar bahwa KSSK adalah powerhouse industri keuangan bangsa.
- *Penyetaraan* kualitas manajemen anggota KSSK dan sinergi perencanaan. KSSK membangun kesetaraan kualitas manajemen anggota KSSK, antara lain pelaksanaan misi dan tupoksi tiap anggota, membangun sistem GCG pada setiap anggota dan iklim GCG pada KSSK, membangun sinergi antar anggota, KSSK membantu penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran berbasis perencanaan strategis bersama dan resolusi masalah bersama tiap anggota.
- *Pooling risks*, membangun sistem perlindungan bersama terhadap krisis, misalnya kesadaran kelemahan aspek ekonomi mikro tertentu yang berdampak kepada ekonomi makro, atau sebaliknya.
- Penggunaan-pemanfaatan kapasitas tersedia pada suatu anggota bagi kepentingan anggota lain, misalnya micro surveilance Bank Indonesia dibantu oleh data OJK dan Depkeu, sebaliknya kebutuhan informasi ekonomi makro dan moneter untuk basis kebijakan ekonomi mikro OJK atau pengaturan sektor riil oleh Pemerintah Pusat dibantu oleh data base BI.
- Intermediasi, saling referensi, sebuah KSO antar anggota KSSK.
- KSSK ibarat kapal besar lebih stabil dan lebih tahan badai, kapal besar lebih mampu lintas samudra dan lintas benua. Dengan bersatu dibawah KSSK, semua anggota dalam grup serentak meningkatkan daya-saingnya di pasar domestik maupun pasar global.
- KSSK berpeluang mengusulkan restrukturisasi organisasi anggota-anggota KSSK untuk kepentingan nasional , misalnya penyatuan lembaga kebijakan fiskal dan moneter.
- Sebuah negara ber KSSK dapat tampil lebih bonafid dimata penyandang dana global, investor, kreditor-perbankan dan pemerintah asing.

- KSSK yang berkinerja baik dan bernama harum menjadi aset bangsa, menjadi salah satu penyumbang devisa, stabilitas makro ekonomi dan moneter, lapangan kerja, pasar modal, perbankan, IKNB, menjadi pahlawan pembangunan ekonomi dan memperoleh legitimasi bahkan dukungan istimewa dari pemerintah.
- KSSK mampu melakukan lobi kepada pusat-pusat kekuasaan , misalnya DPR, secara lebih lebih baik.

4.1.6.2. 3.Uraian Tugas KSSK.

Sesuai PMK Nomor 92/PMK.01/2017 , Tugas Sekretariat KSSK antara lain mencakupi perumusan tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Sekretariat KSSK, perumusan kerangka kerja, termasuk kriteria dan indikator, penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, penyiapan bahan untuk penilaian terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK, beserta data dan informasi pendukung, penyiapan usulan langkah koordinasi untuk mencegah krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota KSSK, penyiapan rekomendasi KSSK kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status stabilitas sistem keuangan, langkah penanganan krisis sistem keuangan, serta penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan, dan penyiapan penyerahan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada LPS, penyiapan keputusan pembelian Surat Berharga Negara yang dimiliki LPS oleh Bank Indonesia guna penanganan bank, penyiapan masukan bagi anggota KSSK mengenai materi peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, penyiapan bahan pemantauan/evaluasi pelaksanaan keputusan KSSK, pengelolaan data/informasi terkait SSK, pelaksanaan kajian risiko dan hukum atas kebijakan KSSK, pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antar lembaga.

4.1.6.2. 4.Kegiatan KSSK.

Sumber Investor Daily, 2020, mengunggah artikel berjudul *Ancaman Stabilitas Sistem Keuangan,* mengungkapkan bahwa *dalam m*enghadapi pelesuan perekonomian akibat pandemi, pada tahun 2020 KSSK melakukan (1) penguatan basis data dan informasi terintegrasi antarlembaga, termasuk koordinasi antarlembaga, yang dibutuhkan KSSK dalam melakukan analisis dan identifikasi potensi permasalahan di sektor jasa keuangan secara lebih akurat dan lebih dini, (2) penguatan koordinasi sektor keuangan secara terintegrasi, termasuk pengintegrasian pengaturan mikro-makro prudensial, (3)penguatan instrumen perbankan untuk mengatasi permasalahan likuiditas, terutama upaya penyederhanaan persyaratan instrumen likuiditas bagi perbankan, (4) LPS akan mengubah fungsi loss minimizer menjadi risk minimizer dengan intervensi dini (early intervention), termasuk dengan penempatan dana, dan (5) penguatan kepastian hukum KSSK sebagai pengambil keputusan kebijakan/instrumen terpilih.

4.1.6.2.5. Budaya KSSK.

Komitmen Bersama dan Sinergi Kelembagaan dalam KSSK Arief Rahman Hakim dari liputan 6, 2021, mengunggah artikel berjudul *Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Normal Seiring Penurunan Kasus Covid-19,* menguraikan antara lain bahwa Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua LPS berkomitmen bersama-sama memperkuat sinergi dari keempat lembaga dalam menjaga dan mendukung momentum pemulihan ekonomi dan terus berkomitmen menjaga terus sistem keuangan , mendorong penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui bantuan pemerintah kepada masyarakat agar pelaku usaha dapat bertahan. Pada 6 Agustus tahun 2021, Sekretariat KSSK membuat kumpulan berita berjudul Sinergi Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Peningkatan COVID-19, antara lain mengungkapkan bahwa stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan II 2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kembali kasus varian Delta Covid-19, bahwa tren perbaikan kinerja ekonomi global berlanjut pada triwulan II 2021, terutama ditopang oleh terus menguatnya kinerja ekonomi AS dan RRC, berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan global dan harga komoditas,bahwa sejumlah negara maju yang tetap mempertahankan stimulus fiskal dan moneter, bahwa menggunakan momentum penguatan kinerja ekonomi global tersebut dan sukses kebijakan *countercyclical* Pemerintah, kebijakan moneter dan pemulihan sektor keuangan yang akomodatif , pemerintah NKRI mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional yang berwujud nyata dalam bentuk pertumbuhan PDB, sukses program Bansos, diskon tarif listrik, insentif PPnBM Kendaraan Bermotor & PPN Perumahan , inflasi relatif terkendali, peningkatan konsumsi masyarakat, kenaikan kinerja ekspor-impor, dan meningkatnya harga komoditas, gejala penguatan PMI Manufaktur Indonesia yang selalu dalam zona ekspansif, sektor perdagangan dan konstruksi,sektor-sektor penunjang aktivitas pariwisata menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pertumbuhan positif di seluruh wilayah. Kinerja tersebut antara lain disebabkan kepatuhan-masyarakat dan APBN perlindungan/pemulihan kesehatan masyarakat, dan pemulihan ekonomi, niscaya jauh lebih besar apabila tidak dihambat program PPKM Darurat karena Varian Delta dan selanjutnya.

4.1.6.2.6. Patok Duga KSSK.

Dalam artikel berjudul *KSSK: Kondisi stabilitas sistem keuangan normal pada triwulan III* .Satyagraha,dari lembaga ANTARA, 2021 , meliput rapat KSSK terakhir tahun 2021 untuk asesmen terhadap kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan pada triwulan III-2021 , antara lain bahwa sebagai latar belakang (1) kondisi stabilitas sistem keuangan pada triwulan III-2021 berada dalam kondisi normal seiring dengan penurunan signifikan kasus COVID-19, pelonggaran penerapan PPKM yang berimplikasi pada mulai pulihnya aktivitas ekonomi domestik, gejala PMI manufaktur yang mulai masuk ke zona ekspansif serta indeks mobilitas penduduk, indeks belanja masyarakat, penjualan kendaraan bermotor, penjualan semen dan konsumsi listrik yang mulai tumbuh, (2) lembaga multilateral seperti OECD maupun IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 masing-masing dari 5,8 persen dan 6 persen, menjadi

5,7 persen dan 5,9 persen, dengan berita bahwa pemerintah bersama BI, OJK dan LPS selaku KSSK akan terus menjaga serta mendukung momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, bahwa KSSK akan terus mewaspadai risiko dari kondisi global yaitu munculnya gelombang varian baru COVID-19, ketimpangan distribusi vaksin, serta gangguan pada suplai global yang bisa meningkatkan tingkat inflasi. *Global supply disruption* yang lebih panjang, telah menimbulkan kenaikan harga seperti harga-harga energi, serta memicu terjadinya inflasi,dalam artikel berjudul KSSK: Kondisi stabilitas sistem keuangan normal pada triwulan III .

4.1.6.3. Bank Sentral

4.1.6.3.1. Otoritas moneter.

Otoritas Moneter adalah lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan dibidang moneter, juga merupakan sumber uang primer, baik bagi perbankan, masyarakat maupun pemerintah. Otoritas moneter adalah bank sentral negara tersebut. Otoritas moneter berstatus indipenden , namun meng-indahkan keputusan KSSK.

4.1.6.3. 2. Fungsi Pokok Otoritas Moneter.

Fungsi pokok otoritas moneter dapat disebutkan antara lain namun terutama adalah menerbitkan/mengedarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, memelihara cadangan devisa nasional dan mengawasi sistem moneter

4.1.6.3. 3. Peranan Bank Sentral sebagai Otoritas Moneter .

Kerangka dasar kebijakan moneter sebuah bangsa tergantung pada rezim-nilai-tukar di anut bangsa. Rezim nilai-tukar-tetap memiliki opsi lebih terbatas dalam kebijakan-moneternya, dibanding rezim nilai-tukar-luwes. Rezim nilai-tukar nan luwes-paripurna memudahkan pembentukan kerangka-kerja penargetan-inflasi.

Bank Sentral (BS) mempunyai dua fungsi utama,

(1) makroekonomi tatkala meregulasi inflasi dan stabilitas harga,

(2) mikroekonomi tatkala bertugas sebagai peminjam-terakhir.

BS bertugas memelihara inflasi tetap rendah dan pertumbuhan PDB berkesinambungan melalui kebijakan moneter dan pengendalian pasok uang. Kerangka dasar kebijakan moneter sebuah bangsa tergantung pada rezim-nilai-tukarnya. Bangsa memilih rezim nilai-tukar-tetap memiliki opsi lebih terbatas dalam kebijakan-moneternya, dibanding rezim nilai-tukar-luwes. Rezim nilai-tukar nan luwes-paripurna memudahkan pembentukan kerangka-kerja penargetan-inflasi. Kebijakan makroprudensial bank Sentral (BS) berhadapan dengan kekuatan politik cq DPR dan kekuatan pelaku industri jasa-keuangan , sehingga BS merasa perlu membentuk Komite Kebijakan Makro Prudensial yang bijak dan secara profesional mampu menjelaskan alasan pilihan

kebijakan. Bank Sentral indipenden namun mengindahkan Kabinet cq KSSK dan Kementerian Keuangan

4.1.6.3. 4.Kerangka Kerja dan Instrumen Otoritas Moneter.

Kerangka kerja kebijakan moneter terbagi atas Kerangka Kerja Operasional dan Kerangka Strategis.

4.2. Hubungan Sistem Keuangan dan Sistem Moneter.

Pusat/sentral sistem keuangan adalah sistem moneter. Sistem moneter mewacanakan berbagai aspek uang, bank dan induustri perbankan, nilai tukar internasional terkait kegiatan perbankan komersial dan bank sentral. Sebuah sistem keuangan adalah sebuah konsepsi lebih besar yang mencakupi pasar saham dan obligasi, berbagai lembaga yang ikut-serta/terlibat dalam penciptaan/pembentukan sumber pembiayaan untuk memperoleh/membeli barang-modal dan investasi.

4.3. Hubungan Kebiijakan Keuangan dan Kebijakan Moneter.

Kebijakan keuangan (*financial policy*) bertujuan memperoleh/mempertahankan stabilitas keuangan yang bermakna sistem-keuangan dapat memenuhi fungsi utama transaksi pembayaran, transformasi tabungan menjadi investasi, dan efektivitas manajemen risiko keuangan , sebuah sistem yang tangguh/bertahan pada situasi perekonomian baik atau buruk. Kebijakan keuangan dan kebijakan moneter adalah dua hal berbeda, pada kenyataannya ; kebijakan keuangan berpengaruh kepada inflasi dan pendayagunaan (utilisasi) sumberdaya bangsa, dan aspek operasi pasar-uang, sementara kebijakan moneter berdampak pada perkonomian-nyata. Karena itu kebijakan keuangan mempertimbangkan kebijakan moneter, sebaliknya kebijakan moneter bank-sentral mengindahkan kebijakan keuangan sesuai sumber berbentuk makalah berjudul The Relation between Monetary Policy and Financial Policy, karangan Lars E.O Svenson, Sveriges Riksbank, Stockholm University, CEPR, and N. Salah satu anggota penting KSSK sebagai pembuat kebijakan keuangan nasional adalah BI sebagai otoritas moneter nasional.

4.4..Sistem Moneter

4.4.1. Dimensi Sistem Moneter

Sistem moneter adalah sebuah sistem yang mengendalikan uang-beredar (termasuk pencetakan uang / menambah / menarik /mengganti uang beredar lusuh , sanering, dan emisi jenis uang-kartal yang baru , sebagian negara memasukkan *bit-coin*) dan kredit dengan pengaturan suku bunga, suku-bunga deposito, tingkat inflasi dan lain-lain.

4.4.2. Ruang Lingkup Sistem Moneter.

Termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, unsur dalam sistem moneter adalah (1) otoritas

moneter dan (2) bank-bank pencipta uang giral. Sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter.

4.4.3. Sistem Moneter Internasional.

Makna Sistem Keuangan Internasional. Sistem Moneter Internasional (*International Monetary System* atau IMS) mencakupi seluruh aset berpulangan bunga dan nonbunga, lembaga keuangan bank dan bukan-bank, pasar keuangan yang memperdagangkan dan menenyukan harga aset, aktivitas nan-pasar seperti transaksi ekuitas-privat, ventura-bersama, lindung-nilai, LBO dll yang melibatkan urusan keuangan. Sistem Keuangan Internasional mencakupi sebuah aliran uang terintegrasi terkait otoritas-peregulasi kuantitas uang-beredar, berbagai sarana pendukung kebutuhan mata-uang dan dasar pertukaran antar-mata-uang dalam rangka penyelesaian kewajiban pembayaran lintas negara. Bank sentral, lembaga keuangan internasional, entitas bank komersial dan entitas dana, terkait pasar-bebas-mata-uang , tergantung struktur kelembagaan dan obligasi pemerintah, merupakan bagian sistem moneter internasional.

Kerjasama Kebijakan Moneter Lintas Negara diuraikan sumber BIS Annual Economic Report , 2015, yang menjelaskan sistem moneter & keuangan internasional dalam artikel berjudul The international monetary and financial system, antara lain sebagai berikut. Pengaturan perekonomian global berbasis rancang-bangun kesepakatan moneter & keuangan lintas negara untuk menanggulangi ketidak-seimbangan sistem keuangan global lintas-negara berbasis international monetary and financial system (IMFS) , adalah karena globalisasi perdagangan, penggunaan mata uang USD dan Euro lintas negara, globalisasi pasar keuangan , aliran modal di muka-bumi, upaya tiap-negara untuk menahan dampak buruk perembetan kondisi buruk negara lain atau mata-uang-jangkar (secara egosentris) jangan sampai melanggar kesepakatan kerja-sama internasional apalagi merugikan sebagian besar negara lain. Fitur utama IMFS adalah (1) faktor wilayah kebijakan moneter tentang mata-uang-internasional-kunci cq mata-uang USD meluas keluar batasan negara, (2) penghindaran senjang-suku bunga antar bangsa , (3) gelombang besar arus modal yang bergerak bebas lintas yuridiksi dan lintas mata uang , sebagai dasar perubahan kebijakan moneter (khas) bangsa tersebut dalam semangat kerja-sama internasional. IMFS adalah sebuah pengaturan/kesepakatan transaksi perdagangan barang, jasa dan instrumen keuangan lintas negara , sebagai dasar pembuatan kebijakan-moneter-domsetik nan-prudent terfokus pada stabilitas-harga DN dalam kesadaran akan tatanan arus-modal nan-bebas di muka bumi. Kita sama mafhum bahwa mata-uang USD berperan-utama (disusul Euro) dan dominan pada perdagangan & keuangan internasional, sebesar 87 % perdagangan valas, di atas 87 % apabila ditambah transaksi forward dan swap. Lebih dari separuh faktur-perdagangan diselesaikan dalam mata-uang USD. Lebih dari setengah PDB dunia merupakan zona Dollar , jaug lebih besar dari PDB AS. Pemantauan likuiditas global adalah sarana relaksasi pembiayaan dalam pasar-uang-global , antara lain tertandai jumlah-kredit bank dan pasar obligasi. Dalam mata-uang USD atau Euro. Komponen kredit internasional cenderung lebih rapuh dan pro-siklus, pasar obligasi berkembang bila kredit-bank menurun. Banyak BS melakukan intervensi valas yang berdampak relaksasi moneter global , membeli USD dan berinvestasi besar-

besaran pada obligasi-pemerintahan tanpa peduli tingkat-pulangan. Pada umumnya berbagai perekonomian negara berkembang dan negara maju mengikuti suku bunga perekonomian-besar-canggih umumnya, AS khususnya terkait kebiasaan investor-global dalam memandang rumpun tingkat-suku-bunga pada berbagai pasar-modal. Divergensi kebijakan moneter lintas negara mengandung potensi instabilitas sistem-keuangan dan apresiasi mata-uang USD , relaksasi wilayah Eropa berpotensi memperpanjang masa-relaksasi global bila korporasi dan pemerintah di muka bumi mampu mengganti pendanaan berbasis Euro menjadi berbasis USD. Apresiasi mata-uang USD memberat korporasi & pemerintah yang ber utang dalam mata-uang USD. Perekonomian AS menggunakan posisi-pendek pada USD untuk pendanaan posisi-panjang mata-uang lain. Risiko apresiasi USD menyebabkan kebanyakan negara mengambil posisi piutang dalam USD lebih besar ketimbang utang dalam USD. Kebijakan umum adalah kepemilikan aset dalam USD lebih besar dari kepemilikan liablitas dalam USD berkembang tatkala mata-uang USD terapresiasi. Pada tatanan global, terjadi internastional spillover, negara egois yang sudi berkoordinasi akan menerima hukuman tertular balik (*spillback*) masalah keuangan negara lain. Hal ini memaksa tiap negara wajib bekerjasama dengan negara-negara lain dalam pembuatan kebijakan-moneter dan aksi bersama agar berdampak-positif signifikan. Berbagai kerjasama internasional, antara lain kebijakan jaring-pengaman-sosial tak mudah dilakukan karena perbedaan tingkat-ekonomi tiap negara dan kondisi stabilitas-sistem-keuangan.

4.5. Kebijakan Moneter

4.5.1.Pro-Kontra Kebijakan Moneter

Crystal Lombardo, 2016, menyajikan artikel berjudul *Pros and Cons of Monetary Policy*, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut. Kebijakan moneter mendorong suku-bunga lebih rendah, mendorong eforia usaha , belanja dan perekonomian, melalui penganekaragaman dan pengamanan instrumen-keuangan dan dapat melakukan relaksasi-kuantitif (*quantitative easing*) dan aliran kredit-bank kepada masyarakat pada satu sisi, pada sisi lain pada saat artikel dibuat (2016) belum terbukti ampuh untuk mengatasi resesi global, kebijakan kontraksioner dengan meningkatkan suku-bunga berdampak menghalangi kegiatan/pertumbuhan perekonomian & bisnis, harus bersinergi dengan kebijakan fiskal untuk program pemulihan perekonomian..

Keith Miller, 2022, melalui © 2022 FOW, menyajikan artikel berjudul *Advantages and Disadvantages of Monetary Policy*, menjelaskan bahwa pada satu sisi, kebijakan moneter berpotensi pengembangan instrumen sarana keuangan, bisnis dan investasi , sehingga mendorong laju pertumbuhan perekonomian, dapat berbentuk relaksasai-kuantitatif Bank Sentral, , menjaga tingkat suku bunga tetap rendah , menekan laju inflasi, ., mendorong transparansi dan meningkatkan keterdugaan industri-keuangan dan perekonomian, industri keuangan , bank sentral dan perbankan bebas pengaruh politik, pada sisi lain kebijakan moneter tak menjamin pemulihan perekonomian, tak seberapa ampuh untuk menanggulangi resesi-global, ,tak selalu mampu menekan suku-bunga, ., kebijakan moneter butuh waktu implementasi, kebijakan moneter dapat berisiko menahan laju ekspansi bisnis dan perekonomian.

Diluar bank sentral, kebijakan moneter dilakukan oleh pemerintah dengan instrumen utama pendapatan dari pajak dan juga pengeluaran/ belanja negara. Kebijakan fiskal dilakukan dengan cara mengubah pola penerimaan yang berupa pajak dan pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah.

4.5.1.1. Lingkup Tugas Kebijakan Moneter.

Kebijakan moneter pada umumnya berlaku menyeluruh, berlaku juga bagi sub-ekonomi atau industri tertentu yang tak membutuhkan stimulus kebijakan moneter tertentu.Kebijakan tarif bunga bank sentral menyebabkan tarif bunga deposito naik/turun, menyebabkan selera menabung masyarakat naik/turun, biaya kredit (bunga) naik/turun, penyediaan dana untuk investasi naik/turun.Inflasi adalah gejala kenaikan harga-harga umum barang/jasa. Inflasi kecil adalah baik untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, pekerja dapat berharap kenaikan imbalan kerja. Kebijakan moneter harus praktis dan mudah diterapkan. Tambahan uang beredar dan tarif-bunga menurun akan menurunkan nilai mata uang domestik. Pelemahan mata-uang tertentu mendorong kinerja ekspor, apabila harga produk eks-impor di negara-asing turun , meningkatkan permintaan (demand). Untuk bank sentral, tarif bunga hanya dapat diturunkan sampai nihil, tarif bunga rendah dapat menjadi jebakan likuiditas. Beberapa bank sentral Eropa menggunakan tarif bunga negatif. Tarif bunga rendah lebih cocok pada saat ekonomi mekar-berkembang. Kebijakan moneter sebaiknya mencipta lapangan/peluang kerja. Bila bunga kredit rendah, masyarakat cenderung meminjam walau tak butuh. Kondisi pinjam berlebih menyebabkan uang berputar lebih banyak ketimbang barang/jasa, daya-beli meningkat, menyebabkan permintaan meningkat, menyebabkan harga-harga umum meningkat, meningkatkan besar inflasi. Kebijakan moneter berbagai bank sentral makin berhampiran kebijakan kuasi-fiskal.

4.5.1.2. Peran Ekonomi-Makro dan Peran Ekonomi-Mikro Bank-Sentral.

Pada tataran makro-ekonomi, kebijakan moneter BS mempengaruhi suku bunga dan berpartisipasi pada operasi-pasar-terbuka (OMO) untuk pengendalian biaya-pinjaman & biaya-peminjaman suatu bangsa. BS juga bertugas pada tataran mikro, dengan kebijakan nisbah cadangan wajib dan sebagai peminjam-terakhir.BS bertanggungjawab atas stabilitas harga, OMO adalah sarana pengendalian inflasi, pasok uang dan harga. Pada tataran tugsa mempengaruhi kondisi makro-ekonomi, BS menggunakan kebijakan moneter untuk meregulasi inflasi dengan pengendalian pasok-uang cq melakukan operasi-pasar-terbuka (Open Market Operation) cq injeksi pasar dengan likuiditas atau sebaliknya , menarik sebagian uang-beredar. Pada tataran ekonomi mikro-ekonomi , BS menjadi peminjam-terakhir (*lenders of last resort*) bagi bank-komersial yang kekurangan-dana kredit. Pinjaman berjangka pendek dengan tarif-bunga khusus (tarif terdiskonto) yang ditetapkan sedemikian rupa agar bank-komersial tertarik-untuk-pinjam namun tidak ketagihan meminjam. BS negara tertentu mewajibkan bank komersial menaruh simpanan wajib pada BS , sebagai sebuah ancangan pengendalian pasok-uang. Pada era-pandemi, kewajiban cadangan tersebut mungkin dirurunkan sampai nihil. Sebagai contoh, Sumber Bank Albania , 2018, berjudul *Standing Facilities* antara lain menjelaskan sebagai berikut. Fasilitas Siaga (*Standing Facilities*) adalah instrumen-

tersedia-bagi bank domestik & cabang bank-asing di Albania atas inisiatif sendiri , antara lain (1) *overnight deposits* kelebihan likuiditas harian bank, (2) *overnight loan* ber-agun, sebagai kebalikan OPT BS, untuk menambah/mengurangi likuiditas harian (*overnight liquidity*). Bunga instrumen membentuk koridor dan bunga-pasar-uang bergerak pada kisaran tersebut. Hampiran fasilitas siaga tersebut digunakan hanya apabila tidak ada alternatif lain.Instrumen Deposito-Semalam (overnight deposit) adalah fasilitas investasi bagi bank-komersial untuk menginvestasikan kelebihan-likuiditas-semalam tanpa-batas boleh-ditolak-BS tanpa alasan (overnight excess liquidity) dalam bentuk investasi-jangka-pendek pada suku-bunga-tetapan-dimuka.Maturitas instrumen adalah lewat-semalam, kecuali besok adalah hari libur nasional, ditambah bunga dari BS dibayar hari selanjutnya.Instrumen Pinjaman-Semalam (overnight loan) adalah instrumen utang berjangka-pendek tersedia bagi bank-komersial, beragun paripurna, tersedia bagi bank membutuhkan karena yang mengalami kekurangan likuiditas-semalaman saja, dengan bunga kisaran-tertinggi (ceiling) suku-bunga-pasar-semalaman (*overnight market interest rate*) . Gagal pengembalian bank-komersial berisiko sita-agunan dan penghentian bantuan BS. Seluruh bank komersial dan cabang bank-asing yang memiliki akun pada BS berhak atas fasilitas-semalaman (*overnight facilities*). Gagal bayar harian otomatis terkonversi menjadi pinjaman-semalam (*overnight loan*). BS memberi tahu kepada bank tentang perpanjangan-otomatis pinjaman-semalam dan pembekuan-otomatis-agunan. Intrumen bbermaturitas semalam saja, hari selanjutnya (kecuali hari libur nasional) dikembalikan bank kepada BS berikut bunga, dengan bunga harian dihitung berdasar 365 hari bunga setahun. Otoritas moneter. Otoritas Moneter adalah lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan dibidang moneter, juga merupakan sumber uang primer, baik bagi perbankan, masyarakat maupun pemerintah. Otoritas moneter adalah bank sentral negara tersebut. Otoritas moneter berstatus indipenden , namun mengindahkan keputusan KSSK.

Fungsi Pokok Otoritas Moneter. BS mempunyai dua fungsi utama, (1) makroekonomi tatkala meregulasi inflasi dan stabilitas harga, (2) mikroekonomi tatkala bertugas sebagai peminjam-terakhir. BS bertugas memelihara inflasi tetap rendah dan pertumbuhan GDP berkesinambungan melalui kebijakan moneter dan pengendalian pasok uang.

Fungsi pokok otoritas moneter terutama adalah menerbitkan/mengedarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, memelihara cadangan devisa nasional dan mengawasi sistem moneter. Peranan Otoritas Moneter . Kerangka dasar kebijakan moneter sebuah bangsa tergantung pada rezim-nilai-tukar di anut bangsa. Rezim nilai-tukar-tetap memiliki opsi lebih terbatas dalam kebijakan-moneternya, dibanding rezim nilai-tukar-luwes. Rezim nilai-tukar nan luwes-paripurna memudahkan pembentukan kerangka-kerja penargetan-inflasi. BS mempunyai dua fungsi utama, (1) makroekonomi tatkala meregulasi inflasi dan stabilitas harga, (2) mikroekonomi tatkala bertugas sebagai peminjam-terakhir. BS bertugas memelihara inflasi tetap rendah dan pertumbuhan PDB berkesinambungan melalui kebijakan moneter dan pengendalian pasok uang. Kerangka Kerja dan Instrumen Otoritas Moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter terbagi atas Kerangka Kerja Operasional dan Kerangka Strategis. Peranan Bank Sentral .Kebijakan makroprudensial bank Sentral (BS) berhadapan dengan kekuatan politik cq DPR dan kekuatan pelaku industri jasa-keuangan , sehingga BS merasa perlu membentuk Komite

Kebijakan Makro Prudensial yang bijak dan secara profesional mampu menjelaskan alasan pilihan kebijakan.

4.6. Hulu Kebijakan Moneter Sebuah Negara.

Teori ekonomi umum bertujuan mencapai *full employment, economic growth, dan price stability* , pada era-pandemi setiap negara mendambakan sukses kebijakan fiskal, stabilitasi keuangan dan sukses vaksinasi. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : (1)Kebijakan ekonomi mikro, adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut, (2)Kebijakan ekonomi meso, adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu, dalam tataran ilmu ekonomi regional dan (3) Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang mencakupi semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat), kebijakan makro yang mempengaruhi kebijakan meso dan kebijakan mikro.

Hulu atau dasar teori ekonomi makro adalah teori aliran-moneteris (*monetarist theory* atau "monetarism") terfokus pada kekuatan pasok uang sebagai determinan tingkat-harga dan inflasi. Tambahan pasok uang menyebabkan kenaikan-harga umum dan inflasi, pengurangan pasok uang menyebabkan deflasi dan berisiko resesi. Bagi Milton Friedman, kebijakan moneter adalah sarana lebih efektif dibanding kebijakan fiskal cq kebijakan perpajakan. Bila suku-bunga bank-sentral naik, maka terjadi penurunan jumlah uang yang dipinjamkan kepada bisnis dan konsumen, sehingga menurunkan besar belanja dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dan merupakan tindakan pemerintah (khususnya Bank Sentral) untuk mempengaruhi situasi makro-ekonomi yaitu pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian yang dilaksanakan melalui pasar uang.
Mazhab moneteris melahirkan konsep ekonomi makro, mazhab ekonomi makro melahirkan teori kebijakan moneter. Kebijakan moneter bank-sentral disusun dengan mempertimbangkan perkiraan dampak kebijakan fiskal pada ekonomi-makro, dijelaskan oleh bank sentral AS sebagai berikut. Eric Tymoigne, 2021 , mengunggah makalah berjudul Money and Banking (Part 3 – Monetary Base, Reserves, and Central Bank's Balance Sheet) menjelaskan sebagai berikut. Pada neraca the Fed, sisi aset terdiri atas surat berharga, PN bank privat domestik, aset LN terdenominasi , uang kartal di tangan, aset lain seperti gedung, sarana , sisi liabilitas terdiri atas kas milik the Fed dalam sirkulasi atau disimpan, *Reserve Balance (Checking Account due to banks)*, rekening perbendaharaan dan surat utang negara-federal di pegang bendahara, liabilitas kepada pihak asing dll, dan liabilitas lain, termasuk ekuitas. Persamaan matematis sebagai berikut : *Monetary Base = Reserve balances + vault cash + cash in circulation*, dan persamaan *Total reserves = Reserves balances + applied vault cash = L2 + part of L1*.

Kebijakan moneter juga dipahami sebagai tindakan makro-ekonomi pemerintah cq Bank Sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Fokus kebijakan moneter adalah pada variabel-variabel keuangan yaitu pasok uang (money supply), aliran kredit, dan tingkat suku bunga.

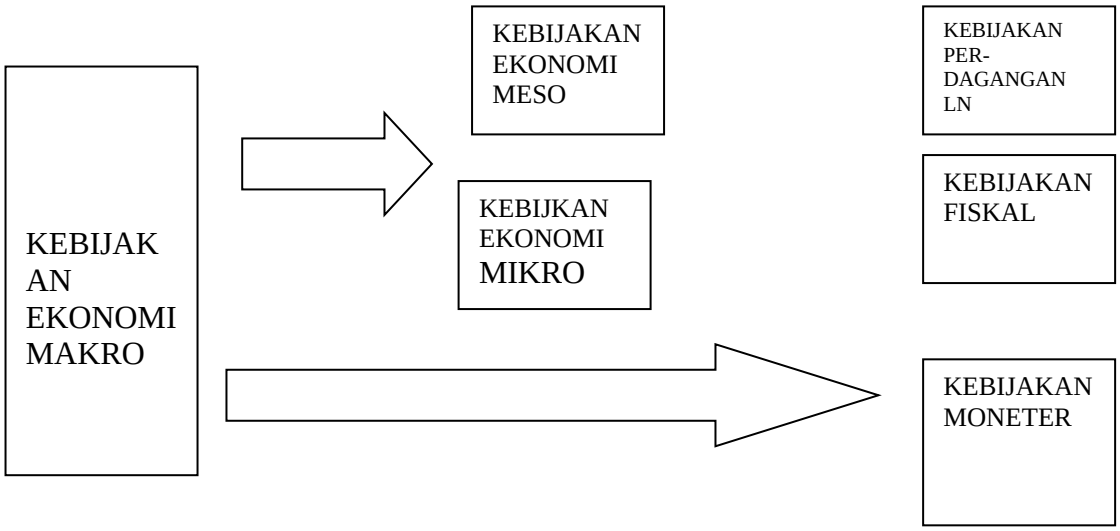

Bagan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi makro mencakupi antara lain (1) kebijakan moneter , (2) kebijakan fiskal dan (3) kebijakan perdagangan LN dengan penjelasan sebagai berikut;

(1) Kebijakan moneter dilakukan terutama melalui (1a) operasi pasar terbuka, (1b) penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan (1c) batas maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, (1d) kebijakan perubahan tingkat suku bunga diskonto, (1e) jual-beli surat berharga SBI dan SBPU untuk pengendalian tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar.

(2) Kebijakan Fiskal (2a) bidang perpajakan bertujuan untuk mencapai target pendapatan APBN,(2b) kebijakan belanja APBN dalam rezim APBN seimbang atau boleh defisit, bertujuan untuk pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

(3) Kebijakan perdagangan luar negeri mencakupi (3a) kebijakan subsidi, (3b) akselerasi pertumbuhan industri tertentu , (3c) deregulasi peraturan ekspor, (3d)kebijakan tarif ekspor-impor, (3e) kebijakan substitusi impor, (3f) kebijakan perdagangan terharmonisasi dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, dan kebijakan industri.

4.7. Hubungan Otoritas Fiskal dan Otoritas Moneter.

Kebijakan moneter dilakukan oleh pemerintah dengan instrumen pendapatan dari pajak dan juga pengeluaran/ belanja negara. Kebijakan fiskal dilakukan dengan cara mengubah pola penerimaan yang berupa pajak dan pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah.

Lars E.O. Svensson , 2015, mengunggah artikel berjudul Monetary *Policy and Macroprudential Policy: Different and Separate,* antara lain menyatakan sebagai berikut. Pertama, Kebijakan fiskal berpengaruh pada inflasi dan lapangan-kerja, yang digunakan dalam pilihan kebijakan moneter. Kedua, Kebijakan moneter berpengaruh kepada APBN

pendapatan dan belanja, sehingga dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan fiskal. Agar selaras, sumber lain menyatakan bahwa kebijakan moneter BS dibangun berdasar berbagai asumsi kebijakan fiskal Pemerintah. Michael Hatcher, Patrick Minford , 2014, dalam makalah berjudul *Inflation targeting vs price-level targeting: A new survey of theory and empirics* , menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Pada bank sentral, hubungan penargetan inflasi dan penargetan tingkat-harga adalah sebagai berikut. **Pertama**, guncangan-kagetan inflasi merupakan dasar membentuk aksi-penargetan tingkat harga.**Kedua**, dalam penargetan-inflasi, kesalahan di masa-lalu dan guncangan masa-lalu diperlakukan sebagai kejadian masa-lalu (*by gone*) . Sebagi contoh, bila hari ini terjadi inflasi besar-kagetan, hal ini di masa depan akan diikuti inflasi dibawah-rerata dalam rezim penargetan tingkat-harga.Penargetan inflasi di masa depan tidak tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi sekarang. Penargetan tingkat-harga terdapat dalam berbagai model makro-modern adalah sarana yang baik untuk pemulihan perekonomian.

4.8 . Teori Kebijakan Moneter

4.8.1.Makna Kebijakan Moneter.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dan merupakan aksi/tindakan Bank Sentral untuk mempengaruhi situasi/kondisi makro-ekonomi kearah yang diinginkan dengan (1) pengaturan jumlah uang beredar , penarikan/penambahan/pencetakan uang-beredar dan (2) tingkat suku bunga pasar uang. Fokus kebijakan moneter adalah pada variabel-variabel keuangan yaitu pasok-uang-beredar (*money supply*), aliran kredit, dan tingkat suku bunga.
Sumber lain menyatakan hal yang serupa dengan kalimat sebagai berikut, kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, dan/atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan,status/kondisi, tingkat kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan/dituju diproksi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai uang, menjaga likuiditas perekonomian , stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan pemerkerjaan-penuh (*full employment*) , keseimbangan neraca pembayaran (*Balance of Payment* atau BOP). Proses kebijakan moneter dilakukan dengan mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pemerkerjaan penuh atau tingkat perekonomian lebih sejahtera. Kebijakan moneter antara lain melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, *margin requirement*, kapitalisasi untuk bank , *lender of the last resort*.
Di AS, dua sasaran the Fed adalah stabilitas harga dan pemerkerjaan penuh, yaitu stabilisasi inflasi disekitar target-inflasi the Fed dan pemerkerjaan pada tingkat-berkesinambungan-jangka-panjang.
Sumber lain menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah seperangkat-sarana aksi bank-sentral untuk mengendalikan pasok-uang dan mencapai pertumbuhan perekonomian nan-lestari. Kebijakan tersebut terklasifikasi sebagai kebijakan kontraksi atau ekspansi, instrumen kebijakan utama adalah kebijakan perubahan tarif-bunga bank-sentral ,

pinjaman tunai kepada bank dan kebijakan perubahan kewajiban-cadangan (reserve requirements).

4.8.2..Tujuan / Sasaran Kebijakan Moneter.

Tujuan / Sasaran Kebijakan Moneter adalah menjaga stabilitas nilai mata uang, menjaga likuiditas perekonomian , stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi nan-ideal, dan pemerkerjaan-penuh (*full employment*) , keseimbangan neraca pembayaran (*Balance of Payment* atau BOP).

Sumber lain menyatakan bahwa kebijakan moneter bank-sentral bertujuan (1) mempertahankan momentum pertumbuhan-ekonomi , (2) membangkitkan (kembali) perekonomian kala-resesi cq pandemi. Hasil kebijakan dalam jangka pendek sesuai harapan, mungkin berdampak dalam-jangka-panjang yang tak sesuai harapan/skenario. Pemerintah harus memadu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara arif-bijaksana. Sumber lain menyatakan bahwa kebijakan moneter bertujuan agar inflasi terkendali (harga-harga stabil) , mencapai target pertumbuhan ekonomi (PDB) , meningkatkan kemudahan akses-kepada-modal, bangsa mencapai kondisi pemerkerjaan-penuh (*full employment*) dan kekuatan mata-uang terjaga.

4.8.3.Jenis Kebijakan Moneter.

4.8.3.1. Kebijakan Moneter Bersama Lintas Negara.

BIS Annual Economic Report , 2015, menjelaskan sistem moneter & keuangan internasional dalam artikel berjudul *The international monetary and financial system*, antara lain sebagai berikut. Pengaturan perekonomian global berbasis rancang-bangun kesepakatan moneter & keuangan lintas negara untuk menanggulangi ketidak-seimbangan sistem keuangan global lintas-negara berbasis international monetary and financial system (IMFS). Fitur utama IMFS adalah (1) faktor wilayah kebijakan moneter tentang mata-uang-internasional-kunci cq mata-uang USD meluas keluar batasan negara, (2) penghindaran senjang-suku bunga antar bangsa , (3) gelombang besar arus modal yang bergerak bebas lintas yuridiksi dan lintas mata uang , sebagai dasar perubahan kebijakan moneter (khas) bangsa tersebut dalam semangat kerja-sama internasional. Pada tatanan global, terjadi internastional spillover, negara egois yang tak-sudi berkoordinasi akan menerima hukuman tertular balik (*spillback*) masalah keuangan negara lain. Hal ini memaksa tiap negara wajib bekerjasama dengan negara-negara lain dalam pembuatan kebijakan-moneter dan aksi bersama agar berdampak-positif signifikan. Berbagai kerjasama internasional, antara lain kebijakan jaring-pengaman-sosial tak mudah dilakukan karena perbedaan tingkat-ekonomi tiap negara dan perbedaan kondisi stabilitas-sistem-keuangan. Sebagai contoh, maksud pembentukan Uni Eropa antara lain sebagai sarana kebijakan moneter lintas negara anggota UE, sepanjang bermanfaat.

4.8.3.2.Teori Perbandingan Instrumen Kebijakan Moneter Kala-Normal dan Kala-Krisis.

Instrumen Kebijakan Moneter Kala Normal. Instrumen kebijakan moneter kala-normal adalah kebijakan-tarif-bunga dan kebijakan komunikasi/informasi publik seperti ramalan inflasi dan ramalan pengangguran dimana sistem keuangan nan-tangguh & cepat-pulih dari distorsi apapun (*resilience*) , mampu memenuhi tiga fungsi utama sistem keuangan bangsa , yaitu transformasi tabungan menjadi pembiayaan, manajemen risiko nan-baik, dan tranmisi pembayaran. Instrumen makroprudensial adalah supervisi, regulasi dan komunikasi, antara lain kewajiban kecukupan modal dan likuiditas, *loan-to-value (LTV) caps* atau nisbah pinjaman vs agunan, laporan-stabilitas-keuangan terutama *stress-test* atau kecukupan-modal pada kondisi resesi atau semacamnya , bagi Lembaga Keuangan. Sumber © 2014 - 2021 CentralCharts mengunggah artikel *Definition: conventional monetary policy* , *What is conventional monetary policy?* Menjelaskan bahwa kebijakan moneter konvensional memiliki tiga poros, yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas tersedia dan cadangan minimum. Poros pertama, OPT. Untuk memelihara likuiditas pasar-interbank, kebijakan OPT BS dilakukan melalui lelang pemendekan/pemanjangan jadwal-jatuh-tempo , memberi kesempatan bank komersial memnijam dari BS dengan meng-agunkan sekuritas utang,T Bill dll. Para peserta lelang majukan sebuah tarif-bunga pinjaman. Terdapat beberapa jenis lelang, (1) lelang mingguan untuk pembiayaan kembali operasional, (2)untuk operasi berjangka lebih panjang , pada umumnya 3 bulanan, dan (3) untuk kegiatan operasional sangat panjang, pada umumnya di atas 3 tahun.Poros kedua, Fasilitas Siaga (Standing facilities) adalah instrumen-tersedia-bagi bank atas inisiatif sendiri , antara lain (1) overnight deposits kelebihan likuiditas harian bank, (2) *overnight loan* ber-agun, sebagai kebalikan OPT BS, untuk menambah/mengurangi likuiditas harian (*overnight liquidity*) , bunga instrumen membentuk koridor di dalam mana bunga-pasar-uang bergerak. Hampiran fasilitas siaga baru digunakan hanya apabila tidak ada alternatif lain.Poros ketiga, Cadangan minimum (minimum reserve) adalah sejumlah uang tunai, surat-berharga-utang atau instrumen moneter lain, yang harus di simpan pada BS sebagai bagian kebijakan moneter.
Kebijakan moneter kala krisis merupakan kebijakan luar-biasa, karena kebijakan kala-normal tak lagi memadai. Kebijakan kala krisis ditujukan untuk mengatasi krisis tersebut, misalnya resesi ekonomi dan krisis keuangan global, krisis global karena pandemi dan krisis perang dunia. Krisis era-pandemi ditandai kebijakan-luar biasa untuk pemulihan kesehatan publik cq rumah-tangga, penjagaan agar kondisi ekonomi bangsa tidak kolaps, sehingga momentum pemulihan-ekonomi yang muncul kapan-saja dapat ditunggangi (menunggangi gelombang pasang dalam ilmu berselancar / *surfing*) bangsa tersebut.

4.8.3.3. Kebijakan Moneter Kontraktif.

Kebijakan moneter kontraktif bertujuan mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan laju inflasi dan mendinginkan suku perekonomian. Kimberly Amadeo, 2020, menyajikan artikel Contractionary Monetary Policy With Examples, antara lain menguraikan berbagai hal sebagai berikut. Inflasi tinggi menyebabkan konsumen membeli lebih banyak untuk menghindari kenaikan harga , kenaikan agregat-permintaan menyebabkan harga-harga umum meningkat, menuju inflasi luar-biasa (hiper inflation). BS menaikkan suku bunga BS, menyebabkan kenaikan suku bunga kredit bank. BS melepas SUN

kepada bank , menyebabkan likuiditas bank menurun , karena itu menaikkan suku-bunga kredit bank. BS meningkatkan cadangan wajib (reserve requirement) untuk mengurangi daya-menyalurkan-kredit industri perbankan. BS menaikkan suku-bunga BS, menyebabkan kenaikan suku-bunga deposito, mendorong pertumbuhan tabungan masyarakat, mengurangi eforia konsumsi , menurunkan permintaan-agregat , menyebabkan kenaikan suku-bunga-kredit , kenaikan biaya modal menurunkan hasrat kewirausahaan cq investasi/ekspansi bisnis dan menurunkan selera-pinjam-uang ke bank, menurunkan jumlah investasi baru juga karena penurunan permintaan-agregat di atas. Bank jarang meminjam kepada BS membergunakan tarif diskonto bank sentral yang lebih rendah dari tarif dana bank sentral , karena akan dipersepsi pasar dalam kesulitan likuiditas atau solvabilitas, sehingga bank-bank lain enggan memberi-pinjaman kepada bank yang menggunakan discount window..

4.8.3.4. Kebijakan Moneter Ekspansif.

Di bawah ini adalah mengambil the Fed sebagai contoh. Kimberley Amadeo, 2020, *Expansionary Monetary Policy ;How Low Interest Rates Create More Money for You*,menjelaskan antara lain sebagai berikut. Kebijakan moneter ekspansionis dilakukan BS tatkala resesi-ekonomi dan kontraksi siklus-bisnis dengan menambah pasokan-uang , menurunkan suku-bunga pinjaman untuk meningkatkan permintaan (*demand*) untuk mendorong pertumbuhan-perekonomian , menyebabkan pula penurunan nilai-mata-uang dan nilai tukar mata-uang-domestik.

- ✓ Operasi pertama, Kebijakan moneter ekspansionis dilakukan dengan operasi pasar terbuka (membeli treasury notes bank-bank) ,bank berlebih likuiditas ingin melepas kredit lebih besar menyebabkan tarif-bunga-kredit menurun, tarif-bunga kartu-kredit menurun menyebabkan belanja-konsumsi meningkat, unit usaha ramai meminjam untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan..
- ✓ Operasi kedua, penurunan bunga BS untuk standing facilities cq *overnight deposits* sebagai deposits, bank berlebih likuiditas meminjami bank-lain yang tak mampu menyediakan dana-reserve dengan tarif bunga BS yang lebih rendah itu , menyebabkan bank-bank dapat menurunkan bunga-kredit.
- ✓ Operasi ketiga, tarif diskonto (*discount rate*) adalah bunga-diterapkan kepada bank yang terpaksa pinjam dari BS sebagai *lender of the last resort*, sebuah tarif yang lebih rendah dari tarif BS.
- ✓ Operasi keempat, BS menurunkan persyaratan cadangan (reserve requirement) para bank anggota.

Sebagai contoh sejarah, sarana the Fed untuk kebijakan ekspansi moneter era-krisis sekitar tahun 2011 antara lain adalah sebagai berikut.

- ✓ Fasilitas-pinjaman sekuritas berjamin-aset (*Term Asset-Backed Securities Loan Facility*), bank dizinkan menjual subprime mortgage-backed securities kepada the Fed sebagai BS. The Fed bereaksi cepat , secara kreatif mencegah keruntuhan perekonomian. Pasar kredit dapat dibekukan.Tanpa respon the Fed tersebut, likuiditas bisnis segera terkuras

kering. Publik tak memahami progam the Fed, mencurigai motif aksi tersebut dan pengunaan kekuasaan semena-mena, sehingga the Fed harus di audit secara khusus.

- ✓ The Fed juga mencipta sarana operasi-pasar-terbuka dikenal sebagai Relaksasi-Kuantitatif (*quantitative easing*) dengan menambah pembelian hipotek berjamin-aset (*mortgage-backed securities*).
- ✓ The Fed mencipta Pelintiran Operasional (*Operation Twist*) dengan menjual surat-utang jangka-pendek jatuh-tempo, hasilnya untuk membeli Surat-Utang Perbendaharaan Jangka-Panjang. Suku bunga menurun dan sarana ber-hipotek jadi terjangkau.

Seusai krisis keuangan global 10 tahun lalu di atas, bagaimana kebijakan the Fed sepanjang era Pandemi ? Cheng, Powel, Skidmore dan Wessel, 2021, mengunggah artikel berjudul *What's the Fed doing in response to the COVID-19 crisis? What more could it do?* antara lain menjelaskan berbagai hal sebagai berikut.

- ✓ Pertama, Coronvirus terkait penutupan bisnis, pembatalan berbagai event dan kebijakan bekerja dari rumah menyebabkan penurunan kondisi perekonomian dunia. The Fed membuat berbagai kebijakan dan aksi untuk membatasi kerusakan perekonomian antara lain pinjaman USD 2,3 T untuk rumah-tangga, pemberi kerja, pasar uang dan pemerintah.
- ✓ Kedua, Menurunkan tarif *the Fed cq Federal funds rate*, sampai dekat-nihil ,menjaga tarif-bunga tetap rendah sampai pemulihan lapangan-kerja dan inflasi naik atau lebih dari 2 %.
- ✓ Ketiga, Menunjang berfungsinya pasar uang, dengan pembelian sekuritas (QE), , memberi pinjaman kepada perusahaan sekuritas, meluncurkan ulang *Money Market Mutual Fund Liquidity Facility* atau MMLF, melakukan aksi beli-kembali (repo).
- ✓ Keempat, Mendorong lembaga keuangan memberi kredit dengan cara memberi pinjaman langsung kepada bank, relaksasi persyaratan atau kewajiban kepada otoritas jasa keuangan.
- ✓ Kelima, Pinjaman langsung kepada pemberi kerja berbentuk korporasi.
- ✓ Keenam, Pendanaan warkat komersial (*commercial Paper*) USD 1,2 T.
- ✓ Ketujuh, Menunjang pinjaman bagi UKM.
- ✓ Kedelapan, Memberi tunjangan pinjaman pada lembaga nirlaba termasuk pemerintah.
- ✓ Kesembilan, Membangun bantalan peredam kejut (*cushion*) pasar uang dari tekanan internasional berupa Jalur lindung nilai internasional, Menawari mata-uang USD kepada berbagai BS yang tak memiliki fasilitas swap melalui fasilitas repo baru (FIMA), pinjaman *overnight dollar loans* dengan utang perbendaharaan AS sebagai agunan.
- ✓ Kesepuluh, Memulai kembali (*restart*) Fasilitas Lelang Berjangka (*Term Aucion Facility* atau TAF) sebagai alternatif dari discount window karena berbagai bank segan meminjam pada discount window karena berisiko dinilai sedang mengalami kesulitan likuiditas. Pinjaman berbasis TAF mencapai USD 450 M, sedang *discount window* mencapai USD 100 M.
- ✓ Kesebelas, Memperlebar kisaran (range) entitas-keuangan yang dapat meminjam dari *Primary Dealer Credit Facility*.

- ✓ Keduabelas, Memperkuat panduan masa depan untuk memelihara suku bunga dekat-nihil (near zero) dan pembelian sekuritas besar-besaran, sampai kondisi perekonomian bergejala pemulihan.
- ✓ Ketiga-belas, berupaya melampaui *(exceeding)* target untuk *overnight federal funds rates* dengan menerapkan kebijakan penggunaan sarana *yield curve control* dengan hasil-berjangka-lebih-panjang , misalnya 2 atau 3 tahun hasil (*yield*). Sebagai penjelasan, YCC adalah aksi BS berupa penargetan suku-bunga-berjangka lebih-panjang (*a longer-term interest rate*) dengan membeli atau menjual sejumlah-obligasi sesuai keperluan sampai perubahan suku-bunga sesuai target diinginkan.
- ✓ Keempat-belas, Memperlebar kisaran (range) entitas-keuangan yang dapat meminjam dari *Primary Dealer Credit Facility* yang diciptakan the Fed untuk penyediaan pinjaman-semalam bagi upa-duta-niaga-utama.

Kebijakan moneter ekspansionis disebut-sebut dengan istilah lain sebagai kebijakan inkonvensional (*noncoventional*) , tidak baku (*non-standard*) , luar biasa (*extraordinary*) , lebih sering berciri melawan siklus (*countercyclical*) ketimbang mengakselerasi arus (*procyclical*). Pada situasi krisis keuangan global, BS me-relaksasi kebijakan-moneter dengan menurunkan suku-bunga jangka-pendek sampai nihil, agar tak ada ruang untuk penurunan lebih-lanjut. Kebijakan moneter nir-konvensional menghadapi risiko-deflasi dengan membeli obligasi jangka-panjang untuk menekan suku-bunga-jangka-panjang dan melonggarkan kondisi perekonomian. Sebagian BS menurunkan suku-bunga jangka-pendek di bawah nihil.Relaksasi moneter masa pandemi adalah menjaga likuiditas pada pasar-pembiayaan dan menjaga kelancaran aliran kredit.Mitigasi tekanan-pada-mata-uang dan pasar-obligasi-domestik, BS melakukan intervensi dan pelaksanaan program-beli-aset.

Will Kenton, 2021, dalam artikel berjudul *Non-Standard Monetary Policy*, menjelaskan bahwa kebijakan moneter tidak-baku sebagai kebijakan moneter tidak konvensional , diterapkan pada krisis keuangan global tahun 2008 dan kebijakan moneter era pandemi , dimana kebijakan konvensional/baku berupa perubahan suku bunga , kewajiban cadangan *(reserve requirement)* , operasi-pasar terbuka (open market operation) bank sentral tak-lagi mencukupi , harus ditambah kebijakan moneter luar-biasa/inkonvensional/tidak-baku bertujuan untuk pelonggaran-kuantitatif (*quantitative easing*), memberi panduan jangka-panjang kedepan (*forward guidance*) belanja & investasi untuk membangun stabilitas & kepercayaan (*confidence*) kepada , menetapkan suku bunga negatif dan perluasan/pelonggaran jenis/penyesuaian agunan/jaminan bertujuan mengeluarkan negara dari resesi. Berbagai sumber lain menggunakan istilah kebijakan baku/tidak baku dengan istilah kebijakan-konvensional/kebijakan-biasa (conventional/ordinary measure) dan kebijakan inkonvensional/luar-biasa (*inconventional/extraordinary measure*).

4.9.Teori Transmisi / Operasionalisasi Kebijakan Moneter.

Kebijakan tinggal kebijakan, kalau tidak diluncurkan atau diterapkan. European Central Bank , 2021, menunggah artikel berjudul *Transmission mechanism of monetary policy*, menjelaskan antara lain sebagai berikut.Transmisi adalah proses penerapan atau pemberlakuan suatu kebijakan moneter tertentu pada perekonomian umumnya, pada

tingkat harga khususnya. Penerapan tersebut mencakupi berbagai variabel dan ketidak-pastian jeda-waktu-efektifitas (*uncertain time lags*). Bagan transmisi tampak dibawah ini. Perubahan tarif-bunga resmi dilakukan BS melalui penyediaan dana dan menetapkan tarif-bunga-dibebankan. Perubahan tarif-bunga-resmi berdampak langsung kepada tarif-bunga pasar-uang, berdampak tak-langsung pada tarif peminjaman kepada debitur bank dan bunga-deposito kepada deposan. Ekspektasi publik akan perubahan atau maa depan tarif-bunga-resmi berdampak pada tarif bunga jangka-menengah dan jangka panjang, sesuai ekspektasi pasar terhadap masa-depan tarif jangka-pendek. Makin tinggi kredibilitas BS makin tinggi pula ekpektasi akan stabilitas-harga masa-depan . Penurunan kecemasan umum akan inflasi menyebabkan pelaku ekonomi tak-merasa-perlu menaikkan harga jual barang/jasa dagangannya. Aksi kebijakan moneter membentuk panorama perekonomian cq ekspektasi-pasar , memicu kondisi pembiayaan/pendanaan usaha , harga aset, harga saham dan nilai-tukar . Perubahan nilai-tukar berpengaruh langsung pada tingkat-inflasi dan harga barang-impor untuk konsumsi masyarakat. Kenaikan tarif-bunga menyebabkan peminjam makin-tak-mampu membayar bunga dan pengembalian pokok kredit, menyebabkan penurunan kredit-konsumsi, penurunan daya-beli, penurunan permintaan-agregat , produksi , penciutan peluang kerja , tarif upah dan PDB. Perubahan kebijakan tarif-bunga berdampak kepada marginal-cost bank untuk memperoleh pembiayaan luar yang lain tatkala bank mengalami kesulitan keuangan. Pemberian kredit berisiko lebih tinggi meningkatkan tarif-bunga dan agunan , berbasis studi-kelayakan kepastian-pulangan memadai setara risiko di ambil debitur dan bank.Suku bunga rendah menyebabkan banyak pengusaha berminat meminjam dan masuk ke-risiko-investasi yang lebih besar.

4.10.Teori Instrumen Kebijakan Moneter.

Instrumen kebijakan adalah OPT, fasilitas diskonto, GWM dan pengumuman publik / imbauan kepada masyarakat cq aktor/pelaku dalam sistem moneter dengan sasaran-operasional suku bunga dan uang-primer , dimulai strategi penetapan sasaran antara yaitu suku-bunga kredit dan sasaran akhir yaitu inflasi dan pertumbuhan PDB, berbasis jangkar nominal nilai-tukar, inflasi, besaran moeter, output nominal. Debra Loipeldinger ,2020, menyajikan artikel berjudul *What are the components of monetary policy?*, menjelaskan antara lain sebagai berikut. Kebijakan moneter adalah aksi/kegiatan dan komunikasi BS dalam mengelola pasok-uang (termasuk kredit, tunai, cheque, pasar uang dana bersama (*mutual fund*))untuk meningkakan likuiditas moneter pencipta pertumbuhan ekonomi. Instrumen utama kebijakan-moneter adalah Nisbah Cadangan Kas (*Cash Reserve Ratio*), Nisbah Likuiditas Statuter (*Statutory Liquidity Ratio*) , suku bunga bank (Bank Rate), tarif beli kembali (*Repo Rate*) , tarif cadangan beli-kembali(*Reverse Repo Rate*) dan operasi pasar terbuka (*Open Market Operations*) . Pada sisi lain bukan-seberang, elemen kebijakan fiskal pemerintah adalah pengumuman publik target-inflasi jangka menengah, komitmen kelembagaan tentang stabilitas-harga sebagai sasaran utama kebijakan-moneter, basis kecukupan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan moneter yang berkualitas.

Instrumen kebijakan moneter dijelaskan sebagai berikut..

(1) Pemberi-Pinjaman Terakhir (*Lender of The Last Resort*) .

Pada tataran ekonomi mikro-ekonomi , BS menjadi peminjam-terakhir (*lenders of last resort*) bagi bank-komersial yang kekurangan-dana kredit. Pinjaman berjangka pendek dengan tarif-bunga khusus (tarif terdiskonto) yang ditetapkan sedemikian rupa agar bank-komersial tertarik-untuk-pinjam namun tidak ketagihan meminjam. BS negara tertentu mewajibkan bank komersial menaruh simpanan wajib pada BS , sebagai sebuah ancangan pengendalian pasok-uang. Pada era-pandemi, kewajiban cadangan tersebut mungkin dirurunkan sampai nihil. Sebagai contoh, Sumber Bank Albania , 2018, berjudul *Standing Facilities* antara lain menjelaskan sebagai berikut. Fasilitas Siaga (*Standing Facilities*) adalah instrumen-tersedia-bagi bank domestik & cabang bank-asing di Albania atas inisiatif sendiri , antara lain (1) *overnight deposits* kelebihan likuiditas harian bank, (2) *overnight loan* ber-agun, sebagai kebalikan OPT BS, untuk menambah/mengurangi likuiditas harian (*overnight liquidity*). Bunga instrumen membentuk koridor dan bunga-pasar-uang bergerak pada kisaran tersebut. Hampiran fasilitas siaga tersebut digunakan hanya apabila tidak ada alternatif lain.Instrumen Deposito-Semalam (*overnight deposit*) adalah fasilitas investasi bagi bank-komersial untuk menginvestasikan kelebihan-likuiditas-semalam tanpa-batas boleh-ditolak-BS tanpa alasan (*overnight excess liquidity*) dalam bentuk investasi-jangka-pendek pada suku-bunga-tetapan-dimuka.Maturitas instrumen adalah lewat-semalam, kecuali besok adalah hari libur nasional, ditambah bunga dari BS dibayar hari selanjutnya.Instrumen Pinjaman-Semalam *(overnight loan)* adalah instrumen utang berjangka-pendek tersedia bagi bank-komersial, beragun paripurna, tersedia bagi bank membutuhkan karena yang mengalami kekurangan likuiditas-semalaman saja, dengan bunga kisaran-tertinggi (*ceiling*) suku-bunga-pasar-semalaman (*overnight market interest rate*) . Gagal pengembalian bank-komersial berisiko sita-agunan dan penghentian bantuan BS. Seluruh bank komersial dan cabang bank-asing yang memiliki akun pada BS berhak atas fasilitas-semalaman (*overnight facilities*). Gagal bayar harian otomatis terkonversi menjadi pinjaman-semalam (*overnight loan*). BS memberi tahu kepada bank tentang perpanjangan-otomatis pinjaman-semalam dan pembekuan-otomatis-agunan. Intrumen bermaturitas semalam saja, hari selanjutnya (kecuali hari libur nasional) dikembalikan bank kepada BS berikut bunga, dengan bunga harian dihitung berdasar 365 hari bunga setahun.

(2) Operasi Pasar Terbuka (OPT) atau *Open Market Operation* (OMO).

Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) adalah sebuah kebijakan moneter bertujuan mengatur/memelihara/mengubah jumlah uang beredar agar selalu berada dalam kondisi ideal, antara lain dengan penjualan obligasi-pemerintah dengan fitur “jual dan beli-kembali” untuk menyedot uang bank-komersial agar jumlah-uang-beredar menurun, dengan mengendalikan suku-bunga, yang kemudian berpengaruh pada tarif-bunga- yang-lebih-berjangka-panjang dan kegiatan perekonomian. Pada tataran makro-ekonomi, kebijakan

moneter BS mempengaruhi suku bunga dan berpartisipasi pada operasi-pasar-terbuka (OMO) untuk pengendalian biaya-pinjaman & biaya-peminjaman sebuah negara. BS juga bertugas pada tataran mikro, dengan kebijakan nisbah cadangan wajib dan sebagai peminjam-terakhir. BS bertanggungjawab atas stabilitas harga, OMO adalah sarana pengendalian inflasi, pasok uang dan harga. Pada tataran tugas mempengaruhi kondisi makro-ekonomi, BS menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dengan pengaturan jumlah uang beredar, pengaturan pasok-uang cq melakukan operasi-pasar-terbuka (Open Market Operation) melalui pengendalian suku bunga bank sentral atau injeksi pasar dengan likuiditas , antara lain dengan mencetak uang.

(3) Kebijakan Tarif Diskonto.

Bank komersial menghadapi masalah operasional, likuiditas dan risiko gagal-bayar , dapat meminjam uang dari bank-lain dengan tarif-antar-bank (*interbank rate*) atau fasilitas-pinjaman (*discount window*) bank sentral dengan tarif-bunga-terdiskonto (*discount rate*) . Tarif diskonto adalah tarif bunga pinjaman terpaksa oleh bank bermasalah likuiditas dan/atau kekurangan-cadangan-wajib kepada bank lain atau kepada BS, sebuah tarif ditetapkan oleh BS , yang biasanya lebih rendah dari tarif bunga umum.

(4) Kewajiban Cadangan (*reserve requirement*).

Kewajiban cadangan adalah persentase dari deposito berbentuk tunai yang disimpan pada bank atau bank sentral,yang tak boleh digunakan bank tersebut, demi keamanan industri perbankan nasional. Kewajiban cadangan adalah fungsi Permintaan Neto (*Net Demand*) dan Liabilitas Waktu (*Time Liabilities*) atau NDTL. NDTL terdiri atas saldo penempatan nasabah (*current deposits*), tabungan (*saving deposits*), deposito berjangka (*term deposits*) dan liabilitas lain-lain (*other liabilities*) tersesuai (*adjusted*) deposito milik-bank lain.

(5) Nisbah Cadangan Kas (*Cash Reserve Ratio*).

Nisbah Cadangan Kas (Cash Reserve Ratio) = cadangan kas dipelihara dengan bank-sentral / permintaan neto dan kewajiban berjangka-waktu (*Cash Reserve Ratio = Cash Reserve maintained with the Central Bank/Net demand and time liabilities*).

(6) Nisbah Likuiditas Statuter (*Statutory Liquidity Ratio*).

Statutory Liquidity Ratio atau SLR adalah persentase minimum dari deposito yang harus diselenggarakan bank dalam bentuk kas/tunai , emas dan sekuritas tertentu , sebagai syarat bank memberi pinjaman / kredit kepada nasabah. SLR adalah sarana pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan perekonomian, penurunan SL berdampak pertumbuhan ekonomi.

(7) Suku bunga bank (*Bank Rate*).

Suku bunga bank adalah tarif bunga pinjaman jangka-amat-pendek bank sentral kepada bank domestik . Penurunan suku bunga bank akan meningkatkan volume-kredit bank-komersial , menyemerakkkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan PDB , sebaliknya peningkatan suku bunga bank dimaksud untuk meningkatkan hasrat menabung, mengurangi volume uang beredar dan menekan laju inflasi yang dinilai terlampau besar.

(8) Tarif Beli Kembali (*Repo Rate* atau RR).

Tarif beli kembali adalah tarif-pinjaman kepada bank-komersial yang menghadapi kesulitan likuiditas berbasis perjanjian beli-kembali di mana bank-komersial penyerahan sekuritas (misalnya SUN) dengan janji-beli-kembali pada harga-tertentu kepada bank sentral sebagai imbalan pinjaman-jangka-pendek dari BS. Tarif beli kembali adalah kebijakan moneter untuk mengatur likuiditas, inflasi dan pasok-uang , dan pembentukan pola-pinjaman industri perbankan. BS menaikkan tarif beli kembali untuk menekan inflasi , BS menurunkan tarif beli kembali untuk meningkatkan likuiditas perekonomian.

(9) Tarif sebaliknya dari tarif beli-kembali (*Reverse Repo Rate* atau RRR).

Tarif sebaliknya dari tarif-beli-kembali adalah tarif bunga pinjaman BS kepada entitas bank komersial , untuk memenuhi hasrat-likuiditas BS .Tarif memikat hati bank untuk mendorong penempatan cadangan-bank di bank sentral, merupakan kebijakan mengurangi likuiditas industri perbankan. Dampak kebijakan RRR nan-memikat adalah untuk mengurangi hasrat menyalurkan kredit , mengurangi skala-risiko kredit macet, menekan inflasi , meningkatkan kekuatan mata-uang domestik. Kebijakan repo meningkatkan likuiditas bangsa, kebijakan repo-balikan (RRR) menurunkan likuiditas bangsa.Tarif RRR selalu lebih rendah dibanding tarif RR.

(10) **Kebijakan Bunga atas Cadangan Bank**.

BS membayar bunga terhadap cadangan wajib bank sesuai peraturan BS dan bunga atas kelebihan saldo diatas kewajiban cadangan bank.untuk menghapus biaya-peluang (*opportunity cost*) bagi bank. Kebijakan Penargetan Inflasi (*inflation targeting*) dalam kerangka kebijakan moneter ditandai oleh pemberitahuan kepada masyarakat mengenai target inflasi yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, dimana laju inflasi yang rendah dan stabil dijadikan sasaran utama jangka panjang . Tentang teori penargetan inflasi, Michael Hatcher, Patrick Minford , 2014, dalam makalah berjudul *Inflation targeting vs price-level targeting: A new survey of theory and empirics* , menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Pada bank sentral, hubungan penargetan inflasi dan penargetan

tingkat-harga adalah sebagai berikut. Pertama, guncangan-kagetan inflasi merupakan dasar membentuk aksi-penargetan tingkat harga. Kedua, dalam penargetan-inflasi, kesalahan di masa-lalu dan guncangan masa-lalu diperlakukan sebagai kejadian masa-lalu (by gone) . Sebagai contoh, bila hari ini terjadi inflasi besar-kagetan, hal ini di masa depan akan diikuti inflasi dibawah-rerata dalam rezim penargetan tingkat-harga. Penargetan inflasi di masa depan tidak tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi sekarang. Penargetan tingkat-harga terdapat dalam berbagai model makro-modern adalah sarana yang baik untuk pemulihan perekonomian tertimpa guncangan-deflationair yang memicu kebijakan moneter-ekspansionis sampai pada kebijakan suku-bunga-nihil (*zero bound*).

4.11. Teori Kebijakan Moneter Tak-Lazim / Inkonvensional.

Empat Belas Strategi Moneter the Fed sebagai BS AS Kala Pandemi meliputi kebijakan pembatasan kerusakan perekonomian dengan pinjaman kepada rumah-tangga, pemberi kerja, pasar uang dan pemerintah, menurunkan tarif *the Fed cq Federal funds rate* sampai dekat-nihil untuk pemulihan lapangan-kerja dan pengendalian inflasi, menunjang berfungsinya pasar uang, relaksasi kuantitatif atau QE dengan pembelian sekuritas, memberi pinjaman kepada perusahaan sekuritas, peluncuran kembali Money Market Mutual Fund Liquidity Facility atau MMLF, dan melakukan aksi beli-kembali (*repo*), mendorong aliran kredit lembaga keuangan dengan pinjaman langsung kepada bank, relaksasi persyaratan atau kewajiban kepada otoritas jasa keuangan, memberi pinjaman langsung kepada pemberi kerja berbentuk korporasi, pendanaan warkat komersial (*commercial Paper*), menunjang pinjaman bagi UKM, memberi tunjangan pinjaman pada lembaga nirlaba termasuk pemerintah, membangun bantalan-peredam-kejut (*cushion*) pasar uang dari tekanan internasional berupa Jalur Lindung Nilai Internasional, menawari bantuan mata-uang USD kepada berbagai BS negara-negara lain yang tak memiliki fasilitas *swap* melalui fasilitas repo baru (FIMA), pinjaman *overnight dollar loans* dengan utang perbendaharaan AS sebagai agunan, memulai kembali (*restart*) Fasilitas Lelang Berjangka (*Term Aucion Facility* atau TAF) sebagai alternatif dari *discount window* karena berbagai bank segan meminjam pada *discount window* karena berisiko dipersepsi publik/deposan bahwa bank tersebut sedang mengalami kesulitan likuiditas, melakukan kebijakan peringanan-syarat-kredit atau pelonggaran cq memperlebar kisaran (*range*) entitas-keuangan yang dapat meminjam dari *Primary Dealer Credit Facility*, memperkuat panduan masa depan untuk memelihara suku bunga dekat-nihil (*near zero*) dan pembelian sekuritas besar-besaran, sampai kondisi perekonomian menunjukkan gejala pemulihan, berupaya melampaui *(exceeding)* target untuk *overnight federal funds rates* dengan menerapkan kebijakan penggunaan sarana *yield curve control* (YCC) dengan hasil-berjangka-lebih-panjang , misalnya 2 atau 3 tahun hasil (*yield*) dimana YCC adalah aksi BS berupa penargetan suku-bunga-berjangka lebih-panjang (*a longer-term interest rate*) dengan membeli atau menjual sejumlah-obligasi sesuai keperluan sampai perubahan suku-bunga terjadi sesuai target diinginkan dan memperlebar kisaran (range) entitas-keuangan yang dapat meminjam dari *Primary Dealer Credit Facility* yang diciptakan the Fed untuk penyediaan pinjaman-semalam bagi upa-duta-niaga-utama/dealer.

Sumber BI menyatakan bahwa tujuh strategi bank sentral NKRI era-pandemi terkoordinasi dengan pemerintah dan OJK adalah kebijakan *triple intervention* pasar spot, DNDF dan pembelian SBN di pasar sekunder, memperpanjang tenor Repo SBN, menambah frekuensi lelang FX swap, memperkuat instrumen deposito berjangka valas, aturan rekening Rupiah transaksi DNDF investor asing, pelonggaran GWM, sistem pembayaran uang higienis berhampiran digital , transaksi tunai/nontunai elektronik. Sumber lain menyatakan dengan cara lain , bahwa bauran kebijakan BI era pandemi mencakupi penurunan suku-bunga kebijakan-moneter, melanjutkan kebijakan stabilisasi Rupiah dan penguatan Rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan tiga intervensi pasar spot (*triple intervention*) di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)[2], dan pembelian SBN dari pasar . BI menurunkan GWM Valas untuk menimgkatkan likuiditas valas diperbankan & mengurangi tekanan pada pasar valas, perluasan jenis *underlying*,transaksi bagi investor asing untuk memberikan alternatif lindung nilai atas kepemilikan Rupiah , memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas.

Sumber KSSK selanjutnya memerinci bahwa pada era-pandemi BI mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya perbaikan ekonomi nasional. Seluruh instrumen kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), baik dari sisi kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, maupun internasional serta inklusi ekonomi dan keuangan. Sejarah mencatat pada sisi kebijakan moneter, setelah menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 6 (enam) kali sebesar 150 *bps* sejak tahun lalu, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI-7DRR) tetap pada level 3,50%, terendah sepanjang sejarah, sejalan dengan terkendalinya inflasi, perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan kebijakan *triple intervention*, di pasar *spot*, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder, sehingga nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah turbulensi pasar keuangan global yang relatif tinggi, menambah likuiditas (*quantitative easing*) pada industri perbankan sebesar Rp101,10 triliun hingga 19 Juli 2021 sehingga sejak tahun lalu Bank Indonesia telah melakukan *quantitative easing* sebesar Rp827,7 triliun atau 5,4% PDB. Bank Indonesia juga terus melakukan koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang sangat erat baik dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi, pemulihan ekonomi, dan melanjutkan bantuan bagi APBN cq melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk pendanaan APBN 2021. Sesuai adat-kebiasaan dunia, BS berbela-rasa dengan strategi pemoneteran (monetasi) cq pembelian SBN dari pasar perdana untuk APBN 2020 sebesar Rp473,42

[2] Transaksi DNDF adalah transaksi lindung nilai nilai-tukar derivative valuta asing terhadap rupiah , berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi .Mekanisme Fixing adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs *Transaksi Forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*). Transaksi DNDF tertentu wajib disertai dengan dokumen *underlying*.

triliun,sampai 19 Juli 2021, pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 tercatat sebesar Rp124,13 triliun, terdiri dari Rp48,67 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme *Greenshoe Option* (GSO). Bank Indonesia terus melakukan akselerasi pendalaman pasar uang khususnya pasar uang Rupiah dan valas antara lain dengan implementasi *Electronic Trading Platform* (ETP) *Multimatching*, khususnya pasar uang Rupiah dan valas, percepatan pendirian *Central Counterparty* (CCP). Pendalaman pasar uang Rupiah dan valas difokuskan pada 2 (dua) produk utama yaitu transaksi repo dan DNDF. Dengan pengembangan transaksi repo tersebut, pasar repo diharapkan menjadi lebih likuid, efisien, mendukung upaya penurunan *yield* SBN jangka panjang agar semakin mendekati suku bunga jangka pendek. Fokus pengembangan DNDF dimaksudkan untuk memperkuat instrumen lindung nilai dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pembiayaan. Di bidang makroprudensial, kebijakan akomodatif BI juga terus ditempuh untuk mendorong intermediasi keuangan perbankan bagi pemulihan ekonomi nasional, dengan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit perbankan (SBDK), kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain. Di sisi sistem pembayaran, upaya percepatan keuangan digital dalam rangka turut mendukung pemulihan ekonomi juga terus dilakukan melalui implementasi ketentuan mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). Digitalisasi sistem pembayaran juga terus dipercepat dalam mendorong pemulihan ekonomi, khususnya inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk UMKM. Penggunaan QR Indonesia Standard (QRIS) sebagai satu-satunya standar terbukti telah mampu mendorong peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan digital. QRIS telah menyambungkan 8 (delapan) juta *merchant* UMKM ke dalam *platform-platform* digital ekonomi, mendukung elektronifikasi penyaluran bantuan sosial pemerintah, *local currency settlement untuk perdagangan internasional dan FDI.* Sektor Jasa Keuangan secara umum dalam kondisi stabil dengan indikator prudensial terjaga dengan baik dan terjadi peningkatan kinerja pada triwulan II 2021. Catatan kinerja kebijakan & aksi moneter & makroprudensial BI meningkat sepanjang tahun 2021 , ditunjukkan oleh perbaikan CAR dan kesehatan likuiditas industri perbankan, gearing ratio LKBB, risk based capital atau RBC industri asuransi, peningkatan volume intermediasi industri perbankan.

4.12.Teori Penargetan

Michael Hatcher, Patrick Minford , 2014, dalam makalah berjudul *Inflation targeting vs price-level targeting: A new survey of theory and empirics* , menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Pada bank sentral, hubungan penargetan inflasi dan penargetan tingkat-harga adalah sebagai berikut. Pertama, guncangan-kagetan inflasi merupakan dasar membentuk aksi-penargetan tingkat harga.Kedua, dalam penargetan-inflasi, kesalahan di masa-lalu dan/atau guncangan masa-lalu diperlakukan sebagai kejadian masa-lalu (by gone) . Sebagai contoh, bila hari ini terjadi inflasi besar-kagetan, hal ini di masa depan akan diikuti inflasi dibawah-rerata dalam rezim penargetan tingkat-harga. Penargetan inflasi di masa depan tidak tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi sekarang.

Penargetan tingkat-harga terdapat dalam berbagai model makro-modern adalah sarana yang baik untuk pemulihan perekonomian tertimpa guncangan-deflationari yang memicu kebijakan moneter-ekspansionis kepada suku-bunga-nihil(*zero bound*).

Kebijakan moneter berbentuk penargetan nan-luwes (*flexible targeting*) terhadap inflasi bersasaran ganda, yaitu stabilitas harga dan stabilitas-sejati , yaitu upaya stabilisasi-inflasi disekitar target-inflasi dan pendayagunaan sumber-daya ekonomi disekitar tarif-jangka-panjang-berkesinambungan. Kebijakan moneter untuk mengurangi nilai utang-publik dilakukan dengan cara mencipta inflasi lebih tinggi. Para pembuat kebijakan menyadari bahwa kejatuhan suku-bunga-sejati karena kebijakan moneter ekspanisonis akan mendotong arus-modal-keluar dan depresiasi nilai tukar. Para pembuat kebijakan menyadari bahwa solusi stabilisasi nilai-tukar dengan mengurbankan cadangan-devisa, hanya dapat dilakukan negara-negara ber-cadangan-devisa memenuhi syarat. Kebijakan bank sentral untuk menggunggung cadangan devisa dibutuhkan untuk menyerap guncangan dan stress keuangan , agar bank sentral mampu menghadapi depresiasi-mata-uang, mitigasi risiko gagal-bayar pinjaman-luar dan mengelola aliran-keluar- modal. Para pembuat kebijakan menyadari bahwa aksi ekspansi moneter meningkatkan permintaan-agregat, mendorong investasi perusahaan dari sudut-pandang moneter.

4.13.Teori Kebijakan Pemoneteran *(monetization*)

Sohaib Shaid, 2020 menyajikan makalah berjudul *Debt Monetization: The Good, The Bad, And the Ugly*, antara lain mengungkapkan bahwa relaksasi kuantitatif (quantitative easing) dapat berbuah pemoneteran atau monetasi. Monetasi adalah kenaikan permanen basis moneter bertujuan pendanaan pemerintah. Pada situasi krisis, bank sentral membeli SUN berbunga dengan uang nirbunga , bukan sekadar OPT sederhana, berisiko meningkatkan laju inflasi , berisiko membuat polutan citra indipenden BS , berisiko mengurbankan cadangan devisa cq solvabilitas BS , sementara mencetak uang berisiko lebih mendorong laju inflasi cq menurunkan kekuatan uang domestik.

4.14.Teori Bantalan Likuiditas (*liquidity buffer*).

Sebuah *bantalan penahan guncangan* likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan penyeimbang-balik (*counter balancing*) di bawah sebuah tekanan likuiditas yang diskenariokan pada sebuah bingkai-waktu jangka-pendek tertentu (*survival period*) dalam bentuk penyediaan likuiditas minimum. Pada tataran teori, pengaturan cadangan likuiditas tergolong kebijakan moneter, pada masa krisis digunakan sebagai penyokong likuiditas dan kemampuan-memberi-kredit. Otoritas berbagai negara menyadari bahwa kalau semua bank menggunakan pola manajemen lukuiditas kala-normal, maka akan terjadi kelangkaan/kelaparan likuiditas pada sistem keuangan. Berbagai otoritas perbankan merelaksasi persyaratan likuiditas bank berbasis kebijakan mikroprudensial, yang berada di bawah nisbah-liput-likuiditas versi Basel III (*below Basel III liquidity coverage ratios* (LCRs)) yaitu nisbah aset-likuid-berkualitas-tinggi banding kewajiban-jangka-pendek, agar masing masing bank tersebut mampu menjaga lukuiditas minimum masing-masing. Otoritas perbankan Eropa memberi panduan penggunaan LCR kala-stress, menghindari kebijakan berdampak fragmentasi pasar pendanaan, bank diizinkan

beroperasi-temporer di bawah LCR. Bank Swedia lalu memperluas pemberlakuan tersebut bagi berbagai mata-uang , secara individual dan/atau gabungan.The Fed mendukung upaya penggunaan bantalan-likuiditas bertatacara nan-baik. Bank Sentral Afsel menurunkan LCR ke 80 % dari 100%. Sebagian besar otoritas perbankan tak menggariskan berapa banyak bank boleh menggunakan bantalan-lukuiditasnya. Beberapa bank sentral merelaksasi batas LCR valas. Sebagian besar bank sentral tak mengatur besar tarikan, kecuali bank sentral Korea yang menurunkan foreign exchange LCR dari 80 % menjadi 70 %.Berbagai bank sentral menurunkan persyaratan cadangan bagi lembaga keuangan simpanan. The Federal Reserve menurunkan syarat-cadangan sampai nihil, agar bank lebih mampu menolong bisnis dan rumah tangga. The Reserve Bank of India menurunkan nisbah cadangan kas dari 4 % menjadi 3 % untuk memberi kelegaan-lukuiditas satu tahun ke depan. Bank sentral Malaysia dan Iceland menurunkan persyaratan-cadangan untuk menjaga lukuiditas domestik.

4.15. Kumpulan Kebijakan Moneter Inkonvensional Bank Sentral

RBI Bulletin March 2021, mengunggah makalah berjudul *Unconventional Monetary Policy in Times of COVID-19*, antara lain menjelaskan berbagai hal sebagai berikut.
Berbagai bank sentral melakukan berbagai penyesuaian pada operasi-pasar mereka terkait stress-pasar-uang cq kontraksi-pasar cq kehancuran bisnis simpan-pinjam perbankan karena pandemi , sebagai berikut.

- ✓ Pertama, injeksi likuiditas dadakan.
- ✓ Kedua, penganekaragaman bertujuan perluasan jenis agunan.
- ✓ Ketiga, pelonggaran kisaran “pihak lain yang memenuhi syarat”.
- ✓ Peningkatan kepastian likuiditas keuangan lembaga-keuangan dibutuhkan bank-sentral untuk meyakini berfungsinya pasar uang. Lebih jauh dari penetapan suku bunga BI yang menyebabkan suku bunga deposito perbankan NKRI berada dibawah laju-inflasi,terdapat berbagai opsi nonkonvensional lain sebagai berikut.
- ✓ Keempat, Kebijakan suku bunga negatif masa pandemi, misalnya Bank Nasional Swiss menggunakan tarif – 0.75 %, ECB menggunakan tarif deposito -0,50 %.
- ✓ Kelima, dukungan likuiditas melalui instrumen baru. Sebagian besar bank sentral menurunkan kewajiban cadangan *(reserve requirement*) , relaksasi persyaratan agunan & jaminan , meningkatkan skala transaksi beli-kembali , skema kredit khusus bagi UMKM , skema kredit dalam mata-uang tertentu.

  The Fed mencipta kelonggaran operasi-semalam (*overnight*) dan syarat beli-kembali (*repo*) dan mencipta berbagai instrumen untuk mendukung aliran-kredit, antara lain fasilitas pendanaan surat-komersial untuk penerbit pemerintah dan perusahaan tertentu,

fasilitas likuiditas pasar uang dana-bersama (*mutual fund*) , fasilitas kredit khusus bagi dealer-utama untuk pendanaan dealer-utama, fasilitas kredit bagi lembaga-simpanan untuk pembelian-aset, pinjaman bagi korporasi agar mampu membeli emisi obligasi yang menguntungkan, fasilitas kredit korporasi bagi para emiten obligasi, pembentukan pinjaman bersyarat sekuritas-berjamin-aset bagi penerbit sekuritas-berjamin-aset proteksi pembayaran imbalan-kerja bagi entitas-yang-berupaya-tidak-mem-PHK, pembentukan program pinjaman untuk membeli kredit baru atau tambahan kredit bagi UMKM terlibas pandemi, pembentukan fasilitas likuiditas kotapraja untuk membeli sekuritas jangka pendek pemerintah/pemda.

\BoJ Jepang menggencarkan pasok dana dengan memperluas pihak-layak-transaksi dan memperlonggar agunan uuntuk pinjaman pribadi, BoJ memperkenalkan pemrovisian dana untuk mendukung pembiayaan UMKM.

Diantara negara-negara EME, Bank Indonesia meningkatkan durasi maksimum untuk transaksi beli-kembali dan beli-kembali-balik (reverse repo) sampai 12 bulan dan memperkenalkan lelang-harian. RBSA Afrika Selatan membuka peluang pinjaman bagi lembaga keuangan dengan obligasi-korporasi sebagai agunan. BoT Thailand membuka fasilitas pinjaman bagi lembaga keuangan dengan bunga-lebih-murah untuk keperluan kredit bagi UKM dan fasilitas perbankan khusus sebagai penjaga likuiditas entitas dana-bersama (mutual fund) .

- ✓ Keenam, Strategi Pembelian Aset.

BoE England memperbanyak pemegangan obligasi pemerintah dan obligasi-koporasi nir-peringkat-keuangan sampai £300 M , the US Fed berkomitmen membeli sekuritas perbendaharaan negara.

ECB Eropa membuat program-beli-gawat-darurat-pandemi (the pandemic emergency purchase program atau PEPP) sampai 1.85 T Euro dengan perpanjangan durasi sampai akhir Maret 2022. BoJ Jepang meningkatkan pembelian obligasi-pemerintah nirbatas , surat-berharga-pasar-modal dan obligasi korporasi tertentu. Directorate General Communications, 2021 mengunggah artikel berjudul ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability , antara lain menyatakan sebagai berikut. Aset-agunan-berpasar tetap-boleh-digunakan (grandfather) pada sistem-kredit-Eropa sampai September 2021, kebijakan haircut akan dilakukan untuk aset yang berada di bawah-kualitas-minimum sebagai agunan.

Berbagai bank sentral negara-negara EME seperti Indonesia, Afsel, Filipina dan Thailand meluncurkan program beli-obligasi , Indonesia dan Filipina me-monetasi utang dengan aksi beli obligasi langsung dari pemerintah, Mexico dan Brazil menjalankan operation twist berupa penurunan suku-bunga-pinjaman-jangka-panjang dengan cara menjual obligasi-perbendaharaan-hampir-jauh-tempo dan membeli obligasi-berdurasi-

panjang, menghasilkan kurva-hasil dimana hasil-jangka-pendek meningkat dan suku-bunga-jangka-panjang turun-simultan.

- ✓ Ketujuh, strategi menunggu momentum pemulihan ekonomi.

The Fed sebagai bank sentral AS menyatakan tarif bunga direncanakan akan tetap rendah sampai kondisi ekonomi dan lapangan-kerja terpulihkan. Berbagai bank sentral mengupayakan reduksi siklus-balik bantalan-modal (reduction in counter-cyclical capital buffers), relaksasi nisbah-likuiditas, menunda bagi dividen dan aksi beli-kembali, relaksasi proses restrukturisasi-utang dan pemrovisian kerugian, relaksasi aturan prudensial tertentu, pelonggaran kewajiban pelaporan dan kepatuhan tertentu.

Industri perbankan didorong untuk re-negosiasi dengan debitur bermasalah, menggunakan bantalan modal dan bantalan likuiditas, menggunakan berbagai aturan hukum dan akuntansi untuk menyerap kerugian sesuai BIS,2020. Kebijakan lazim bank sentral adalah pengurangan pada kebijakan-beli-balik dan penurunan nisbah cadangan kas, sementara kebijakan tidak-konvensional mencakupi perpanjangan dana operasional dan dukungan likuiditas berhampiran pembiayaan-ulang, beli aset termasuk pelintir-operasional (operation twists atau OTs), operasi dukung likuiditas, yang mencakupi kebijakan perpanjangan jangka pendanaan/peminjaman.

Di India, dukungan likuiditas dengan pembiayaan-ulang kepada bank agri,bank UKM , bank pedesaan dan bank/lembaga keuangan perumahan, f asilitas kredit bagi bank ekspor-impor 90 hari boleh-diperpanjang tersedia dengan fasilitas lindung nilai USD, bantuan penutupan utang lembaga dana-bersama (mutual fund) dan suatu fasilitas penunjang likuiditas, program Beli Aset dengan cara jual sekuritas-jangka-pendek, beli sekuritas-jangka-panjang. Kedepan, reserve bank berkomunikasi dan mendukung berbagai kebijakan komite kebijakan moneter nasional India.

4.16.Peranan Bank Sentral

Peran Ekonomi-Makro dan Peran Ekonomi-Mikro Bank-Sentral adalah sebagai berikut.

Pada tataran makro-ekonomi, kebijakan moneter BS mempengaruhi suku bunga dan berpartisipasi pada operasi-pasar-terbuka (OMO) untuk pengendalian biaya-pinjaman & biaya-peminjaman suatu bangsa. BS juga bertugas pada tataran mikro, dengan kebijakan nisbah cadangan wajib dan sebagai peminjam-terakhir. BS bertanggungjawab atas stabilitas harga, OMO adalah sarana pengendalian inflasi, pasok uang dan harga. Pada tataran tugsa mempengaruhi kondisi makro-ekonomi, BS menggunakan kebijakan moneter untuk meregulasi inflasi dengan pengendalian pasok-uang cq melakukan operasi-pasar-terbuka (*Open Market Operation*) cq injeksi pasar dengan likuiditas atau sebaliknya , menarik sebagian uang-beredar .

Pada tataran ekonomi-mikro, BS menjadi peminjam-terakhir (*lenders of last resort*) bagi bank-komersial yang kekurangan-dana kredit. Pinjaman berjangka pendek dengan tarif-bunga khusus (tarif terdiskonto) yang ditetapkan sedemikian rupa agar bank-komersial tertarik-untuk-pinjam namun tidak ketagihan meminjam. BS negara tertentu mewajibkan bank komersial menaruh simpanan wajib pada BS , sebagai sebuah ancangan pengendalian pasok-uang. Pada era-pandemi, kewajiban cadangan tersebut mungkin dirurunkan sampai nihil. Sebagai contoh, Sumber Bank Albania , 2018, berjudul *Standing Facilities* antara lain menjelaskan sebagai berikut. Fasilitas Siaga (*Standing Facilities*) adalah instrumen-tersedia-bagi bank domestik & cabang bank-asing di Albania atas inisiatif sendiri , antara lain (1) *overnight deposits* kelebihan likuiditas harian bank, (2) *overnight loan* ber-agun, sebagai kebalikan OPT BS, untuk menambah/mengurangi likuiditas harian (*overnight liquidity*). Bunga instrumen membentuk koridor dan bunga-pasar-uang bergerak pada kisaran tersebut. Hampiran fasilitas siaga tersebut digunakan hanya apabila tidak ada alternatif lain.Instrumen Deposito-Semalam (*overnight deposit*) adalah fasilitas investasi bagi bank-komersial untuk menginvestasikan kelebihan-likuiditas-semalam tanpa-batas boleh-ditolak-BS tanpa alasan (overnight excess liquidity) dalam bentuk investasi-jangka-pendek pada suku-bunga-tetapan-dimuka.Maturitas instrumen adalah lewat-semalam, kecuali besok adalah hari libur nasional, ditambah bunga dari BS dibayar hari selanjutnya.Instrumen Pinjaman-Semalam *(overnight loan)* adalah instrumen utang berjangka-pendek tersedia bagi bank-komersial, beragun paripurna, tersedia bagi bank membutuhkan karena yang mengalami kekurangan likuiditas-semalaman saja, dengan bunga kisaran-tertinggi (ceiling) suku-bunga-pasar-semalaman (*overnight market interest rate*) . Gagal pengembalian bank-komersial berisiko sita-agunan dan penghentian bantuan BS. Seluruh bank komersial dan cabang bank-asing yang memiliki akun pada BS berhak atas fasilitas-semalaman (*overnight facilities*). Gagal bayar harian otomatis terkonversi menjadi pinjaman-semalam (*overnight loan*). BS memberi tahu kepada bank tentang perpanjangan-otomatis pinjaman-semalam dan pembekuan-otomatis-agunan. Intrumen bbermaturitas semalam saja, hari selanjutnya (kecuali hari libur nasional) dikembalikan bank kepada BS berikut bunga, dengan bunga harian dihitung berdasar 365 hari bunga setahun.

4.16.1.Otoritas moneter.

Otoritas Moneter adalah lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan dibidang moneter, juga merupakan sumber uang primer, baik bagi perbankan, masyarakat maupun pemerintah. Otoritas moneter adalah bank sentral negara tersebut. Otoritas moneter berstatus indipenden , namun meng-indahkan keputusan KSSK.

4.16.2.Fungsi Pokok Otoritas Moneter.

Fungsi pokok otoritas moneter dapat disebutkan antara lain namun terutama adalah menerbitkan/mengedarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, memelihara cadangan devisa nasional dan mengawasi sistem moneter.

BS mempunyai dua fungsi utama, (1) makroekonomi tatkala meregulasi inflasi dan stabilitas harga, (2) mikroekonomi tatkala bertugas sebagai peminjam-terakhir. BS bertugas memelihara inflasi tetap rendah dan pertumbuhan GDP berkesinambungan melalui kebijakan moneter dan pengendalian pasok uang

4.16.3.Peranan Otoritas Moneter .

Kerangka dasar kebijakan moneter sebuah bangsa tergantung pada rezim-nilai-tukar di anut bangsa. Rezim nilai-tukar-tetap memiliki opsi lebih terbatas dalam kebijakan-moneternya, dibanding rezim nilai-tukar-luwes. Rezim nilai-tukar nan luwes-paripurna memudahkan pembentukan kerangka-kerja penargetan-inflasi. BS mempunyai dua fungsi utama, (1) makroekonomi tatkala meregulasi inflasi dan stabilitas harga, (2) mikroekonomi tatkala bertugas sebagai peminjam-terakhir. BS bertugas memelihara inflasi tetap rendah dan pertumbuhan PDB berkesinambungan melalui kebijakan moneter dan pengendalian pasok uang.

4.16.4.Kerangka Kerja dan Instrumen Otoritas Moneter.

Kerangka kerja kebijakan moneter terbagi atas Kerangka Kerja Operasional dan Kerangka Strategis. Kerangka dasar kebijakan moneter sebuah bangsa tergantung pada rezim-nilai-tukarnya. Bangsa memilih rezim nilai-tukar-tetap memiliki opsi lebih terbatas dalam kebijakan-moneternya, dibanding rezim nilai-tukar-luwes. Rezim nilai-tukar nan luwes-paripurna memudahkan pembentukan kerangka-kerja penargetan-inflasi. Kebijakan makroprudensial bank Sentral (BS) berhadapan dengan kekuatan politik cq DPR dan kekuatan pelaku industri jasa-keuangan , sehingga BS merasa perlu membentuk Komite Kebijakan Makro Prudensial yang bijak dan secara profesional mampu menjelaskan alasan pilihan kebijakan. BS mempunyai dua fungsi utama, (1) makroekonomi tatkala meregulasi inflasi dan stabilitas harga, (2) mikroekonomi tatkala bertugas sebagai peminjam-terakhir. BS bertugas memelihara inflasi tetap rendah dan pertumbuhan GDP berkesinambungan melalui kebijakan moneter dan pengendalian pasok uang.

4.17.Kebijakan Luar biasa BI.

Kebijakan moneter luar-biasa (*extra-ordinary measures*) atau non-konvensional BI antara lain menurunkan kebijakan tarif cq tarif reverse repo 7 harian dari 5 % pada Januari 2020 menjadi 3.50 % dalam bulan Februari 2021. BI menggunakan cadangan devisa untuk upaya stabilisasi mata-uang-rupiah , memasok valas di pasar, memperoleh REPO Line dari the Fed untuk penguatan cadangan devisa , emisi berbagai kebijakan untuk memitigasi dampak negatif pandemi, yaitu dengan menurunkan suku-bunga-kebijakan, meningkatkan intervensi-tiga-titik pada pasar spot, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas bank umum konvenional, memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuidtas rupiah dan menambah frekuensi lelang FX Swap menjadi setiap hari untuk memastikan kecukupan likuiditas, memperluas jenis underlying transaksi DNDF sehingga dapat mendorong lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, menurunkan GWM Rupiah untuk bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor, pembiayaan kepada UMKM dan/atau sektor prioritas lain,melonggarkan ketentuan *Rasio Intermediasi Makroprudensial* (RIM),menyediakan uang higienis, menurunkan biaya SKNBI, penetapan MDR QRIS 0% untuk merchant usaha mikro, dan mendukung penyaluran dana nontunai program-program pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BNPT, Program Kartu Prakerja, dan Kartu

Indonesia Pintar. BI membeli Beli Surat Utang Pemerintah,melakukan intervensi pasar dengan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS). Penerbitan global ini dilakukan dalam tiga bentuk surat berharga global yaitu Surat Berharga Negara (SBN) seri RI1030, RI 1050, dan RI 0470, lalu masuk ke pasar dengan membeli surat utang pemerintah di pasar perdana dalam keadaan tidak normal (abnormal) dimana suku bunga yield terlalu tinggi atau bila pasar tak mungkin lagi bisa menyerap. Bila kapasitas pasar enggak cukup, misalnya suku bunga melonjak tinggi, maka BI membeli dari pasar perdana.

BI mensinergikan kebijakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mitigasi dampak pandemi dan mengurangi kepanikan pasar keuangan global. Dari sisi kebijakan moneter, bank sentral di muka bumi menurunkan suku bunga, melakukan injeksi likuiditas dan berbagai aksi untuk mengurangi beban kepada sektor ekonomi dan keuangan. Dari sisi kebijakan fiskal, berbagai langkah ditempuh melalui stimulus fiskal melalui APBN antara lain peningkatan anggaran kesehatan, relaksasi pajak, dan bantuan sosial.

Pada situasi krisis keuangan global, BS me-relaksasi kebijakan-moneter dengan menurunkan suku-bunga jangka-pendek sampai nihil, agar tak ada ruang untuk penurunan lebih-lanjut. Kebijakan moneter nir-konvensional menghadapi risiko-deflasi dengan membeli obligasi jangka-panjang untuk menekan suku-bunga-jangka-panjang dan melonggarkan kondisi perekonomian. Sebagian BS menurunkan suku-bunga jangka-pendek di bawah nihil. Relaksasi moneter masa pandemi adalah menjaga likuiditas pada pasar-pembiayaan dan menjaga kelancaran aliran kredit.Mitigasi tekanan-pada-mata-uang dan pasar-obligasi-domestik, BS melakukan intervensi dan pelaksanaan program-beli-aset. Bank sentral (BS) melancarkan kebijakan moneter dengan mengatur/memelihara/mengubah pasok-uang , pada umumnya melalui operasi-pasar-terbuka, antara lain dengan penjualan obligasi-pemerintah dengan fitur “jual dan beli-kembali” untuk menyedot uang bank-komersial agar jumlah-uang-beredar menurun. Tujuan operasi-pasar-terbuka atau OPT (Open Market Operation atau OMO) adalah untuk mengendalikan suku-bunga, yang kemudian berpengaruh pada tarif-bunga- yang-lebih-berjangka-panjang dan kegiatan perekonomian.

4.18. Teori Bauran Kebijakan Fiskal & Moneter.

Pertemuan kebijakan Kemenkeu dan BI adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan defisit-fiskal , ditandai kenaikan defisit-neraca-berjalan karena mendukung hipotesis-defisit-kembar (*twin deficit hypothesis*) antara defisit fiskal (pendapatan APBN – Belanja APBN) dan defisit neraca-berjalan (*current-account*, yang terdiri atas ekspor + pendapatan investasi (atau deviden) dari LN + penerimaan bunga dan cicilan dari LN + saldo penerimaan dan transfer uang dari LN – impor-pembayaran dividen ke LN-pembayaran bunga & cicilan LN- saldo pembayaran/transfer uang ke LN). Maka negara harus meminjam atau mencetak-uang untuk pembiayaan-defisit APBN, menyebabkan kenaikan jumlah utang LN dan menyebabkan kenaikan tingkat

inflasi. Kenaikan saldo hutang LN mencipta masalah APBN pembayaran bunga dan pengembalian pokok pada tahun-tahun fiskal yang akan datang, kenaikan inflasi menyebabkan keruntuhan tingkat-bunga-sejati sehingga mencipta arus-modal-keluar. Terdapat beberapa implikasi pilihan kebijakan . Ekspansi moneter meningkatkan permintaan-agregat, mendorong investasi perusahaan dari sudut-pandang moneter.

2. Jesus Felipe, Scott Fullwiler, Gemma Estrada, Maria Hanna Jaber, Mary Ann Magadia, and Remrick Patagan, menerbitkan ADB Economics Working Paper Series tentang *How "Monetization" Really Works—Examples from Nations' Policy Responses to COVID-19*, menjelaskan antara lain sebagai berikut. Pada era pandemi, pendapatan pajak pemerintahan menurun, belanja untuk menanggulangi pandemi dan pemulihan perekonomian meningkat , dan bank sentral membantu masalah keuangan pemerintah dengan pinjaman langsung atau monetesisasi / pembelian obligasi pemerintah pada (1) pasar primer dan/atau (2) pasar sekunder, serta hampiran (3) pasar sekunder dengan pengendalian kurva-hasil atau Lindung-Nilai-Jatuh-tempo (*Secondary Market Purchases*: *Yield Curve Control or Maturity Swap*). Dalam tataran pembukuan-berpasangan, aliran masuk-keluar keuangan pemerintah berdampak sebaliknya kepada sirkulasi *Reserve Balance* (RB) bank-sentral.
3. *Board of Governors of the Federal Reserve System*, 2021, menjelaskan hubungan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam artikel berjudul *What is the difference between monetary policy and fiscal policy, and how are they related*? , sebagai berikut. Kebijakan fiskal ditentukan DPR dan pemerintah , BS tak ikut serta. DPR AS menghendaki BS AS mencapai sasaran kebijakan ekonomi-makro seperti stabilitas harga, pemerkerjaan penuh dan pertumbuhan perekonomian nan-stabil.

   DPR AS menjaga BS AS bebas dari pengaruh politik, the Fed adalah agen pemerintahan nan-indipenden. Kebijakan utama BS adalah penetapan tarif bunga-bank untuk kredit-jangka-pendek, melalui penetapan suku-bunga BS , yang menjadi dasar kebijakan suku-bunga-jangka-lebih-panjang. The *Federal Open Market Committee* (FOMC) dalam sistem the Fed bertugas menelaah kemungkinan-pengaruh kebijakan-fiskal pada berbagai variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan PDB, pemerkerjaan/pengangguran, dan inflasi. Dengan demikian, kebijakan-fiskal mempunyai pengaruh tidak-langsung kepada proses pembentukan kebijakan moneter. Sebagai misal, BS menilai efektivitas kebijakan fiskal cq kebijakan perpajakan dan belanja APBN terhadap sasaran ekonomi-makro cq tingkat pemerkerjaan/pengangguran dan tingkat stabilitas-harga , sebagai dasar penyusunan kebijakan moneter.
4. *European Central Bank* , 2021, menyajikan artikel berjudul *Fiscal and monetary policy in a monetary union*, menjelaskan antara lain sebagai berikut. Pada era pandemi, kebijakan moneter dan fiskal bekerja berdampingan meresolusi krisis. ECB membuat kebijakan moneter untuk 19 negara Uni-Eropa , setiap negara itu membuat kebijakan fiskalnya masing masing. Terjadi perubahan tata-perekonomian dunia , ECB menggunakan berbagaI sarana-baru untuk menjaga stabilitas-harga pada era-krisis , dengan menurunkan suku bunga ECB sampai suku-bunga negatif. Pada kondisi perekonomian nan-lemah, kebijakan belanja

APBN menjadi amat penting untuk pemulhan perekonomian dan membantu inflasi masuk jalur-kendali bank sentral kembali. Upaya gabungan kebijakan fiskal & moneter dilakukan apabila kondisi perekonomian.makin turbulen dan memburuk , beraroma krisis.

5. *People's Bank of China* , 2021, menyajikan artikel *Monetary policy, fiscal policy and public debt management*, menjelaskan bahwa kerja sama otoritas fiskal dan otoritas moneter dirangkai sebagai berikut.

   - ✓ Pertama, untuk pengendalian utang negara dalam entitas Pemerintah dan BS menetapkan bersama sasaran-kebijakan berbagai sarana-pengendalian makro ekonomi ,dengan perkataan lain; manajemen utang-publik dan kebijakan moneter harus selaras.

   - ✓ Kedua, pilihan besar utang-publik, pilihan jenis-utang publik, pilihan irama/kecepatan penerbitan surat-utang-negara harus terkoordinasi dengan BS sebagai dasar BS melakukan manajemen-likuiditas nan-efektif.

   - ✓ Ketiga, BS dan pemerintah bersama-sama membentuk/menjaga lingkungan pasar obligasi negara untuk menjamin likuiditas obligasi-negara pada pasar-sekunder , yang mencipta dasar-mantap untuk membentuk kurva hasil nan-andal (*reliable yield curve*) untuk suku-bunga-pasar nan-bebas-risiko (*a reliable yield curve for risk -free market interest rates*), sedemikian rupa , sehingga mencipta efisiensi mekanisme-transmisi kebijakan-moneter.

   - ✓ Keempat, penerbitan surat-utang-negara jangan sampai mengganggu/menciderai kebijakan moneter dan stabilitas mata uang. Penerbitan SUN skala-besar untuk menanggulangi krisis ekonomi dan krisis-keuangan jangan sampai mengganggu indipendensi BS.

6. Leika Kihara , 2021, via Reuters menyajikan artikel berjudul *BOJ putting independence at risk with quasi-fiscal steps, says ex-c.bank policymaker*, menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. "Kematian" sarana kebijakan moneter konvensional menyebabkan Bank Of Japan menjadi lebih akrab dengan kebijakan fiskal , tanpa mengurbankan indipendensi BS dalam mencapai/memelihara stabilitas harga. Berbagai sarana BOJ makin terlibat pada distribusi-pendapatan . Disamping menjaga tarif bunga agar tetap amat-rendah, BOJ membeli obligasi pemerintah besar-besaran dan aset berisiko seperti *exchange-traded funds* (ETF). Pada era pandemi, BOJ membangun bantalan-peredam-benturan (*cushion*) seperti skema bunga-pinjaman kepada bank, skema jaminan kredit dan skema bantuan kepada UKM. Tak ada kepastian kapan krisis-berakhir, sehingga BOJ merasa makin sulit membentuk kebijakan-moneter sendirian , sehingga kebijakan BOJ cenderung makin teranyam dengan kebijakan fiskal pemerintahan. Kebijakan tidak-lazim BOJ antara lain menjaga biaya-pinjaman tetap rendah yang bertujuan mencapai target inflasi 2 % , bukan mendukung pembiayaan pemerintah cq

APBN. Para pakar menyatakan bahwa pada masa krisis, boleh-boleh saja Bank Sentral bekerja-sama bahu-membahu dengan otoritas fiskal , namun dengan itikad-batin secepat mungkin menjauhkan diri dari pola-pemikiran-fiskal sebelum larut-termutasi (malih rupa, bahasa Jawa) dalam sebuah dunia terdominasi pemikiran fiskal.

7. Kebijakan Kuasi-Fiskal.

Sambil berhati-hati tak campur-tangan kebijakan-fiskal Kememnkeu, bank-sentral melakukan kebijakan fiskal-semu sebagai berikut. Pada tataran kebijakan moneter bersifat kuasi-fiskal , PDB dan inflasi tak lagi menjadi perhatian utama bank sentral. Inflasi tak menjadi target bank sentral, namun sebagai faktor-perlu-dipertimbangkan atau syata/batasan mencapai sasaran bank sentral. Pada masa pandemi, Bank sentral lebih memilih kebijakan melindungi industri perbankan dari risiko kebangkrutan , mencegah pembengkakan kredit-nir-kinerja (*non performing loan*) dengan mendorong kehati-hatian melepas kredit , ketimbang optimalisasi aliran-kredit untuk optimalisasi pertumbuhan GDP. Bank sentral memilih lebih berhati-hati dalam upaya penyehatan industri perbankan, untuk tidak membahayakan neraca bank sentral sendiri karena tugas mengakuisisi aset-nirkualitas yang menguras cadangan bank-sentral , berisiko bank sentral pada posisi pailit, bank sentral menjual kembali aset-bank tersebut kepada industri-perbankan, menyebabkan industri perbankan tidak-likuid tanpa peduli dampak buruk kepada tingkat inflasi.

Seok Gil Park,2012, menyajikan *IMF Working Paper* berjudul *Central Banks Quasi-Fiscal Policies and Inflation* , antara lain menyatakan sebagai berikut, Kebijakan kuasi-fiskal adalah kebijakan moneter BS yang berdampak pada neraca BS , misalnya operasi relaksasi-kredit berdampak pada aset BS. Bila otoritas fiskal tak-mengganti kerugian tersebut, maka keputusan tersebut tergolong kebijakan kuasi-fiskal yang sesungguhnya “mengukuhkan” besar-modal BS yang baru. Beberapa pengamat cemas bahwa pertimbangan dampak/konsekuensi negatif kebijakan moneter kepada neraca BS berisiko menyebabkan BS tidak memilih kebijakan moneter tersebut. Guncangan pada neraca BS berpengaruh pada inflasi melalui perubahan-portofolio rumah-tangga , bila otoritas fiskal tidak bersedia mendukung neraca BS. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berinteraksi secara koheren , meng-konsolidasi keterbatasan anggaran BS dan otoritas-fiskal dalam sebuah persamaan. Otoritas fiskal pada umumnya tak peduli utang BS dan merekapitalisasi defisit ekuitas BS.

George Dorgan , 2014, dalam artikel berjudul *Central Banks’ Quasi-Fiscal Deficits and Potential Hyperinflation* , antara lain menyatakan bahwa BS sebaiknya tak berperan sebagai agen quasi-fiskal dari otoritas fiskal , karena akan mengurangi kapasitas BS menjaga stabilitas ekonomi-makro, membahayakan neraca BS , mengacaukan pertanggungjawaban tugas pokok masing masing otoritas. Peran tersebut tak terpahami oleh publik. Hiperinflasi atau kematian

mata-uang disebabkan defisit kuasi-fiskal (*quasi-fiscal deficits*) atau defisit pada BS.

Seok G Park, 2012, dalam artikel berjudul *Central Banks Quasi-Fiscal Policies and Inflation*, menyatakan bahwa bila neraca BS tak mendapat dukungan penuh dari otoritas fiskal , suatu aksi undur-diri (exit) dari relaksasi-kuantitatif (*quantitative easing*) boleh jadi berdampak inflatoir, dan BS tak selalu mampu membereskan neraca yang mengecil, sehingga disimpulkan bahwa perlindungan/dukungan penuh otoritas fiskal terhadap operasi kuasi-fiskal otoritas-moneter adalah syarat sebuah kebijakan moneter nan-efektif.

8. Kondisi Pertengahan 2022

Menurut IMF, inflasi dunia tahun 2022 sebesar 3,6 % pertahun. Sumber Trading Economics Jan 2022, menyatakan 10 negara berinflasi tertinggi, adalah Venezuela 1198.0%, Sudan 340.0%, Lebanon 201.0%, Syria 139.0%, Suriname 63.3%, Zimbwabe 60.7%, Argentina 51.2% dan Turki 36.1%. Penyebab Inflasi adalah (1) inflasi tertarik permintaan (*demand pull inflation*) dimana permintaan tinggi tak terlayani pasok, harga-umum-naik, jumlah pelanggan mampu-beli menyusut menimbulkan kurva pasok-permintaan baru,(2) inflasi terdorong kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*) , dan (3) inflasi terancang asumsi-inflasi-berlanjut (*bulit in inflation*) , menyebabkan harga-harga cenderung naik, tarif umum imbalan kerja naik, menyebabkan harga pokok produksi & harga jual terus menerus meningkat.

Pada pertengahan tahun 2022, berbagai negara seperti Hong Kong, Netherlands, Switzerland, Sweden,Ireland, Jepang, Saudi Arabia, Togo, Aruba dan Brunei Darussalam berisiko mengalami deflasi.

Pada Indeks Harga edisi Juni 2022, FAO mengungkapkan, harga beras di bulan Mei 2022 naik ke level tertinggi dalam setahun, yaitu berada pada level 109,2 poin, naik 3,5% dibandingkan April 2022, lonjakan tajam terjadi untuk semua jenis beras. Pada pertengahan 2022, i nflasi pangan di Rusia mencapai 12,3 persen, Amerika Serikat 6,9 persen, Turki 55,6 persen, India 5,4 persen dan kawasan Uni Eropa 4 persen, bersyukur bahwa inflasi pangan di Indonesia pada angka 3 persen. Pada tahun 2022, kelangkaan pangan mulai terjadi di beberapa negara, harga pangan dunia pada pertengahan 2022 berkecenderungan naik .

Data Food Agriculture Organization (FAO) Food Price Indexmenyatakan bahwa indeks harga pangan terus bergerak naik dari level 101 saat gelombang Covid-10 varian Alpha, level 125,3 saat gelombang varian Delta, dan kini di level 140,7 saat terjadi perang. Level 140,7 adalah indeks per Februari 2022, naik 3,9 persen dari torehan Januari dan lebih tinggi 20,7 persen secara tahunan (*year-on-year*). Indonesia terkena imbas (harga) kedelai dunia yang naik, diakselerasi pula oleh harga gandum, hampir 20 persen lebih gandum dunia berasal dari Ukraina dan Rusia. Perang memberi berbagai dampak lanjutan , yaitu kelangkaan pangan dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Diperkirakan sekitar 60

negara akan mengalami kesulitan ekonomi, berisiko menjadi negara gagal kalau tak dapat menyelesaikan masalah ekonomi.D ua masalah ekonomi saat ini adalah kenaikan harga energi dan kenaikan harga pangan. Komoditas energi seperti batu bara, minyak, dan gas telah mengalami kenaikan harga di pasar global. Di Indonesia, harga pakan-ternak naik, harga telur, harga ayam naik , kedelai naik 33 persen, padahal harga tahu & tempe bila naik berimbas kepada inflasi. Sampai pertengahan 2022, tidak terlihat risiko inflasi-luarbiasa bagi Indonesia.

4.19. Teori Hubungan Antar Kebijakan

Terdapat fungsi Kementerian Koordinator, KSSK dan berbagai instrumen Kabinet, agar berbagai kebijakan lintas lembaga kepemerintahan terkoordinasi.

4.19.1. Pengaruh Kebijakan Lain Terhadap Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter BI memperhatikan berbagai faktor seperti

- GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga mempengaruhi kebijakan moneter.
- Kebijakan makroprudensial mempunyai fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan , dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan , serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran.
- Kebijakan makroprudensial pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Secara spesifik, kebijakan ini digunakan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik, mengurangi dampak risiko sistemik, dan memperkuat daya tahan sistem keuangan dari krisis.
- Berbagai kebijakan fiskal yang bersifat hulu kebijakan moneter, agar jangan sampai suatu kebijakan moneter (belakangan) menghalangi penerapan/efektivitas kebijakan fiskal (lahir lebih dahulu).
- BI dalam merumuskan kebijakan moneter mungkin menemukan berbagai kebijakan lembaga-negara lain yang menghalangi sukses raihan kebijakan-moneter tertentu, sehingga hal-tersebut diungkapkan pada rapat-kabinet paripurna berkala.

4.19.2. Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kebijakan Lain

Suatu kebijakan moneter yang lahir lebih dahulu merupakan input (salah satu bahan baku) pembuatan berbagai kebijakan kementerian/lembaga negara.

- Kebijakan moneter dan kebijakan makro-prudensial merupakan dasar berpijak dalam menyusun kebijakan fiskal cq RAPBN sesuai sumber Lars E.O. Svensson , 2015, dalam artikel berjudul Monetary *Policy and Macroprudential Policy: Different and Separate,*.
- Kebijakan moneter berdampak pada pasar uang dan pasar surat berharga.

- Berbagai kebijakan moneter berpengaruh kepada APBN Pendapatan dan APBN Belanja, sehingga dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan fiskal.
- Kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor riil, karena jika tingkat bunga diturunkan maka investasi akan meningkat dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cq output.

4.19.3. Kebijakan Bersama.

Tugas Presiden dan para Menko meng-koordinasi berbagai kebijakan lintas kementerian dan lembaga negara, agar sinegestis. Kebijakan bersama juga dibentuk pada forum KSSK.

4.19.3.1.Perpaduan Kebijakan Moneter dan Makro-prudensial.

Kebijakan makroprudensial mempunyai fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan , dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan , mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Pada tataran moneter dan makro-prudensial, bank sentral Eropa ECB memutuskan kebijakan dukungan moneter melalui tambahan pembelian aset sebesar €120 Miliar sampai akhir 2020 , lelang tambahan temporer fasilitas-likuiditas ber tarif bunga tetap, peringanan beban bunga pinjaman-jangka-panjang untuk pembiayaan-kembali proyek-proyek tertentu jatuh-waktu mejadi berjangka-lebih-panjang, program pembelian-gawat-darurat-era-pandemi ((Pandemic Emergency Purchase Program atau PEPP),) berbagai sekuritas-berharga sektor-privat dan sektor-publik tertentu.ECB menerbitkan aturan pelonggaran aset-layak-beli dan relaksasi tolok-ukur jaminan/agunan kredit seperti pemotongan-agunan tak-berpasar-bebas bersifat permanen (*a permanent collateral haircut reduction of 20 percent for non-marketable assets*).

4.19.3.2.Perpaduan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.

Pada tataran konsep, perpaduan harmonis kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas tingkat pertumbuhan ekonomi dengan inflasi rendah & terkendali, tingkat pengangguran rendah dan harga-harga umum stabil. Sayang sekali ditemukan banyak dikotomi diantara dua kebijakan tersebut dan tak ada formula optimasi/optimalisasi perpaduan-keduanya. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi alat dalam perencanaan ekonomi di Indonesia agar dapat mengendalikan perekonomian makro. Kedua kebijkan tersebut berhubungan erat dengan empat sektor yaitu sektor rumanh tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan dan sektor internasional , yang memiliki interaksi masing-masing dalam upaya menciptakan pendapatan serta pengeluaran pemerintah.

Tentang Hubungan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal, Fakultas Ekonomi Online,2016 cq Fery KOOL mengunggah artikel berjudul *Hubungan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal,* menguraikan beberapa hal sebagai berikut. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi alat dalam perencanaan ekonomi di Indonesia agar dapat mengendalikan perekonomian makro. Kedua kebijkan tersebut berhubungan erat dengan empat sektor yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan dan sektor internasional , yang memiliki interaksi masing-masing dalam upaya menciptakan pendapatan serta pengeluaran pemerintah. Yang mempengaruhi kebijakan fiskal ialah pengeluaran APBN serta pajak sedangkan yang mempengaruhi kebijakan moneter diantaranya GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Kebijakan fiskal berdampak pada perekonomian dengan penerimaan Negara serta pengeluaran Negara, sedangkan kebijakan moneter akan berdampak pada pasar uang dan pasar surat berharga.. Pasar surat berharga menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat PDB. Kebijakan fiskal akan berpengaruh terhadap permintaan agregat serta penawaran agregat, permintaan agregat dan penawaran agregat menentukan pasar barang dan jasa. Kondisi pasar barang dan jasa menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja, berdampak pada tingkat pendapatan serta tingkat upah yang diharapkan. Pendapatan memberikan berpengaruh terhadap permintaan agregat barang/jasa, tingkat upah berdampak pada penawaran agregat barang/jasa, pasar uang dan surat berharga.

Adam Hayes, 2021 mengunggah artikel berjudul *Fiscal Policy vs. Monetary Policy: Pros and Cons* , menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Kebijakan moneter bank-sentral bertujuan mempertahankan momentum pertumbuhan-ekonomi , membangkitkan perekonomian kala-resesi cq era-pandemi. Hasil kebijakan dalam jangka pendek sesuai harapan, mungkin berdampak dalam-jangka-panjang tak sesuai harapan/skenario. Kebijakan fiskal pemerintahan berbentuk perubahan bentuk dan tingkat pemajakan dan aktivitas kena-pajak , berpengaruh pada hukum pasok-permintaan barang/jasa. Kebijakan fiskal berisiko terpolusi politik dan pengejaran popularitas, tak sesuai teori ekonomi nan-baik.Pemerintah harus memadu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara arif-bijaksana. Teori Pro-Kontra kebijakan Moneter adalah sebagai berikut. Kebijakan tarif bunga bank sentral menyebabkan tarif bunga deposito naik/turun, selera menabung masyarakat naik/turun, biaya kredit(bunga) naik/turun, penyediaan dana untuk investasi naik/turun.Inflasi adalah gejala kenaikan harga-harga umum barang/jasa. Inflasi kecil adalah baik untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, pekerja dapat berharap kenaikan imbalan kerja.Kebijakan moneter praktis dan mudah diterapkan bank sentral. Tambahan uang beredar dan tarif-bunga menurun akan menurunkan nilai mata uang domestik. Pelemahan mata-uang tertentu mendorong kinerja ekspor, apabila harga produk eks-impor di negara-asing turun , meningkatkan permintaan (demand). Untuk bank sentral, tarif bunga hanya dapat diturunkan sampai nihil, tarif bunga rendah dapat menjadi jebakan likuiditas.Beberapa bank sentral Eropa menggunakan tarif bunga negatif. Tarif bunga rendah lebih cocok pada saat ekonomi mekar-berkembang. Kebijakan

moneter berlaku menyeluruh, juga bagi sub-ekonomi atau industri tertentu yang tak membutuhkan stimulus. Kebijakan moneter sebaiknya mencipta lapangan/peluang kerja. Bila bunga kredit rendah, masyarakat cenderung meminjam walau tak butuh. Pinjam berlebih menyebabkan uang berputar lebih banyak ketimbang barang/jasa, daya-beli meningkat, menyebabkan permintaan meningkat, menyebabkan harga-harga umum meningkat, meningkatkan besar inflasi.

Ekspansi moneter meningkatkan permintaan-agregat, mendorong investasi perusahaan dari sudut-pandang moneter. Dari perspektif fiskal, kebijakan pemerintah untuk mensubsidi investasi dan meluncurkan program investasi-publik mungkin mendorong iklim investasi. Ekspansi moneter dapat jatuh kedalam perangkap stagnasi terpicu-ekspektasi , berdampak negatif pada pertumbuhan perekonomian-fundamental. Teori makroekonomi konvensional harus dimodifikasi sesuai situasi berkembang, harus terkoordinasi dalam tugas menjaga ekuilibrium pasok-permintaan secara efektif. Disamping 3 jenis kebijakan makroprudensial, moneter dan fiskal, kebijakan makroekonomi dan kebijakan APBN harus terfokus pada penanggulangan-lapangan situasi gawat-darurat akibat pandemi/endemi.

4.2.Teori Inflasi

Nikita Dutta, 2021, menyajikan artikel Inflation: Types, Causes and Effects (With Diagram), menjelaskan antara lain sebagai berikut.

Pertama, Jenis inflasi berbasis sebab-musabab.

1. Inflasi Mata Uang (Currency Inflation), adalah inflasi karena cetak-uang kartal.

2.Inflasi Kredit (*Credit Inflation*) karena ekspansi kredit industri perbankan menyebabkan jumlah uang beredar meningkat, inflasi meningkat.

3.Inflasi karena pemerintah cq inflasi disebabkan mencetak uang-kartal untuk menutup defisit APBN.

4.Inflasi karena Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*) , akibat jumlah uang beredar meningkat, penghasilan masyarakat bertambah besar, gairah membeli meningkat , terjadi perebutan pembelian atas pasok barang/jasa tetap/terbatas, menyebabkan harga-harga naik.

5.Inflasi Terdorong Biaya (*Cost-push Inflation*) pada suatu perekonomian di mana harga-harga umum input meningkat , misalnya harga bahan baku, imbalan kerja, tarif air,listrik,tol dll meningkat, menyebabkan harga pokok barang/jasa peningkat, mendorong harga-jual meningkat. Kenaikan gaji umum arena gerakan serikat-buruh , menyebabkan kenaikan gaji sia-sia , karena inflasi.

Kedua, Jenis inflasi Berbasis Kecepatan dan Intensitas

1.Jenis Inflasi Merangkak Lembut (Creeping or Mild Inflation), digambarkan oleh kenaikan harga-harga umum lambat , tak-ketara atau tak-terasa, namun pasti , sekitar 2 atau 3 % pertahun atau lebih besar sedikit.

2.Inflasi Berjalan (*Walking Inflation*) adalah bila keaikan harga umum diantara 3 % sampai 4% pertahun, tergolong inflasi moderat. Berbagai pakar bahkan berpendapat inflasi digit tunggal (*single digit inflation*) adalah inflasi sedang-sedang saja, bila terprediksi & terkendali , menyebabkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Apabila mendekati 10 % , apalagi terjadi tak terduga, akan menghasilkan panik masyarakat, karena berpotensi menjadi *running inflation*.

3.Inflasi Cepat (*Running Inflation*) , inflasi tak beraturan (*Galloping*) dan Inflasi-Hiper. Inflasi moderat dapat/mudah pindah-kelas menjadi berbahaya apabila tak-terkendali, tak terprediksi lagi (*Galloping & Hyperinflation*) , pada awalnya ditandai inflasi-berdigit-ganda (double digit inflation) menuju inflasi dalam ratus %, ribu %, miliar %, triliun %.

4.Reaksi Pemerintah Terhadap Inflasi

Sistem pemerintah terbuka, mengungkap kinerja inflasi apa adanya dan upaya mengatasi, terdapat pemerintahan yang tak terlampau transparan dengan sistem kurs-terpasung.

Ketiga, Sebab Musabab Inflasi

1. Kenaikan permintaan tak dimbangi kenaikan pasok , atau peristiwa lain yang mirip, misalnya penurunan pasok lebih besar dari penurunan permintaan. Mazhab Keynes membelah permintaan (demand) menjadi permintaan konsumsi, investasi dan pemerintahan.
2. Teori Sebab-Musabab Inflasi Tarikan-Permintaan.
   Pertama, Mazhab Moneter manyatakan pada wilayah-kondisi-ekonomi ber-pengerjaan-penuh (full employment economics) , pasok uang berlebih meningkatkan permintaan-agregat, sehingga mengingkatkan inflasi.
   Kedua, Mazhab Keynes berpendapat bahwa penurunan tarif-pajak menyebabkan belanja-konsumsi meningkat, meningkatkan investasi dan belanja APBN, ditambah gairah mencetak uang, menyebabkan inflasi meningkat.

Kenaikan jumlah penduduk meningkatkan permintaan-agregat, penghasilan ekspor meningkatkan daya-beli negara peng-ekspor.

CPI disebabkan kenaikan-imbalan kerja terdorong inflasi , kenaikan laba-terdorong-inflasi, kenaikan harga-barang/jasa input yang di impor, antar lain harga migas internasional,kenaikan pajak tertentu sebagai unsur CPI, keusangan mesin dan teknologi, inefisiensi dan korupsi.

Keempat, Teori Dampak Inflasi

1. Inflasi terkait keinginan masyarakat pembeli untuk beli murah, keinginan masyarakat penjual untuk jual-mahal.
2. Dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan.
   Selama inflasi, pada umumnya manusia mengalami kenaikan penghasilan , sebagian kenaikan lebih besar dari tingkat kenaikan harga umum, sebagian lagi lebih kecil. Peminjam kredit memperoleh keuntungan inflasioner, sebaliknya pemberi kredit merugi-inflasioner. Peminjam kredit-rumah tinggal berjangka 10 tahun berharap inflasi terus meningkat, karena perjanjian angsuran tak terkoreksi inflasi vs harga real-estate terus meningkat. Kekuatan uang diterima sepuluh tahun lalu mungkin jauh lebih tinggi dari kekuatan uang-angsuran kredit pulus bunga.
3. Dampak inflasi kepada kreditur dan debitur.
4. Peminjam untung, pemberi pinjaman merugi , karena nilai-uang cq daya-beli (purchasing power) saat diterima peminjam jauh lebih tinggi dibanding saat pengembalian tertambah bunga. Peminjam memperhitungkan tingkat iflasi dalam suku-bunga pinjaman.
5. Dampak inflasi pada Pemegang Obligasi.
   Para pemberi pinjaman atau pemegang-obligasi berpenghasilan bunga dengan suku-bunga tetap , menderita , karena (1) penghasilan-nyata bunga adalah tarif-bunga dikurangi tingkat-inflasi, (2) pokok pinjaman diterima kembali dalam jumlah sama dengan yang diberikan, karena nilai-sejati merosot.
6. Investor menerima penghasilan deviden, dengan ROE mungkin lebih-besar atau lebih kecil dibanding tingkat-inflasi. ROE dikurang tarif-inflasi adalah penghasilan sejati investor.
7. Penerima imbalan kerja berkala berjumlah tetap, nilainya digerus tarif-inflasi , terdapat kebijakan pemberi-kerja berbentuk kenaikan-berkala sebesar tarif-inflasi. Terdapat serikat buruh yang berupaya mempertahankan daya konsumsi imbalan-kerja tergerus-inflasi dengan unjuk-rasa (purchasing-power parity demo).
8. Pedagang dengan tarif-margin (% laba bruto) dibawah tarif inflasi , berisiko bertambah miskin tiap tahun. Upaduta Niaga membandingkan rerata-hasil-perantara tahunan tahun lalu dengan tahun-terakhir yang terkoreksi inflasi untuk mengetahui penghasilan sejati.
9. Dampak Inflasi pada Produksi dan Pertumbuhan Ekonomi
    - Inflasi tak mendorong output sektor riil meningkat.
    - Pada kondisi ekonomi bukan ber-pengerjaan-paripurna (full employment), inflasi menguntungkan sektor riil.
    - Pada umumnya inflasi mendorong kenaikan-tingkat-harga perunit barang/jasa, namun kenaikan-laba-sejati muncul tatkala laba-jual-baru memberi lebihan yang dapat menutup tingkat-inflasi, bila berterima konsumen, akan mendorong gairah investasi.
    - Kenaikan harga-jual karena inflasi berdampak pada sisi permintaan yang berisiko mengecil , pada kelompok konsumen berpenghasilan-tetap.
    - Kenaikan laba-pengusaha akibat inflasi dihantui oleh kenaikan harga-bahan-baku, kenaikan upah-pekerja dan kenaikan tarif-umum FOH seperti tarif PAM, Tol dan Listrik.
    - Inflasi luarbiasa menakutkan rumah-tangga, kelangsungan berumah-tangga terdistorsi kepemilikan tunai (tabungan) yang semakin tidak-berdaya-beli , terjadi perubahan pola konsumsi dan pola investasi terfokus investasi-tahan-inflasi seperti deposito dalam valas negara-negara rendah-inflasi , investasi properti , emas, berlian bila cepat naik harga lantaran inflasi, dll. Di Indonesia, perbankan memberi suku-bunga deposito lebih kecil dari laju-inflasi, sehingga daya-beli para deposan menyusut sebesar selisih tarif tersebut.

- Inflasi kecil, lambat dan terkendali mendorong pertumbuhan PDB.

Sejarah Inflasi Luar-Biasa

Sejarah dunia tentang inflasi-hiper mencatat bahwa pada era 1861-1865 inflasi-hiper mencapai 1.200 banding 1, Austria pada periode 1914-1923 antara lain mencapai 1.426 % , pada tahun 1922 dengan CPI berfaktor 11.836, Jerman pada periode 1914-1923 mencapai 1 miliar banding 1, Hungaria pada periode 1919 -1924 mencapai 98 % perbulan pada tahun 1922, Polandia pada periode 1918-1924 mencapai 800.000 banding 1, Yunani (Greece) pada periode 1942-1953 mencapai 50 T banding 1, Hungaria pada periode 1945-1946 mencapai 400 Oktiliun (yaitu angka 400 diikuti dengan 27 bilangan 0 dibelakangnya) banding 1, RRC pada periode 1947-1949 mencapai 15 Kuantiliun (15 dan 18 angka nol) banding 1, Brazil pada periode 1967-1994 mencapai 2.750 Kuadriliun (yaitu angka 2.750 ditambah 15 angka nol dibelakangnya) banding 1, ,Meksiko pada periode 1982- 1993 mencapai 10.000 %, Bolivia pada periode 1984-1987 mengganti mata uang lama dengan mata-uang baru (sanering) 1 juta banding 1, Irak pada periode 1987-1995 sebesar 10.000 banding 1, Nicaragua pada periode 1988-1991 sebesar 50 Miliar banding 1, Argentina pada periode 1975- 1993 nilai tukar 100 Miliar banding 1, Peru pada periode 1986-1991 sejumlah 1 Miliar banding 1, Yugoslavia pada periode 1989-1994 berakhir dengan 10^{27} (terbilang 10 pangkat 27) banding 1, Polandia pada periode 1989-1994 berakhir pada 10 Ribu banding 1, Zaire pada periode 1989-1996 berakhir pada 300 Miliar banding 1, Angola pada periode 1991-1999 nilai tukar berakhir pada 1 Miliar banding 1, Bosnia dan Herzegovina pada periode 1992-1993 tingkat inflasi mencapai 10.000 banding 1, Belarus pada periode 1994-2002 nilai tukar berakhir pada 1 Miliar banding 1, Zimbwabe pada periode 1998-2008 secara keseluruhan berdampak 1 = 10^{25} (terbilang sepuluh pangkat 25).

David Baur, 2021, menyajikan artikel berjudul *Hyperinflationary economies at 31 December 2021*, antara lain mengemukakan bahwa Argentina masuk wilayah inflasi-hiper pada tahun 2018 , dan diramalkan akan tetap demikian pada tahun setelah periode 3 tahun kumulatif diatas 100 % sejak 2018, sehingga wajib menerapkan standar akuntansi inflasi-luarbiasa, disamping Islamic Republic of Iran , Lebanon, South Sudan ,Sudan ,Suriname (mulai 2021) , Venezuela, Yemen (mulai 2021) dan Zimbabwe . Pada tahun 2022, risiko wajib-terap akuntansi inflasi-luarbiasa tertandai pada negara-negara Angola, Ethiopia (baru 2021) dan Haiti, mungkin juga termasuk Afghanistan (baru 2021) dan Syrian Arab Republic .

Menurut IMF, inflasi dunia dewasa ini sebesar 3,6 % pertahun. Sumber Trading Economics Jan 2022, menyatakan 10 negara berinflasi tertinggi, adalah Venezuela 1198.0%, Sudan 340.0%, Lebanon 201.0%, Syria 139.0%, Suriname 63.3%, Zimbwabe 60.7%, Argentina 51.2% dan Turki 36.1%. Penyebab Inflasi adalah (1) inflasi tertarik permintaan (demand pull inflation) dimana permintaan tinggi tak terlayani pasok, harga-umum-naik, jumlah pelanggan mampu-beli menyusut menimbulkan kurva pasok-permintaan baru,(2) inflasi terdorong kenaikan biaya produksi (cost push inflation) , dan (3) inflasi terancang asumsi-inflasi-berlanjut (bulit in inflation) , menyebabkan harga-

harga cenderung naik, tarif umum imbalan kerja naik, menyebabkan harga pokok produksi & harga jual terus menerus meningkat.

Teori Deflasi.

Penyebab deflasi adalah kejatuhan permintaan agregat, kenaikan pasok agregat. Penurunan permintaan-agregat disebabkan kenaikan suku-bunga bank-sentral menyebabkan penurunan pasok-uang cq kredit.Deflasi menimbulkan pesimisme-massal akan masa-depan perekonomian, menyebabkan peningkatan tabungan dan pengurangan-konsumsi. Kenaikan pasok-agregat disebabkan biaya-produksi menurun, kemajuan teknologi, menyebabkan persaingan-menajam, bisnis dan jumlah pemain/pemasok/produsen menurun

Berbagai negara seperti Hong Kong, Netherlands, Switzerland, Sweden,Ireland, Jepang, Saudi Arabia, Togo, Aruba dan Brunei Darussalam berisiko mengalami deflasi. Sebuah jurnal bisnis terbitan the Wharton School of the University of Pennsylvania , 2015, menyajikan artikel berjudul *Deflation: Why Europe's Problem Is Everyone's Problem* , antara lain mengungkapkan bahwa Deflasi antara lain disebabkan penurunan harga migas global. Sebagai penyebab pelambatan pertumbuhan ekonomi, berisiko depresi-ekonomi dan stagnasi-ekonomi, deflasi adalah situasi tingkat-harga-umum merosot , menyebabkan harga-harga barang/jasa lebih murah bagi konsumen, laba lebih kecil karena harga-jual makin mendekati titik-impas (*break-even point*) atau terpaksa jual dibawah titik-impas.. Pada situasi konsumen memiliki uang lebih sedikit untuk belanja, permintaan agregat menurun , menyebabkan situasi surplus-pasok , pengurangan produksi dan SDM, penurunan kebutuhan kredit menyebabkan penurunan suku-bunga-kredit menekan margin-industri-perbankan, berisiko meningkatkan pengangguran. European Central Bank (ECB) melakukan relaksasi-perekonomian atau *quantitative easing* (QE) bertujuan pelemahan mata-uang Euro dengan injeksi likuiditas melalui pembelian obligasi negara dan swasta , sambil melihat-lihat dampaknya pada perubahan tingkat-inflasi kembali menuju sekitar 2 %.

Kebijakan The Fed Menyikapi Inflasi.

Untuk menahan laju-inflasi, the Fed dan berbagai bank sentral lazimnya melancarkan kebijakan moneter kontraksioner (*contractionary monetary policy*) dengan cara mengurangi pasok-uang-beredar, mengurangi gairah konsumsi/belanja publik, menurunkan tingkat kegiatan ekonomi, untuk menurunkan tingkat inflasi.

Teori Inflasi Utang.

Robert C Kelly pada Investopedia Team, 2021, menjelaskan Debt Deflation, antara lain sebagai berikut. Deflasi Utang (Debt deflation) atau kenaikan nilai-sejati utang (real value of debt) terjadi tatkala harga-harga jatuh, imbalan-kerja dan nilai-aset menekan kemampu-bayaran para peminjam menuju risiko gagal-bayar utang, lalu mencipta spiral deflasionair berupa kredit-macet perbankan, berujung likuidasi dan penyitaan agunan-kredit.

Teori Indeks Harga.

Pada berbagai negara terdapat *Consumer Price Index (CPI) ,Implied Exchange Rate Price Index, Exhange Rate Price Index,* dan/atau *Wholesale Price Index(WPI).* Pada umumnya, akuntansi kepemerintahan negara-negara memperhatikan indeks digunakan lembaga-terkemuka seperti PBB, LK negara adi-daya ekonomi & akuntansi. Berbagai negara menggunakan bauran berberapa indeks.

Pada umumnya rerata berbagai komoditas tersebut tak mampu menggambarkan perubahan-harga tiap komoditas, sebagian rerata harga-umum dan perubahan harga-umum berstandar-deviasi besar , berkemungkinan lebih besar dari rerata-harga itu sendiri. Blair Fix, 2021, menyajikan artikel berjudul *The Truth About Inflation* , antara lain menyatakan berbagai hal sebagai berikut. Bagi Milton Friedman (1960), inflasi adalah fenomena moneter dimana APBN Belanja terlampau besar , pencetakan dan manajemen pasok uang-kartal sembarangan. Pada kenyataannya, terdapat divergensi tingkat-inflasi pada berbagai rumpun barang/jasa, misalnya harga pangan (tertentu) naik 10 %, harga mobil (tertentu) naik 30 % , harga-busana (tertentu) turun 5 %, sehingga Jonathan Nitzan (1990) menyebut inflasi adalah sebuah proses restrukturisasi perekonomian , restrukturisasi budaya dan restrukturisasi kekuasaan. Persamaan (*equation*) ciptaan para pakar seringkali bertaraf naif, dangkal , keliru bahkan menggelikan walau lulus uji korelasi. Sebagai misal, persamaan MV=PT karya Milton Friedman, dimana V adalah tingkat perputaran uang (velocity of money) dan T adalah indeks nilai-sejati semua transaksi, sehingga teori inflasi dapat dibuktikan, menimbulkan pertanyaan apakah benar pencetakan-uang semata adalah penyebab inflasi, .tanpa sebab lain(?) , misalnya peningkatan hasrat meninjam uang menyebabkan kebutuhan tambahan jumlah-uang beredar, kebangkrutan entitas produsen tertentu menyebabkan pasok barang/jasa tertentu menurun sementara perintaan konstan. Notasi P mewakili rerata tingkat harga adalah penyederhanaan menyedihkan sebagai sarana pemrediksi perilaku harga-umum. Penggunaan hampiran rerata juga amat naif, me-rata-rata harga apel naik dan harga jeruk turun , merata-rata jumlah tabungan perkapita dan banyak lagi yang lain, menghasilkan informasi menyesatkan. Penyimpangan/ Deviasi umumnya,devasi-baku (*standard deviation*) khususnya kurang mendapat tempat (dituduh disembunyikan) pada proses-analisis, termasuk fenomena menggelikan , dimana deviasi atau deviasi-baku lebih besar dari rerata. Joan Robinson menyatakan bahwa gagasan “rerata tingkat harga” adalah sarana-salah-ajar (miseducation) ditangan para ekonom; *central tendency* versi rerata-harga-umum konsumen atau pedagang besar (CPI atau WPI) nan-stabil tak mencerminkan harga-individual barang/jasa juga stabil. Pada dunia-nyata, perubahan harga amat-tak-seragam , sehingga info perubahan harga-umum mungkin tak layak-guna. Studi Jonathan Nitzan & Shimson Bichler, 1990 , menyimpulkan bahwa terdapat dampak-distribusional dari inflasi, bahwa unit bisnis besar ternyata di untungkan oleh inflasi ,bahwa kemampu-labaan bisnis-besar lebih tinggi dibanding unit-usaha yang lain , karena dalam posisi oligopoli , mereka lebih-cepat atau lebih-dahulu melakukan kebijakan-kenaikan-harga.

Studi Kasus Manajemen Laju-Inflasi di AS

Berlatar belakang guncangan pasok-permintaan era-pandemi, gangguan rantai-pasok , berbagai kebijakan stimulus-fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya, perubahan belanja konsumsi, partisipasi tenaga-kerja menurun dan ketidak-pastian bisnis masa depan.

Empat skenario masa-depan AS adalah (1) keseimbangan baru mengatasi disrupsi rantai-pasok dan perubahan permintaan akan barang/jasa (Blue Skies) , (2) perubahan/penyesuaian badan-usaha dan konsumen pada kondisi disrupsi rantai-pasok dan pasok-TK nan-konstan menghasilkan pemberesan tingkat-inflasi pada 3-4% menuju 2024 (Sun Showers), (3) inflasi naik ketingkat 8-9 % karena tuntutan kenaikan imbalan kerja serikat buruh , menekan belanja-konsumsi dan operasi-bisnis (Stormy Weather) , (4) disinflasi menuju 1 % sebagai dampak resolusi pemberesan-kemacetan rantai-pasok (Downdraft). Opsi teoretis strategi-terpilih AS pada situasi (1) Blue Skies adalah persiapan dini raih-peluang paska-pandemi, restrukturisasi utang-publik pada industri-keuangan , strategi merger-akuisisi untuk akselerasi pertumbuan ekonomi, (2) Sun Showers adalah mitigasi kenaikan biaya input , perbaikan kinerja , investasi untuk pertumbuhan ekonomi menggunakan suku-bunga sedang rendah untuk pelanjutan/pengembangan bisnis, (3) Stormy Weather adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dengan hampiran skala-keeknomomian dan alih-teknologi untuk strategi penghematan biaya, diversifikasi usaha, mitigasi risiko inflasi dengan strategi lindung-nilai. (4) Downdraft adalah kapitalisasi pengalaman-baru dan diferensiasi tawaran produk/jasa untuk meningkatkan permintaan, rasionalisasi pemasok dan mitra-usaha untuk meninkatkan efisiensi dan penghematan berlambar persepsi & ekspektasi pasa/pelanggan.

Bagaimana Dunia Akuntansi Menentukan Inflasi Luar-Biasa

Pertama, Indikator Inflasi-Luar-Biasa IFRS/IPSAS adalah

1. Penduduk memilih menyimpan kekayaan tidak dalam mata-uang domestik, memilih mata uang asing dan aset-nonmeneter.
2. Penduduk dalam bertransaksi , misalnya menetapkan harga jual barang/jasa, tidak menggunakan mata-uang-domestik, namun mata uang-asing ber nilai stabil.
3. Jual/beli secara kredit mempertimbangkan kehilangan-daya-beli (purchasing power) periode kredit, termasuk kredit jangka-pendek.
4. Suku bunga, imbalan kerja dan harga terhubung dengan suatu indeks-harga.
5. Tingkat inflasi kumulatif sepanjang 3 tahun mendekati/melebihi 100 %.

Kedua, US GAAP menggunakan Metode Dua Tahap untuk penetapan situasi ekonomi ber-inflasi-luar-biasa.

- Tahap 1. Lakukan analisis kuantitatif untuk menghitung tingkat inflasi kumulatif sepanjang 3 tahun dimuka LK , apakah melebihi 100 %. Pertimbangan khusus dilakukan apabila terdapat beberapa jenis indek-umum sebagai pengukur inflasi.
- Tahap 2. Bila hasil kalkulasi Tahap 1 kurang dari 100 %, gunakan pertimbangan sehat berdasar trend inflasi historis , kualitas statistik nasional dan berbagai faktor ekonomi lain.

BAB 5
KEBIJAKAN MAKRO PRUDENSIAL

BAB 5 KEBIJAKAN MAKRO PRUDENSIAL

5.1. Teori Ekonomi sebagai Hulu Teori Makro-Prudensial

Pertama, Kebijakan Ekonomi. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : (1)Kebijakan ekonomi mikro, adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut, (2)Kebijakan ekonomi meso, adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu, dan (3) Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang mencakupi semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat), sebuah kebijakan yang mempengaruhi kebijakan meso dan kebijakan mikro. Disamping 3 jenis kebijakan , yaitu makroprudensial, moneter dan fiskal, kebijakan makroekonomi dan kebijakan APBN harus terfokus pada penanggulangan-lapangan situasi gawat-darurat akibat Covid -19.

5.2. Model Makro Ekonomi.

Narayana Kocherlakota, 2010, membuat makalah berjudul *Modern Macroeconomic Models as Tools for Economic Policy* sebagai sebuah 2009 Annual Report Essay , menyatakan bahwa sejak tahun 1980 an , terpicu kritik Robert Lucas (1976), Model Makro Modern memiliki 5 fitur, yaitu batasan APBN bagi rumahtangga, batasan teknologi bagi unit-usaha dan batasan sumber-daya bangsa, dengan asumsi preferensi rumah tangga dan asumsi sasaran unit-usaha di masa-yang-akan-datang, termasuk guncangan yang dijumpai rumah-tangga & unit-usaha, sebagai dasar pemodelan ekonomi makro.

Sarana berbangsa-bernegara berupa kebijakan makroprudensial bertujuan meningkatkan daya-tahan sistem keuangan. Otoritas pengendali instrumen makroprudensial (bank sentral ,KeMenkeu, LPS, KSSK, dll) bertanggungjawab akan raihan/pemeliharaan stabilitas-keuangan dalam negeri.

Krisis ekonomi dan keuangan global memaksa tiap negara untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan mengkoordinasi kebijakan makroekonomi cq koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bangsa itu. Pada tataran teori ekonomi, kebijakan ekonomi makro mencakupi antara lain (1) kebijakan moneter , (2) kebijakan fiskal dan (3) kebijakan perdagangan LN , dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan terutama melalui operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan batas maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, perubahan tingkat suku bunga diskonto, jual-beli surat berharga SBI dan SBPU untuk pengendalian tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar. Kebijakan Fiskal bidang perpajakan bertujuan untuk mencapai target pendapatan APBN, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perdagangan luar negeri mencakupi kebijakan subsidi, akselerasi pertumbuhan industri tertentu , deregulasi peraturan ekspor, kebijakan tarif ekspor-impor, substitusi impor, harmonisasi dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, dan kebijakan industri.

Kinerja makro prudensial berpengaruh positif pada kinerja ekonomi makro. Menurut sumber IMF-FSB-BIS (2011,2016), kebijakan makroprudensial bertujuan mengendalikan risiko-sistemik , sehingga memberi sumbangan kepada pemeilharaan stabilitas makro ekonomi. Secara empiris ditemukan Codruta Boar, Leonardo Gambacorta, Giovanni Lombardo,Luiz Pereira da Silva, dalam artikel berjudul *What are the effects of macroprudential policies on macroeconomic performance?*, bahwa makin banyak penggunaan kebijakan makroprudensial, makin tinggi pertumbuhan PDB perkapita negara itu, makin tidak-berfluktuasi pertmbuhan PDB. Kebijakan makro-prudensial lebih efektif bagi negara berkembang perekonomian ketimbang negara bersistem keuangan maju dalam sistem perekonomian terbuka. Kebijakan tentang kewajiban kecukupan modal bank berpengaruh kepada stabilitas sistem keuangan, ditemukan studi empiris Alejandro Van der Ghote, 2019, yang dinyatakan dalam artikel nerjudul *Interactions between monetary and macroprudential policies.*

5.3. Makna Kebijakan Makroprudensial

Sumber Leksikon Bank Indonesia pada *situs istilahbank.blogspot.co.id,* menjelaskan bahwa kebijakan makroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang ditujukan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan kesehatan lembaga keuangan secara individual. Walaupun kebijakan moneter,kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial memiliki area yang saling tumpang tindih, kebijakan makroprudensial mempunyai tujuan dan peran tersendiri.
Tujuan kebijakan moneter adalah menstabilkan harga dari barang dan jasa dalam perekonomian. Sementara itu, tujuan dari kebijakan makroprudensial adalah untuk menjamin daya tahan sistem keuangan secara keseluruhan dalam rangka menjaga suplai jasa intermediasi keuangan kepada perekonomian secara keseluruhan. Untuk itu, kebijakan makroprudensial digunakan untuk mencegah terjadinya siklus boom-bust suplai kredit dan likuiditas yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Dengan peran menjaga stabilitas suplai intermediasi keuangan ini, kebijakan makroprudensial mempunyai peran yang menunjang tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan output.

Kebijakan makroprudensial lebih banyak diterapkan di bank sentral yang menganut sistem nilai tukar mengambang yang berpotensi membatasi efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan pertumbuhan kredit. Instrumen kebijakan tergantung jenis penyebab guncangan sistem keuangan negara tersebut, misalnya aliran modal asing , sehingga kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan kredit disebabkan aliran modal asing masuk dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan stabilitas suku bunga acuan BI.

5.4. Kebijakan Trilema

Kebijakan makroprudensial mempunyai fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan , dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan , serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Sarana berbangsa-bernegara berupa kebijakan makroprudensial bertujuan meningkatkan daya-tahan sistem keuangan. Kebijakan makro-prudensial nan-tepat dalam pilihan-kebijakan-trilema untuk mencapai stabilitas makro-ekonomi , secara empiris terbukti bahwa (1) perpaduan tepat antara kebijakan makro-prudensial & kebijakan moneter membantu memelihara stabilitas-ekonomi-makro, yaitu dengan kebijakan nilai tukar dan kebijakan manajemen-aliran-modal nan-tepat, (2) kebijakan makro-prudensial nan-tetap berpotensi membantu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Teori Trilema (teori tiga kubu nan-sulit di rekonsiliasi atau disenergi) dijelaskan Harold James, 2015 pada artikel berjudul *How to understand policy trilemmas*, antara lain sebagai berikut. Trilema pertama adalah trilema-makroekonomi-klasik yaitu mobilitas modal, , nilai tukar tetap dan otonomi moneter dalam situasi perdagangan bebas, mobilitas modal nir-batas, kebijakan berbagai negara akan nilai-tukar tetap, mengambang, terkendali, dan kebijakan moneter yang tak selalu indipenden. Trilema kedua adalah Trilema Stabilitas Keuangan berdimensi mobilitas modal, Nilai tukar tetap dan stabilitas keuangan. Perpaduan pergerakan global modal dengan sistem perbankan nan-lemah pada berbagai negara miskin /berkembang mencipta krisis keuangan internasional, perkembangan real-esate dan obligasi-sampah menyebabkan krisis keuangan AS dan menjalar keseluruh muka bumi. Jaminan-pemerintah untuk mempertahankan stabilitas-keuangan juga amat-berisiko ingkar-janji-pelunasan dan menyebabkan ledakan-instabilitas-keuangan negara tersebut.Trilema ketiga adalah Trilema Ekonomi Politik, berdimensi mobilitas-modal, demokrasi dan otonomi moneter yang sulit disinkronisasi. Kabinet pemenang pemilu diharapkan mampu membuat ramuan kebijakan yang mampu meramaikan pasar modal cq PMA/PMDN sambil menjaga stabilitas-nilai-tukar dan stabilitas-sektor-keuangan. Didalamnya termaktub masalah hubungan internasional berdimensi mobilitas modal, demokrasi domestik versus aturan internasional (misalnya benturan dalam dunia akuntansi; hukum positif domestik vs IFRS). Demokrasi dibutuhkan untuk (1) memikat PMA dan PMDN , (2) sebagai dasar triti / aliansi grup-negara sehaluan & sepaham-nilai.

5.5. Kerangka Kebijakan Makro Prudensial.

Dokumen BI berjudul Kebijakan Makro Prudensial antara lain menjelaskan bahwa Kerangka Kebijakan makroprudensial disusun dengan fokus stabilitas sistem keuangan diproksi oleh(1) identifikasi & mitigasi dini risiko sistemik , (2) ukuran/kriteria minimum keseimbangan / kualitas intermediasi keuangan, (3) sistem keuangan nan efektif & efisien, (4) akses ke sumber dana nir-hambatan. Terdapat 4 (empat) elemen utama dalam strategi operasional makroprudensial yaitu, (1) identifikasi sumber risiko sistemik; (2) sistem pen-sinyalan munculnya bahaya, fenomena/peristiwa gangguan/distorsi kepada sistem keuangan , deteksi tingkat kerentanan dan kerusakan sistem, derajat korelasi (kuat, sedang, lemah) antara fenomena/gangguan terhadap tingkat kesehatan (vs keterpurukan) sistem keuangan, (3) sistem tanggapan terhadap

bahaya, sistem penerapan/transmisi kebijakan makroprudensial gawat-darurat, sesuai (4) protokol manajemen krisis.

5.6.Tujuan Kebijakan Makro-Prudensial

Kebijakan makroprudensial bertujuan meningkatkan daya-tahan sistem keuangan yang mempunyai beberapa segmen, yaitu pasar spot valuta asing, pasar swap valuta-asing, pasar sekuner obligasi pemerintah, pasar-uang inter-bank nir-jamin, pasar ekuitas, dan segmen perbankan.

5.7.Instrumen Makro-Prudensial

Instrumen/sarana kebijakan makroprudensial adalah supervisi, regulasi dan komunikasi, antara lain kewajiban kecukupan modal dan likuiditas, *loan-to-value (LTV) caps* atau nisbah pinjaman vs agunan, laporan-stabilitas-keuangan terutama *stress-test* atau kecukupan-modal pada kondisi resesi atau semacamnya. Berbagai instrumen makro-prudensial untuk menghindari risiko sistemik adalah risiko gangguan jasa keuangan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya semua atau sebagian dari sistem keuangan yang mempunyai potensi dampak negatif terhadap perekonomian. Dengan demikian orientasi kebijakan makro-prudensial bukan pada keamanan dan kesehatan individual institusi keuangan satu-persatu (yang diatur dalam mikro-prudensial) , namun pada sistem keuangan secara menyeluruh (*system wide*). Namun terdapat tumpang-tindih antara kebijakan makro-prudensial dan mikro-prudensial. Berdasar Prinsip Pareto, kebijakan makroprudensial juga sering ditafsir sebagai kebijakan untuk meng-address entitas bank tertentu berciri *systematically important financial institutions t*ertentu yang bersifat strategis , misalnya menampung tabungan masyarakat dan menyalurkan kredit UKM terbesar pada negara itu (*"too big too fail"*). Instrumen yang digunakan dalam kebijakan makroprudensial dalam setiap negara berbeda-beda.

Berbagai jenis instrumen makro-prudensial ..

Instrumen Kebijakan Makroprudensial bank sentral adalah *Countercyclical Buffer* (CCB), nisbah *Loan To Value* atau nisbah *Financing To Value*, Nisbah Intermediasi Makroprudensial, Penyangga Likuiditas Makroprudensial, Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP).

5.7.1. Countercyclical Buffer .

CCB adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) atau bantalan-peredam-kejut untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan adalah cenderung meningkat saat periode ekonomi tumbuh/ekspansi (*boom*) dan melambat pada periode ekonomi kontraksi (*burst*).Tambahan modal yang wajib dibentuk bank pada periode ekspansi dapat digunakan ketika bank menghadapi tekanan saat ekonomi

sedang kontraksi, sehingga keberlanjutan fungsi intermediasi bank diharapkan tetap dapat terjaga.

5.7.2. **Rasio Loan to Value atau Financing to Value** .

LTV atau FTV adalah nisbah antara nilai kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan, berupa properti pada saat pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. Salah satu risiko yang dihadapi di sistem keuangan adalah peningkatan harga aset properti. Salah satu tujuan dari kebijakan LTV atau FTV adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko sistemik yang berasal dari peningkatan harga properti.Instrumen kebijakan Makroprudensial ini bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.

5.7.3. Rasio Intermediasi Makroprudensial.

RIM merupakan instrumen makroprudensial yang ditujukan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Instrumen kebijakan Makroprudensial ini bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.

5.7.4. **Penyangga Likuiditas Makroprudensial** .

PLM merupakan cadangan likuiditas minimum entitas bank tertentu dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam Rupiah.

5.7.5. **Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek** .

PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.

5.8. Perkembangan Kebijakan Makro Prudensial Dunia

Perkembangan makro-prudensial pada era pandemi adalah sebagai berikut.

- Kebijakan relaksasi modal industri perbankan.
- Kebijakan penundaan pembayaran kembali kredit dan relaksasi likuiditas.
- Kebijakan relaksasi keuangan temporer dilakukan berbagai negara untuk me-mitigasi cidera-ekonomi oleh pandemi. Walau berisiko membahayakan deposan, industri perbankan diizinkan menanggung rugi lebih besar dan mendukung kebutuhan masyarakat akan dana kredit,
- Kebijakan modifikasi perjanjian-kredit bagi para debitur terluka-bisnis
- Kebijakan percepatan aliran bantuan untuk kebutuhan darurat rumah-tangga, bisnis dan likuiditas pasar kala pandemi.

- Kebijakan relaksasi kebutuhan modal minimum bank melalui manajemen CcyB *(countercyclical capital buffer)* sejalan aturan Basel III, pada era pandemi.
- Karena pandemi, Otoritas Moneter Kanada menurunkan bantalan-stabilitas-domestik (*domestic stability buffer*) sejalan CcyB.
- Karena situasi pandemi, berbagai otoritas perbankan membuat panduan untuk bank beroperasi di bawah bantalan-pengaman-operasional (*operational buffer*).
- Pada era pandemi, ECB (*The European Central Bank*) mengawasi secara khusus bank-bank yang beroperasi lebih-rendah dari Pilar II.
- Otoritas perbankan AS mendorong penggunaan bantalan-pengaman pada masa-masa-pandemi.
- Pada masa pandemi, bank sentral AS-The Fed - mengizinkan bank-bank grup-usaha untuk sementara mengeluarkan cadangan dan sekuritas perbendaharaan dari perhitungan *total-assets* dalam penentuan nisbah-utang suplementer.
- Pada era-pandemi, negara Inggris , Swedia, Norwegia dll mendorong penggunaan bantalan-pengaman-bank terkait ECL dan bantuan-kredit gawat-darurat , bank diharapkan mengurangi rencana beli-kembali saham-beredar, mengurangi rencana dividen dan bonus SDM untuk meningkatkan daya-serap akan kerugian masa-depan.
- Pada era pandemi, dibentuk kebijakan relaksasi kredit bermasalah, perubahan kriteria kredit- bermasalah-kala-normal menjadi kriteria-kredit-bermasalah-kala-pandemi , perluasan jenis agunan dan relaksasi nisbah agunan vs kredit.
- Karena nasabah menyusut era-pandemi, maka dibuatlak kebijakan perluasan jenis anggota masyarakat layak fasilitas kredit (*new proper-fit criteria*).
- Era pandemi mendorong peningkatan kerjasama. Berbagai negara mendorong bank dan lembaga-keuangan-lain untuk bekerjasama dengan peminjam dalam melewati masa-krisis.
- Berbagai otoritas perbankan memberi panduan relaksasi pengembalian kredit , agar bank tak serta merta menurunkan peringkat kredit & debitur karena kondisi-pandemi menyebabkan pemeringkatan masa-normal menjadi tidak masuk akal.
- Bank sentral Inggris meminta agar mempertimbangkan berbagai bantuan-pemerintah , antara lain relaksasi pembayaran kembali, perpajakan dll dalam menghitung ECL.
- Bank Sentral Eropa-ECB- mempelajari untuk memperlebar berbagai kiat-fleksibilitas klasifikasi-debitur yang tak mungkin memenuhi kewajiban karena pandemi.
- Terjadi relaksasi bantalan-likuiditas (*liquidity buffer*) pada tataran strategi menggunakan bantalan likuiditas (*liquidity buffer*). Otoritas moneter berbagai negara menyadari bahwa kalau semua bank menggunakan pola manajemen likuiditas kala-normal, maka akan terjadi kelangkaan/kelaparan likuiditas pada sistem keuangan bangsa itu.

  Berbagai otoritas perbankan merelaksasi persyaratan likuiditas bank berbasis kebijakan mikroprudensial, yang berada di bawah *nisbah-liputan-likuiditas* versi Basel III (*below Basel III liquidity coverage ratios* atau *LCR*s)) yaitu nisbah aset-likuid-berkualitas-tinggi banding kewajiban-jangka-pendek, agar masing masing bank tersebut mampu menjaga likuiditas minimum masing-masing.

ECB sebagai otoritas perbankan Eropa memberi panduan penggunaan LCR kala-stress, menghindari kebijakan berdampak fragmentasi pasar pendanaan, bank diizinkan beroperasi-temporer di bawah LCR.

Bank Swedia lalu memperluas pemberlakuan tersebut bagi berbagai mata-uang , secara individual dan/atau gabungan.

The Fed mendukung upaya penggunaan bantalan-likuiditas bertatacara nan-baik.

Bank Sentral Afsel menurunkan LCR ke 80 % dari 100%. Sebagian besar otoritas perbankan tak menggariskan berapa banyak bank boleh menggunakan bantalan-lukuiditasnya.

Beberapa bank sentral merelaksasi batas LCR valas.

Sebagian besar bank sentral tak mengatur besar tarikan, kecuali Bank Sentral Korea yang menurunkan *foreign exchange LCR* dari 80% menjadi 70%.

- Kebijakan perubahan (relaksasi) cadangan lembaga simpanan. Berbagai bank sentral menurunkan persyaratan cadangan bagi lembaga keuangan simpanan (*custodian financial entity*). Pada tataran teori, pengaturan cadangan tersebut tergolong kebijakan moneter, pada masa krisis digunakan sebagai penyokong likuiditas dan kemampuan-memberi-kredit tergolong kebijakan-manajemen-bank-nan-sehat-kala-krisis.

  The Federal Reserve menurunkan syarat-cadangan sampai nihil, agar bank lebih mampu menolong sektor bisnis dan sektor rumah tangga.

  The Reserve Bank of India menurunkan nisbah cadangan kas dari 4 % menjadi 3 % untuk memberi kelegaan-likuiditas perbankan selama satu tahun ke depan.

  Bank sentral Malaysia dan Iceland menurunkan persyaratan-cadangan untuk menjaga likuiditas domestik.
- Undang-Undang Peduli versi AS mengizinkan para debitur rumah-tangga mengajukan pelonggaran hipotik-berjamin-pemerintah, bank sentral Filipina menaikkan batas pinjaman-perorangan, regulator keuangan Swedia me-relaksasi aturan-makroprudensial tentang *high-loan-to-value borrowers* untuk meng-amortisasi pinjaman hipotik.
- Berbagai otoritas perbankan berupaya membebaskan berbagai biaya-kepatuhan *(compliance cost)* , agar industri perbankan dapat memfokuskan diri pada optimalisasi-penggunaan sumber-daya terbatas dan pemberesan-debitur-bermasalah , adalah sebuah jenis kebijakan makro-prudensial.
- *The Bank of England* and ECB menunda penerapan uji-stress 2020.
- Komite Bassel menunda penerapan Basel III agar bank mampu mengatasi masalah operasionalnya kala-pandemi.

  Otoritas Perbankan Kanada menunda konsultasi masalah regulasi sampai kondisi stabil.
- The Fed menghapus berbagai aktivitas pengujian / pemeriksaan bank dan melonggarkan batas waktu pelaporan wajib industri perbankan.
- Regulator perbankan AS - the Fed - mengizinkan entitas bank menunda implementasi SAK Internasional terkait *current expected credit losses (ECL)*.

5.9.Kebijakan Makro-Prudensial Indonesia

Disamping kebijakan moneter terfokus pada pemulihan ekonomi, terdapat empat kebijakan pro-pertumbuhan tahun 2022 terfokus pada kebijakan makro prudensial, digitalisasi perekonomian, dan pengembangan UMKM.Pada intinya, implementasi instrumen kebijakan makroprudensial di Indonesia adalah dengan menggunakan (a) Perubahan *Reserve Requirement* digunakan sebagai tujuan untuk membatasi pertumbuhan kredit, mengelola likuiditas, dan sebagai komplemen bagi kebijakan moneter untuk mencapai tujuan makroprudensial , (b) Pembatasan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko, khususnya terkait dengan resiko kredit dan likuiditas. Kebijakan moneter umumnya, kebijakan makro prudensial khususnya bertema pro-pertumbuhan-ekonomi , sehingga kebijakan fiskal PPN properti diharapkan dilanjutkan pemerintah. Pada tahun 2021 disimpulkan bahwa kebijakan makro-prudensial longgar 2021 akan dipertahankan pada 2022 untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas.

Sumber BI berjudul **Instrumen Kebijakan Makroprudensial** menyatakan antara lain bahwa kebijakan makroprudensial mencakupi tambahan modal penyangga, nisbah kredit banding pembiayaan,nisbah intermediasi makroprudensial, Penyangga Likuiditas Makroprudensial, dan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP). Countercyclical Capital Buffer (CCyB) adalah tambahan modal lembaga keuangan berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) risiko kerugian karena pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan.Perilaku prosiklikas adalah cenderung optimisme dan eforia untuk memberi-kredit karena kondisi ekonomi berkembang (*boom*) , gairah memberi kredit melesu pada kondisi ekonomi kontraksi (*bust*). Kebijakan berpola meningkatkan besaran CCyB pada saat ekonomi berkembangi, kebijakan menurunkan besar CCyB pada saat ekonomi melesu , seirama kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan nisbah nilai kredit vs nilai agunan tersesuai perkembangan ekonomi cq perubahan harga umum agunan bertujuan melindungi kredit industri perbankan dilengkapi kebijakan nisbah intermediasi berbasis prinsip prudensial dan kebijakan penyangga likuiditas dengan kewajiban lukiditas minimum, dan kebijakan fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek bank entitas bank yang menghadapi masalah likuiditas dan syarat GWM.

5.10.Aturan Emas Kebijakan Makro-Prudensial

Aturan emas makro-prudensial adalah (1) bahwa secara keseluruhan lembaga- jasa-keuangan selalu sadar akan posisi dan sumbangannya kepada kesehatan sistem keuangan , (2) bahwa industri-jasa-keuangan terutama industri perbankan harus dipastikan menggunakan pola manajemen lembaga keuangan nan-prudent untuk menjauhi risiko-sistematis , antara lain namun terutama risiko kecukupan modal dan likuiditas.

5.11.Teori Perbedaan

- ✓ **Pertama**, Teori Perbedaan Tujuan & Instrumen Kebijakan Moneter dan Kebijakan Makroprudensial. Lars E.O. Svensson , 2015, mengunggah artikel berjudul Monetary *Policy and Macroprudential Policy: Different and Separate*, antara lain menyatakan sebagai berikut. Kebijakan fiskal berpengaruh pada inflasi dan lapangan-kerja, yang digunakan dalam pilihan kebijakan moneter. Kebijakan moneter berpengaruh kepada APBN pendapatan dan belanja, sehingga dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan fiskal.Kebijakan moneter berbentuk penargetan nan-luwes terhadap inflasi bersasaran ganda, yaitu stabilitas harga dan stabilitas-sejati , yaitu upaya stabilisasi-inflasi disekitar target-inflasi dan pendayagunaan sumber-daya ekonomi disekitar tarif-jangka-panjang-berkesinambungan. Dua sasaran moneter the Fed adalah stabilitas harga dan pemerkerjaan penuh, yaitu stabilisasi inflasi disekitar target-inflasi the Fed dan pemerkerjaan (employment) pada tingkat-berkesinambungan-jangka-panjang. Instrumen kebijakan moneter kala-normal adalah kebijakan-tarif-bunga dan kebijakan komunikasi/informasi publik seperti ramalan inflasi dan ramalan pengangguran dimana sistem keuangan nan-tangguh & cepat-pulih dari distorsi apapun (*resilience*) , mampu memenuhi tiga fungsi utama sistem keuangan bangsa , yaitu transformasi tabungan menjadi pembiayaan, manajemen risiko nan-baik, dan tranmisi pembayaran. Instrumen makroprudensial adalah supervisi, regulasi dan komunikasi, antara lain kewajiban kecukupan modal dan likuiditas, *loan-to-value (LTV) caps* atau nisbah pinjaman vs agunan, laporan-stabilitas-keuangan terutama *stress-test* atau kecukupan-modal pada kondisi resesi atau semacamnya , bagi Lembaga Keuangan.

- ✓ **Kedua**, Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Makroprudensial. Bank sentral adalah otoritas kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial , sehingga dua rumpun kebijakan itu seharusnya dirancang harmonis dan saling mendukung . Pertama, kebijakan moneter berbentuk penargetan nan-luwes terhadap inflasi bersasaran ganda, yaitu stabilitas harga dan stabilitas-sejati , yaitu upaya stabilisasi-inflasi disekitar target-inflasi dan pendayagunaan sumber-daya ekonomi disekitar tarif-jangka-panjang-berkesinambungan. Sebagai contoh, dua sasaran the Fed atau bank sentral AS adalah stabilitas harga dan pemerkerjaan penuh, yaitu stabilisasi inflasi disekitar target-inflasi the Fed dan pemerkerjaan pada tingkat-berkesinambungan-jangka-panjang. Instrumen kebijakan moneter kala-normal adalah kebijakan-tarif-bunga dan kebijakan komunikasi/informasi publik seperti ramalan inflasi dan ramalan pengangguran. Instrumen kebijakan moneter kala-krisis adalah kebijakan-neraca, seperti kebijakan beli-aset (untuk relaksasi kuantitatif), pembekuan biaya bunga-pinjaman jangka-panjang, intervensi nilai-tukar dan penetapan *exchange rate floor* atau batas-bawah nilai-tukar ditentukan otoritas nilai tukar , yaitu pemerintah & bank sentral. Kedua, tujuan kebijakan makro-prudensial adalah stabilitas keuangan dimana sistem keuangan nan-tangguh & cepat-pulih dari distorsi apapun (*resilience*) , mampu memenuhi tiga fungsi utama sistem keuangan bangsa , yaitu transformasi tabungan menjadi pembiayaan, manajemen risiko nan-baik, dan tranmisi pembayaran. Instrumen makroprudensial adalah supervisi, regulasi dan komunikasi, antara lain kewajiban kecukupan modal dan likuiditas, *loan-to-*

value (LTV) caps atau nisbah pinjaman vs agunan, laporan-stabilitas-keuangan terutama *stress-test* atau kecukupan-modal pada kondisi resesi atau semacamnya , bagi Lembaga Keuangan. Ketiga, Otoritas pengendali instrumen makroprudensial lebih banyak dibanding otoritas kebijakan moneter , yaitu bank sentral, Menkeu, LPS, KSSK, dll yang bertanggungjawab akan raihan/pemeliharaan stabilitas-keuangan dalam negeri.

5.12.Teori Hubungan Antar Kebijakan

5.12.1.Teori Hubungan Kebijakan Makro-Prudensial dengan Kebijakan Fiskal dan Moneter.

Linda Seprillina, Ghozali Maskie, Moh. Khusaini, 2016, pada majalah *International Journal of Social and Local Economic Governance*, mengunggah artikel berjudul *Analisis Respon Kebijakan Moneter dan Kebijakan Makroprudensial dalam Mekanisme Transmisi Jalur Kredit di Indonesia*, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut. **Pertama**, Krisis ekonomi dan keuangan global memaksa tiap negara untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan mengkoordinasi kebijakan makroekonomi cq koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bangsa itu. **Kedua**, Kebijakan fiskal bertujuan agar APBN terkelola dengan baik, kebijakan moneter bertujuan agar inflasi terkendali , pertumbuhan ekonomi dan kekuatan mata-uang terjaga. **Ketiga**, Kebijakan moneter bersyarat sistem keuangan nan-stabil. Mekanisme transmisi kebijakan moneter terkait pada pengelolaan sektor-keuangan umumnya, pasar keuangan khususnya, lebih-khusus lagi adalah lembaga-keuangan, lebih khusus lagi adalah pilihan (1) tarif bunga bank sentral, (2) rumpun sektor riil yang digunakan, misalnya UKM, (3) jenis kredit perbankan yang di dorong, misalnya kredit UKM nir-agun, (4) pilihan strategi/sarana pengendalian transmisi ini, agar berdampak baik. **Keempat**, Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan bertujuan menstabilkan sektor keuangan dengan cara meminimalkan risiko internal sistem keuangan secara keseluruhan dan memitigasi kecenderungan perilaku *procyclical* pelaku bisnis, antara lain peningkatan gairah memberi kredit pada saat ekonomi naik-daun, yang menyebabkan fluktuasi perekonomian yang berlebihan. Kebijakan makroprudensial mempunyai tujuna agar fungsi intermediasi menjadi seimbang bagi sektor perekonomian, meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan , dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan , serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Instrumen kebijakan makroprudensial setiap negara berbeda-beda.

Sumber BI berjudul *Mengupas Kebijakan Makro Prudensial* antara lain menyatakan bahwa sebagai bagian tugas dari bank sentral, adalah wajar jika kebijakan makroprudensial harus beradaptasi dan menghormati kebijakan lain. Kebijakan makroprudensial bertujuan membatasi risiko sistemik untuk menjaga stabilitas keuangan. Stabilitas moneter tidak akan tercapai tanpa adanya stabilitas keuangan. Demikian pula sebaliknya, karena transmisi kebijakan moneter berlangsung melalui sistem keuangan, serta perilaku institusi/agen keuangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Keunikan dari kebijakan makroprudensial adalah kemampuan dalam memberikan

dampak kepada target agen keuangan tertentu, misalnya, kebijakan makroprudensial dapat ditujukan kepada lembaga keuangan berperilaku spekulatif dalam investasi di bidang properti, melalui kebijakan nisbah pinjaman banding agunan (nisbah LTV), kebijakan yang mempersyaratkan kenaikan uang muka untuk kredit pembelian rumah kedua dan seterusnya. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh kebijakan moneter, di mana pada saat ditetapkan, berlaku bagi semua lembaga keuangan. Kebijakan makro-prudensial dirancang untuk melengkapi kebijakan makro-ekonomi termasuk moneter dan fiskal, serta kebijakan mikroprudensial. Kekuatan dari kebijakan makroprudensial adalah kemampuan menjaga keseimbangan antara pendekatan makroekonomi yang cenderung hanya melihat kondisi perekonomian secara agregat dan pendekatan mikroprudensial yang cenderung hanya memastikan individu institusi keuangan sehat. Interaksi antara kebijakan makroprudensial dengan kebijakan mikroprudensial lebih mudah diobservasi, karena pada dasarnya kebijakan makroprudensial diimplementasikan dengan menggunakan instrumen mikroprudensial, namun diberlakukan dengan tujuan yang berbeda dari tujuan mikroprudensial. Kebijakan makroprudensial cenderung fokus pada institusi keuangan yang memiliki dampak sistemik (misalnya bank sistemik atau *systemically important bank*), dengan mengimplementasikan aturan-aturan yang ketat untuk menjaga keberlangsungan institusi keuangan tersebut, sehingga tidak menimbulkan risiko sistemik.

Bank sentral melakukan berbagai sinkronisasi kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter searah dan saling menguatkan. Pada saat perekonomian melaju terlalu cepat misalnya, kedua kebijakan tersebut menahan laju pertumbuhan kredit perbankan; kebijakan moneter dengan cara meningkatkan suku bunga acuan, dan kebijakan makroprudensial dengan cara meningkatkan persyaratan permodalan bank pada saat ekonomi sedang berkembang, menyebabkan biaya dana meningkat , menurunkan ketersediaan dana untuk kredit, kebijakan kenaikan suku bunga kredit menambah biaya pelunasan kredit (*repayment*), sehingga akan mengurangi permintaan akan kredit.

Bank sentral menyikapi secara bijak berbagai kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial berlawanan dampak. Misalnya, dalam pada kontraksi-ekonomi , kebijakan moneter menurunkkan suku-bunga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian , menyebabkan kenaikan permintaan akan properti dan meningkatkan harga properti. Kondisi tersebut diatasi dengan kebijakan makroprudensial berupa kebijakan LTV lebih ketat cq penaikan uang-muka pembelian properti untuk menekan permintaan agregat terhadap properti. Contoh lain adalah kebijakan pengetatan moneter untuk mengurangi tekanan pada nilai tukar Rupiah berpotensi mencipta tekanan likuiditas pada perbankan.

5.12.2. Hubungan Kebijakan Makro Prudensial dan Kebijakan Fiskal.

Tujuan kebijakan fiskal adalah mendorong permintaan agregat dan menyediakan bantalan-penahan fiskal, menggunakan sarana khusus seperti *tax and discretionary countercyclical measures.* Kebijakan makroprudensial pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Secara spesifik, kebijakan ini digunakan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik, mengurangi dampak risiko sistemik, dan memperkuat daya tahan sistem keuangan dari krisis.

Menurut IMF, FSB, dan BIS; risiko sistemik adalah risiko gangguan jasa keuangan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya semua/sebagian dari sistem keuangan , yang mempunyai potensi dampak negatif terhadap perekonomian.
Dengan demikian orientasi kebijakan makro-prudensial bank-sentral bukan pada keamanan dan kesehatan individual lembaga jasa keuangan, namun pada sistem keuangan secara menyeluruh (*system wide*).
Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi dan membina setiap lembaga-keuangan, pada tataran mikro-prudensial.

5.12.3. Hubungan Kebijakan Makro Prudensial dan Mikro Prudensial.

Sumber BI berjudul *Mengupas Kebijakan Makroprudensial* yang diterbitkan *Departemen Kebijakan Makroprudensial BI* antara lain menyatakan bahwa bila kebijakan *mikroprudensial* difokuskan pada tingkat kesehatan individu institusi keuangan (bank dan nonbank) dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, maka kebijakan *makroprudensial* lebih berorientasi pada sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, fokus kebijakan makroprudensial tak hanya mencakup institusi keuangan, namun meliputi pula elemen sistem keuangan lainnya, seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan.

Hubungan Kebijakan Makro Prudensial bank sentral dan Kebijakan Mikro Prudensial otoritas-jasa-keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, orientasi kebijakan makro-prudensial bukan pada keamanan dan kesehatan individual institusi / lembaga keuangan, namun pada sistem keuangan secara menyeluruh (system wide) , sedang kebijakan mikro-prudensial OJK bertujuan agar setiap lembaga-keuangan , satu persatu, berada dalam kondisi sehat. Kedua, Otoritas makro-prudensial dan otoritas mikro-prudensial mengawasi bank dan LKBB sistemik. Kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga keuangan strategis terkait teori domino yang diawali oleh kejatuhan entitas bank tertentu atau *systematically important financial institutions t*ertentu yang dianggap *"too big and too important too fail"* . Dokumen BI berjudul Kebijakan Makro Prudensial antara lain mengungkapkan bahwa lembaga internasional FSB memerangi risiko bank sistemik dengan berbagai kebijakan, antara lain dengan kewajiban setiap bank sentral membuat daftar penetapan lembaga keuangan sistemik, kebijakan khusus persyaratan modal khusus bagi bank sistemik, panduan resolusi berbagai masalah keuangan bank sistemik, penguatan infrastruktur pasar keuangan dari gangguan kesehatan bank sistemik , pengawasan khusus manajemen risiko bank sistemik, pemantauan kondisi bank-sistemik , membangun kesepakatan internasional (lintas bangsa) untuk menghalangi dampak limpahan (*spill over*) atau penularan.

5.12.4. Hubungan Kebijakan Makro-Prudensial dengan Kebijakan Lain.

Kebijakan makroprudensial adalah sebuah perlengkapan penting bagi berbagai aksi fiskal, moneter, dan krisis likuiditas masa pandemi untuk mencegah kerusakan-perekonomian negara itu, yang sama-sekali berbeda dengan strategi & tatacara penanganan krisis-keuangan-global. Pandemi mengajarkan bahwa tiap-negara harus selalu waspada dan sadar pentingnya pembangunan bantalan-pengaman tatkala

perekonomian negara itu sedang bagus, agar dapat menggunakannya tatkala terjadi kontraksi ekonomi.

Kebijakan makroprudensial bank Sentral (BS) berhadapan dengan kekuatan politik cq DPR dan kekuatan pelaku industri jasa-keuangan , sehingga BS merasa perlu membentuk Komite Kebijakan Makro Prudensial yang bijak dan secara profesional mampu menjelaskan alasan pilihan kebijakan. Sebagai contoh, pada tataran moneter dan makro-prudensial, bank sentral Eropa ECB memutuskan kebijakan dukungan moneter melalui tambahan pembelian aset sebesar €120 Miliar sampai akhir 2020 , lelang tambahan temporer fasilitas-likuiditas ber tarif bunga tetap, peringanan beban bunga pinjaman-jangka-panjang untuk pembiayaan-kembali proyek-proyek tertentu jatuh-waktu mejadi berjangka-lebih-panjang, program pembelian-gawat-darurat-era-pandemi ((Pandemic Emergency Purchase Program atau PEPP),) berbagai sekuritas-berharga sektor-privat dan sektor-publik tertentu. ECB menerbitkan aturan pelonggaran aset-layak-beli dan relaksasi tolok-ukur jaminan/agunan kredit seperti pemotongan-agunan tak-berpasar-bebas bersifat permanen (*a permanent collateral haircut reduction of 20 percent for non-marketable assets*).

BAB 6

KEBIJAKAN EKONOMI MESO & MIKRO, DAN KEBIJAKAN MIKRO-PRUDENSIAL

BAB 6 KEBIJAKAN EKONOMI MIKRO DAN MESO, SERTA KEBIJAKAN MIKRO PRUDENSIAL

6.1.Ekonomi Mikro.

6.1.1.Teori Ekonomi Mikro

- ✓ **Pertama, tentang Definisi dan Kedudukan Ilmu Ekonomi-Mikro.**

  Sumber Wikipedia berjudul *Microeconomics* menjelaskan antara-lain sebagai berikut. Mikro-ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas perilaku pengalokasian SD-ekonomi nan-langka oleh individu dan perusahaan , pada pasar-tertentu, sektor-tertentu, industri tertentu , meng-analisis mekanisme-pasar pembentuk-harga barang/jasa , meng-analisis kegagalan-pasar dalam mengalokasi SD secara paling-efisien.

- ✓ **Kedua, tentang Ruang Lingkup Ekonomi-Mikro.**

  Sumber http://www.maxmonroe.com, 2020 , menyatakan bahwa ruang lingkup ekonomi-mikro mencakupi teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar, teori elastisitas permintaan dan elastisitas penawaranm teori perilaku konsumen, teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba, teori pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, teori permintaan akan input, teori mekanisme harga dan distribusi pendapatan.

- ✓ **Ketiga, tentang Konsep Dasar Ekonomi-Mikro.**

  Pada situs Satu Jam, Sofyan Hadi, 2015, menjelaskan dalam artikel *Pengertian Ekonomi Mikro Beserta Analisa dan Komponen yang Ada Didalamnya* bahwa k**onsep dasar ekonomi mikro mencakupi konsep elastisitas (**kepekaan konsumen/pasar terhadap perubahan suatu variabel pasar, seperti: jumlah barang tersedia, harga), konsep s**urplus konsumsi (**selisih harga, antara harga barang vs harga kesediaan konsumen membayar, konsep **surplus produsen (**selisih harga barang/jasa, antara harga barang produsen dengan harga barang di pasar bebas), konsep permintaan agregat , konsep persaingan dan konsep efisiensi.

- ✓ **Keempat, tentang Analisis Ekonomi-Mikro**.

  Analisis ekonomi-mikro antara lain berbentuk analisis biaya dan manfaat, permintaan dan penawaran, elastisitas harga/permintaan, analisis sesuai model-model pasar, analisis industri, analisis berbasis teori produksi dan teori harga.

- ✓ **Kelima, tentang Komponen Ekonomi-Mikro.**

  Komponen Ekonomi Mikro dalam bisnis mencakupi interaksi di pasar barang/jasa, tingkah laku penjual dan pembeli, interaksi konsumen dan produsen yang melibatkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan kewirausahaan.

- ✓ **Keenam, tentang Faktor Ekonomi-Mikro.**

  Vinish Parikh, 2017, dalam artikel berjudul *Micro Economic Factors* menjelaskan bahwa faktor ekonomi mikro adalah pelanggan, karyawan, investor, pesaing, pemasok, dan publik.

- ✓ **Ketujuh , tentang Tujuan Ilmu Ekonomi-Mikro**.

  Sumber Wikipedia menyajikan rtikel berjudul *Economic efficiency* menjelaskan bahwa tujuan ilmu ekonomi-mikro adalah mencapai/meningkatkan efisiensi-ekonomi sampai tingkat optimal, dimana peningkatkan selanjutnya akan berdampak-negatif kepada aspek-ekonomi yang lain, tak mungkin lagi meningkatkan output barang/jasa tertentu tanpa menurunkan output barang/jasa tertentu yang lain.

  - Efisiensi ekonomi-mikro dicapai dengan meningkatkan/mengurangi campur-tangan pemerintah kedalam mekanisme pasar-besar.
  - Efisiensi alokatif sebuah pasar terjadi bila harga suatu produk/jasa seimbang dengan nilai-marginal (*marginal value*) konsumen pada barang/jasa tersebut dan seimbang dengan tambahan-biaya akibat tambahan-satu-unit-output (*marginal cost*) , dimana sebuah tambahan output barang/jasa menghasilkan maslahat-tambahan (*marginal benefit*) lebih kecil dibanding tambahan-biaya memproduksi satu unit tambahan tersebut (*marginal cost*). SD produktif adalah langka, sehingga harus dialokasikan kepada berbagai jenis industri barang/jasa dalam jumlah yang tepat , agar hasil tak terlampau banyak atau terlampau sedikit, mencapai kondisi tambahan-biaya untuk tambahan satu unit produksi atau *marginal cost* sama dengan rerata-pendapatan atau *average revenue* dalam ekuilibrium jangka-panjang dan pasar ber-persaingan-sempurna.
  - Reformasi ekonomi-mikro adalah penerapan kebijakan bertujuan mereduksi distorsi-ekonomi melalui deregulasi , yang bertujuan agar secara alamiah bergerak meningkatkan efisiensi ekonomi.
  - Teori Terbaik Kedua (*theory of second best*) adalah memahami kenyataan bahwa distorsi-pasar suatu-sektor tak mungkin di hindari bangsa, bahwa pengurangan distorsi pada sektor lain sesungguhnya menurunkan efisiensi. Efisiensi ekonomi bersifat efisiensi alokasian, efisiensi distribusian, efisiensi bersifat dinamis, efisiensi-informasi terkait efisiensi pasar-uang, efisiensi versi Kaldor-Hicks (belarasa terhadap pihak-dirugikan kebijakan, terkait *game-theory* & *Pareto Principles*), efisiensi operasional, efisiensi produktif, efisiensi berbasis

prinsip Pareto (prinsip bagian nan-dominan) , optimasi fungsi kesejahteraan-sosial, pemaksimuman nilau guna (*utility maximization*) dan inefisiensi-X (*nisbah input/ouput*).

- ✓ **Kedelapan, tentang Ekonomi Manajerial.**

Ekonomi Manajerial adalah Ilmu Ekonomi-Mikro Terapan untuk keperluan pengambilan keputusan sebuah organisasi negara, pemerintah daerah, badan usaha (komersial) dan badan lain (termasuk nirlaba) yang melebur/amalgamasi teori ekonomi dan teori pengambilan keputusan dalam perencanaan organisasi dan pemecahan masalah organisasi menggunakan berbagai sarana seperti kalkulus, statistik , berbagai model dan formula dalam berbagai optimasi ekonomi, menaksir risiko dan ketidak pastian untuk pengambilan keputusan, menaksir fungsi permintaan berbasis elastisitas harga, pendapatan dan biaya, manajemen produksi terkait skala-keekonomian, hukum pulangan menurun, biaya eksplisit & implisit, penggunaan kurva-belajar, time-series, regresi,dan ekstrapolasi biaya keseluruhan/rerata/perunit/marginal, yang bermuara pada berbagai hampiran/model penetapan harga-jual dan berbagai hampiran keputusan investasi dalam kaidah nilai-kini.

- ✓ **Kesembilan, Ilmu Ekonomi Kewilayahan *(Regional Economics).***

Ilmu ekonomi-meso dan ilmu ekonomi regional menggunakan ilmu-ekonomi mikro pada wilayah-geografis tertentu , antara lain menggunakan teori permintaan cq perilaku konsumen dan teori pasok cq industrialisasi dan sektor-andalan, perdagangan (termasuk kebijakan perdagangan keluar wilayah, kira kira setara kebijakan ekspor / impor untuk tingkat negara) , pasar tenaga-kerja wilayah, dan harga-harga umum wilayah tertentu sebagai dasar kebijakan fiskal (APBD dan kebijakan pajak daerah) wilayah.

6.1.2.Ilmu Ekonomi-Mikro dan Ekonomi-Makro.

Jon Danielson, 2015, menyajikan etikel berjudul *Macro vs microeconomic policy: is there a winner?*, menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Kebijakan ekonomi-makro dan kebijakan ekonomi-mikro bertujuan agar sistem-keuangan memberi pelayanan-optimal bagi perekonomian-dunia-nyata. Ekonomi-mikro termotivasi oleh kosumen dan perlindungan nasabah-bank , berupaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan nan-prudent sebagai sebuah sistem yang melayani kepentingan industri jasa-keuangan cq perbankan, debitur dan kreditur secara seimbang. Kebijakan ekonomi-mikro lebih penting daripada kebijakan ekonomi-makro bagai para pelaku ekonomi itu pada saat ekonomi-berkembang dan kondisi lingkungan sosial-ekonomi tenteram dan damai. Ekonomi-makro terfokus pada risiko-sistemik dan stabilitas sistem-keuangan secara keseluruhan , barulah terasa dibutuhkan oleh para pelaku-ekonomi pada saat krisis-ekonomi.

6.1.3.Teori Ekonomi Mikro untuk Era Pandemi

(1) **Pertama**, pemetaan bisnis era-pandemi. Tak ada perubahan faktor ekonomi-mikro kala normal menjadi kala-pandemi, yaitu pelanggan, karyawan, investor, pesaing, pemasok, dan publik. Tracey Welson-Rosman, 2021, menyajikan artikel berjudul *Changing Consumer Habits During The Pandemic Demand A Digital Shift* , diambil hikmahnya antara lain sebagai berikut. Berbagai usaha beralih ke basis maya dengan perubahan demografi pelanggan , lebih terfokus pada pembelanja berusia 65 tahun atau lebih. Perencanaan bisnis mencakupi pemetaan lingkungan teknologi cq piranti-maya yang biasa digunakan masyarakat , mencocokkan berbagai piranti tersebut dengan lini-bisnis , mengubah sistem tata-cara berbisnis (promosi, penjualan, layanan pengiriman, layanan langsung berbasis jaga-raka-sosial dan masker, penagihan dan sistem penerimaan pembayaran) yang praktis/sederhana bagi pelanggan , mengubah struktur organisasi, kualifikasi karyawan, PHK dan rekrutmen jenis SDM baru, pengujian sistem tatacara kerja baru atau perubahan sistem secara berkesinambungan, menanggapi perubahan permintaan pelanggan dan perubahan peta-pasar, mengubah jenis, bentuk, sifat produk/jasa secara terus menerus.

(2) **Kedua**, berbagai unit usaha tak layak beroperasi. Jia Wertz, 2020, menyajikan artikel berjudul *Consumer Spending And Demand Has Changed Due To The Pandemic* menjelaskan antara lain sebagai berikut. Para pebisnis menghadapi penurunan , perubahan dan pergeseran permintaan dan perilaku pelanggan. Pada segmen lapis pendapatan bawah, terjadi pengurangan belanja rekreasi, perjalanan jauh, perhelatan, mobil mewah, hotel dan restoran. Seluruh segmen pelanggan makin berorientasi pada pembelian aman, pembelian nilai (value purchases) , pasar barang bekas terlihat meningkat. Pasar jasa berubah karena terdapat pertambahan pasar jasa-maya dari pekerja-lepas tidak purna-waktu (gig worker) .

(3) **Ketiga**, terjadi pergeseran variabel ekonomi-mikro. Pada era-pandemi terjadi pergeseran/perubahan semua variabel ekonomi-mikro , antara lain (1) jumlah , jenis dan kualitas *ouput*, harga dan pendapatan, (2) jumlah, jenis, kualitas dan harga *input*, (3) perubahan cara proses beli/produksi/operasi , (4) perubahan BEP, perubahan MR dan MC , perubahan titik ekuilibrium , yang berbeda dengan situasi krisis-keuangan global.

6.1.4. Teori Daya Tahan Perusahaan.

Floriana Borino, Eric Carlson, Valentina Rollo, Olga Solleder , 2021, menyajikan makalah berjudul *International firms: More exposed but more resilient during Covid-19* , antara lain menyatakan bahwa korporasi-internasional lebih repot menghadapi pandemi karena melakukan kegiatan pembelian / penjualan dengan negara asing yang sebagian bersistem kesehatan sosial nan-buruk dan pada kondisi parah-terpapar virus, riset 4.433 korporasi dari 133 negara itu menyimpulkan bahwa berbagai korporasi tersebut membangun sistem tatacara kerja yang lebih baik dibanding perusahaan domestik masing-masing negara. Ditemukan bahwa perusahaan-internasional mempunyai kesulitan akses ke bahan baku lebih besar 13 % dibanding perusahaan-domestik, 63 % menghadapi kesulitan akses kepada input dibanding perusahaan-domestik mempunyai 50 % kemungkinan menghadapi kesulitan akses kepada iniput.

Perusahaan internasional berkemungkinan 6 % lebih tinggi dari perusahaan domestik dalam risiko-penurunan pendapatan, 83 % perusahaan internasional mengakami penurunan penjualan dibanding perusahaan-lokal berkembungkinan 77% mengalami penurunan penjualan. Terjadi penurunan layanan-logistik , angkutan laut dan udara terdampak lebih besar dibanding angkutan-darat. Tertengarai berbagai ketentuan sertifikasi layanan internasional makin sulit dipenuhi karena penutupan bandara/pelabuhan dan peraturan jaga-jarak-sosial. Ditemukan secara empiris bahwa berbagai perusahaan internasional membangun beberapa sistem pertahanan bisnis dengan mengubah portofolio impor cq negara pemasok input dan portofolio negara-tujuan ekspor, lokalisasi input dan lokasi produksi dengan strategi *reshoring/nearshoring* (pemindahan pabrik ke dalam-negeri dan ke negara-tetangga-yang-lebih-dekat misalnya pabrik perusahaan multinasional AS di RRC dipindah ke Meksiko), perolehan bahan baku dari sumber lain, penciptaan produk/jasa baru bertujuan mengurangi bahan-baku/input dari negara-lain, mengubah cara kerja, jam kerja dan mengurangi karyawan.

6.2.Teori Kebijakan Ekonomi-Mikro.

- ✓ Tujuan Kebijakan Ekonomi-Mikro adalah jenis kebijakan otoritas ekonomi-mikro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB.
- ✓ Enam Kebijakan Ekonomi Mikro adalah kebijakan perdagangan, PMA, nasionalisasi/privatisasi, persaingan usaha dan subsidi. Kebijakan perdagangan mencakupi berbagai Kebijakan Tarif, Kebijakan Kuota, Kebijakan Pembatasan/Restriksi, Kebijakan tarif Bea Masuk, Pajak Impor dan PNBP, Kebijakan Pajak Ekspor , dan berbagai kebijakan kurang lazim lain yang menjadi agenda kesepakatan GATT/WTO tentang tarif.
- ✓ Kebijakan PMA atau manajemen investasi modal-asing mencakupi seleksi bidang usaha yang tak-mampu dilakukan oleh SD domestik , investasi pro-pertumbuhan PDB & kesempatan kerja. Pembatasan atau (sebaliknya) mendorong investasi-asing-langsung (*Restriction or promotion of FDI*) berbentuk:

    a. Kebijakan restriksi PMA bertujuan perlindungan usaha domestik dari (1)kepemilikan asing atau (2)persaingan dengan PMA. Kebijakan mengundang PMA dengan kebijakan substitusi impor , mengundang eksportir sebagai PMA.
    b. Kebijakan anti FDI misalnya India & Meksiko.
    c. Strategi promosi PMA, mengundang PMA dgn kemudahan perizinan & pajak, Singapura, China, Kanada. Strategi memikat investor asing dengan penyediaan lahan industri & prasarana bagi PMA, dilakukan negara RRC.
    d. Kebijakan nasionalisasi dan kebijakan privatisasi sebagai kebijakan cermin (*Nationalization and privatization, mirror policy*).

- ✓ **Strategi nasionalisasi badan usaha adalah sebagai berikut.**

a. Negara sosialis gemar menasionalisasi PMA atau mengubah perusahaan privat menjadi perusahaan negara.
b. Nasionalisasi pada umumnya untuk industri strategis atau untuk kepentingan umum seperti air, gas, minyak, perusahaan listrik, KA, penerbangan, telekomunikasi , perbankan, untuk industri berat tertentu, misalnya industri baja, perkapalan, pesawat, dan mobil.
c. Terdapat kebijakan denasionalisasi apabila SD bangsa tak mampu, PMA diundang sebagai "guru", misalnya untuk membentuk PDAM modern.
d. Kebijakan deprivatisasi dilakukan apabila sebuah jenis industri tiba-tiba liar tak terkendali , misalnya dengan pembentukan BULOG.
e. Kebijakan nasionalisasi dan privatisasi adalah kebijakan cermin (*mirror policy*). Bila PN atau BUMN tak efektif-efisien, selalu merugi, mengalami pendarahan arus-kas , maka dilakukan kebijakan privatisasi dengan masuk-bursa atau jual-langsung.
f. Terdapat strategi pengendalian tanpa kepemilikan (*control don't own strategy*) dan pembangunan tidak berdasar belanja APBN antara lain berbentuk KPBU.
g. *Go public policy*, mengubah badan usaha milik-pemerintah menjadi badan usaha milik publik , dengan/tanpa *golden share* bagi pemerintah.
h. Strategi sedikit tapi sehat, antara lain aksi-lego atau *sell off policy* BUMN nonstrategis dan merugi.
i. Negara maju praktis berupaya agar 100% badan-usaha diprivatisasi, misalnya AS, England, Australia, Jepang, Italia, Kanada, Chili,dan Meksiko.
j. Unit Bisnis Strategis tetap dikendalikan negara, selebihnya di privatitasi, terjadi di Singapura, Perancis, Jerman, China, India, Rusia.
k. Terdapat berbagai negara kurang suka privatitasi , misalnya Saudi Arabia, Turki, Brazil. Kebijakan persaingan adalah sebagai berikut.
l. Bila sasaran adalah pertumbuhan ekonomi , maka negara harus memperbaiki national output, memperbaiki iklim persaingan, menghapus kartel dan monopoli, membuat UU antimonopoly.
m. Terdapat kebijakan untuk memperbaiki ekses atau dampak buruk dari monopoli alamiah, kebijakan memperbaiki moral hazard /eksternalitas negatif akibat persaingan bebas (kebijakan koreksional atau *tuning up policy*).
n. Terdapat pula Kebijakan Koreksional atau Kebijakan Pendukung Kebijakan Utama, misalnya tentang kompetisi yang belum/tidak efektif / berhasil meningkatkan pertumbuhan GDP,GNP, dan *income percapita*.

o. Kebijakan antitrust provisions untuk mendorong persaingan sehat, dilakukan oleh AS,Eropa,NKRI dll.
p. Kebijakan anti kartel dan penetapan harga bersifat monopoli, Jepang sebelum 1970.
q. Kebijakan provisi untuk subsidi (*Provision of subsidy*), bertujuan mendorong pertumbuhan industri secara sektoral antara lain dengan bantuan/hibah/transfer langsung , peng-istimewaan perlakuan perpajakan antara lain *tax-holiday*, kebijakan penyediaan input oleh APBN antara lain berbentuk tanah/lahan usaha cuma-cuma, penyediaan teknologi dan pembentukan pasar TK siap pakai untuk industri binaan, pembelian hasil produksi oleh pemerintah .
r. Kebijakan subsidi diatur dalam konteks kebijakan industrialisasi bangsa.
s. Kebijakan lain pada tataran mikro misalnya kebijakan pilihan sektor tulang-punggung-bangsa cq pilihan sumber penghasilan utama bangsa dalam tataran industrialisasi, agrikultur atau jasa. Sebagai misal, industrialisasi otomotif terpilih Jepang, industri agribisnis kopi terpilih negara Vietnam.

6.3.Teori Kebijakan Ekonomi-Mikro Kala Krisis

- ✓ **Pertama**, Kebijakan Bersifat Reformatif. Sumber *"Microeconomic Reform and Productivity Growth"* pada alamat http://www.aph.gov.au/ , menjelaskan bahwa reformasi ekonomi-mikro bertujuan mendorong produktivitas bangsa melalui pembentukan lingkungan-bisnis tersesuai kondisi-lingkungan agar seluruh SD bangsa teralokasi secara lebih efisien, adalah kebijakan-pemerintah untuk meregulasi atau meregulasi-kembali pruduk/jasa utama tulang-punggung bangsa, berbagai faktor yang mendorong persaingan-sehat dan efisiensi banngsa (Robertson, Quayle and McEachern, 1994: 384). Kebijakan itu mencakupi regulasi/deregulasi pasar tenaga-kerja, penaikan/penurunan tarif impor, regulasi/deregulasi pasar keuangan, privatisasi dan masuk-bursa BUMN, menghapus aturan pajak yang menghambat pertumbuhan PDB. Reformasi ekonomi-mikro tak se-sertamerta dampaknya dibanding kebijakan ekonomi-makro,dan lebih terfokus pada sisi-pasok. Bagi Michael Brennan , 2021, kebijakan ekonomi-mikro era-pandemi dilakukan untuk melindungi bisnis dan unit-usaha terdampak-pandemi dengan menghapus/memindahkan guncangan, mendorong pembentukan bisnis baru, mendorong / memperbesar cita-rata-risiko (risk appetite) , membantu berbagai industri terpilih melalui belanja APBN.

- ✓ **Kedua**, Teori Dampak Pilihan Kebijakan. Berbagai konflik kebijakan ekonomi-mikro dijelaskan Smitri Chand, 2021, dalam artikel berjudul *Conflicts in Government Micro Economics Aims*, antara lain sebagai berikut. Konflik kebijakan pemerkerjaan dan inflasi , dimana upaya pengurangan pengangguran berisiko meningkatkan inflasi . Sebagai

misal, APBN belanja pensiun diperbesar bertujuan meningkatkan konsumsi, produsen terdorong memperbesar hasil-produksi, kapasitas produksi dan merekrut karyawan baru , sekaligus mendoromg harga-harga umum meningkat. Kebijakan pengurangan belanja APBN terkait impor berdampak mengurangi pasok bahan-baku eks-impor meningkatkan, meningkatkan harga pokok produksi, menurunkan permintaan agregat dan pertumbuhan PDB. Kebijakan fiskal dan moneter ekspansionis bertujuan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian/PDB, kebijakan fiskal dan moneter deflasioner bertujuan menekan laju inflasi dan pengeluaran untuk impor.

6.4. Ekonomi Meso

Dengan berbagai tokoh seperti Yew-Kwan Ng, Markos Mamalakis, Stuart Holland, He-ing Shi, Niclas Andersson, Kurt Dopfer dan Richard Parker, Mesoeconomics atau Mezzoeconomics adalah logika-baru dalam studi ilmu-ekonomi yang tak berbasis ekonomi-mikro tentang beli/jual dan pasok/permintaan, juga tidak berbasis ilmu-ekonomi-makro berpenalaran permintaan-agregat, namun lebih pada strukur dimana interaksi antar-pihak/kekuatan ekonomi terjadi dan ilmu pengukuran dampaknya, sebagai jembatan-penghubung teori ekonomi-mikro dan teori ekonomi-makro. Disiplin ilmu tersebut menengarai berbagai perbedaan antara berbagai jenis/rumpun kegiatan ekonomi yang perlu diperhatikan/diperlakukan secara terpisah, ketimbang sebuah agregasian nan-naif, dimana berbagai signal pembentuk pasok, permintaan , harga dan tingkat-inflasi (sektor/rumpun tersebut) mempunyai karakteristik khusus, berdinamika non-linear dan tidak-stabil , sehingga tiap-rumpun membutuhkan hampiran , metode dan sarana analisis berbeda-beda. Disiplin ini meng-klaim game-theory sebagai dasar utama, ilmu ekonomi-meso mencakupi ilmu ekonomi-politik, institution economics dan ilmu ekonomi-informasi (information economics)

6.4.1.Teori Ekonomi Meso dan Meta

- **Pertama, Teori Ekonomi Regional.**

  Sumber Wikipedia berbentuk artikel berjudul *Mesoeconomics* menyatakan bahwa sebagai sebuah ilmu , Mesoeconomics, muncul pada abad 19 dalam tataran pengembangan & pemecahan masalah dalam tataran teori-ekonomi-kewilayahan (regional economics) cq teori lokasi produksi & , teori efisiensi produksi regional (Johann Heinrich Thünen, Alfred Weber, Walter Kristalller, August Lesch, Walter Isard, Jean Chardonnay, Vasily Leontiev, V. Thompson, T. Palander, H. Armstrong , J. Taylor, G.M. Krzhizhanovsky, I.G. Alexandrova, V.V. Kuibyshev, N.N. Kolosovsky) , perencanaan jangka-panjang pen-zona-an wilayah-ekonomi, distribusi regional, penciptaan wilayah-produksi teritorial, efisiensi produksi regional (T.S. Khachaturova, Ya.G. Feigina, N.N. Nekrasov, A.G. Granberg, P.M. Alampieva, E.B. Alaeva, K.N. Bedrintseva, G.I. Granik, F.D. Zastavny, R.S. Livshits, K.I. Klimenko, Yu.K. Kozlova, A.M. Korneeva, V.V. Kistanova, A.G. Omarovsky, N.N. Oznobina, V.F. Pavlenko, M.M. Palamarchuk, Yu.G. Saushkina, E. D. Silaeva, N.I. Shraga and V.M. Torosov) dan berbagai bukut teks tentang ekonomi-meso (antara lain V.M. Torosov). Konsep ekonomi-meso menyatakan bahwa perekonomian

sebuah negara terdiri atas tiga tingkatan, yaitu ekonomi-mikro, ekonomi-makro dan ekonomi-meso masing masing mempunyai sebuah set-kelimuan nan-unik. Sebuah wilayah meso tak selalu berbentuk sebuah-unit-kepemerintahan-wilayah , namun sebuah wilayah dalam sebuah negara yang memiliki keserupaan lingkungan-hidup dan tenaga-kerja produktif.

- **Kedua, Teori ekonomi meso.**

  Kurt Dopler, John Foster, Jason Potss, 2004, menyajikan artikel berjudul *Micro-meso-macro*, menjelaskan antara lain sebagai berikut.Pembangunan realisme-evolusioner ontologis (pengatagorian berbasis jenis & konsepsi) diajukan Dopfer & Potts adalah sebagai berikut. Agregasi elemen mikro ekonomi tak dapat membangun elemen ekonomi makro, karena sebuah perekonomian adalah sebuah unir meso. Sifat evolusioner perekonomian harus dibahas dalam terminologi mikro-meso-makro, dimana sebuah sistem-perekonomian terdiri atas sekumpulan unit-meso, dimana setiap meso mengandung serumpun-aturan dan tata-cara aplikasi oleh sebuah populasi. Ekonomi mikro adalah tentang perilaku individu sebagai pembawa aturan dan sistem yang dibuat bersama, ekonomi makro adalah sekumpulan sistem-meso sebuah struktur-populasi . Struktur mikro dibangun dari berbagai elemen terkandung dalam setiap meso, ekonomi makro adalah sebuah struktur berkomponen berbagai meso yang saling-berhubungan secara harmonis.

- **Ketiga, Teori hubungan ilmu ekonomi-meso dan ekologi.**

  Jan G. Lambooy,1990, menyajikan artikel berjudul *Meso-Economics and Organizational Ecology*, menjelaskan antara lain bahwa ekonomi meso beruang-lingkup ekonomi regional dan ekonomi sektoral yang kemudian saling menglasifikasi. Sebagai misal , ekonomi regional di NKRI dibagi menjadi sekitar 550 pemerintah daerah yang memiliki/tidak memiliki sektor tertentu, misalnya pariwisata atau sektor riil.

- **Keempat, Teori Trayektori.**

  Sumber ©2021 TermPaperWarehouse.com , menyajikan buah pikiran shila (s memang dalam huruf kecil) tentang *Meso Economics*, menjelaskan antara lain sebagai berikut. Ilmu ekonomi meso adalah sebuah konsep baru (tahun 1980 an) yang bukan berbasis pada teori-ekonomi mikro (tentang beli-jual, pasok-permintaan) atau teori-ekonomi makro (tentang agregat pasok-permintaan. Trayektori/lintasan/rute/arah sebuah meso berubah secara dinamis , sebuah ekonomi makro adalah kumpulan berbagai trayektori meso nan-unik tersebut. Tiga tahap trayektori ekonomi-meso adalah sebbagai berikut. Tahap 1 pembuatan aturan dasar bersifat generik berbasis imajinasi-kewirausahaan dan eksperimen/pengalaman-belanja-konsumen. Tahap 2 adalah proses adopsi/adaptasi aturan tersebut pada tingkat populasi. Adaptasi/adopsi tersebut melalui proses pengaitan/pencocokan/harmonsasi dengan aturan berbagai meso selebihnya. Tahap 3 adalah penjagaan/pemutahiran berkesinambungan aturan meso tersebut agar selalu selaras dengan populasi aturan berbagai meso selebihnya.

- **Kelima, Teori bahaya data agregasi ekonomi-makro berdasar data ekonomi-mikro.**

  Andrew Sheng dan Xiao Geng, 2012 menyajikan artikel berjudul *The new economics: Meso and Meta* , menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Krisis memberi tekanan pada

perekonomian & pasar keuangan global, menyebabkan proses mempertimbangkan kembali berbagai prinsip ekonomi modern. Ronald H. Coase menyatakan bahwa teori ekonomi-mikro gagal menjelaskan hubungan kontraktual antara korporasi dan pasar-pasar, semantara Paul Krugman menyatakan bahwa ilmu ekonomi-makro sepanjang 3 dekade terakhir tak-bermanfaat dan berisiko berbahaya. Kesederhanan dan keanggunan berbagai model ekonomi-mikro dan model ekonomi-makro , memikat para ekonom sebagai pengguna model, karena berterima-nalar dan dirasakan berdaya guna untuk menjelaskan mekanisme harga , keseimbangan/ketimbangan berbagai agregat variabel-ekonomi, tanpa mampu menjelaskan perilaku sebenarnya para parsitipan pasar , tak memadai . Untuk menjelajahi interaksi rumit-dinamis antara individu, lembaga dan sifat/kondisi perekonomian sesungguhnya, ilmu ekonomi klasik tak mampu menjawab pertanyaan Samuelson tentang jenis produksi barang/jasa, bagaimana dan untuk siapa diproduksi/ diserahkan/di jual , dimana dan bilamana. Pembagian ilmu-ekonomi menjadi hanya (1) ilmu ekonomi-makro tentang kinerja-ekonomi, struktur perekonomian, perilaku dan pengambilan keputusan pada tataran-nasional/regional/global dan (2) ilmu ekonomi-mikro tentang alokasi sumberdaya oleh rumahtangga dan perusahaan adalah konsep-tak-paripurna dan menyesatkan.

- **Keenam, Ilmu ekonomi meso bersifat unik dan mandiri.**

  Ilmu ekonomi-meso berupaya menutup senjang ekonomi-mikro dan makro , membahas berbagai aspek kelembagaan yang tak dibahas pada tataran ilmu ekonomi-mikro dan makro antara lain jaringan kontrak formal/informal dalam lingkungan antar individu dalam-keluarga / luar-keluarga, korporasi, pasar, penduduk dan lembaga sosial.

- **Ketujuh, Teori perekonomian berbasis kelestarian lingkungan.**

  Ilmu-ekonomi-meta (*Meta-economics*) mempelajari lebih dalam/jauh berbagai aspek-fungsional-perekonomian sebagai sebuah sistem rumit, interaktif dan holistis , misalnya mengapa sebuah sistem perekonomian lebih lestari dan berdaya-saing dibanding yang lain, mengapa “campur tangan “ pemerintah yang serupa berdampak positif pada suatu negara dan berdampak buruk pada negara lain, lebih khusus lagi mempelajari suatu fenomena khusus misalnya bagaimana negara RRC secara amat cepat mampu membangun empat skala-global rantai-pasok untuk sektor riil, sektor infrastruktur, sektor keuangan dan layanan pemerintahan. Pengukuran PDB dalam ilmu ekonomi dewasa ini mengabaikan kerugian kerusakan sumberdaya alam , polusi dan lenyapnya lingkungan hidup ber biodiversivitas. Berbagai kebijakan publik dibentuk tanpa ukuran efektivitas atau dampak. Berbagai analisis sebab-akibat dilakukan secara linear dan statis berbeda dengan kenyataan yang bersifat non-linear dan dinamis dalam interkoneksi sistem yang saling mempengaruhi. Bagi Fritz Schumacher dan Eric Beinhocker, ilmu ekonomi-meta adalah ilmu yang memanusiakan ilmu-ekonomi dengan memperhitungkan lingkungan-lestari , dimana maksimalisasi-laba dan rasionalitas-ekonomi dipadu dengan falsafah moral, filsafat, antropologi dan ilmu sosiologi.

- **Kedelapan, Teori Ekonomi Regional.**

Ilmu ekonomi regional bertujuan *full employment, economic growth, dan price stability* , seperti kebijakan moneter. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi dalam bahasan ilmu ekonomi tradisional dan memiliki kekhususan dalam menjawab pertanyaan tentang di mana lokasi wilayah dari suatu kegiatan yang seharusnya, tetapi tidak menunjuk pada lokasi konkret. Ilmu ekonomi regional pada umumnya memiliki tujuan yang sama dengan teori ekonomi umum dan teori moneter, yaitu *full employment, economic growth, dan price stability*, dan bermanfaat untuk membantu perencana wilayah menghemat waktu dan biaya dalam memilih lokasi.Ilmu ekonomi regional murni membicarakan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait dengan wilayah , sebuah teori yang terbagi atas beberapa kumpulan pandangan pakar.

Wikipedia , mengunggah artikel berjudul *Regional economics* , sebagai subdisiplin ilmu ekonomi yang sering disebut pula sebagai sebuah lahan ilmu sosial, menjelaskan berbagai aspek ekonomi sebuah wilayah geografis yang dapat di analisis secara mandiri terpisah dari wilayah lain , untuk membangun kebijakan berbasis kewilayahan tersebut. Ilmu Ekonomi Regional membantu berbagai bidang ilmu lain yang mencakup aspek kewilayahan atau pemecahan masalah dalam suatu wilayah , menjadi bagian ilmu ekonomi sambil membangun tradisi pemikiran dan hampiran khas unik/sendiri. Dasar ekonomi regional adalah teori lokasi yang berkembang di Jerman dan Amerika Utara pada abad 20 dan teori ekonomi-eksternal dari industri-terlokalisasi versi Alfred Marshall dalam Prinsip Ilmu Ekonomi (1890) dalam bahasa Jerman , *ilmu ekonomi lokasi* versi August Losch (1944) diterjemahkan W.H.Woglom (1954) ke dalam bahasa Inggris berjudul *The Economics of Location*, makalah Paul Krugman berjudul *Increasing Returns and Economic Geography* (1991) yang mendorong riset-riset selanjutnya ke arah *regional economics & economic geography* .

- Pandangan pertama adalah menolak ilmu ekonomi regional sebagai ilmu terpisah dari ilmu ekonomi (Harvey Stephen Perloff & Alivin Harvey Hansen).
- Pandangan kedua, Ilmu ekonomi regional di definisikan Lionel Charles Robbins (1932) sebagai ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana-terbatas untuk berbagai-penggunaan-alternatif tentang berbagai masalah ekonomi dalam suatu wilayah.
- Pandangan ketiga mendefinisikan ilme ekonomi regional sebagai sub-displin ilmu ekonomi yang berbasis spatial general equilibrium (L. Lefeber and H. O. Nourse).
- Pandangan keempat mendefinisikan ilmu-ekonomi-regional sebagai sub-displin ilmu-ekonomi tentang sumber-daya tak-dapat-berpindah (G. H. Borts (1960), J. L. Stein (1961), J.R.Meyer (1963). Dalam karya berjudul *Regional Economic Growth* (1969), Horst Siebert memandang ilmu-ekonomi-regional sebagai studi perilaku manusia dalam bingkai ruang (space). Bagi Edgar M.Hoover dan Frank Giarratanai (1964) ilmu ekonomi regional didefinsikan sebagai studi pembedaan dan hubungan wilayah-wilayah di muka bumi yang terbagi secara tidak merata dan berbagai sumber-daya tidak-mudah-berpindah-tempat dalam perencanaan sosial investasi modal untuk mitigasi masalah sosial pada lingkungan tersebut.

  Sebagai studi kasus, sebuah pemerintah daerah di NKRI mempunyai batas wilayah, budaya penduduk asli, lingkungan hidup dan sumber-daya dalam tataran ekonomi-mikro , “impor” dari luar wilayah, “ekspor” keluar wilayah, “kerja sama “ dan “ bersaing” dengan wilayah-lain, seperti NKRI dengan negara-negara lain,

mempunyai kebijakan-fiskal yang tercermin dari APBD, memperoleh berbagai kinerja makro-ekonomi seperti PDB wilayah, pendapatan perkapita wilayah, inflasi wilayah dan tingkat pengangguran wilayah nan-unik, yang terpisah dengan wilayah lain.

- Pada tahun 2019 , organisasi regional/kewilayahan dengan kondisi masing-masing nan-unik NKRI terdiri atas 74.957 desa, 8.490 kelurahan, 7.094 Kecamatan, 416 Kabupaten, 98 Kota dan 34 Provinsi , sehingga seluruhnya berjumlah 91.083 meso. Sebagai misal, pada tataran desa, disamping ekosistem , prasarana, sistem-perekonomian, budaya dan populasi yang unik dan berbeda-beda yang secara kasar diidentifikasi/diklasifikasi sebagai desa pertanian & kehutanan,desa perikanan dan pelayaran, desa pasar atau perdagangan, desa wisata atau istirahat, desa lalulintas penyeberangan sungai, danau dan laut, desa keramat, candi, sumber air, makam Sunan, desa tambakan dan desa gabungan, federasi desa, gabungan *desa ginealogis* (berbasis marga, keturunan asli) , pada tahun 2021 pemerintah meng-katagori status 74.957 desa sebagai rumpun berstatus Mandiri 3.269 desa, Maju 15.321 desa, Berkembang 38.083 desa, Tertinggal 12.635 desa dan Sangat Tertinggal 5.649 desa , dimana masing-masing desa sebagai sebuah unit-meso berbeda. Sebuah provinsi sebagai sebuah unit-meso nan-khas terdiri atas beberapa ekonomi-meso tingkat kabupaten dan kota-mandiri , yang terbelah menjadi unit-meso kecamatan, kelurahan dan desa.
- Buku berjudul Akuntansi Desa (2018) terbitan Salemba Empat, karangan Jan Hoesada, menggambarkan contoh keunikan entitas desa sehingga pemerintah menghormati hukum adat desa, bahwa rancang-bangun hukum positif NKRI tentang desa memperhatikan keaneka-ragaman hukum adat desa. Hukum adat tidak (perlu) tertulis, namun dihayati dan dipatuhi tiap orang desa (penduduk asli). Sebagai misal, hukum adat tentang tanah lebih dipatuhi ketimbang hukum agraria. UU 6/2014 tentang Desa juga mengakui Desa Adat, menunjukkan supremasi hukum adat. Istilah Arab adalah "adat", istilah Minang adalah *limbago* adalah hukum adat nan mengikat, istilah Jawa adalah *cara*, pada kenyataannya seringkali berstatus-budayadi atas hukum positif bagi desa. Tersebut pada pepatah-petitih masyarakat asli Jawa bahwa "Deso mowo coro, negoro mowo toto", di Minangkabau dinyatakan bahwa "Sakali air gadang, sakali tapian beranja, sakali raja berganti, sakali adat berubah", menunjukkan dualisme hukum bagi desa, sekaligus penghormatan penguasa akan supremasi hukum adat desa, dan sebaliknya. Adat bukan sinonim tradisional, istilah tradisional bukan sinonim istilah zaman dahulu dan anti modernisasi. Dengan demikian dalam derap modernisasi desa, tradisi asli Nusantara nan-relevan zaman dapat tetap dipertahankan walau penduduk desa kini tak canggung menggunakan sarana listrik, sepeda, sepeda motor, sarana perahu bermotor, traktor, radio transistor, laptop dan telepon genggam. Kepala keluarga, mempunyai lahan pertanian dan rumah tinggal keluarga sebagai pemegang hak dan kewajiban desa, sebagai warga desa penuh harus mengatur kehidupan sesuai tatanan dan hukum alam cq langit, cuaca, hawa,

matahari, bulan, bintang, hawa udara, air termasuk air hujan, angin, batu, tanah, flora dan fauna desa.Warga desa sejati harus mampu membaca tanda tanda alam, membaca peluang dan risiko akibat alam, beraktivitas dan beradaptasi dengan perubahan alam, agar supaya selamat sejahtera. Bila langit biru tanpa awan selama berbulan bulan, orang desa menghadapi risiko tanaman kering dan mati. Sebaliknya apabila langit selalu mendung dan cuaca hujan bermingu minggu, alamat sungai meluap, banjir bandang, banjir curah, tangkis patah, galengan putus, tanaman terendam, hanyut, busuk akar, risiko puso. Kedua situasi tersebut menimbulkan kebutuhan lumbung desa. Hujan terus menerus di malam hari menyebabkan tanaman padi diserang penyakit beluk. Bila bintang beluku muncul di langit malam, tandanya akan jatuh hujan, para petani mulai memperbaiki sarana pertanian, memperkuat galengan sawah, menambal dan membersihkan selokan tertier, memperbaiki jalan desa, menguruk genangan air, memperbaiki atap rumah, atap balai desa dan atap lumbung desa. Sebagian penduduk desa mungkin masih murni desa. Manusia desa masih murni adalah manusia tak mempunyai pikiran keluar dari desanya, berbahagia sehidup semati dengan desanya, sehingga Pemerintah Kabupaten menjaga agar setiap Pilkades menggunakan azas kemurnian tersebut, agar desa tak "dijajah orang asing". Tolong menolong antar warga desa adalah kewajiban sosial tiap warga desa. Guru, kepala desa , dukun dan orang orang yang dituakan seperti tetua desa dan kepala desa dianggap pemegang sifat baik dan mulia, karena itu layak dihormati dan ditaati. Kemudian warga desa menerapkan konsep kesetiaan terhadap orang orang tersebut. Keadilan sosial desa berbasis budaya mengasihi, peduli dan memberi, tak ada budaya menuntut apalagi demo. Panen adalah *event* memberi padi bagi para pemungut tak bersawah ladang, tradisi gentong air didepan rumah disediakan bagi musafir lewat dan kehausan, terdapat sarana desa seperti sarana sosial seperti gamelan, saha, tegalan, rojokoyo (hewan ternak), wayang, meja kursi perhelatan adalah (tidak disebut hak) milik desa yang digunakan bersama sesuai hukum adat desa tersebut. *Individualisme*, *liberalisme*, *materialisme* adalah kaidah Barat yang tidak disukai dalam budaya desa. Penerapan kaidah sama rata sama rasa, musyawarah untuk sepakat, keadilan sosial versi desa (yaitu keadilan batin, bukan keadilan lahiriah), bukan pemungutan suara, adalah basis keadilan desa. Pada berbagai musyawarah, cukup satu orang tidak setuju, rapat desa tidak dapat ditutup. Dalam desa, jangan sampai ada kelompok dirugikan oleh kelompok lain, ada kelompok yang dizalimi kelompok lain. Tak ada yayasan pada hukum adat desa, tak ada rumah miskin pada sistem desa, tak ada pengemis di desa, karena menolong sesama yang terlantar, seperti kebakaran, kebanjiran, sakit, meninggal, perkawinan, panen adalah kewajiban sehari hari, bukan kebajikan atau kebaikan hati orang kota. Pencuri mendapat hukuman secara adat. Gugur gunung adalah tradisi pekerjaan fisik besar besaran yang dilakukan seluruh anggota desa, dan kepala desa hadir untuk memimpin. Kalau kepala desa berhalangan karena sakit dan lain-lain, sebuah arak-arakan payung, busana kepala desa,

songkok diatas baki memasuki perhelatan gugur gunung, sebagai simbol kepala desa hadir secara batiniah. Dalam kerja gugur gunung, tak ada iri hati, tak ada yang memilih kerja ringan, apalagi memerintah sesama penduduk desa. Demo gaya desa disebut "pepe" yang berarti dibawah terik matahari, duduk diam di alun alun didepan rumah kepala desa, sampai suatu keberatan warga didengar kepala desa. Kepala keluarga, mempunyai lahan pertanian dan rumah tinggal keluarga sebagai pemegang hak dan kewajiban desa, sebagai warga desa penuh, sedang kepala keluarga tanpa lahan pertanian namun memiliki rumah tinggal keluarga memiliki hak dan kewajiban lebih terbatas. Penduduk desa tak berlahan pertanian dan tidak berumah disebut mondok, warga desa golongan ketiga ini tak boleh ikut serta mengatur desa, sekalipun mempunyai tingkat sosial, pengalaman, bintang jasa dari pemerintah dan pendidikan tinggi. Hukum perdata desa berbasis hukum adat berbasis moral dan saling percaya, pelanggaran janji pada umumnya dimengerti dan dimaafkan oleh pihak dirugikan, hubungan majikan dan buruh seperti hubungan ayah-anak. Dukun desa memberi obat lahiriah berupa jamu, parem, bobok dan lain lain, serta obat batiniah berupa rasa aman, terlindung dan harapan sembuh. Dewasa ini secara bertahap, fungsi dukun diganti oleh poliklinik, puskesmas, dan dokter wajib kerja.

- **Kesembilan, Teori Kebijakan Ekonomi Regional.**

Edgar M.Hoover & Frank Giarrantani dari Universitas Pittsburg mengajar materi *Regional Objectives and Policies* , menjelaskan antara lain sebagai berikut. Kebijakan ekonomi regional berbasis ilmu ekonomi regional , bertujuan optimalisasi kinerja-ekonomi sebuah wilayah-regional , terutama pertumbuhan PDB regional, pendapatan perkapita regional, pemerkerjaan regional , lingkungan hidup regional , keamanan/kedamaian regional, kalau-mungkin diatas rerata kinerja regional tetangga dan kinerja nasional. Bagi individu, keluarga, perusahaan dan pemerintahan pada wilayah tersebut , digambarkan oleh pendapatan perkapita, kesempatn kerja dan pemerkerjaan-penuh *(full employment)* wilayah itu, keamanan penghasilan wilayah itu, keamanan/kenyamanan kehidupan politik dan sosial wilayah tersebut, bermuara pada pertumbuhan tingkat kebahagiaan regional, yang ditandai harmonisasi-optimal hubungan kelompok masyarakat, hubungan kota dan desa, optimalisasi pemerataan sebaran penduduk dan minimalisasi senjang-taraf kehidupan, optimalisasi kesadaran hak-politik bermuara pada kesehatan/kualitas sistem pemilihan calon pemimpin daerah (pilkada) berintegritas dan peduli, menghasilkan kepemerintahan regional nan-baik , ditandai belanja APBD mengakomodasi kebutuhan-prasarana dan kebutuhan khusus kelompok masyarakat dalam wilayah itu berbasis optimalisasi Pareto, pengelolaan kepadatan-penduduk "asli" yang berkembang pesat, kebijakan larangan unsur negatif masuk kewilayah itu misalnya industri tertentu (antara lain perjudian) dan pabrik tertentu (antara lain perusahaan ekstraktif tertentu, pabrik penghasil polutan dan perusak sistem-lingkungan-hidup), termasuk mendorong generasi penerus keluar dari lingkungan tersebut untuk memperluas kesempatan kerja dan wawasan, mempersilahkan pendatang baru berkualitas tinggi misalnya rumah-

sakit dan sekolah, sebaliknya menghalangi pendatang-baru yang berpotensi merusak tatanan regional misalnya kelompok ganster , bisnis pelacuran , perdagangan manusia dan pedagang-narkoba , formulasi kebijakan pungutan/pajak daerah terkait isu-isu tersebut di atas, terutama yang memiliki eksternalitas negatif. Sasaran ekonomi regional berada dalam bingkai sasaran ekonomi multiregional dan sasaran ekonomi nasional (negara), karena pengangguran regional digunggung menjadi pengangguran nasional, PDB , pendapatan perkapita dan inflasi kewilayahan tidak digunggung tapi berpengaruh pada perhitungan pertumbuhan PDB, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi nasional , kerusuhan (*social unrest*) sebuah wilayah menular ke wilayah lain dengan mudah, sebaliknya anak-anak dapat merantau & kuliah keluar dari wilayah ortu ke wilayah lain atau LN. Terdapat persaingan regional , antara lain hasil-bumi semua dikirim ke kota-besar yang sama, sebaliknya pemerintah daerah (kabupaten) harus melakukan *beauty contest* untuk memikat investor memilih daerahnya, pengejaran Opini WTP BPK atas LK Auditan Pemda yang mungkin berdampak pada alokasi APBN ke pemda tersebut. Berbagai pemda meluncurkan kebijakan aglomerasi ekonomi dan peng-klaster-an spasial merupakan puncak komitmen regional, misalnya pembentukan industri batik, industri garam,industri wisata, dan, industri belajar-mengajar.Terdapat potensi kerja-sama regional sinergestis dalam konsep maju bersama secara komplementer dan/atau substitusi, sebagai misal daerah pedalaman berfungsi sebagai penghasil hasil bumi , daerah pesisir sebagai pedagang lintas pulau.Tugas pemda manapun mendorong semangat belajar , inovasi dan kewirausahaa penduduknya. Setiap pemda mewaspadai risiko degradasi SDM & SDA , membuat strategi SDM & SDA lestari sepanjang dimungkinkan. Sebagai misal menyedihkan, berbagai keluarga petani desa kehilangan pewaris karena pewaris lebih memilih menjadi tukang parkir di kota , anak gadis keluarga petani memilih menjadi buruh pabrik daripada bekerrja di sawah . Setiap kepala daerah baru harus memahami mengapa ada wilayah makmur , miskin menjadi makmur dan miskin tetap miskin. Pemerintah pusat menanggulangi kemunduran perekonomian wilayah cq penurunan PDB daerah tertentu dengan berbagai akal dan cara , sangat mungkin disebabkan oleh penurunan kualitas pemda , sebaran jenis industri amat sempit , generasi penerus tak bersedia meneruskan kegiatan keluarga petani dan sebab lain. Pemda sakit harus segera diobati/direhabilitasi pemerintah pusat, Terdapat jenis daerah yang berkembang terlampau cepat sehingga perlu kewaspadaan bervisi jangka-panjang yang lebih lestari , sebelum meledak , layu/mati.

6.5.Kebijakan Mikroprudensial

6.5.1.Teori Mikro-Prudensial

- **Pertama, Otoritas Mikro-Prudensial.**

  Lembaga OJK terbentuk oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 memiliki wewenang mengawasi seluruh lembaga keuangan, baik perbankan maupun non

bank. Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 cq pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI kepada OJK , menyebabkan pembagian tugas Lembaga OJK di bidang mikro-prudensial dan Bank Indonesia (BI) di bidang makroprudensial. Tugas mikro-prudensial OJK mencakupi (1) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank,(2) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, (3) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan (4) tugas pemeriksaan bank.

- **Kedua, Ruang Lingkup Tugas Mikro-Prudensial.**

Makna tugas mikro-prudensial OJK adalah bahwa (1) OJK membuat kebijakan/keputusan bagi tiap individu lembaga keuangan , (2) OJK melakukan pemecahan masalah individual tiap lembaga keuangan untuk melindungi kepentingan para deposan dari krisis lembaga keuangan tersebut , dan (3) mencegah terjadinya dampak-domino atau risiko-sistemik, yaitu penularan penyakit sebuah lembaga keuangan ke lembaga yang lain karena panik-publik (*public rush*) . Akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan mikroprudensial adalah pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI kepada OJK maka perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara BI dan Lembaga OJK, selain itu pemahaman mengenai micro-prudential harus lebih di jelaskan dan diberikan definisi secara jelas dalam UU OJK untuk menjamin adanya kepastian hukum khususnya menyangkut masalah kewenangan. Sumber BI berjudul Kebijakan Makro Prudensial menyatakan sebagai berikut. Peran OJK terutama berujung pada perlindungan konsumen sistem keuangan. OJK bertugas menerapkan aturan-aturan prudensial yang bertujuan untuk menjaga kesehatanindividual institusi keuangan, serta memastikan kode etik pelaku pasar mendukung iklim investasi yang sehat. Untuk tujuan itu, JK melakukan pengawasan mikroprudensial terhadap semua institusi keuangan untuk memastikan institusi dapat menjaga kelangsungan usahanya dengan mengelola risikonya. Kesehatan institusi keuangan merupakan salah satu faktor penentu stabilitas sistem keuangan.

- **Ketiga, Kebijakan Makro-Prudensial vs Kebijakan Mikro-Prudensial.**

Otoritas *macroprudential* NKRI adalah Bank Indonesia terfokus pada pengelolaan perilaku komponen sistem keuangan dan perubahan selera risiko sektor keuangan NKRI secara menyeluruh (*overall risk appetite*). OJK sebagai otoritas *microprudential* NKRI terfokus pada konsentrasi risiko pada setiap lembaga keuangan, yaitu risiko setiap bank atau lembaga-keuangan bukan bank.

- **Keempat, Ruang Lingkup Mikro-Prudensial**.

  Kebijakan mikroprudensial pada umumnya menguji kemampuan tiap bank menghadapi risiko eksogen (yaitu risiko karena perubahan kondisi fundamental ekonomi, hukum alam (mis.dampak domino krisis), hukum ekonomi (mis.hukum pasok-permintaan), bencana (mis.bank rush), kehendak Allah (mis.kematian CEO)), bukan risiko endogen (yaitu risiko karena kelemahan sistem keuangan ciptaan bangsa itu, cq OJK dan BI), *dalam sudut pandang* tidak terkait pada berbagai sistem lain.

- **Kelima, Supervisi Mikro-Prudensial**.

  Rruang lingkup supervisi *micro-prudential* mencakupi evaluasi kesehatan lembaga keuangan, satu persatu, penerapan kerangka-acuan Basel III, manajemen risiko bank dan LKBB, risiko likuiditas, risiko pasar dan pengukuran risiko pasar, pengujian stress pada bank, manajemen risiko likuiditas dan membuat kebijakan/regulasi *micro prudential*

6.5.2. Tumpang Tindih Tugas OJK dan BI

- **Pertama, Tumpang Tindih Wilayah Kerja.**
  Tumpang tindih wilayah kerja dan kebijakan diuraikan sebagai berikut. Tumpang tindih tujuan masing-masing otoritas. Supervisi perbankan oleh OJK bertujuan untuk menjamin kesehatan individual pelaku IJK dan keamanan sistem perbankan sebagai subsistem keuangan NKRI, stabilitas perbankan sebagai substabilitas keuangan NKRI. Siapa yang bertanggungjawab apabila tiba tiba muncul systemic risk cq risiko kebangkrutan sebuah bank-sistemik: apakah OJK saja atau BI saja, atau OJK dan BI, atau KSSK ? Tumpang tindih penilaian risiko. OJK sebagai pengawas bank, OJK harus mengambil keputusan dan instruksi kepada bank tersebut, dengan memperhatikan (1) lingkungan eksternal di mana bank tersebut beroperasi, dan (2)dampak keputusan/instruksi tersebut pada reaksi pasar, pelanggan, pesaing dan industri jasa keuangan. Sementara itu, lingkungan eksternal bank tersebut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan microprudential Bank Indonesia. Pembentukan penahan/pengaman modal bank (*capital buffer*) sesuai *Basel Capital Framework* sesungguhnya adalah penahan/pengaman pengaman tiap bank (*capital buffer*), namun lalu teragregasi menjadi pengaman industri perbankan (*industry buffer*) dan menjadi bagian penting untuk menurunkan *systemic risk* industri keuangan bangsa itu. Stabilitas keuangan

secara sistemik adalah agregasi dari stabilitas pelaku industri keuangan. OJK melakukan pengawasan dan menjaga kondisi kesehatan (mis.CAR, likuiditas, LLL), stabilitas kinerja dan pertumbuhan tiap bank berkedudukan strategis (mis.EPS stability & growth), berarti pula OJK menjaga stabilitas keuangan NKRI. Supervisi & penjagaan khusus OJK terhadap SIB sesungguhnya bermakna OJK peduli risiko sistemik industri keuangan, berarti OJK berkontribusi pada akan kondisi makro-ekonomi, berarti OJK memperingan tugas *macroprudential* BI. Bila menggunakan Advance CAR Strategy, bank sentral sebuah bangsa menentukan CAR minimum yang menjadi patokan umum industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan bangsa itu *dapat* menentukan CAR minimum (di atas CAR umum versi bank sentral) untuk bank tertentu sesuai (1) posisi/peran bank (SIB atau bukan), (2) risiko bawaan bank sesuai bidang/jenis usaha bank, misalnya bank-agro rantan hama dan cuaca, dan atau (3) risiko khusus yang sedang ditanggung oleh bank tersebut, misalnya sedang mempunyai direksi berkarakter penjudi.

- **Kedua, Tumpang Tindih Sarana Kerja.**
  Tumpang tindih sarana kerja diuraikan sebagai berikut :

1. Tolok ukur atau standar prudensial adalah standar pengaman bagi bank individual dan bagi sistem keuangan keseluruhan.
2. Untuk tujuan masing-masing, OJK dan BI menggunakan instrumen dan sarana kebijakan prudensial yang serupa pada tataran bank sebagai pelaku SJK, misalnya kebijakan pengaman atau penahan (buffer) tentang ekuitas/modal bank, likuiditas bank, batasan/larangan bagi bank untuk kegiatan tertentu, syarat manajemen bank, berbagai nisbah pinjaman terhadap nilai (loan-to-value ratios), tolok-ukur-baku utang terhadap penghasilan (debt-to-income standards), aturan cadangan bank, bentuk dan batasan neraca bank, serta aturan pungutan (levies). Penggunaan instrumen kebijakan yang serupa menyebabkan kebijakan OJK dan Kebijakan BI saling melengkapi, saling memperkuat atau sebaliknya; juga berisiko bertentangan dan saling memperlemah, berdampak kebingungan industri. Dua sumber kebijakan itu berisiko menyebabkan tegangan meningkat bagi iklim industri.
3. Kebijakan *macroprudential* berdampak pada regulator berbagai pasar, seperti pasar IJK (DK Kompartemen, DK OJK Edukasi & Perlindungan Konsumen), pasar tenaga kerja (Pemerintah NKRI), bank gagal (LPS) dan lain-lain, karena itu membutuhkan koordinasi atau KSSK plus. Keempat, systemic risk dapat disebabkan reaksi sistem keuangan terhadap inovasi keuangan, perubahan teknologi dan UU baru.

- **Ketiga, Interaksi.**
  Interaksi diuraikan sebagai berikut.

    1. Kesehatan individual pelaku SJK adalah perlu, namun belum cukup untuk memelihara stabilitas sistem keuangan NKRI. Kesehatan tiap bank dipengaruhi oleh stabilitas sistem keuangan dan persyaratan penahan/pengaman (*buffer*).

    2. BI mungkin berupaya menengarai berbagai ancaman terhadap stabilitas keuangan dari kebijakan microprudential OJK, kebijakan ekonomi makro & fiskal Pemerintah Pusat NKRI, kebijakan perubahan struktural dan lain-lain.

    3. Tugas KSSK adalah menjaga / membangunkan kewaspadaan semua otoritas lain diluar KSSK tersebut akan bahaya instabilitas sistem keuangan NKRI yang disebabkan oleh kebijakan yang dibuat masing-masing otoritas. Tanpa mengurangi indipendensi tiap otoritas, KSSK menyediakan forum tanggapan bagi draft PBI, POJK, PLPS untuk memberi kesempatan pihak lain mengutarakan (1) bahaya kebijakan tersebut bagi sistem keuangan, (2) bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan kebijakan otoritas lain.

    4. Karena itu, keputusan KSSK secara ideal berbasis musyawarah untuk mufakat, tidak mungkin menggunakan voting anggota KSSK.

- **Keempat, Teori Kebijakan Mikroprudensial berbasis Makroprudensial**.

    1. Salah satu hampiran pembuatan kebijakan microprudential OJK adalah dengan memperhatikan kebijakan macroprudential BI (yang sedang berlaku) dan diumumkan akan-berlaku di masa yang-akan-daytang , sebagai *contraints*.
    2. Terdapat interaksi antara kebijakan mikro OJK dan kebijakan makro BI melalui (1)Program Berbagi Informasi (Information Sharing Program), (2) program Analisis Risiko Bersama dan (3) dialog terstruktur dan berkala antar otoritas.
    3. Terdapat kebijakan mikro-prudensial yang *komplementer* (saling melengkapi, saling mendukung) atau sebaliknya, dengan kebijakan makro-prudensial.
    4. Bahwa kesehatan setiap lembaga keuangan misalnya SIB adalah perlu, namun tidak cukup, untuk stabilitas sistem keuangan.

6.5.3. Kepemerintahan Mikroprudensial OJK (*Microprudential Governance*) .

OJK membuat regulasi yang memperkuat (1) kondisi kesehatan tiap pelaku IJK, (2) kebijakan mikroprudensial bagi kelembagaan pelaku IJK, dan berbagai POJK lain yang *memperkuat* stabilitas makro-ekonomi, menghindari pembuatan (3)kebijakan mikroprudensial cq kebijakan kelembagaan pelaku IJK, dan berbagai POJK lain yang berisiko *memperlemah* stabilitas makro-ekonomi. Sebagai misal, pengaturan CAR, kebijakan perkreditan pada industri perbankan (misal % tertentu harus dialirkan kepada badan usaha UKM, pengaturan kredit produktif dan konsumtif dll) akan berpengaruh langsung kepada kondisi makro ekonomi. Regulasi Keamanan Penutupan Bank (*Die Safely Regulation*) sebagai kebijakan / pengaturan penutupan usaha pelaku IJK dan pencabutan izin pelaku tertentu yang tak layak beroperasi, adalah pengaturan mikro yang tidak berisiko kepanikan, *rush*, dan berpengaruh negatif pada kondisi makro ekonomi. Pada waktu OJK membuat regulasi untuk menarik/memikat investasi tertentu ke dalam IJK, mungkin regulasi tersebut perlu dipikirkan bersama dengan Bank Indonesia sebagai otoritas *macroprudential*. Terdapat kemungkinan pembentukan berbagai peraturan baru bersifat kohabitasi makro-mikro, mungkin berbentuk POJK dan PBI bersama., atau melalui keputusan KSSK. Kita sama mafhum bahwa, kebijakan microprudential perbankan berlandas *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* untuk menjamin keamanan & kesehatan bank dan sistem perbankan NKRI. Karena stabilitas sistem keuangan NKRI tergantung pada kebijakan OJK dan BI, setiap RPOJK tentang perbankan secara-ideal perlu mendapat tanggapan BI, yang mempertimbangkan dampak RPOJK tersebut kepada kondisi makro ekonomi dan/atau berkonsekuensi kebijakan makro-fiskal tertentu. Kebijakan mikroprudensial pada umumnya menguji kemampuan tiap bank menghadapi risiko eksogen (yaitu risiko karena fundamental ekonomi, hukum alam (mis.dampak domino krisis), hukum ekonomi (mis.hukum pasok-permintaan), bencana (mis.bank rush), kehendak Allah (mis.kematian CEO, bencana alam)), bukan risiko endogen (yaitu risiko karena kelemahan sistem keuangan ciptaan bangsa itu, cq ciptaan OJK dan BI), tidak terkait pada berbagai sistem lain. Apabila terdapat Forum OJK ASEAN, dan apabila tidak ada Forum Bank Sentral ASEAN, maka rencana kesepakatan antar OJK tersebut harus dipertimbangkan oleh BI. Apabila terdapat Forum KSSK ASEAN (*Micro Macro Cohabitation Forum*), Forum OJK ASEAN (*Micro Prudential Forum*) dan Forum Bank Sentral ASEAN (*Macro Prudential Forum*), maka forum-forum itulah yang akan bernegosiasi & bersepakat. Kondisi mikro teragregasi, misalnya jumlah kredit macet perbankan masa-pandemi mungkin berpengaruh kepada kondisi makro-ekonomi dan memaksa BI menggulirkan kebijakan moneter tertentu. Informasi mikro teragregasi dibutuhkan untuk evaluasi risiko-sistemik dan dasar kebijakan moneter BI. Statistik mikro apa saja yang dibutuhkan BI harus dibicarakan dalam kerjasama berbagi informasi dalam forum KSSK. Manajemen krisis SIB karena itu secara berkala dibahas pada tataran KSSK, perencanaan pemindahan tanggungjawab regulasi & pengawasan suatu pelaku industri tersebut kepada LPS harus dilakukan secara cepat. Supervisi perbankan dan IKNB oleh OJK adalah pelaksanaan sebuah aspek kebijakan *microprudential*, sedang BI melakukan *surveilance* terhadap kegiatan dan kondisi pelaku IJK cq bank-bank bertujuan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan *macroprudential* secara lebih tepat. Berbagai informasi diperoleh dari kegiatan supervisi bank oleh OJK dapat menjadi bagian informasi berguna yang dikumpulkan melalui BI

surveilance oleh BI. Supervisi perbankan harus dilakukan dengan pengetahuan cukup akan kondisi makro ekonomi & *macroprudential policy*, karena itu OJK , apa boleh buat, perlu melakukan *macro surveilance* dan/atau mendapat masukan kondisi makro ekonomi dan *macro prudential policy* dari BI, secara langsung atau melalui forum berbagai-info dan KSSK.

6.5.4. Peran Lembaga Penjamin Simpanan

Sumber BI berjudul Kebijakan Makro Prudensial menyatakan sebagai berikut. Melengkapi tugas mikro-prudensial OJK, LPS berperan memberikan jaminan atas simpanan nasabah dalam bank. Untuk itu, LPS mengumpulkan iuran premi dari bank dan mengelola dana tersebut agar dapat dipergunakan untuk membayar simpanan nasabah bank yang mengalami kegagalan berdasarkan aturan penjaminan simpanan yang berlaku. Dalam penanganan bank bermasalah, LPS juga memiliki peranan penting. Secara khusus, LPS adalah otoritas resolusi masalah bank secara individual , yang bertugas melaksanakan penanganan masalah solvabilitas Bank Sistemik serta bank lainnya, termasuk jika bank tertentu mengalami kegagalan. Peran LPS membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional, karena adanya garansi pengembalian simpanan jika terjadi kegagalan bank. Kondisiini mendukung proses pendanaan perbankan sehingga fungsiintermediasi dapat berlangsung dengan baik dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.

LAMPIRAN
digital blasphemy

LAMPIRAN 1

TABEL KEBIJAKAN FISKAL

1.	Sumber/Hulu Kebijakan	• Pertama, Kebijakan ekonomi terbagi atas kebijakan ekonomi makro yang berpengaruh pada kebijakan ekonomi meso (regional) dan kebijakan ekonomi mikro. • Kedua, Kebijakan ekonomi makro mencakupi (1) kebijakan moneter , (2) kebijakan fiskal dan (3) kebijakan perdagangan LN
2.	Definisi, Ruang Lingkup Kebijakan	• Kebijakan fiskal berdampak pada perekonomian , berdampak pada penerimaan negara dari perekonomian , berdampak pengeluaran/belanja negara untuk menjaga/memulihkan/mengembangkan perekonomian. • Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait besar/tingkat belanja APBN tersesuai pendapatan APBN . • Kebijakan fiskal menjabarkan perilaku pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan APBN untuk mendanai pengeluaran rutin APBN dan transfer kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah. • Pendapatan pemerintah diperoleh dari menghimpun pajak dan pinjaman, selain endowmen seperti cadangan migas dan hasil tambang lain.
3.	Tujuan	• Kebijakan Fiskal bidang perpajakan bertujuan untuk mencapai target pendapatan APBN, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. • Kebijakan fiskal bertujuan agar APBN terkelola dengan baik . • Tujuan kebijakan fiskal adalah belanja strategis bangsa , antara lain namun terutama belanja infrastruktur strategis antara lain

		berbentuk dukungan-fiskal bagi sektor usaha tertentu , pendidikan dan kesehatan, dapat dipenuhi oleh pendapatan bukan pinjaman. Terjadi perubahan mendasar belanja infrastruktur karena pandemi, antara lain belanja pembangunan infrastruktur transaksi-maya, belanja vaksin, belanja sarana-prasarana terkait pandemi, dan perubahan struktur belanja pegawai . • Secara ideal tujuan kebijakan fiskal adalah mencapai keseimbangan APBN Pendapatan dan APBN Belanja. • Salah satu kebijakan fiskal adalah kebijakan batas defisit APBN. Disiplin fiskal NKRI berupa batas defisit APBN di bawah 3 % PDB sejak krisis keuangan Asia 1998 , dengan estimasi defisit akan mencapai 5.07 % PDB.. • Kebijakan fiskal dirumuskan untuk memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi, dengan kebijakan perolehan pendapatan APBN dan alokasi APBN, untuk meningkatkan distribusi pendapatan.
4.	Instrumen Kebijakan	Aturan Emas dari khasanah ekonomi-makro mengutamakan keadilan & maslahat belanja berbasis APBN nan-seimbang , fokus investasi bagi kepentingan generasi masa-yang-akan-datang. Kebijakan investasi harus sesuai posisi utang negara, perencanaan tingkat-utang negara dan pendapatan pajak &migas , aturan pajak dipastikan harus berterima batin generasi sekarang & yang akan datang. APBN pembiayaan tak boleh digunakan untuk belanja rutin/operasional pemerintahan.
5.	Perbandingan Instrumen Kala-Normal & Kala-Pandemi	Pertama, Pada era-normal, kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan Fiskal dalam APBN

		a. Berbasis pengetahuan akan kondisi perekonomian global dan domestik, berbasis program pembangunan nasional, berbasis kondisi keuangan negara , berbasis kondisi sosial ekonomi negara. b. Identifikasi dan pelanjutan sukses kebijakan tahun tahun APBN lalu, penghentian kebijakan dan mata anggaran yang tak berbuah sukses, terfokus pada pemanfaatan sumber-daya terpulihkan bernilai-tambah-tinggi, pemanfaatan strategis berbagai sumber-daya tak-terpulihkan secara amat berhati hati c. Terfokus pada pembangunan struktural cq pembangunan, pemeliharaan, pemutahiran infrastruktur perekonomian antara lain pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan penyempurnaan tata-kelola keuangan-negara terfokus pada percepatan penyerapan anggaran. d. Bertujuan agar 3 fungsi pokok kebijakan fiskal , yaitu kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, berjalan efektif , berbasis penentuan nan-tepat asumsi dasar ekonomi makro&fiskal e. Dengan keluaran berupa raihan APBN Pendapatan Pajak, pengendalian batas aman keseimbangan primer menuju positif dan peningkatan nisbah pajak (*tax ratio*) , fundamendal perekonomian nan baik dan inflasi terkendali. f. Pengalihan belanja modal dan operasional ke luar APBN, melalui KPBU infrastruktur dan lain-lain. 2. Kebijakan makro-fiskal terpadu. Manajemen Fiskal cq Departemen Keuangan melakukan analisis makro-fiskal sebagai sarana pembentukan kebijakan-fiskal, menerbitkan keluaran berbentuk dokumen strategi fiskal , strategi makro-fiskal , kebijakan prioritas, pernyataan risiko fiskal, kemampuan keberlanjutan menanggung utang (pembiayaan) ,laporan kepatuhan/pelanggaran fiskal dan proyeksi fiskal jangka-panjang, bersama/tanpa kementerian

		perencanaan/BAPENAS , KSSK dan Bank Sentral. 3. Kebijakan FiskaL Diluar APBN/D. Instrumen Kebijakan Fiskal Diluar APBN atau Kebijakan Fiskal Tak terkait APBN antara lain adalah mendorong investasi swasta di bidang infastruktur , mengurangi hasrat masyarakat memboroskan cadangan devisa, mendorong kegiatan ekonomi pencipta cadangan-devisa melalui kebijakan tarif/nontarif ekspor-impor, perizinan & insentif pajak industri infrastruktur dan pendidikan , entitas padat karya, entitas di dirikan di luar Pulau Jawa, entitas yang bergerak sebagai pelaku ekonomi digital dan hijau. Berbagai kebijakan KSSK berdimensi makro-fiskal-moneter, kerjasama BI dan Kementerian Keuangan dalam membentuk kebijakan fiskal-moneter terpadu. Kedua, Pada era-pandemi, kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Terjadi perubahan struktur APBN. 1. Perubahan jenis belanja dan realsasi defisit APBN. Karena APBN pendapatan menurun, sebaliknya belanja wajib untuk (1) penanggulangan pandemi, (2) pemeliharaan roda-perekonomian jangan-sampa berhenti berputar, agar (3) pemulihan dapat lebih segera dan meningkat besar-besaran , berbagai negara menggunakan hampiran sumber APBN berasal dari pembiayaan/utang APBN dan merelaksasi batas maksimum defisit APBN terhadap PDB. 2. Inti Belanja. Pada tataran belanja APBN, setiap pemerintahan membangun prasarana-sosial-ekonomi-era-pandemi yang mengamankan jiwa manusia pada satu sisi, mengupayakan pemulihan kegiatan ekonomi dan *bentuk baru* sistem perekonomian. 3. Kebijakan Luar biasa. Reformasi APBN pada masa pandemi, adalah untuk kebijakan/aksi luar-biasa (*extraordinary measure*) berbentuk

		strategi pendanaan sektor kesehatan habis-habisan (*all out*) oleh APBN , sampai sekitar 50 % PDB, untuk (1) pencegahan/penanggulangan wabah, (2) pemeliharaan kapasitas untuk bangkit kembali, (3) pembentukan masyarakat baru new-normal anti-virus, (4) pemulihan perekonomian dalam tata perekonomian-baru hidup berdampingan dengan virus, antara lain digital-economics dan green-economics , dan (5) pelanjutan APBN infrastruktur ekonomi-digital, ekonomi-hijau dan strategi pembangunan yang menyikapi pemanasan global. 4. Untuk butir 1 di atas, dibentuk APBN tunjangan riset & produksi vaksin/obat bagi produsen , APBN program vaksinasi gratis, pengembangan fasilitas penanggulangan seperti RS Khusus, APBN pengadaan/penyediaan/persediaan mobil ambulance, tabung O2 di RS & sarana seperti test kits, ventilator dll, penambahan jumlah/kualitas nakes , APBN sarana pelatihan dan pelatihan nakes , serta kebijakan imbalan-kerja nakes berisiko tinggi, karena merupakan syarat utama pemulihan (*recovery*) perekonomian negara itu. 5. Untuk butir 2 diatas, APBN proteksi-sosial meningkat menjadi (1) proteksi fisik/nyawa dengan berbagai larangan keluar rumah *(lock down)* , jarak minimum, penggunaan masker dan sarana sanitasi lain, (2) APBN tunjangan pengangguran bagi pekerja ter PHK dan pemberi kerja anti-PHK dalam APBN anti-rasionalisasi, perbesaran APBN jaminan sosial, distribusi tunai, BOS dan tunjangan anak-anak dalam keluarga , (3) pelonggaran skedul pengembalian-kredit bagi unit-usaha yang kehilangan 30 % pendapatan ,sampai penghapusan utang, (4) transfer APBN kepada APBD terkait penanggulangan bencana pandemi. 6. Strategi anti mati-suri. Setiap negara memahami bahwa sistem perekonomian pingsan/mati suri/mati (kolaps) sulit di pulihkan pada era-paska-pandemi suatu-hari

		nanti , dengan fokus pemeliharaan kemampuan-pulih sektor pariwisata, transportasi-perhotelan,dan rumah makan.. Untuk butir 2 tersebut di atas cq APBN memelihara kemampuan nasional memasuki era-pemulihan (*recovery abilility*) , berbagai negara mengembangkan berbagai program yang bertarget, tepat-waktu, bersifat-sementara dan bersifat-transformatif , program dukungan likuiditas bagi rumah tangga dan komunitas pelaku bisnis, sebagai berikut. 7. Strategi Dampak Bola-Salju. Kebijakan fiskal dan APBN bagi pelaku bisnis , terdapat identifikasi sub-sektor industri strategis tertimpa stress-ekonomi dan berbagai paket bantuan bagi unit-usaha tersebut, terdapat kebijakan konsesi pinjaman usaha, APBN subsidi bunga-kredit, gaji pekerja sebagai bagian program anti PHK dialokasikan terutama bagi badan usaha yang berjuang tidak mem PHK, pinjaman-nir-agun-bunga untuk pembayaran upah/gaji , aturan jam-kerja baru, APBN bantuan teknis perubahan aktivitas-bisnis menjadi aktivitas/transaksi maya lewat kurir , penjaminan kredit berbunga-rendah oleh negara, kebijakan penghapusan/penurunan PTKP dan tarif PPh & PPN sektor tertentu penundaan tagihan biaya sewa properti pemerintah untuk dunia-usaha , pembebasan/pelonggaran pembayaran utang bank dan utang pajak UMKM, pelonggaran syarat/kontrak belanja APBN barang/jasa yang dibeli dari UMKM , pengunduran/pelonggaran berbagai kewajiban hukum dan LK , pelonggaran/penundaan status kebangkrutan korporasi versi UUPT. 8. Dasar utama negara adalah rumah tangga. Kebijakan fiskal dan APBN bagi penduduk/rumah tangga, berupa APBN program vaksinasi gratis dan penyediaan sarana deteksi virus pada wilayah-publik, kebijakan perlindungan lapangan kerja , syarat kerja dan anti PHK , aturan khusus kebijakan karyawan dirumahkan, aturan jam-kerja baru, aturan kerja di rumah saja, tunjangan putra-putri dalam keluarga misalnya tunjangan

		sekolah, tunjangan pangan dan pengobatan keluarga, tunjangan asuransi-kerja, asuransi kesehatan karyawan dan tunjangan biaya isoman/rumah-sakit, tunjangan sewa rumah , listrik, PAM keluarga-miskin, tunjangan RS, pangan dan tunjangan tunai keluarga, pembebasan utang bank dan utang pajak tertentu, kebijakan penurunan PTKP WP individu, penurunan tarif PBB rumah tinggal, dan berbagai perubahan jaminan-sosial dan pensiun kelompok masyarakat rentan risiko sosial.
6.	Pengaruh Kebijakan pada kebijakan lain	• Kebijakan fiskal mempengaruhi berbagai variabel ekonomi makro seperti tingkat pemerkerjaan (*employment*) , tingkat harga, dan tingkat GDP. • Kebijakan fiskal berpengaruh pada inflasi dan lapangan-kerja, yang digunakan dalam formulasi kebijakan moneter. • Kebijakan fiskal berdampak pada perekonomian , berpengaruh terhadap permintaan agregat serta penawaran agregat, lalu permintaan agregat dan penawaran agregat menentukan pasar barang dan jasa. • Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi alat dalam perencanaan ekonomi , agar dapat mengendalikan perekonomian makro. • Kebijakan kenaikan pajak merusak rencana pendirian / ekspansi bisnis , bertentangan dengan tugas pemerintah memperluas lapangan kerja formal dan umur-usia-kerja.
7.	Pengaruh Kebijakan lain pada Kebijakan ini	• Yang mempengaruhi kebijakan fiskal ialah rencana pengeluaran APBN minimum tersedia berdasar taksiran pendapatan pajak dan rencana ber-utang (APBN pembiayaan) , sedangkan yang mempengaruhi kebijakan moneter diantaranya GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga.. • Aturan Emas kebijakan-fiskal berasal dari teori makro-ekonomi , adalah kerangka-

		berfikir yang mewajibkan kebijakan-fiskal dirancang untuk stabilisasi-aliran sumberdaya-sektor publik kedalam siklus bisnis.APBN pembiayaan tak-boleh dirancang untuk APBN Belanja Rutin. • Kebijakan moneter yang berpengaruh kepada APBN pendapatan dan belanja, sehingga dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan fiskal yang berpengaruh pada APBN. • Kebijakan makroprudensial adalah sebuah perlengkapan penting bagi berbagai aksi fiskal (*fiscal action*). • Tujuan dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai mata-uang, menjaga likuiditas perekonomian, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan keterpenuhan lapangan kerja, serta keseimbangan *Balance of Payment* (BOP). Bila kebijakan moneter sukses, kondisi ekonomi-makro menjadi lebih baik. Kebijakan Fiskal lalu dibentuk untuk penyempurnaan kondisi ekonomi makro tersebut, jangan sampai bertentangan dengan kebijakan moneter. • Model Makro Modern memiliki 5 fitur, antara lain berupa batasan APBN bagi rumahtangga. DSGE Model mencakupi 5 aspek, yaitu (1) keterbatasan sumber-daya dan APBN, (2) preferensi unik negara itu , sasaran unik negara itu, (3) ekspektasi-rasional kejadian-kejadian di masa depan, proyeksi lingkungan di masa depan, (4) identifikasi guncangan dan dampak-guncangan di masa depan, dan (5) pemodelan matematis yang menggambarkan intuisi-verbal analis. • Kebijakan makroprudensial tertentu sering ditafsir/dituduh sebagai kebijakan untuk meng-address entitas bank tertentu atau *systematically important financial institutions t*ertentu yang *“too big too fail”* .

8.	Hubungan Antar Kebijakan	• Krisis ekonomi dan keuangan global memaksa tiap negara untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan mengkoordinasi berbagai kebijakan makroekonomi, terutama koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bangsa itu. IMF menyatakan bahwa kebijakan moneter disusun berdasar kebijakan fiskal & peturbasi kemungkinan dampak kebijakan fiskal tersebut, sebagai asmusi perumusan kebijakan moneter nan-pas. • Yang mempengaruhi kebijakan fiskal ialah pengeluaran APBN serta pajak, sedangkan yang mempengaruhi kebijakan moneter diantaranya GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. • Kebijakan fiskal berdampak pada perekonomian dengan penerimaan Negara serta pengeluaran Negara, sedangkan kebijakan moneter akan berdampak pada pasar uang dan pasar modal. • Gabungan sinergestis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi alat dalam perencanaan ekonomi , agar bangsa itu dapat mengendalikan perekonomian-makro. Kebijakan fiskal berdampak lebih cepat dibanding kebijakan moneter. • Perpaduan harmonis kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas tingkat pertumbuhan ekonomi dengan inflasi rendah & terkendali, tingkat pengangguran rendah dan harga-harga umum stabil. Dua kubu pembuat kebijakan menyadari bahwa banyak dikotomi diantara dua kebijakan tersebut dan tak ada formula optimasi/optimalisasi perpaduan-keduanya. • Pada era-pandemi, APBN berbagai negara membantu perusahaan padat-karya dengan subsidi upah/gaji dan berupaya mencegah moral hazard PHK massal. Berbagai pemerintahan amat sadar bahaya PHK, bahwa bila seluruh sektor riil lumpuh, akan sulit dibangkitkan kembali tatkala pandemi berlalu , menyebabkan kondisi ekonomi-terpuruk lebih berkepanjangan daribangsa-bangsa anti

		PHK kala-pandemi.

LAMPIRAN 2

TABEL KEBIJAKAN MONETER

1.	Sumber/Hulu Kebijakan	Kebijakan ekonomi makro mencakupi antara lain (1) kebijakan moneter , (2) kebijakan fiskal dan (3) kebijakan perdagangan LN.
2.	Definisi, Ruang Lingkup Kebijakan	Kebijakan moneter bank sentral berbentuk pengaturan jumlah uang beredar dan pengaturan suku bunga pasar-uang bertujuan mencapai situasi-makro-ekonomi idaman.
3.	Tujuan	Tujuan kebijakan moneter bank-sentral adalah untuk mencapai kondisii makro-ekonomi idaman yaitu pertumbuhan ekonomi cq pertumbuhan-PDB tertentu, target pendapatan perkapita dalam kondisi harga stabil dan perluasan kesempatan kerja. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai uang, menjaga likuiditas perekonomian , stabilitas harga umum, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan pemerkerjaan-penuh (*full employment*) , keseimbangan neraca pembayaran (*Balance of Payment* atau BOP).
4.	Instrumen Kebijakan	1. Cadangan devisa. 2. Kebijakan ekspansi moneter (KEM) cq OPT, tingkat bunga dan tarif diskonto, kewajiban cadangan (reserve requirement) bank. 3. Jumlah uang beredar. 4. Mengupayakan suku-bunga kredit mendukung perekonomian. 5. Mengatur suku-bunga pasar-uang 6. Mengatur standar bunga pinjaman. 7. Mengatur *margin requirement* (deposito wajib bagi pedagang efek) 8. Mengatur kapitalisasi untuk bank 9. Pelonggaran kuantitatif . 10. Kebijakan moneter ekspansif. 11. Pelintiran Operasioanl (Operation Twist) . 12. Menunjang berfungsinya pasar uang. 13. Mendorong agar lembaga keuangan memberi kredit. 14. 14. Pinjaman langsung kepada pemberi kerja berbentuk korporasi.

		15. 15. Pendanaan warkat komersial (*commercial Paper*) USD 1,2 T. 16. 16. Menunjang pinjaman UKM. 17. Memberi tunjangan pinjaman pada lembaga nirlaba. 18.Membangun bantalan peredam kejut (*cushion*) pasar uang dari tekanan internasional. 19.Membanguni Fasilitas Lelang Berjangka (Term Aucion Facility atau TAF) sebagai alternatif discount window. 20. Memperlebar kisaran (range) entitas-keuangan yang dapat meminjam dari Primary Dealer Credit Facility. 21. Penargetan suku-bunga-berjangka lebih-panjang (a longer-term interest rate).
5.	Perbandingan Instrumen Kala-Normal & Kala-Pandemic	Kebijakan moneter konvensional terdiri atas o Kebijakan moneter konvensional memiliki tiga poros, yaitu operasi pasar terbuka (OPT), fasilitas tersedia/siaga (standing facilities) dan cadangan minimum (minimum reserve) entitas bank. o Penetapan target suku-bunga-semalam pada pasar-uang-antar-bank untuk memelihara likuiditas pasar-uang dan stabilitas-harga jangka-menengah o Penyesuaian pasok-uang BS kepada target melalui operasi-pasar-terbuka o Menghindari hampiran peminjaman-langsung kepada sektor-privat , pembelian obligasi pemerintah dan korporasi. Kebijakan moneter nonkonvensional terdiri atas o Panduan ekspektasi suku-bunga jangka-menengah, o Mengubah struktur neraca BS

		○ Memperbesar ukuran neraca BS ○ Reduksi suku-bunga-jangka-pendek. ○ Aksi transmisi dengan kebijakan tidak-konvensional. ○ Mempengaruhi biaya-kredit dengan menentukan sasaran suku-bunga berjangka-lebih-panjang lintas-ragam aset-keuangan. ○ Relaksasi kredit perbankan . ○ Pembelian SUN. ○ Pembelian obligasi dari entitas-entitas bank, meningkatkan likuiditas bank. ○ Menurunkan bantalan-pengaman (*buffer*) simpanan wajib bank pada BS.
6.	Pengaruh Kebijakan Moneter pada kebijakan lain	• Kebijakan moneter dan kebijakan makro-prudensial merupakan dasar berpijak dalam menyusun kebijakan fiskal cq RAPBN sesuai sumber Lars E.O. Svensson , 2015, dalam artikel berjudul Monetary *Policy and Macroprudential Policy: Different and Separate,*. • Kebijakan moneter berdampak pada pasar uang dan pasar surat berharga. • Berbagai kebijakan moneter berpengaruh kepada APBN Pendapatan dan APBN Belanja, sehingga dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan fiskal. • Kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor riil, karena jika tingkat bunga diturunkan maka investasi akan meningkat dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cq output.
7.	Pengaruh Kebijakan lain pada Kebijakan Moneter	• GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga mempengaruhi kebijakan moneter. • Kebijakan makroprudensial mempunyai fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan , dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan , serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. • Kebijakan makroprudensial pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menjaga stabilitas

		sistem keuangan. Secara spesifik, kebijakan ini digunakan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik, mengurangi dampak risiko sistemik, dan memperkuat daya tahan sistem keuangan dari krisis.
8.	Hubungan Antar Kebijakan	• Perpaduan Kebijakan Moneter dan Makro-prudensial dilakukan BS Eropa dengan tambahan pembelian aset sebesar €120 Miliar sampai akhir 2020 , lelang tambahan temporer fasilitas-likuiditas ber tarif bunga tetap, peringanan beban bunga pinjaman-jangka-panjang untuk pembiayaan-kembali proyek-proyek tertentu jatuh-waktu mejadi berjangka-lebih-panjang, program pembelian-gawat-darurat-era-pandemi ((Pandemic Emergency Purchase Program atau PEPP),) berbagai sekuritas-berharga sektor-privat dan sektor-publik tertentu,menerbitkan aturan pelonggaran aset-layak-beli dan relaksasi tolok-ukur jaminan/agunan kredit seperti pemotongan-agunan tak-berpasar-bebas bersifat permanen (*a permanent collateral haircut reduction of 20 percent for non-marketable assets*). • Perpaduan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal bertujuan menjaga stabilitas tingkat pertumbuhan ekonomi dengan inflasi rendah & terkendali, tingkat pengangguran rendah dan harga-harga umum stabil. Kedua kebijkan tersebut berhubungan erat dengan empat sektor yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan dan sektor internasional , yang memiliki interaksi masing-masing dalam upaya menciptakan pendapatan serta pengeluaran pemerintah.

Lampiran 3

DAFTAR ISTILAH KEBIJAKAN FISKAL

- Analisis fiskal dilakukan sub-organisasi Departemen Keuangan atau Sub-Departemen Fiskal dari Departemen Keuangan untuk memantau realisasi APBN/D, pencatatan sebenarnya bagaimana uang negara digunakan, yang mencakupi (1) sistem/prosedur perencanaan dan perealisasian APBN, (2) dasar pikiran/pertimbangan proses pemilihan pengguna mata APBN yang paling tepat, (3) memberi nasihat bagi para pelaksana realisasi APBN/D , (4) melakukan analisis keuangan tentang ketersediaan keuangan, kualitas permohonan keuangan dan kualitas pengeluaran keuangan berbasis APBN/D , gaya belanja, efisiensi belanja dan hasil belanja yang sesuai atau tak sesuai harapan.

- Aturan fiskal (fiscal rule) atau target fiskal (fiscal target) adalah parameter dibentuk pemerintah untuk membatasi belanja berbasis pendapatan diperoleh , sebagai kebijakan menghindari pinjaman yang memberatkan generasi penerus. Di negara Inggris, aturan fiskal berbentuk penghindaran investasi sektor-publik lebih dari 3 % PDB , evaluasi ulang proyek-proyek penyebab biaya bunga yang menyebabkan belanja bunga suatu tahun APBN berisiko menjadi di atas 6 % pendapatan APBN , terlampir pada manifesto pemilu 2019.
- Defisit fiskal sebuah tahun APBN adalah posisi pendapatan APBN diluar utang lebih kecil dari belanja APBN, dimana pengeluaran APBN melampaui perolehan APBN, dikalkulasi sebagai persentase terhadap PDB. Defisit fiskal pada RAPBN adalah dasar utama untuk perencanaan utang (pembiayaan) tahun RAPBN tersebut.
- Fiskal defisit bruto adalah kelebihan jumlah belanja APBN termasuk pelunasan pinjaman dibanding pendapatan diterima termasuk hadiah, hibah, sumbangan diterima dan penerimaan modal bukan-pinjaman. Fiskal defisit neto adalah fiskal defisit bruto dikurang pinjaman-neto pemerintah pusat.

- Keadilan Fiskal adalah sebagai berikut. Unsur keadilan sosial dan kemanusiaan nan-adil & beradab dalam kebijakan fiskal adalah (1) redistribusi pendapatan melalui tarif pajak progresif, dari kelompok berpenghasilan besar kepada kelompok lain yang berpenghasilan lebih kecil, dan belanja APBN berbentuk dana desa, bansos, subsidi, bantuan keuangan, pemakaman massal dan vaksinasi publik, BOS, BPJS , transfer, belanja modal cq infrastruktur pada pemda/desa tertinggal dan banyak-lagi, (2) pengaturan kondisi, transaksi & penghasilan tidak kena pajak , (3) jenis investasi & tabungan bebas pajak atas bunga adalah kebijakan fiskal untuk memperkuat modal bangsa, selaras/terpadu kebijakan fiskal untuk mendorong konsumsi atau investasi. Belanja modal cq infrastruktur pada wilayah terbelakang bertujuan mendorong pertumbuhan PDB wilayah itu.Belanja modal padat karya (public work) memperluas kesempatan kerja cq mengurangi pengangguran. Kebijakan penaikan tarif PPh tak selalu berdampak meningkatkan pendapatan negara.dari perpajakan, karena kenaikan PPh berisiko

menaikkan harga pokok dan harga jual, dan menurunkan permintaan (demand) sesuai hukum elastisitas-permintaan, menyebabkan kondisi perekonomian melesu.

- Kebijakan fiskal adalah kebijakan bertujuan mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat melalui perubahan penghasilan individual dan badan-usaha, dengan instrumen perpajakan, belanja APBN dan utang pemerintah. Aturan emas kebijakan fiskal adalah bahwa utang tak boleh digunakan untuk belanja rutin pemerintahan.
- Kebijakan fiskal sebuah negara terdiri atas kebijakan perpajakan, kebijakan belanja APBN dan kebijakan utang, berdasar pilihan dasar kebijakan anggaran berimbang atau tidak berimbang . Kebijakan fiskal penting untuk alokasi optimal sumber-daya (SDM, bahan, uang dll) sebuah bangsa, sebagai sarana distribusi kemakmuran dan pendapatan dari kelompok besar penghasilan atau kaya kepada kelompok berpenfhasilan lebih rendah melalui sistem perpajakan, menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi & harga kebutuhan pokok dan pemerkerjaan penuh (full employment) melalui struktur perpajakan konsumsi, tabungan dan investasi , dan kebijakan belanja APBN. Mencapai/memelihara kondisi pemerkerjaan penuh adalah sasaran terpenting dan/atau utama.
- Manajemen Risiko Fiskal departemen Keuangan pada umumnya memiliki Daftar Risiko Fiskal (Fiscal *Risk Register*) yang mencakupi Risiko Makro-Ekonomi, Risiko Sektor keuangan, Risiko Pendapatan, Risiko Neraca, dan Risiko Belanja. Sebagai misal, Daftar Risiko Makro-Ekonomi mencakupi sekitar 15 variabel-amatan, antara lain pertumbuhan menurun PDB paska-krisis, APBN defisit berkesinambungan tiga tahun terakhir. Risiko Sektor Keuangan berupa memburuknya kondisi bank-bank sistemik dan penting saat krisis. Risiko Pendapatan APBN antara lain menurun akibat kesalahan perubahan Kebijakan Perpajakan dan frekuensi tambal sulam peraturan perpajakan. Risiko Belanja antara lain berbentuk penurunan belanja tertentu akibat kebijakan fiskal yang keliru, jumlah kewajiban moneter akibat kekalahan negara pada pengadilan atas pengadilan perpajakan, dan paket imbalan pasti PNS tak terpikul oleh APBN . Risiko Neraca antara lain berbentuk kerusakan besar aset neto sektor publik karena krisis, pelepasan aset negara masa pandemi dengan harga tak memuaskan, dan dampak ilusi fiskal sebagai dasar kebijakan fiskal tertentu
- Model Makrofiskal digunakan World Bank untuk perbandingan kondisi dan kebijakan berbagai negara dunia , mencakupi hubungan permintaan-agregat dengan senjang output-domestik lalu dan yad, kondisi moneter, posisi fiskal (fiscal stance) dan senjang output-asing. Senjang output adalah deviasi log dari output-aktual vs *trend*.
- Pengaruh Fiskal atau/ Dampak Fiskal (*Fiscal stance*) terhadap perekonomian , adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana tingkat belanja APBN secara keseluruhan atau pos APBN tertentu dan kebijakan perpajakan berdampak secara langsung/tidak langsung dalam ukuran besar/kecil pada permintaan agregat dan pertumbuhan perekonomian. Korelasi tersebut dijelaskan pada RAPBN sebagai dasar pikiran. Pada umumnya , kebijakan tarif pajak lebih tinggi dan kebijakan APBN surplus dipandang sebagai konsolidasi fiskal dan berdampak deflasioner (deflasionary stance).
- Risiko fiskal adalah faktor-faktor penyebab hasil/keluaran fiskal (fiscal outcome) berbeda dengan atau menyimpang dari ekspektasi/target fiskal cq proyeksi /rencana fiskal, yang mungkin disebabkan (1) guncangan sektor keuangan dan ekonomi-makro yang bersifat siklikal/kagetan, (2) peristiwa khusus, antara lain realisasi kewajiban-kontinjen,kewajiban-konstruktif dan kewajiban bail-out pemerintah, dan penanggulangan bencana , (3) pemahaman akan risiko fiskal apakah bersifat besar, luas dan jenis (

probabilitas keterjadian, linear/non linear, ber impilkasi nonkumulatif/akumulatif, bersifat sendirian/merembet/menular) yang menimbulkan guncangan fiskal sistemik berantai dan bencana fiskal sistemik berantai. Risiko fiskal dikelola dalam manajemen fiskal departemen keuangan, antara lain mencakupi (1) manajemen kualitas pembentukan asumsi-dasar , antara lain pilihan formula, pilihan asumsi global, pilihan asumsi domsetik , persyaratan kualitas dasar atau bahan pembuatan asumsi-dasar (misalnya mencakupi daftar negara-negara tertentu, jumlah tahun tertentu (misalnya tahun terakhir saja untuk suatu pos belanja, untuk pos belanja lain menggunakan statistik 5-25 tahun terakhir), (2) manajemen perubahan asumsi-dasar sesuai perkembangan terakhir, (3) kinerja realisasi APBN dan analisis dampak belanja cq efektivitas mencapai sasaran. (4) risiko kagetan, misalnya tugas APBN untuk bail out BUMN strategis atau bank sistemik-penting bermasalah tiba-tiba.

- Ruang fiskal (fiscal space) adalah (1) ketersediaan sumber APBN untuk keperluan/tujuan tertentu yang tak mengganggu kesinambungan manajemen keuangan pemerintahan dan kesinambungan perekonomian , dengan memperhatikan risiko solvabilitas , kerusakan neraca dan neraca sektor privat (antara lain utang banding PDB, dominasi utang jangka pendek banding utang jangka panjang), atau (2) senjang batas utang dikurang salso utang yang tak mengganggu kesinambungan manajemen keuangan pemerintahan dan kesinambungan perekonomian . Risiko solvabilitas fiskal diukur dengan Nisbah Utang pemerintah banding PDB, Saldo Fiskal banding PDB , senjang-kesinambungan-fiskal yaitu senjang antara saldo-primer-aktual dengan saldo-primer utang-penyeimbang yang tergantung raihan nisbah utang terhadap PDB jangka-panjang , suku bunga dan pertumbuhan.
- Utang fiskal ditaruh berlawanan dengan utang biasa, pada umumnya terkait pada saldo fiskal atau defisit fiskal tahun berjalan , sebagai istilah yang sering sering bertukar penggunaan. Defisit fiskal (suatu tahun anggaran) berbeda dengan utang fiskal pada Neraca pemerintahan (pada suatu tahun anggaran yang sama), sebagai akumulasi utang pemerintah akibat beberapa tahun defisit/surplus APBN (yang terjadi sebelum tahun fiskal tersebut dan yang terjadi pada tahun fiskal tersebut) yang belum di resolusi.

Lampiran 4

DAFTAR ISTILAH KEBIJAKAN MONETER DAN SISTEM KEUANGAN

- Gejala Pemulihan Ekonomi. Gejala terpilih untuk dipantau oleh suatu bangsa misalnya adalah kinerja negara-negara adi-kuasa ekonomi, kebijakan lawan-sklus (countercyclical) dan kebijakan stimulus-fiskal & moneter yang paling-populer di muka bumi, pertumbuhan PDB, sukses stimulus fiskal cq sukses kebijakan perpajakan dan sukses belanja APBN terkait pemulihan kesehatan publik, pemulihan sektor andalan antara lain ekspor, impor, sektor riil , UKM dan pariwisata, trend pemulihan pendapatan-perkapita dan daya-beli masyarakat, trend konsumsi , kondisi inflasi dan tingkat-harga umum terkendali.
- Infrastruktur Sistem Keuangan. Infrastruktur sistem keuangan antara lain berbentuk pusat-kliring , penyedia pembayaran, bank sentral, berbagai otoritas pengatur/pengawas sistem keuangan. Berbagai lembaga dan pasar menyediakan kerangka pelaksanaan transaksi-ekonomi dan kebijakan moneter, membantu penyaluran tabungan dan investasi , yang secara keseluruhan dimaksud mendorong pertumbuhan perekonomian.
- Kelembagaan Sistem Keuangan. Kelembagaan sistem keuangan sebuah negara mencakupi (1) perbankan, (2) pemberi pinjaman bukan bank, (3) pasar uang dan pasar sekuritas, (4) berbagai entitas penunjang industri jasa-keuangan seperti entitas dana pensiun, entitas asuransi, anjak-piutang, pegadaian dll (5) *mutual* dan (6) berbagai entitas-dana investasi, (7) (7a) penyedia dan (7b) pelanggan/penikmat jasa keuangan antara lain deposan bank, debitur bank, emiten dan investor PM, ,(8) Otoritas Makro-Prudensial , (9) OJK yang mencakupi tugas sebagai Otoritas Mikro-Prudensial dan Otoritas PM .
- Kompetensi Inti Bank Sentral. Pengembangan kapasitas BS terfokus pada kapasitas manusia dengan hampiran tim-kerja yang saling-belajar-mengajar, terfokus pada Pilar dalam kerangka Basel, penilaian modal-bank-sentral , metode pengujian-stress (*stress test method*) , tersesuai kondisi domestik BS dan negara masing masing.
- Komponen Sistem Keuangan. Komponen sistem keuangan adalah (1) hukum-positif tentang tata-cara bertransaksi keuangan pada sebuah negara, antara lain (1a) hukum positif perbankan dan LKBB, (1b) hukum positif pasar uang dan pasar modal , terutama untuk (2) keperluan transaksi (2a) jual-beli barang modal dan operasional, (2b) transaksi investasi, (2c) transaksi keuangan bersifat spekulatif melalui (3) industri jasa-keuangan berbentuk kelembagaan perbankan, LKBB, industri asuransi dan lindung-nilai lain dengan (4) dukungan lembaga penunjang seperti pasar uang, pasar modal, pasar komoditas, pasar tenaga-kerja dan (5) transaksi keuangan (5a) privat (misalnya jual-beli, waris, hibah,wakaf) antar (5b) badan.

- KSSK. *KSSK* sebuah bangsa bertugas melakukan upaya pencegahan dan penanganan krisis keuangan, menetapkan kriteria stabilitas sistem keuangan, melakukan pemantauan terkoordinasi kondisi stabilitas sistem keuangan, , membereskan permasalahan bank sistemik secara terkoordinasi, merekomendasikan kepada Presiden tentang perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, penyelenggaraan dan/atau pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan,dan langkah penanganan krisis.
- Lembaga Pemelihara Stabilitas Keuangan Global. Berbagai lembaga pemelihara stabilitas keuang global adalah The Bank for International Settlements (BIS) , The International Monetary Fund (IMF) , forum kerjasama BIS dan IMF.
- Manfaat KSSK. KSSK bermanfaat sebagai sebagai manajemen-grup dan p*owerhouse* sektor keuangan NKRI, *penyetara* sudut-pandang, preferensi, kualitas manajemen anggota KSSK dan sinergi perencanaan anggota KSSK, *pooling risks, saling membantu/mereferensi/mendukung di antara anggota KSSK*, berbagi informasi antar anggota KSSK, menghasilkan kewibawaan sosial secara nasional dan internasional , meningkatkan domestikasi masa industri keuangan yang diregulasi KSSK, bervisi/berpeluang untuk mereformasi kelembagaan NKRI misalnya dalam gagasan penyatuan kelembagaan kebijakan fiskal & moneter.
- Pasar Keuangan. Pasar keuangan adalah forum berbasis hukum dan tata-cara tersepakati untuk mengatur hak-kewajiban-keuangan antara pemasok uang , lembaga perantara dan pembutuh uang, misalnya deposan/emiten , bank/PM dan debitur/investor. Berbagai forum dalam pasar-keuangan berbentuk pasar uang, PM, industri perbankan dan LKBB.
- Perbedaan Kelembagaan. Lembaga keuangan bank dapat menerima simpanan dari masyarakat, disebut *depository financial institutions* yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah lembaga keuangan selain bank yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- Sistem Keuangan Internasional. Sistem Keuangan Internasional mencakupi sebuah aliran uang terintegrasi terkait otoritas peregulasi kuantitas uang-beredar, berbagai sarana pendukung kebutuhan mata-uang dan dasar pertukaran antar-mata-uang dalam rangka penyelesaian kewajiban pembayaran lintas negara. Bank sentral, lembaga keuangan internasional, entitas bank komersial dan entitas dana, terkait pasar-bebas-mata-uang , tergantung struktur kelembagaan dan obligasi pemerintah, merupakan bagian sistem moneter internasional.
- Sistem Keuangan Negara. Sistem keuangan negara adalah sebuah sistem tata-kelola sebuah negara dalam bidang perekonomian yang memiliki fungsi utama mobilisasi dana , menyediakan berbagai jasa dalam bidang keuangan dan di implementasikan pada pembentukan lembaga keuangan bank, LKBB, pasar uang dan pasar modal ,berbagai otoritas dan lembaga penunjang sistem keuangan.
- Sistem Moneter Internasional. Sistem Moneter Internasional (*International Monetary System* atau IMS) mencakupi seluruh aset berpulangan bunga dan nonbunga, lembaga keuangan bank dan bukan-bank, pasar keuangan yang memperdagangkan dan menentukan harga aset, aktivitas non-pasar seperti transaksi ekuitas-privat, ventura-bersama, lindung-nilai, aksi akuisisi berbasis

pinjaman (LBO), akuisisi semena-mena (hostile take over), merger,konsolidasi dll yang melibatkan urusan keuangan lintas yuridiksi.

- Sistem moneter. Sistem moneter adalah sebuah subsistem keuangan terpenting yang mengendalikan uang-beredar , termasuk pencetakan uang / menambah / menarik /mengganti uang beredar lusuh , sanering, dan emisi jenis uang-kartal yang baru , sebagian negara memasukkan *bit-coin* dan kredit , melalui pengaturan suku bunga umum dan suku bunga kredit, suku-bunga deposito, tingkat inflasi dan lain-lain.
- Sistem Perbankan Nan-Luwes. Stabilitas sistem keuangan diproksi oleh efektivitas sistem keuangan cq sistem perbankan dan sistem LKBB yang mampu berfungsi secara baik pada kondisi perekonomian baik atau buruk , kondisi sedang membaik atau sedang memburuk, kondisi perekonomian tenteram/ damai atau turbulen , karena seluruh unsur pembentuk sistem keuangan, antara lain industri perbankan dan industri jasa-keuangan non-bank memenuhi segala syarat GCG.
- Stabilitas Keuangan Global. Stabilitas keuangan global dengan keputusan moneter sebagai pusat sistem keuangan lintas-negara secara sukarela dan terkoordinasi.
- Tujuan Sistem Keuangan. Tujuan sistem keuangan sebuah negara adalah mencapai/memelihara stabilitas sistem-perbankan dan sistem lembaga-keuangan-nonbank (LKBB) yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam negara, sehingga memperlancar/menunjang kegiatan ekonomi bangsa untuk mencapai berbagai sasaran nasional , misalnya pertumbuhan ekonomi , pendapatan perkapita dan lain-lain..
- Tujuh Fungsi Pokok Sistem Keuangan Negara. Sistem keuangan mempunyai 7 fungsi pokok, peran pokok, tugas pokok yaitu fungsi tabungan atau *saving function* cq menyimpan dan mengalokasikan dana dari masyarakat, fungsi kekayaan atau wealth function cq sebagai sarana masyarakat untuk menimbun kekayaan yang dimiliki, fungsi likuiditas atau *liquidity function*; fungsi kredit atau *credit function* cq menyalurkan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana/tunai kepada masyarakat yang membutuhkan kredit, fungsi pembayaran atau *Payment Function* cq sebagai alat untuk mengatur lalulintas pembayaran, fungsi risiko atau *risk function , serta f*ungsi kebijakan atau p*olicy function cq p*engatur kebijakan berbagai sektor keuangan .
- Ukuran Sukses Sistem Keuangan Negara. Ukuran Sukses Sistem Keuangan sebuah bangsa adalah sistem keuangan nan-stabil . Stabilitas sistem keuangan antara lain dilihat dari (1) tingkat kesehatan ekonomi fundamental, (2) kinerja intermediasi industri jasa keuangan, (3) stabilitas nilai tukar mata uang domestik , (4) kinerja pasar SBN dan surat utang korporasi sambil mewaspadai kondisi global antara lain kebijakan moneter bank sentral AS, terkait kondisi kesehatan neraca bank sentral AS, (5) efektivitas program relaksasi-kuantitatif yang mengambil hikmah program relaksasi-kuantitatif diberbagai negara terutama kelompok negara terkemuka/berpengaruh di muka bumi, tersesuai suhu politik DN , berbagai keputusan KSSK , berbasis risiko-negeri (*country risk)* , antara lain diproksi oleh besar kasus PM dan perbankan, jumlah bank sistemik bermasalah DN, gejala penurunan daya beli domestik, dan inflasi tak-terkendali .

Lampiran 5

DAFTAR ISTILAH TEORI SISTEM MONETER

- Ekspansi Moneter Kala Krisis tahun 2011 antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, fasilitas-pinjaman sekuritas berjamin-aset (*Term Asset-Backed Securities Loan Facility*), bank dizinkan menjual *subprime mortgage-backed securities* kepada BS, BS bereaksi cepat , secara kreatif mencegah keruntuhan perekonomian, pasar kredit dibekukan sebelum likuiditas bisnis segera terkuras kering, mencipta sarana operasi-pasar-terbuka (OPT atau OMO) dikenal sebagai Relaksasi-Kuantitatif (*quantitative easing*) dengan menambah pembelian hipotek berjamin-aset (mortgage-backed securities), mencipta Pelintiran Operasioanal (Operation Twist).
- Empat Belas Strategi Moneter BS AS Kala Pandemi Gaya adalah perekonomian antara lain pinjaman untuk rumah-tangga, pemberi kerja, pasar uang dan pemerintah,menurunkan tarif *the Fed cq Federal funds rate*, menunjang berfungsinya pasar uang,mendorong lembaga keuangan memberi kredit, pinjaman langsung kepada pemberi kerja,pendanaan warkat komersial (*commercial Paper*),memberi tunjangan pinjaman lembaga nirlaba,membangun bantalan peredam kejut *(cushion*) pasar uang,memulai kembali *(restart*) Fasilitas Lelang Berjangka (Term Aucion Facility atau TAF),memperlebar kisaran (range) entitas-keuangan yang dapat meminjam dari *Primary Dealer Credit Facility*, memperkuat panduan suku bunga dekat-nihil (near zero), berupaya melampaui *(exceeding)* target untuk *overnight federal funds rates* , memperlebar kisaran (range) entitas-keuangan yang dapat meminjam dari *Primary Dealer Credit Facility.*
- Fitur Kerjasama Moneter Internasional. Fitur utama IMFS adalah (1) faktor wilayah kebijakan moneter tentang mata-uang-internasional-, (2) penghindaran senjang-suku bunga antar bangsa , (3) mengatur arus modal.
- Kebijakan moneter ekspansionis dilakukan dengan (1) operasi pasar terbuka, (2) penurunan bunga Bank Sentral,(3)tarif diskonto (*discount rate*), (4) menurunkan persyaratan cadangan (*reserve requirement*).
- Instrumen Kebijakan Moneter Global. Instrumen Kebijakan Moneter Global mencakupi rumah-kliring (*clearing house*) , kebijakan mengatasi risiko-iklim bagi lembaga keuangan,pembentukan patok-duga suku-bunga, proses lepas-LIBOR, daya tahan operasional-maya , sistem pelaporan insiden-maya dan revisi Cyber Lexicon.
- Instrumen makroprudensial adalah supervisi, regulasi dan komunikasi, antara lain kewajiban kecukupan modal dan likuiditas, *loan-to-value (LTV) caps* atau nisbah pinjaman vs agunan, laporan-stabilitas-keuangan terutama *stress-test* atau kecukupan-modal pada kondisi resesi atau semacamnya , bagi Lembaga Keuangan.

- Instrumen utama kebijakan-moneter adalah Nisbah Cadangan Kas (Cash Reserve Ratio), Nisbah Likuiditas Statuter (Statutory Liquidity Ratio) , suku bunga bank (Bank Rate), tarif beli kembali (Repo Rate) , tarif cadangan beli-kembali(Reverse Repo Rate) dan operasi pasar terbuka (Open Market Operations).
- Kebijakan Moneter Bersama Lintas Negara berbasis international monetary and financial system (IMFS) dengan fitur (1) faktor wilayah kebijakan moneter tentang mata-uang-internasional-kunci cq mata-uang USD meluas keluar batasan negara, (2) penghindaran senjang-suku bunga antar bangsa , (3) gelombang besar arus modal yang bergerak bebas lintas yuridiksi/negara dan lintas mata uang , sebagai dasar perubahan kebijakan moneter (khas) bangsa tersebut dalam semangat kerja-sama internasional.
- Kebijakan moneter ekspansionis adalah kebijakan-moneter luar-biasa (extraordinary measure), kebijakan-moneter inkonvensional , kebijakan kala krisis berbentuk ekspansi/menambah pasokan-uang dan, menurunkan suku-bunga pinjaman, pelonggaran kuantitatif (Quantitative Easing), membeli sekuritas-berjangka-lebih-panjang berpenghasilan-pasti dari pasar, aksi-beli aset cq obligasi negara, pengumuman bahwa suku-bunga tidak-naik sampai suatu kondisi-ekonomi pulih..
- Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan makro-ekonomi pemerintah cq Bank Sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan/peredaran uang , antara lain pasok uang (money supply), aliran kredit, dan tingkat suku bunga.
- Kebijakan Paling Efektif adalah kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal cq kebijakan perpajakan.
- Kebijakan Penargetan Inflasi (inflation targeting)berbentuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai target inflasi yang ingin/hendak dicapai.
- Kebijakan-monetisas*i (monetization* atau kebijakan-pemoneteran antara lain membantu masalah keuangan pemerintah dengan pinjaman langsung atau monetesisasi / pembelian obligasi pemerintah yang beredar.
- Kerjasama Kebijakan Moneter Lintas Negara adalah rancang-bangun kesepakatan moneter & keuangan lintas negara untuk menanggulangi ketidak-seimbangan sistem keuangan global lintas-negara berbasis international monetary and financial system (IMFS).
- Konsep Kebijakan Moneter Era Pandemi diterapkan tatkala kebijakan perubahan suku bunga dan kebijakan perubahan kewajiban cadangan (reserve requirement) tak lagi memadai sebagai sarana kebijakan konvensional , dan tatkala operasi-pasar terbuka (open market operation) bank sentral tak-lagi mencukupi , sehingga dibutuhkan kebijakan moneter istimewa untuk pelonggaran-kuantitatif (quantitative easing), panduan jangka-panjang kedepan (forward guidance) belanja & investasi untuk membangun stabilitas & kepercayaan (confidence) , kebijakan suku bunga negatif dan perluasan/pelonggaran jenis/penyesuaian agunan/jaminan bertujuan mengeluarkan negara dari resesi.
- Konsep tentang Kebijakan Moneter berbasis perkiraan dampak kebijakan fiskal . Menurut the Fed, kebijakan moneter bank-sentral disusun dengan mempertimbangkan perkiraan dampak kebijakan fiskal pada ekonomi-makro.

- Konsepsi Fasilitas Investasi Lebihan Likuiditas adalah bahwa Instrumen Deposito-Semalam (overnight deposit) disediakan sebagai fasilitas investasi bank-komersial untuk menginvestasikan kelebihan-likuiditas-semalam.
- Relaksasi Masa Pandemi adalah untuk menjaga likuiditas pada pasar-pembiayaan dan menjaga kelancaran aliran kredit.
- Konsepsi Relaksasi Non-Konvensional adalah dengan menurunkan suku-bunga jangka-pendek sampai nihil, agar tak ada ruang untuk penurunan lebih-lanjut.
- Manajemen Uang Beredar adalah kebijakan moneter dengan mengatur/memelihara/mengubah pasok-uang , pada umumnya melalui operasi-pasar-terbuka, antara lain dengan penjualan obligasi-pemerintah dengan fitur "jual dan beli-kembali" untuk menyedot uang bank-komersial agar jumlah-uang-beredar menurun. OPT bertujuan mengendalikan suku-bunga, yang kemudian berpengaruh pada tarif-bunga- yang-lebih-berjangka-panjang dan kegiatan perekonomian.
- Mata Uang Utama. Mata-uang USD berperan-utama (disusul Euro) dan mendominasi perdagangan & keuangan internasional.
- Otoritas Moneter adalah lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan bidang moneter.
- Pemberi -pinjaman-terakhir (*lenders of last resort*) membantu bank-komersial yang kekurangan-dana kredi, pinjaman berjangka pendek dan bertarif-bunga khusus (tarif terdiskonto).
- Gagal bayar harian otomatis terkonversi menjadi pinjaman-semalam (*overnight loan*).
- Proses pelaksanaan kebijakan moneter untuk mengatur uang beredar dan, mencapai pemerkerjaan penuh dan/atau tingkat perekonomian lebih sejahtera melalui pengaturan standar bunga pinjaman, *margin requirement*, kapitalisasi untuk bank , dan *lender of the last resort*.
- Sistem Keuangan Internasional mencakupi sebuah aliran uang terintegrasi terkait otoritas-peregulasi kuantitas uang-beredar semua bangsa, berbagai sarana pendukung kebutuhan mata-uang dan dasar pertukaran antar-mata-uang dalam rangka penyelesaian kewajiban pembayaran lintas negara.
- Sistem Moneter Internasional mencakupi seluruh aset berpulangan bunga dan nonbunga, lembaga keuangan bank dan bukan-bank, pasar keuangan yang memperdagangkan dan menenyukan harga aset, aktivitas nan-pasar seperti transaksi ekuitas-privat, ventura-bersama, lindung-nilai, LBO dll yang melibatkan urusan keuangan, mencakupi semua bank sentral, lembaga keuangan internasional, entitas bank komersial dan entitas dan.Pasar-bebas-mata-uang , tergantung struktur kelembagaan dan obligasi pemerintah, merupakan bagian sistem moneter internasional
- Sistem moneter adalah sebuah sistem yang mengendalikan uang-beredar (termasuk pencetakan uang / menambah / menarik /mengganti uang beredar lusuh , sanering, dan emisi jenis uang-kartal yang baru , sebagian negara memasukkan *bit-coin*) dan kredit dengan pengaturan suku bunga, suku-bunga deposito, tingkat inflasi dan lain-lain.
- Bantalan likuiditas (*liquidity buffer*) adalah relaksasi persyaratan likuiditas bank berbasis kebijakan mikroprudensial, yang berada di bawah nisbah-liputan-

likuiditas versi Basel III (*below Basel III liquidity coverage ratios* (LCRs)) agar tiap bank mampu menjaga likuiditas minimum.

- Teori Bauran Kebijakan Fiskal & Moneter antara lain mencakupi dengan pinjaman langsung kepada pemerintah dan/atau monetesisasi cq pembelian obligasi pemerintah,pembentukan The Federal Open Market Committee (FOMC) dalam sistem the Fed yang bertugas menelaah kemungkinan-pengaruh kebijakan-fiskal pada berbagai variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan PDB, pemerkerjaan/pengangguran, dan inflasi.
- Teori Butuh Semalaman Saja mencakupi Instrumen Pinjaman-Semalam (overnight loan) , yaitu instrumen utang berjangka-pendek tersedia bagi bank-komersial, beragun paripurna, tersedia bagi bank membutuhkan karena yang mengalami kekurangan likuiditas-semalaman saja.
- Teori Cadangan Emas. Teori cadangan emas minimum dewasa ini telah pudar sinarnya. Defisit APBN tak selalu buruk , boleh di atasi dengan mencetak uang tanpa risiko kejatuhan-perekonomian karena uang-beredar kini tak-lagi didukung cadangan-emas bank sentral. Secara teoretis, suku bunga bank sentral seharusnya nihil.
- Teori Depresiasi Mata Uang . Pada tataran global, nilai tukar terkait langsung dengan neraca-perdagangan, daya saing ekspor, utang LN, arus modal, dan stabilitas nilai tukar. Peningkatan volatilitas nilai tukar dan depresiasi mata uang akibat arus keluar modal-asing dan sentimen-pasar berlatar-belakang pandemi berdampak pada pasar-uang, berdampak pada harga-saham, aliran-masuk modal asing, defisit neraca perdagangan, instabilitas keuangan dan kewajiban keuangan. Beberapa negara mengalami depresiasi mata-uang berlanjut, beberapa negara yang lain mengalami apresiasi mata -uangnya.
- Teori Hubungan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal adalah tentang hubungan erat kedua kebijakan tersebut dalam empat sektor yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan dan sektor internasional , yang memiliki interaksi masing-masing dalam upaya menciptakan pendapatan serta pengeluaran pemerintah.
- Hubungan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Mikro-prudensial tampak pada upaya otoritas perbankan merelaksasi persyaratan likuiditas bank berbasis kebijakan mikroprudensial, yang berada di bawah nisbah-liput-likuiditas versi Basel III (*below Basel III liquidity coverage ratios* (LCRs)) yaitu nisbah aset-likuid-berkualitas-tinggi banding kewajiban-jangka-pendek, agar masing masing bank tersebut mampu menjaga lukuiditas minimum masing-masing.
- Hubungan Otoritas fiskal dan Otoritas Moneter antara lain tampak pada bahwa. kebijakan fiskal berpengaruh pada inflasi dan lapangan-kerja, yang digunakan dalam pilihan kebijakan moneter sebaliknya kebijakan moneter berpengaruh kepada APBN pendapatan dan belanja, sehingga dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan fiskal. Agar selaras, sumber lain menyatakan bahwa kebijakan moneter bank sentral dibangun berdasar berbagai asumsi dan sasaran kebijakan fiskal Pemerintah.
- Hubungan Penargetan Inflasi dan Penargetan Tingkat Harga antara lain tentang. guncangan-kagetan inflasisebagai dasar membentuk aksi-penargetan tingkat harga.

- Teori Instrumen Cadangan Devisa sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter , digunakan untuk menyerap guncangan dan stress keuangan , agar bank sentral mampu menghadapi depresiasi-mata-uang, mitigasi risiko gagal-bayar pinjaman-luar dan mengelola aliran-keluar-modal. Perekonomian berlambaran cadangan-devisa diharapkan mampu mengelola depresiasi mata-uang dengan intervensi pasar-valas. Intervensi dengan mengurbankan cadangan-devisa hanya dapat dilakukan bank sentral ber-cadangan-devisa memadai..
- Karakteristik kebijakan-tidak-konvensional adalah (1) menjamin bahwa kebijakan itu adalah pilihan kebijakan terbaik dan paling terfokus kepada satu/beberapa sasaran-antara (*intermediate objectives*) seperti mengatasi-masalah-likuiditas dan sukses sebaran kredit kepada segmen-pasar-keuangan tertentu , (2) mengetahui dimuka dampak-negatif kebijakan-tidak-lazim tersebut terhadap neraca bank sentral, dampak-lain pada rumah-tangga , industri perbankan dan industri-non-keuangan, serta dampak bagi kesehatan struktur-keuangan dalam perekonomian bangsa itu.
- Langkah Fiskal Kuasi Bank Sentral karena tak ada kepastian kapan krisis-berakhir, sehingga bank sentral makin sulit membentuk kebijakan-moneter sendirian , dan kebijakan moneter cenderung makin teranyam dengan kebijakan fiskal pemerintahan.
- Teori Neraca Bank Sentral mencakupi persamaan matematis sebagai berikut : *Monetary Base = Reserve balances + vault cash + cash in circulation*, dan persamaan *Total reserves = Reserves balances + applied vault cash = L2 + part of L1*.
- Kebijakan moneter berbentuk penargetan nan-luwes (flexible targeting) terhadap inflasi bersasaran ganda, yaitu stabilitas harga dan stabilitas-sejati , sebuah upaya stabilisasi-inflasi disekitar target-inflasi dan pendayagunaan sumber-daya ekonomi disekitar tarif-jangka-panjang-berkesinambungan.
- Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kebijakan Lain antara lain bahwa kebijakan moneter dan kebijakan makro-prudensial merupakan dasar berpijak dalam menyusun kebijakan fiskal cq RAPBN dan kebijakan perpajakan, kebijakan moneter berdampak pada pasar uang dan pasar surat berharga, kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor riil, karena jika tingkat bunga diturunkan maka investasi akan meningkat dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cq output nasional.
- Kerangka dasar kebijakan moneter sebuah bangsa tergantung pada sistem perekonomian (kapitalis vs sosialis), rezim-nilai-tukar dianut, sistem/kondisi ekonomi ekonomi ,sistem APBN (seimbang atau boleh defisit.
- Teori Simpanan Wajib. BS negara tertentu mewajibkan bank komersial menaruh simpanan wajib pada BS , sebagai salah satu hampiran pengendalian pasok-uang. Pada era-pandemi, kewajiban cadangan tersebut mungkin dirurunkan sampai nihil.

- Teori Tiga Kebijakan Intervensiadalah intervensi pasar spot (*triple intervention*)di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)[3], dan pembelian SBN dari pasar .
- Teori Tiga Poros Kebijakan Moneter Konvensional. Kebijakan moneter konvensional memiliki tiga poros, yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas tersedia dan cadangan minimum.
- Transmisi kebijakan moneter adalah proses penerapan/pemberlakuan suatu kebijakan moneter tertentu pada perekonomian umumnya, pada tingkat harga khususnya, diawali perubahan tarif-bunga resmi yang berdampak langsung kepada tarif-bunga pasar-uang, berdampak tak-langsung pada tarif peminjaman kepada debitur bank dan bunga-deposito kepada deposan.
- Pengelolaan perekonomian sebuah bangsa dimaksud untuk mencapai kondisi & perkembangan perekonomian yang diinginkan, dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia.
- Tujuan Kebijakan Moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai mata-uang domestik, menjaga likuiditas perekonomian , stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerkerjaan-penuh *(full employment*) , dan keseimbangan neraca pembayaran *(Balance of Payment* atau BOP).

[i] Ventura = venturer = berpetualang = berani

[3] Transaksi DNDF adalah transaksi lindung nilai nilai-tukar derivative valuta asing terhadap rupiah , berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi .Mekanisme Fixing adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs *Transaksi Forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*). Transaksi DNDF tertentu wajib disertai dengan dokumen *underlying*.